



BUPATI KEBUMEN

Kebumen, 21 Maret 2025

Nomor : 000.7.2.2/0415
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Rancangan Awal RPJMD
Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029

Yth. Ketua DPRD Kabupaten Kebumen

di –
Kebumen

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 49 ayat (2), salah satu tahapan yang harus dilalui adalah pengajuan Rancangan Awal RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 untuk dapat dibahas dan disepakati. Pembahasan dan penyepakatan terhadap Rancangan Awal RPJMD ini merupakan tahapan awal dalam proses penyusunan RPJMD sebelum dilakukan pembahasan lebih lanjut secara intensif pada saat penyampaian Rancangan Akhir RPJMD. Oleh karena itu, kami mengharapkan agar pembahasan dan penyepakatan terhadap Rancangan Awal RPJMD ini dapat dilaksanakan pada bulan Maret 2025. Besar harapan kami agar DPRD Kabupaten Kebumen dapat memberikan dukungan dalam pembahasan Rancangan Awal RPJMD ini guna menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.



TEMBUSAN:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Kebumen.

Jalan Merdeka Nomor 1 Kabupaten Kebumen Telepon (0287) 381144, 381410 Fax. (0287) 381423
Email: bupati@kebumenkab.go.id Website: <https://www.kebumenkab.go.id> Kode Pos 54311



PEMERINTAH
KABUPATEN KEBUMEN



RANCANGAN AWAL
RPJMD

KABUPATEN KEBUMEN
2025-2029



BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN



DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	I	1
	1.1 Latar Belakang	I	1
	1.2 Dasar Hukum	I	3
	1.3 Hubungan Antar Dokumen	I	5
	1.4 Maksud dan Tujuan	I	8
	1.5 Sistematika Penulisan	I	9
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II	1
	2.1 Aspek Geografi dan Demografi	II	1
	2.1.1 Geografi	II	1
	2.1.2 Demografi	II	27
	2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II	29
	2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi	II	29
	2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya	II	56
	2.3 Aspek Daya Saing Daerah	II	60
	2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah	II	62
	2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)	II	66
	2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah	II	69
	2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi	II	71
	2.4 Aspek Pelayanan Umum	II	73
BAB III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	III	1
	3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu	III	2
	3.1.1 Pendapatan	III	4
	3.1.2 Belanja Daerah	III	12
	3.1.3 Pembiayaan	III	20
	3.1.4 Neraca Daerah	III	23
	3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III	33
	3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran	III	34
	3.2.2 Analisis Pembiayaan	III	38
	3.3 Kerangka Pendanaan	III	41
	3.3.1 Proyeksi Pendapatan Daerah	III	41
	3.3.2 Proyeksi Belanja Daerah	III	50
	3.3.3 Proyeksi Pembiayaan Daerah	III	58
	3.3.4 Penghitungan Kerangka Pendanaan	III	65
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	III	1
	4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah	III	1
	4.2 Isu Strategis	III	15
	4.2.1 Isu Global	III	15
	4.2.2 Isu Strategis Nasional	III	17
	4.2.3 Isu Strategis Regional	III	21
	4.2.4 Isu Strategis Kabupaten Kebumen	III	45
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	V	1
	5.1 Visi	V	1
	5.2 Misi	V	2
	5.3 Tujuan dan Sasaran	V	4
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VI	1
	6.1 Strategi Pembangunan Daerah	VI	1
	6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	VI	5

6.3 Program Pembangunan Daerah	VI	7
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII	1
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VIII	1
8.1 Penetapan Indikator Kinerja	VIII	1
8.1.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)	VIII	1
8.1.2 Indikator Kinerja Daerah	VIII	5
BAB IX PENUTUP	IX	1
9.1 Pedoman Transisi	IX	1
9.2 Kaidah Pelaksanaan	IX	2



DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Risiko Bencana Kabupaten Kebumen	II	6
Tabel II.2	Distribusi Potensi Daya Dukung Air Kabupaten Kebumen Tahun 2023	II	9
Tabel II.3	Distribusi Potensi Daya Dukung Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2023	II	11
Tabel II.4	Tabel Kelas Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan Kabupaten Kebumen	II	12
Tabel II.5	Tabel Kelas Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air Kabupaten Kebumen	II	13
Tabel II.6	Tabel Kelas JLH Pengatur Iklim Kabupaten Kebumen	II	14
Tabel II.7	Tabel Kelas JLH Pengatur Tata Air Kabupaten Kebumen	II	15
Tabel II.8	Tabel Kelas Jasa Lingkungan Hidup Mitigasi Longsor Kabupaten Kebumen	II	17
Tabel II.9	Tabel Kelas Jasa Lingkungan Hidup Mitigasi Banjir Kabupaten Kebumen	II	18
Tabel II.10	Cekungan Air Tanah Kabupaten Kebumen	II	19
Tabel II.11	Tabel Tingkat Kerentanan terhadap Perubahan Iklim di Kabupaten Kebumen	II	21
Tabel II.12	Tabel Keadaan Flora dan Fauna Kabupaten Kebumen	II	22
Tabel II.13	Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Kebumen 2020-2024	II	24
Tabel II.14	Capaian Pengelolaan Sampah Kabupaten Kebumen 2019-2023	II	24
Tabel II.15	Capaian Akses Sanitasi Aman dan Akses Air Minum Aman Kabupaten Kebumen 2020-2024	II	27
Tabel II.16	Proyeksi Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029	II	28
Tabel II.17	Proyeksi Komposisi Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029	II	29
Tabel II.18	Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	II	35
Tabel II.19	Perbandingan Indeks Harga Konsumen dan Inflasi di 6 Kota Lokasi Survei Biaya Hidup di Jawa Tengah Tahun 2023	II	38
Tabel II.20	Profil Kemajuan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2020 – Tahun 2024	II	41
Tabel II.21	Capaian Kinerja Partisipasi Pendidikan Menurut Kelompok Usia dan Jenjang Pendidikan Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2023	II	47
Tabel II.22	Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2023	II	49
Tabel II.23	Capaian Kinerja Pencegahan dan Penanganan Kasus Tuberculosis Kabupaten Kebumen, Tahun 2019-2023	II	51
Tabel II.24	Capaian Indikator Urusan Pengawasan Kabupaten Kebumen	II	75
Tabel II.25	Capaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	II	75
Tabel III.1	Skala interval Otonomi Fiskal	III	3
Tabel III.2	Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Kebumen, Tahun 2020-2024 (Rupiah)	III	3
Tabel III.3	Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024 (Rupiah)	III	5
Tabel III.4	Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024 (rupiah)	III	14



Tabel III.5	Perkembangan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024 (Rupiah)	III	21
Tabel III.6	Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	III	25
Tabel III.7	Rasio Lancar Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	III	29
Tabel III.8	Analisis Rasio Hutang Terhadap Ekuitas Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	III	30
Tabel III.9	Analisis Rasio Hutang terhadap Total Aktiva Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	III	31
Tabel III.10	Analisis Perputaran Aktiva Tetap Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	III	32
Tabel III.11	Analisis Perputaran Total Aktiva Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	III	33
Tabel III.12	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024 (dalam Jutaan)	III	34
Tabel III.13	Realisasi Pengeluaran Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2023 (dalam Jutaan)	III	37
Tabel III.14	Surplus/Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kebumen 2020-2024	III	38
Tabel III.15	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kebumen 2020-2024	III	38
Tabel III.16	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Kebumen 2020-2024	III	40
Tabel III.17	Asumsi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2030 (Juta Rupiah)	III	48
Tabel III.18	Asumsi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2030 (Juta Rupiah)	III	56
Tabel III.19	Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2030 (Juta Rupiah)	III	60
Tabel III.20	Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026-2030 (dalam Jutaan)	III	65
Tabel III.21	Proyeksi Kapasitas Riil Pagu OPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2030 (Juta Rupiah)	III	66
Tabel III.22	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kabupaten Kebumen Tahun 2026-2030	III	67
Tabel IV.1	Keterkaitan Permasalahan Pokok dan Permasalahan Per Urusan	IV	13
Tabel IV.2	Pembagian PKW, PKL, PPK, PPL pada tiap Kecamatan di Kabupaten Kebumen	IV	32
Tabel IV.3	Indikasi Program Rencana Pola Ruang Kabupaten Kebumen	IV	36
Tabel IV.4	Indikasi Program Pusat Pertumbuhan Wilayah Kabupaten Kebumen	IV	40
Tabel IV.5	Pusat Kegiatan dan Indikasi Program Sistem Jaringan Transportasi	IV	43
Tabel V.1	Rumusan Tujuan dan Indikator Tujuan RPJMD Tahun 2025-2029	V	5
Tabel V.2	Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029	V	8
Tabel V.3	Hubungan Tujuan dan Sasaran Daerah dengan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen	V	18
Tabel VI.1	Strategi Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029	VI	2
Tabel VI.2	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029	VI	6
Tabel VI.3	Program Prioritas Pembangunan dan Program Unggulan Kepala Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029	VI	8



Tabel VIII.1	Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2030	VI	2
Tabel VIII.2	Penetapan Target Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2030	VI	6



DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Hubungan Antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan lainnya	I	6
Gambar II.1	Peta Administrasi Kabupaten Kebumen	II	1
Gambar II.2	Peta Topografi Kabupaten Kebumen (RTRW 2024-2044)	II	2
Gambar II.3	Peta Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Kebumen	II	2
Gambar II.4	Peta Bahaya Banjir Kabupaten Kebumen	II	3
Gambar II.5	Peta Bahaya Longsor Kabupaten Kebumen	II	4
Gambar II.6	Peta Kerentanan Gelombang Ekstrem dan Abrasi Kabupaten Kebumen	II	5
Gambar II.7	Peta Status Daya Dukung Air Kabupaten Kebumen	II	9
Gambar II.8	Peta Status Daya Dukung Pangan Kabupaten Kebumen	II	10
Gambar II.9	Peta JLH Penyedia Pangan Kabupaten Kebumen	II	12
Gambar II.10	Peta JLH Penyedia Air Kabupaten Kebumen	II	13
Gambar II.11	Peta JLH Pengatur Iklim Kabupaten Kebumen	II	14
Gambar II.12	Peta JLH Pengatur Tata Air Kabupaten Kebumen	II	16
Gambar II.13	Peta JLH Mitigasi Longsor Kabupaten Kebumen	II	17
Gambar II.14	Peta JLH Mitigasi Banjir Kabupaten Kebumen	II	18
Gambar II.15	Peta Cekungan Air Tanah Kabupaten Kebumen	II	19
Gambar II.16	Peta Kawasan Hutan Kabupaten Kebumen	II	20
Gambar II.17	Grafik Luasan Kawasan Kumuh yang Tertangani, 2020-2024	II	26
Gambar II.18	Grafik Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, 2020-2024	II	27
Gambar II.19	Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kebumen, 2020-2024	II	31
Gambar II.20	Grafik Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran Kabupaten Kebumen, 2020-2024	II	31
Gambar II.21	Grafik Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kabupaten Kebumen, 2020-2024	II	32
Gambar II.22	Grafik Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB ADHB, 2020-2024 (%)	II	33
Gambar II.23	Grafik Tingkat Return on Asset (ROA) BUMD Kabupaten Kebumen, 2019-2023	II	34
Gambar II.24	Grafik Realisasi Investasi, 2020-2024	II	36
Gambar II.25	Grafik Jumlah Kunjungan Wisatawan, 2020-2024	II	36
Gambar II.26	Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kebumen, 2020-2024	II	37
Gambar II.27	Grafik PDRB Per Kapita Kabupaten Kebumen, 2020-2024	II	38
Gambar II.28	Inflasi Antar Wilayah Cakupan IHK, Desember 2024	II	38
Gambar II.29	Grafik Inflasi Tahunan Purwokerto Tahun 2020-2023	II	39
Gambar II.30	Grafik IHK Tahunan Purwokerto Tahun 2020-2023	II	39
Gambar II.31	Grafik Laju Implisit PDRB Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2023	II	40
Gambar II.32	Grafik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kebumen, 2020-2024	II	42
Gambar II.33	Grafik Usia Harapan Hidup, 2020-2024	II	43
Gambar II.34	Grafik Indeks Kesehatan, 2020-2024	II	44
Gambar II.35	Grafik Rata-Rata Lama Sekolah, 2020-2024	II	44
Gambar II.36	Grafik Harapan Lama Sekolah, 2020-2024	II	45
Gambar II.37	Grafik Indeks Pendidikan, 2020-2024	II	45
Gambar II.38	Grafik Pengeluaran per Kapita, 2020-2024	II	46



Gambar II.39	Grafik Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Terakhir Ditamatkan, 2022-2024	II	47
Gambar II.40	Grafik Rata-rata Kemampuan Literasi dan Numerasi Siswa SD dan SMP Berdasarkan Hasil Asesmen Nasional, Kabupaten Kebumen 2022-2024	II	49
Gambar II.41	Grafik <i>Stunting</i> dan Gizi Buruk, 2019-2023	II	50
Gambar II.42	Grafik Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan, 2020-2024	II	52
Gambar II.43	Grafik Kematian Ibu dan Bayi, 2020-2024	II	52
Gambar II.44	Grafik Indeks Gini Kabupaten Kebumen, 2021-2024	II	53
Gambar II.45	Grafik Distribusi Pendapatan, 2019-2023	II	54
Gambar II.46	Grafik Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kebumen, 2020-2024	II	55
Gambar II.47	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kabupaten (%) Kabupaten Kebumen Tahun 2022-2024	II	55
Gambar II.48	Grafik Indeks Ketahanan Pangan, 2020-2024	II	56
Gambar II.49	Grafik Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga), 2022-2024	II	57
Gambar II.50	Grafik Indeks Ketimpangan Gender, 2019-2023	II	58
Gambar II.51	Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan, 2020-2024	II	59
Gambar II.52	Grafik Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK), 2018-2022	II	60
Gambar II.53	Grafik Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Kebumen, 2024	II	61
Gambar II.54	Grafik Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Kebumen Menurut Pilar IDSD, 2023	II	62
Gambar II.55	Grafik Skor Pilar Stabilitas Ekonomi Makro, 2023	II	63
Gambar II.56	Grafik Skor Pilar Pasar Produk, 2023	II	64
Gambar II.57	Grafik Skor Pilar Sistem Keuangan, 2023	II	64
Gambar II.58	Grafik Skor Pilar Ukuran Pasar, 2023	II	65
Gambar II.59	Grafik Skor Pilar Kesehatan, 2023	II	66
Gambar II.60	Grafik Skor Pilar Keterampilan, 2023	II	68
Gambar II.61	Grafik Skor Pilar Pasar Tenaga Kerja, 2023	II	69
Gambar II.62	Grafik Skor Pilar Infrastruktur, 2023	II	70
Gambar II.63	Grafik Skor Pilar Adopsi TIK, 2023	II	70
Gambar II.64	Grafik Skor Pilar Institusi, 2023	II	71
Gambar II.65	Grafik Skor Pilar Dinamika Bisnis, 2023	II	72
Gambar II.66	Grafik Skor Pilar Kapabilitas Inovasi, 2023	II	73
Gambar II.67	Grafik Indeks Reformasi Birokrasi, 2019-2023	II	74
Gambar III.1.	Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Berdasarkan Jenis Pendapatan Tahun 2020-2024 (persen)	III	7
Gambar III.2.	Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen Berdasarkan Jenis PAD Tahun 2020-2024	III	9
Gambar III.3.	Pendapatan Transfer Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024 (juta rupiah)	III	10
Gambar III.4.	Proporsi Pendapatan Transfer Kabupaten Kebumen Berdasarkan Jenisnya Tahun 2020-2024 (juta rupiah)	III	10
Gambar III.5.	Pendapatan Lain-Lain yang Sah Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024 (juta rupiah)	III	11
Gambar III.6.	Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Berdasarkan Jenisnya Tahun 2020-2024	III	16
Gambar III.7.	Perkembangan Struktur Belanja Operasi Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	III	17



Gambar III.8.	Proporsi Struktur Belanja Modal Kab Kebumen Tahun 2024-2030	III	18
Gambar III.9.	Perkembangan Komposisi Belanja Transfer Kab. Kebumen Tahun 2020-2024	III	19
Gambar III.10.	Target Komposisi PAD Kab Kebumen Tahun 2026-2030	III	46
Gambar III.11.	Target Komposisi Dana Perimbangan Kabupaten Kebumen Tahun 2026-2030	III	47
Gambar III.12.	Target Belanja Operasi Kabupaten Kebumen Tahun 2026-2030 (dalam juta)	III	51
Gambar III.13.	Rata-rata Proporsi Komponen Belanja Meodal Kabupaten Kebumen Tahun 2026-2030	III	53
Gambar III.14.	Target Alokasi Komponen Belanja Modal Kabupaten Kebumen Tahun 2026-2030 (dalam juta)	III	53
Gambar IV.1.	Permasalahan Daerah Kabupaten Kebumen	IV	2
Gambar IV.2.	IPM Kabupaten Kebumen dan Kabupaten sekitar Tahun 2024	IV	3
Gambar IV.3.	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Sekitar Tahun 2024	IV	4
Gambar IV.4.	Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Kebumen Dan Kabupaten Sekitar Tahun 2023	IV	4
Gambar IV.5.	Angka Kemiskinan Kabupaten Kebumen dan Kabupaten sekitar Tahun 2024	IV	5
Gambar IV.6.	Jumlah wisatawan yang berkunjung Kabupaten Kebumen dan sekitar Kebumen Tahun 2023	IV	7
Gambar IV.7.	Persentase Jalan Menurut Kondisi Permukaan Kabupaten Kebumen Tahun 2024	IV	9
Gambar IV.8.	Indeks Resiko Bencana Kabupaten sekitar Kebumen Tahun 2023	IV	11
Gambar IV.9.	Isu Global	IV	15
Gambar IV.10.	Isu Strategis Nasional	IV	17
Gambar IV.11.	Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen	IV	30
Gambar IV.12.	Peta Rencana Sistem Pusat Permukiman Kabupaten Kebumen	IV	31
Gambar IV.13.	Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Kebumen	IV	34
Gambar IV.14.	Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Kebumen	IV	39
Gambar IV.15.	Peta Rencana Sistem Jaringan Transportasi Kabupaten Kebumen	IV	42
Gambar V.1	Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah	V	4
Gambar VI.1	Tema Pembangunan Per Tahun Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029	VI	6



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Kebumen yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, memiliki beragam potensi yang dapat dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Kabupaten ini dikenal dengan kekayaan alamnya, termasuk potensi pertanian, pariwisata dan sumber daya mineral. Pertanian menjadi salah satu sektor utama dengan komoditas unggulan seperti padi, kelapa dan hortikultura, yang didukung oleh kondisi tanah yang subur. Selain itu, Kebumen memiliki potensi pariwisata yang luar biasa, seperti Pantai Menganti, Goa Jatijajar dan Benteng *Van Der Wijck*, yang menawarkan keindahan alam dan warisan sejarah. Potensi geologi berupa batuan karst dan sumber daya alam lainnya juga menjadi aset penting untuk pembangunan di daerah. Kabupaten ini memiliki karakteristik geografis yang unik, dengan wilayah yang terdiri dari dataran rendah dan pantai di bagian selatan serta pegunungan di bagian utara. Karakter ini memberikan Kebumen keanekaragaman ekosistem dan keindahan alam yang khas. Budaya lokal yang masih terjaga dengan baik menjadi ciri khas masyarakat Kebumen seperti tradisi seni Cepetan, Ingkung Suran dan kerajinan batik khas Kebumen. Selain itu, masyarakatnya dikenal ramah, religius, dan memiliki semangat gotong royong yang tinggi. Dengan tingkat pendidikan yang terus meningkat, Kebumen menunjukkan potensi besar dalam pengembangan sumber daya manusia untuk mendukung pertumbuhan di berbagai sektor. Keunikan Kabupaten Kebumen terletak pada perpaduan antara keindahan alam, kekayaan budaya, dan sejarahnya yang kaya. Salah satu daya tarik uniknya adalah fenomena Karangsambung, sebagai bagian dari kawasan Geopark Kebumen yang diakui UNESCO karena nilai geologisnya yang luar biasa sebagai situs pendidikan dan penelitian. Selain itu, kuliner khas seperti lanting, sate ambal, dan nasi penggel menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Kombinasi antara potensi alam, budaya, dan keberagaman yang harmonis menjadikan Kebumen sebagai daerah yang tidak hanya layak untuk dikunjungi, tetapi juga memiliki prospek cerah untuk investasi dan pengembangan berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan merupakan langkah awal pembangunan, yang memegang peranan krusial dalam upaya mencapai tujuan pembangunan di Kabupaten Kebumen. Melalui perencanaan yang matang dan terarah, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi potensi dan tantangan yang ada, serta merumuskan strategi dan program yang tepat sasaran. Perencanaan yang baik juga memungkinkan alokasi sumber daya yang efisien, koordinasi yang efektif antar sektor, dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, perencanaan pembangunan daerah menjadi landasan penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen secara menyeluruh.

Dengan adanya amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota harus menyusun perencanaan pembangunan mulai dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

Dengan dilantikannya Hj. Lilis Nuryani sebagai Bupati dan H. Zaeni Miftah sebagai wakil Bupati pada tanggal 20 Februari tahun 2025 maka pembangunan Kabupaten Kebumen periode 2025-2029 akan segera dilaksanakan. Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sesuai pasal 70 Bupati menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah bupati dilantik. Dengan ini Pemerintah Kabupaten Kebumen harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen tahun 2025-2029 sangat penting karena dokumen ini akan menjadi pedoman utama bagi arah pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. RPJMD berfungsi sebagai penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah terpilih, yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dokumen ini memuat strategi, kebijakan, dan program prioritas yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan potensi daerah, dan mengatasi berbagai permasalahan pembangunan. Dengan adanya RPJMD yang komprehensif dan partisipatif, diharapkan pembangunan di Kabupaten Kebumen dapat berjalan secara terarah, efektif, dan berkelanjutan.

Dalam penyusunan dokumen RPJMD dilakukan beberapa pendekatan yaitu *Teknokratik, Partisipatif, Politis, Atas-bawah dan bawah-atas, Holistik-tematik, Integratif, Spasial*. Kemudian dalam pelaksanaan penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 memiliki beberapa tahapan yaitu (1) Persiapan penyusunan; (2) Penyusunan Rancangan Awal; (3) Penyusunan Rancangan; (4) Pelaksanaan Musrenbang; (5) Perumusan rancangan akhir dan (6) penetapan.

RPJMD ini akan menjadi panduan strategis yang memuat visi, misi, dan program-program prioritas kepala daerah terpilih, yang diselaraskan dengan potensi dan tantangan yang dihadapi Kabupaten Kebumen. Dengan perencanaan yang matang, RPJMD akan memastikan bahwa sumber daya dialokasikan secara efisien untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi. RPJMD yang komprehensif dan partisipatif akan

PENDAHULUAN

II-2

menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen secara menyeluruh.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang *Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang *Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang *Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang *Penyelenggaraan Penataan Ruang* (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang *Perangkat Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 *Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang *Standar Pelayanan Minimal* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang *Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang *Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029*; ;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang *Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah*;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang *Sistem Informasi Pemerintahan Daerah* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang *Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang *Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang *Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah* sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang *Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah*;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang

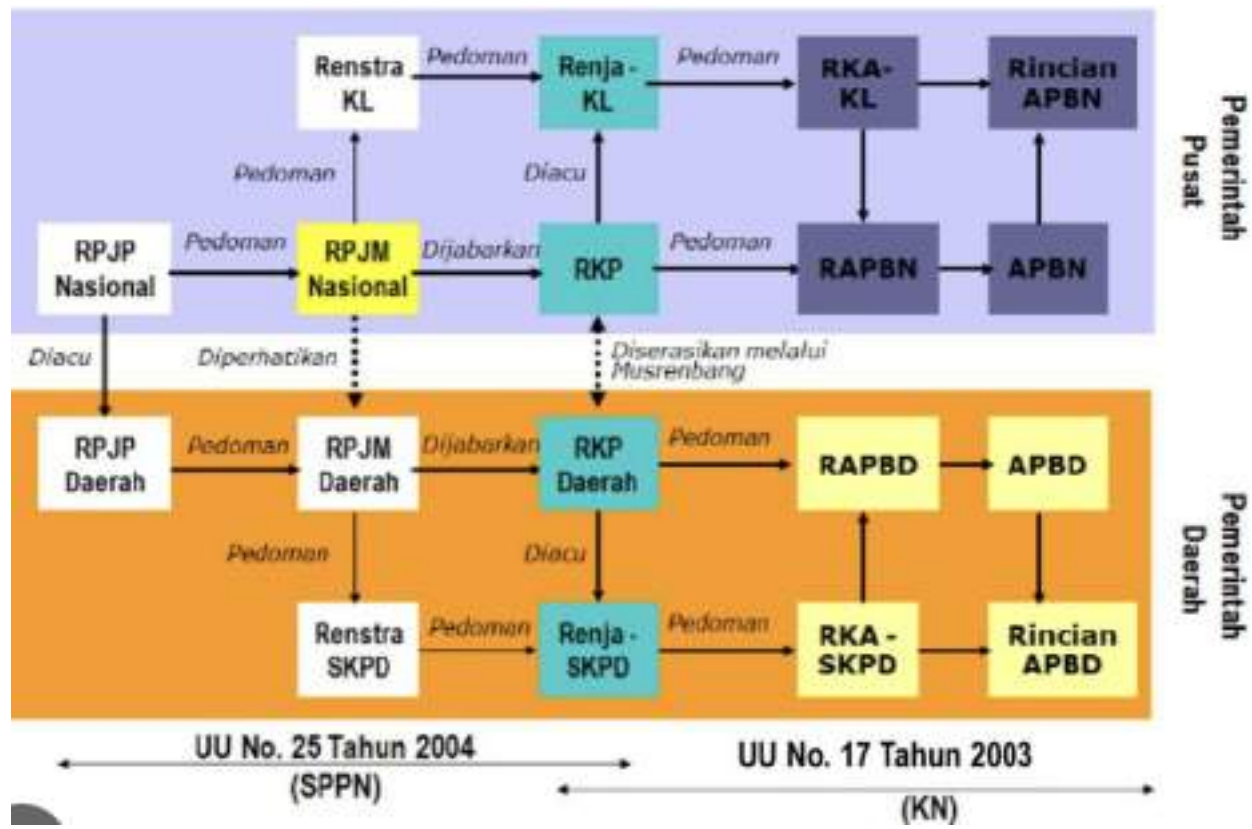
PENDAHULUAN**II-4**

- Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2023-2053;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 – 2044; dan
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Dokumen perencanaan Kabupaten Kebumen membentuk sistem hierarkis yang saling terkait, dimulai dari RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) yang menetapkan visi jangka panjang 20 tahun, menjadi landasan bagi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang memuat strategi 5 tahunan kepala daerah terpilih, yang kemudian dijabarkan dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahunan sebagai dasar penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) dan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) berperan sebagai dokumen pendukung yang memastikan pembangunan berkelanjutan dan kesesuaian tata ruang, sehingga semua dokumen ini saling terintegrasi untuk mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Kebumen.

Gambar I.1.
Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sumber: Rancangan Inmendagri

Berdasarkan gambar di atas, hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Hubungan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029

Hubungan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 terletak pada keselarasan visi, misi, dan prioritas pembangunan. RPJMD Kabupaten Kebumen dirancang untuk mendukung dan mengimplementasikan program nasional di tingkat daerah, dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan lokal. Fokus utama RPJMN, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur, dan transformasi ekonomi, diadaptasi ke dalam konteks lokal Kebumen, mengingat potensi dan tantangan di Kabupaten Kebumen. Melalui sinergi ini, RPJMD diharapkan dapat menjadi instrumen strategis untuk mendorong akselerasi pembangunan nasional sekaligus memenuhi kebutuhan spesifik masyarakat Kabupaten Kebumen.

b. Hubungan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Jawa Tengah tahun 2025-2029

RPJMD Kabupaten Kebumen dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah memiliki hubungan yang erat dan hierarkis. RPJMD Kabupaten Kebumen harus selaras dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah, yang merupakan penjabaran dari RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional).

RPJMD Provinsi Jawa Tengah menetapkan arah kebijakan dan program pembangunan strategis di tingkat provinsi, yang kemudian menjadi acuan bagi kabupaten/kota dalam menyusun RPJMD masing-masing. Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Kebumen harus mengadopsi dan mengimplementasikan kebijakan dan program provinsi yang relevan dengan kondisi dan potensi daerah, serta berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan provinsi secara keseluruhan.

c. Hubungan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045

RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 dan RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 memiliki hubungan yang sangat erat dan saling melengkapi. RPJPD, sebagai dokumen perencanaan jangka panjang, menetapkan visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk 20 tahun ke depan. Sementara itu, RPJMD adalah dokumen perencanaan jangka menengah yang merinci strategi, kebijakan, dan program pembangunan untuk 5 tahun, yang merupakan penjabaran dari RPJPD. Dengan kata lain, RPJMD menjadi tahapan konkret dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJPD, memastikan bahwa setiap langkah pembangunan daerah selaras dengan tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan.

d. Hubungan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 dengan RTRW Kabupaten Kebumen

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen tahun 2025-2029 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kebumen memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi. RTRW berfungsi sebagai landasan spasial yang mengatur struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah, sementara RPJMD menjabarkan program pembangunan dalam periode 5 tahun yang harus selaras dengan arahan tata ruang tersebut. RPJMD harus memastikan bahwa setiap program pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur, pengembangan kawasan industri, atau pengelolaan kawasan lindung, sesuai dengan zonasi dan arahan pengembangan yang telah ditetapkan dalam RTRW. Dengan demikian, sinkronisasi antara RPJMD dan RTRW sangat penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan terhindar dari konflik pemanfaatan ruang.

e. RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen memiliki hubungan yang sangat erat dan saling berkaitan. RPJMD merupakan dokumen perencanaan makro yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah selama lima tahun, sementara Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan yang lebih spesifik dan operasional, yang menjabarkan bagaimana setiap perangkat daerah akan berkontribusi dalam mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD. Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan RPJMD, memastikan

bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah mendukung pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Dengan demikian, Renstra Perangkat Daerah menjadi instrumen penting dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Kebumen yang tercantum dalam RPJMD tahun 2025-2029.

f. Hubungan Antara RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Hubungan antara RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kebumen bersifat hierarkis dan saling melengkapi. RPJMD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah selama lima tahun, sedangkan RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang menjabarkan program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun tersebut. RKPD disusun dengan mengacu pada RPJMD, sehingga setiap program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD harus selaras dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Dengan demikian, RKPD menjadi instrumen untuk mewujudkan visi dan misi yang telah digariskan dalam RPJMD secara bertahap setiap tahunnya.

g. RPJMD dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen 2025-2029 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)-RPJMD Kabupaten Kebumen memiliki hubungan yang sangat erat dan saling melengkapi. KLHS-RPJMD berfungsi sebagai instrumen yang memastikan bahwa setiap kebijakan, rencana, dan program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD telah mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan. KLHS-RPJMD mengidentifikasi potensi dampak lingkungan dari berbagai kegiatan pembangunan, serta memberikan rekomendasi mitigasi dan pengelolaan risiko lingkungan. Dengan demikian, KLHS-RPJMD memastikan bahwa RPJMD Kabupaten Kebumen 2025-2029 tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan hidup untuk generasi mendatang.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen adalah untuk menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih ke dalam strategi dan program pembangunan yang terukur selama lima tahun ke depan. Tujuan dari penyusunan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 adalah:

1. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan yang terukur dan realistis.
2. Menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kebumen selama 5 tahun ke depan.
3. Menciptakan kerangka kerja yang terkoordinasi dan terintegrasi antar sektor pembangunan, memastikan sinergi dan efisiensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

4. Menyediakan panduan yang jelas dan terarah untuk pembangunan daerah selama lima tahun ke depan, dengan menetapkan prioritas dan target yang ingin dicapai.
5. Memastikan alokasi sumber daya yang efisien dan efektif, dengan memprioritaskan program dan kegiatan yang memiliki dampak paling besar terhadap kesejahteraan masyarakat.
6. Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen melalui pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.
7. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dengan menetapkan indikator kinerja yang jelas dan terukur.

1.5 Sistematika Penulisan

RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan penyusunan RPJMD Kabupaten Kebumen.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai menjelaskan tentang kondisi Kabupaten Kebumen secara komprehensif sebagai basis atau pijakan dalam penyusunan perencanaan. Aspek yang dibahas diantaranya (i) geografi dan demografi, (ii) kesejahteraan masyarakat, (iii) pelayanan umum, serta (iv) daya saing daerah.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Memberikan gambaran keuangan daerah dan kapasitas keuangan daerah untuk mendukung pembangunan selama lima tahun ke depan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Dalam bab ini disajikan Permasalahan Pembangunan dan Isu strategis dalam pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang disertai dengan tujuan dan sasarannya.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pada bab ini berisikan rumusan strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja dan pagu indikatif.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini berisi penetapan indikator kinerja daerah sebagai gambaran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah

yang ditetapkan menjadi Indikator Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX PENUTUP

Bab ini menjelaskan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1 GEOGRAFI

Kabupaten Kebumen merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di pesisir selatan Pulau Jawa, memiliki karakteristik yang unik dan menjadi kawasan penting sejalan dengan perkembangan kawasan di sekitarnya. Wilayah Kabupaten Kebumen terletak di posisi 109°33'- 09°50' Bujur Timur dan 7°27'-7°50' Lintang Selatan dengan luas wilayah mencapai 1.334,10 km², dan memiliki garis pantai sepanjang 57,5 km² mulai dari Kecamatan Mirit sampai dengan Kecamatan Ayah. Dilihat dari sisi jarak antara Kabupaten Kebumen ke Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah memang relatif jauh, namun demikian dengan perkembangan Yogyakarta Internasional Airport di Kulon Progo dan Pelabuhan Laut Tanjung Intan di Cilacap telah menjadikan Kabupaten Kebumen memiliki posisi yang sangat strategis untuk berbagai kegiatan investasi dan ekonomi yang lain. Secara administratif, sebelah utara Kabupaten Kebumen berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Cilacap dan Banyumas, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Purworejo, serta sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Pembagian wilayah Kabupaten Kebumen terdiri dari 26 kecamatan, 449 desa dan 11 kelurahan dengan 1.953 Rukun Warga (RW) dan 7.288 Rukun Tetangga (RT). Keunikan Kabupaten Kebumen semakin mempertegas bahwa Kabupaten ini memiliki modal yang sangat besar untuk membangun di masa yang akan datang.

Gambar II.1

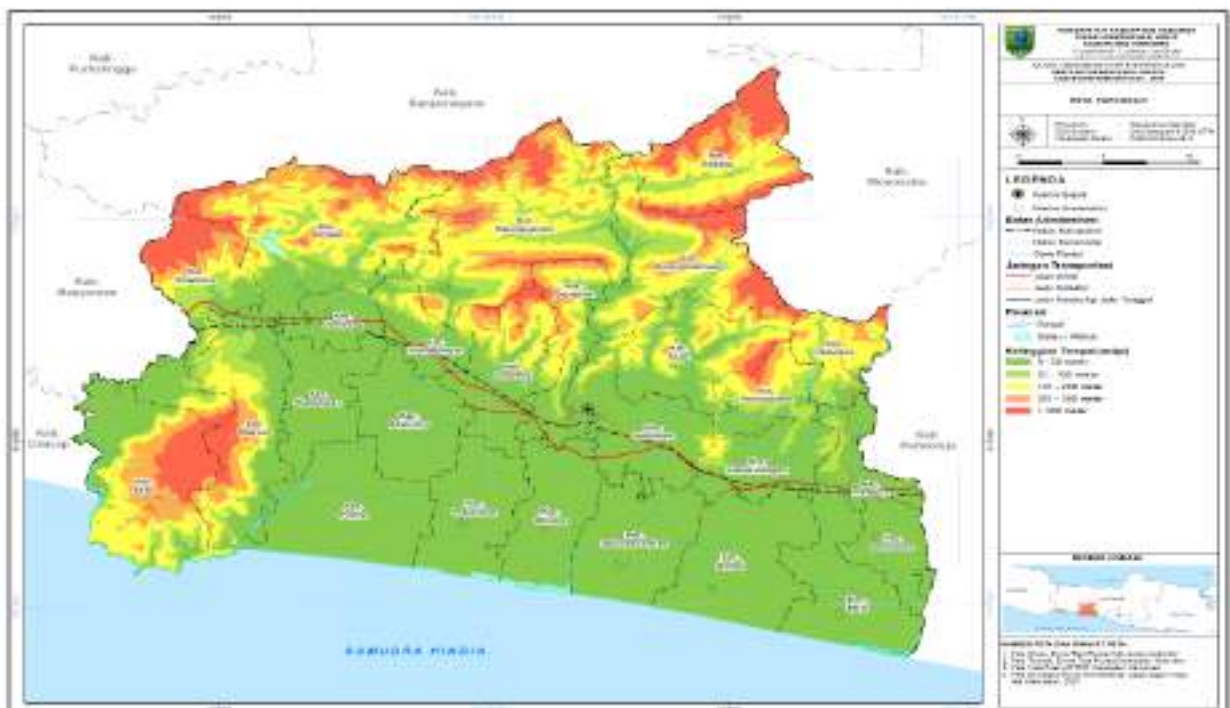
Peta Administrasi Kabupaten Kebumen



Sumber: Perda No 1 Tahun 2024, RTRW 2024-2044, 2024

Kabupaten Kebumen memiliki karakteristik wilayah berupa pesisir, dataran rendah, dan kawasan perbukitan. Kemiringan tanah di Kabupaten Kebumen dikelompokkan dalam 4 (empat) tingkatan yaitu: (1) Kemiringan 0-2 persen seluas 66.953,16 ha atau 52,26 persen; (2) Kemiringan 2-15 persen seluas 5.944,37 ha atau 4,64 persen; (3) Kemiringan 15-40 persen seluas 21.919,37 ha atau 17,11 persen; dan (4) Kemiringan lebih dari 40 persen seluas 33.294,6 ha atau 25,99 persen. Berdasarkan peta topografi Kabupaten Kebumen, kemiringan lereng wilayah Kabupaten Kebumen dikelompokkan dalam 5 kelas yaitu agak curam, curam, datar, landai, dan sangat curam. Pada wilayah utara Kabupaten Kebumen berada pada topografi sangat curam, sementara di bagian Tengah dan Selatan relatif datar dan landai karena merupakan wilayah pesisir.

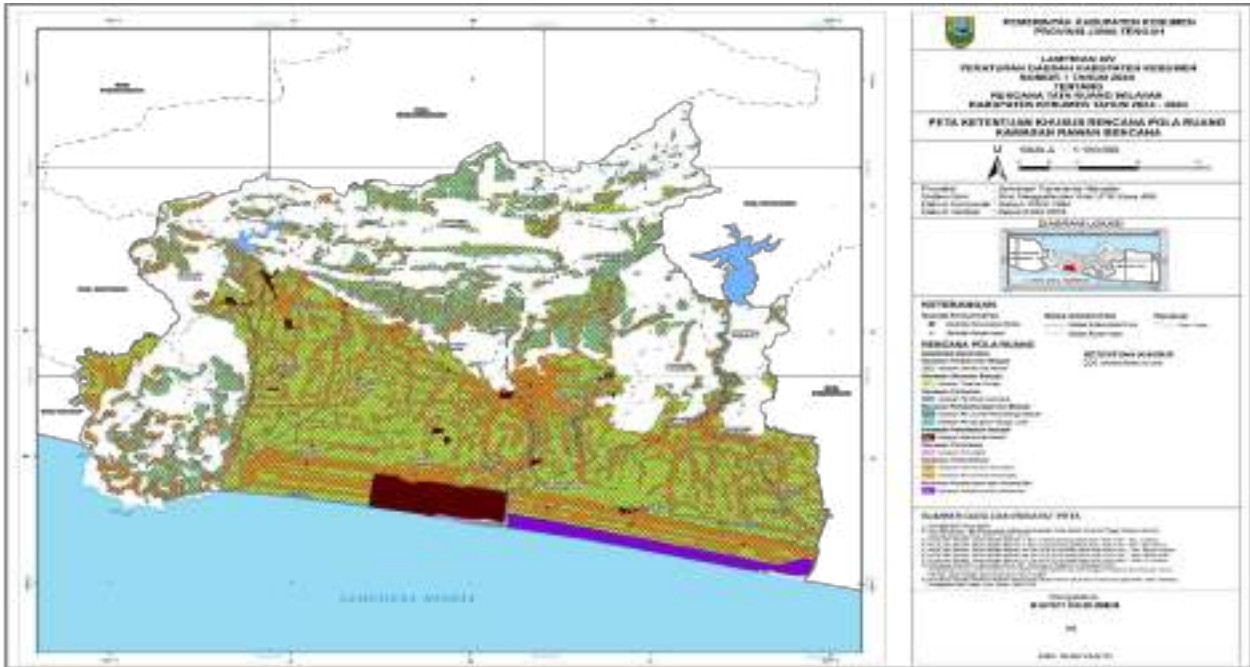
Gambar II.2
Peta Topografi Kabupaten Kebumen (RTRW 2024-2044)



Sumber: Perda No 1 Tahun 2024, RTRW 2024-2044, 2024

Kondisi topografi yang beragam dan wilayah geologis yang dilewati cincin api mengakibatkan potensi bencana alam di Kabupaten Kebumen cukup tinggi. Ancaman potensi bencana yang dapat terjadi di Kabupaten Kebumen yaitu gempa bumi, tsunami, angin puting beliung, banjir, tanah longsor, kekeringan, gelombang ekstrem, dan abrasi. Wilayah yang berpotensi terjadi bencana alam mengalami peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan masyarakat dan berakibat pada timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Pada periode lima tahun terakhir, dari potensi bencana yang ada di Kabupaten Kebumen, bencana yang sering terjadi dan menimbulkan kerugian adalah tanah longsor, banjir, dan angin. Pada musim hujan bencana yang sering terjadi adalah banjir di daerah cekungan dan tanah longsor di daerah pegunungan. Di sisi lain, bencana kekeringan cukup sering terjadi pada saat musim kemarau. Salah satu upaya pemerintah daerah dalam penanganan kekeringan adalah dengan dropping air bersih pada titik-titik kekeringan.

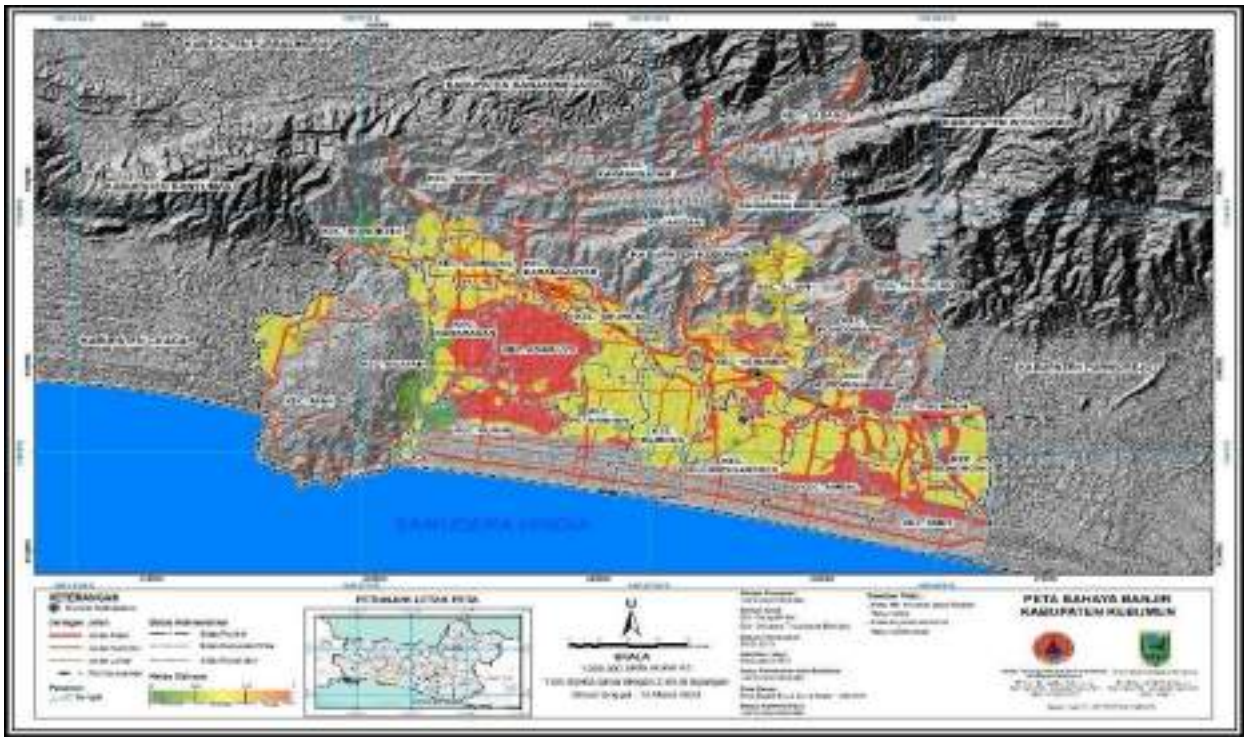
Gambar II.3
Peta Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Kebumen



Sumber: Perda No 1 Tahun 2024, RTRW 2024-2044, 2024

Bencana banjir sering terjadi di Kecamatan Adimulyo, Kebumen, Karanganyar, Buayan, Sruweng, Pejagoan, Prembun, Alian, Mirit, dan Puring. Banjir dengan luas genangan dan durasi yang besar umumnya terjadi karena curah hujan yang tinggi dan dalam waktu lama. Bencana banjir dengan klasifikasi tinggi sebesar 11,5 persen, klasifikasi sedang sebesar 21,7 persen dan klasifikasi rendah sebesar 66,8 persen. Selain itu, 18,66 persen wilayah Kabupaten Kebumen memiliki potensi rawan banjir bandang.

Gambar II.4
Peta Bahaya Banjir Kabupaten Kebumen

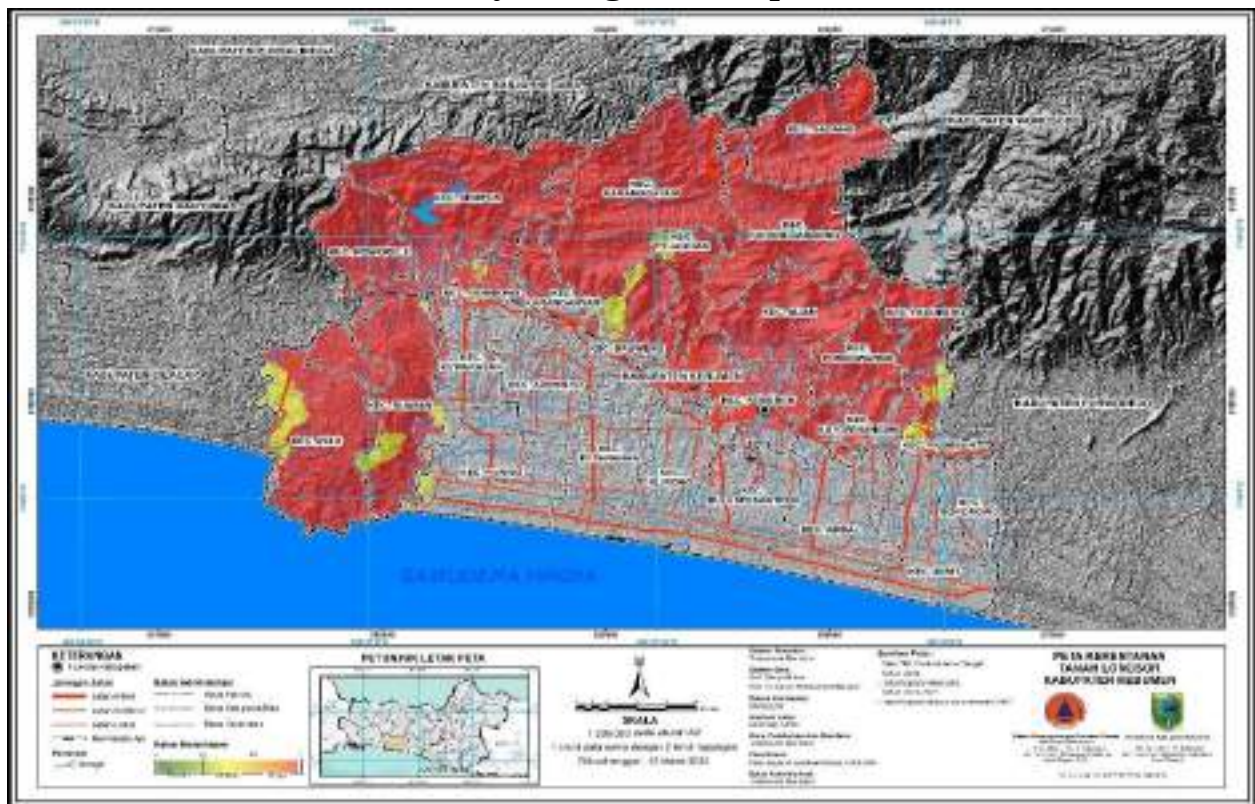


Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

Berdasarkan topografi wilayah, Kebumen bagian utara cenderung terjal dan sangat terjal sehingga bencana tanah longsor menjadi prioritas dalam

kesiapsiagaan dan penanganan bencana. Berdasarkan potensi bencana wilayah Kabupaten Kebumen dibagi menjadi tiga kategori yaitu bahaya longsor dengan klasifikasi tinggi dengan luasan 38.589,87 ha atau 30,1 persen, bahaya longsor dengan klasifikasi sedang dengan luasan 24.663,87 ha atau 19,3 persen, dan bahaya longsor dengan klarifikasi rendah dengan luasan 64.857,75 ha atau 50,6 persen dari luas Kabupaten Kebumen. Ancaman bencana longsor banyak terjadi pada wilayah kecamatan yang memiliki topografi perbukitan dengan lereng yang terjal seperti di Kecamatan Alian, Sadang, Rowokele, Ayah, Buayan, Sempor, Padureso dan Karanggayam.

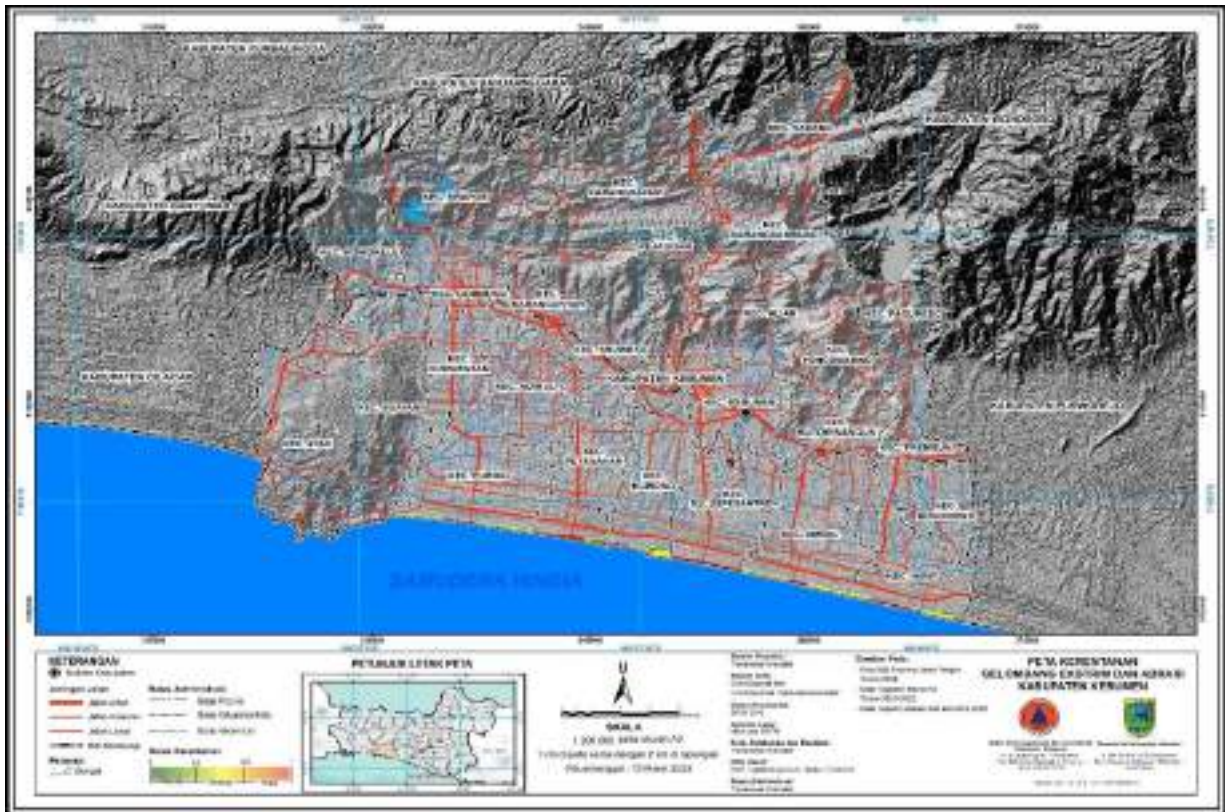
Gambar II.5
Peta Bahaya Longsor Kabupaten Kebumen



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

Ancaman bencana lainnya yaitu gelombang ekstrem dan abrasi di wilayah pesisir. Wilayah dengan potensi bahaya tinggi bencana gelombang ekstrem dan abrasi mencapai 620,18 ha atau 0,48 persen, wilayah dengan bahaya sedang mencapai 280,74 ha atau 0,22 persen sedangkan wilayah dengan bahaya rendah luasannya mencapai 479,79 ha atau 0,37 persen dari total wilayah Kabupaten Kebumen. Berdasarkan data kejadian gelombang pasang dan abrasi, wilayah pesisir yang terdampak bencana gelombang ekstrem dan abrasi antara lain Kecamatan Mirit, Ambal, Buluspesantren, Klirong, Petanahan, Puring, Buayan, dan Ayah. Warga terdampak paling banyak adalah nelayan dan pedagang yang ada di sekitar pantai.

Gambar II.6
Peta Kerentanan Gelombang Ekstrem dan
Abrasi Kabupaten Kebumen



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

Bencana yang terjadi dan menimbulkan kerugian sebagai akibat kondisi topografi di wilayah Kabupaten Kebumen. Sejak tahun 2013, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menerbitkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). Dalam indeks risiko, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana. Berdasarkan hasil kajian risiko bencana nasional Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022-2026 menunjukkan tingkat risiko multibahaya Kabupaten Kebumen pada kategori tinggi untuk kelas bahaya, kategori sedang untuk kelas kerentanan, kategori tinggi untuk kelas kapasitas dan kategori sedang untuk kelas risiko. IRBI Kabupaten Kebumen tahun 2023 yaitu 110,78, meningkat (lebih buruk) dibandingkan tahun 2022 pada angka 102,5. Dari ketiga komponen pembentuk IRBI, untuk menurunkan risiko bencana dapat diupayakan dengan menurunkan komponen kerentanan dan peningkatan komponen kapasitas dalam penanggulangan bencana. Kapasitas Kabupaten Kebumen dalam mengelola bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan ditunjukkan dengan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) mencapai 0,90 (2023). Namun, kondisi IKD stagnan selama 2022-2023 sehingga Kabupaten Kebumen perlu memaksimalkan peningkatan 71 indikator penilaian Indeks Kapasitas Daerah.

Tabel II.1
Risiko Bencana Kabupaten Kebumen

No.	Uraian	Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
1	Tingkat Risiko Bencana Banjir	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
2	Tingkat Risiko Bencana Banjir Bandang	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang
3	Tingkat Risiko Bencana Cuaca Ekstrim	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
4	Tingkat Risiko Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang
5	Tingkat Risiko Bencana Gempabumi	Sedang	Sedang	Tinggi	Sedang
6	Tingkat Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan	Sedang	Rendah	Tinggi	Rendah
7	Tingkat Risiko Bencana Kekeringan	Sedang	Sedang	Tinggi	Sedang
8	Tingkat Risiko Bencana Tanah Longsor	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
9	Tingkat Risiko Bencana Tsunami	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
10	Tingkat Risiko Bencana Epidemi dan Wabah Penyakit	Rendah	Rendah	Sedang	Rendah
11	Tingkat Risiko Bencana Kegagalan Teknologi	Rendah	Rendah	Tinggi	Rendah
12	Tingkat Risiko Bencana Covid-19	Tinggi	Rendah	Tinggi	Rendah
13	Tingkat Risiko Bencana Likuefaksi	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang
14	Tingkat Risiko Multibahaya	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

Kabupaten Kebumen tersusun dari batuan Pra-Tersier, batuan tertua di Pulau Jawa berumur lebih dari 119 juta tahun. Berdasarkan Peta Geologi Lembar Kebumen terdapat batuan di daerah ini mulai dari yang tertua (Paleosen) hingga termuda (Pliosen). Kompleks Melange Luk Ulo tersusun dari bongkah-bongkah batuan Pra-Tersier dengan massa dasar serpih hitam (berumur Kapur Atas). Formasi Karangsambung tersusun dari batu lempung bersisik dengan bongkah batu gamping, konglomerat, batu pasir, batu gamping dan basal (berumur Eosen), serta terdapat pula batu gamping terumbu yang berupa olistolit. Formasi Totogan tersusun dari breksi dengan komponen batu lempung, batu pasir, batu gamping dan basal (berumur Oligo-Miosen). Formasi Waturanda tersusun dari batu pasir kasar, makin ke atas berubah menjadi

breksi dengan komponen andesit, basal dan massa dasar batu pasir tuf, serta terdapat anggota tuf yang tersusun dari perselingan tuf kaca, tuf kristal, batu pasir gampingan, dan napal tufaan (berumur Miosen Awal). Formasi Penosogan tersusun dari perselingan batu pasir gampingan, batu lempung, tuf, napal dan kalkarenit (berumur Miosen Tengah). Diabas ialah batuan beku intrusi hasil aktivitas vulkanik (Miosen Tengah). Formasi Halang tersusun dari perselingan batu pasir, batu gamping, napal dan tuf dengan sisipan breksi (berumur Pliosen). Formasi Peniron tersusun dari breksi dengan komponen andesit, batu lempung, batu gamping, serta massa dasar batu pasir tufan bersisipan tuf. Endapan Pantai berupa pasir lepas dan Alluvium yang berupa lempung, lanau, pasir, kerikil dan kerakal. Adanya batuan pra-tercier yang juga merupakan batuan tertua di Pulau Jawa memberikan potensi ilmiah geologi dan pariwisata. Selain itu, dengan riset eksplorasi yang mendalam, batuan pra-tercier kemungkinan memiliki potensi sumber daya logam dan mineral, bahan bangunan (seperti marmer dan granit), sumber daya energi hingga geothermal. Tantangan dalam mengeksplorasi potensi batuan pra-tercier adalah diperlukan teknologi yang canggih dan investasi yang sangat besar, dimana eksplorasi juga memerlukan waktu yang cukup lama serta tidak selalu mendapatkan hasil yang diinginkan sehingga tidak memberikan keuntungan/profit ketika dieksploitasi. Selain aktivitas eksplorasi dan ekstraksi, batuan Pra-Tersier dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, termasuk deforestasi, erosi, pencemaran air, dan gangguan habitat. Keberadaan batuan tertua di Jawa menjadi warisan geologi bernilai internasional, dan telah diakui oleh Persatuan Ahli Geologi Dunia (IUGS) dalam penilaiannya terhadap dossier/proposal Geopark Kebumen ke UNESCO Global Geopark.

Wilayah Kabupaten Kebumen memiliki sumber air permukaan dan air tanah. Kabupaten Kebumen memiliki sumber air permukaan dan air tanah, serta terdapat tiga Cekungan Air Tanah (CAT) yaitu CAT Banyumudal, CAT Kebumen Purworejo, dan CAT Kroya. Selain itu, Wilayah Kabupaten Kebumen dilalui oleh sungai yang membentuk Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu Sungai Ijo, Luk Ulo, Telomoyo, dan Wawar. Kondisi hidrologi dan geografi berupa CAT dan DAS di memunculkan potensi terjadinya banjir di Kecamatan Adimulyo, Kecamatan Puring, Kecamatan Ayah, dan Kecamatan Bonorowo. Selain sungai, tanah dengan mata air melimpah berada di 16 kecamatan (Kecamatan Buayan, Pejagoan, Sruweng, Ayah, Rowokele, Kutowinangun, Prembun, Karanggayam, Karanganyar, Kebumen, Alian, Padureso, Karangsambung, Sadang, Sempor, dan Poncowarno). Potensi mata air terbesar berada di Kecamatan Buayan dengan jumlah 37 mata air. Potensi air baku terdapat di DAS Wawar, DAS Luk Ulo, DAS Telomoyo, DAS Ijo, dan Mata Air.

Kabupaten Kebumen memiliki beragam kawasan budidaya. Kawasan budidaya di Kabupaten Kebumen terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non-pertanian dengan peruntukan meliputi: (1) kawasan hutan produksi; (2) kawasan hutan rakyat; (3) kawasan pertanian; (4) kawasan perikanan; (5) kawasan pertambangan dan energi; (6) kawasan peruntukkan industri; (7) kawasan pariwisata; (8) kawasan permukiman; dan (9) kawasan pertahanan dan keamanan. Berdasarkan analisis citra satelit sebagai dasar

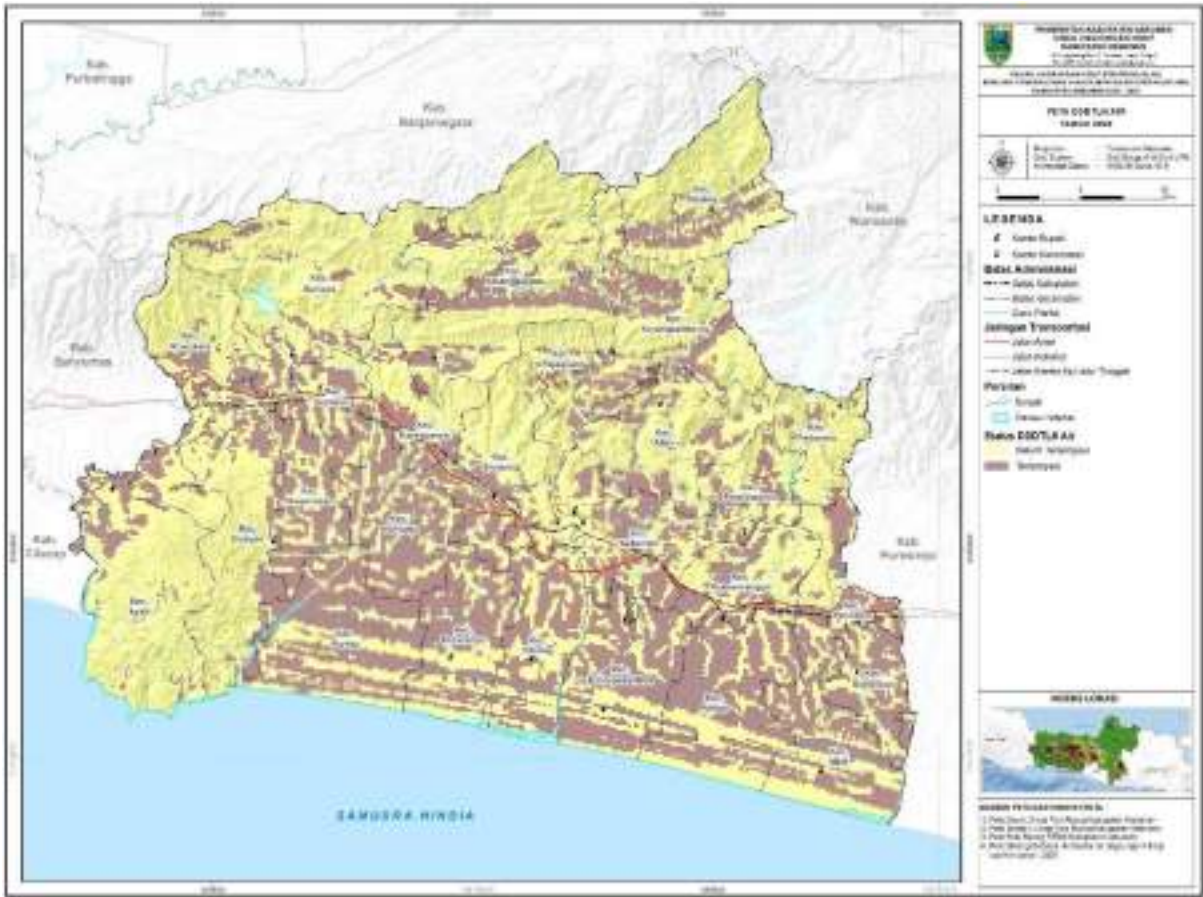
penyusunan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044, pada tahun 2019 terdapat luasan budidaya sebesar 120.695,42 ha dengan luas lahan produktif 59.723,48 ha (49,48 persen) dan tersebar di 26 kecamatan. Kecamatan Adimulyo, Puring, dan Bonorowo memiliki persentase luas wilayah produktif yang paling besar karena topografi wilayahnya terletak di daerah datar yang banyak memiliki sawah atau ladang. Kecamatan Rowokele, Sadang, dan Padureso memiliki persentase luas wilayah produktif yang paling kecil karena topografi wilayahnya berupa pegunungan dengan sedikit sawah atau ladang, tetapi memiliki banyak hutan yang dapat dijadikan sebagai kawasan lindung. Kabupaten Kebumen memiliki beragam kawasan budidaya berupa wilayah yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi kehidupan manusia.

Kabupaten Kebumen memiliki desa yang terdapat kawasan hutan sebanyak 93 desa di 12 Kecamatan, yaitu 15 desa di Kecamatan Ayah, 11 desa di Kecamatan Buayan, 5 desa di Kecamatan Rowokele, 12 desa di Kecamatan Sempor, 3 desa di Kecamatan Karanganyar, 19 desa di Kecamatan Karanggayam, 10 desa di Kecamatan Karangsambung, 7 desa di Kecamatan Sadang, 1 desa di Kecamatan Alian, 5 desa di Kecamatan Sruweng, 2 desa di Kecamatan Pejagoan dan 3 desa di Kecamatan Padureso.

Daya dukung air di Kabupaten Kebumen masih dalam kondisi surplus. Perhitungan status daya dukung dan daya tampung air didasarkan selisih ketersediaan air permukaan dan kebutuhan terhadap air (Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan SK.146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023 tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional). Perhitungan ketersediaan air diinventarisasi dari klasifikasi karakteristik bentang alam, karakteristik vegetasi alami, dan kelas penutupan lahan, sedangkan kebutuhan air diinventarisasi dari kebutuhan air per kapita, kebutuhan air untuk lahan melalui KHL (Kebutuhan Air untuk Hidup Layak) bagi kebutuhan air domestik dan kebutuhan air domestik untuk tiap grid (Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009), serta penggunaan air untuk kegiatan ekonomi berbasis lahan yang diperhitungkan meliputi kelas lahan persawahan, perkebunan, kebun campuran, dan tegalan. Kondisi daya dukung air di Kabupaten Kebumen sebesar 256.063.179,02 m³/tahun masih lebih banyak jika dibandingkan dengan kebutuhannya. Tahun 2023 ketersediaan air dipenuhi dari waduk Wadaslintang dengan kapasitas sebesar 388,72 juta m³, waduk Sempor dengan kapasitas 38,04 juta m³ dan sungai Bogowonto untuk pengairan lahan seluas 4.200 ha. Kebijakan pemerataan air dari sumber air baku telah dilaksanakan melalui pembangunan embung dan perbaikan saluran irigasi tersier, serta pemeliharaan saluran dengan pelibatan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Gabungan Petani Pemakai Air (GP3A) dan Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A). Meskipun ada surplus kapasitas, namun jika ditinjau di masing-masing wilayah masih terdapat kecamatan yang defisit air seperti di Kecamatan Ambal, Buluspesantren, Kuwarasan, Puring, Mirit, dan Petanahan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa distribusi air di Kabupaten Kebumen masih belum merata ke semua wilayah.

Gambar II.7

Peta Status Daya Dukung Air Kabupaten Kebumen



Sumber: KLHS RPJMD Kab. Kebumen Tahun 2025-2029, 2023

Tabel II.2

Distribusi Potensi Daya Dukung Air Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No	Kecamatan	Ketersediaan (m3/tahun)	Kebutuhan (m3/tahun)	Selisih (m3/tahun)	Status
1	Adimulyo	65.863.553,57	75.171.960,41	-.308.406,84	Terlampau
2	Alian	81.157.431,23	66.157.826,04	14.999.605,19	Belum Terlampau
3	Ambal	79.402.995,96	91.852.837,84	-2.449.841,88	Terlampau
4	Ayah	93.884.744,31	44.137.442,48	49.747.301,83	Belum Terlampau
5	Bonorowo	35.851.352,33	39.546.273,25	-3.694.920,91	Terlampau
6	Buayan	86.877.208,17	49.934.523,07	36.942.685,11	Belum Terlampau
7	Buluspesantren	65.620.146,73	76.556.401,52	-0.936.254,79	Terlampau
8	Gombang	27.933.822,53	26.169.458,94	1.764.363,59	Belum Terlampau
9	Karanganyar	41.167.499,51	32.240.189,87	8.927.309,64	Belum Terlampau
10	Karanggayam	149.364.801,43	110.044.218,11	39.320.583,32	Belum Terlampau
11	Karangsambung	88.989.464,94	74.886.754,94	14.102.710,00	Belum Terlampau
12	Kebumen	60.410.919,79	55.869.112,70	4.541.807,09	Belum Terlampau
13	Klirong	55.417.481,50	56.938.800,36	-1.521.318,86	Terlampau
14	Kutowinangun	43.934.729,87	37.285.478,87	6.649.251,00	Belum Terlampau
15	Kuwarasan	45.239.803,43	49.310.904,60	-4.071.101,18	Terlampau
16	Mirit	59.908.490,70	64.380.173,51	-4.471.682,81	Terlampau
17	Padureso	34.246.005,01	21.631.994,35	12.614.010,66	Belum Terlampau

Sumber: KLHS RPJMD Kab. Kebumen Tahun 2025-2029, 2023

RANWAL RPJMD KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029

Tabel II.3

Distribusi Potensi Daya Dukung Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No	Kecamatan	Ketersediaan (m ³ /tahun)	Kebutuhan (m ³ /tahun)	Selisih (m ³ /tahun)	Status
1	Adimulyo	11.409,74	4.510,72	6.899,02	Belum Terlampaui
2	Alian	10.820,77	3.667,63	7.153,13	Belum Terlampaui
3	Ambal	13.665,24	5.577,49	8.087,75	Belum Terlampaui
4	Ayah	12.770,94	7.046,30	5.724,65	Belum Terlampaui
5	Bonorowo	6.135,37	2.561,78	3.573,60	Belum Terlampaui
6	Buayan	12.189,43	5.303,24	6.886,19	Belum Terlampaui
7	Buluspesantren	11.189,44	5.230,34	5.959,10	Belum Terlampaui
8	Gombang	4.555,79	2.569,14	1.986,65	Belum Terlampaui
9	Karanganyar	5.611,78	2.720,35	2.891,43	Belum Terlampaui
10	Karanggayam	19.368,31	4.435,53	14.932,77	Belum Terlampaui
11	Karangsambung	12.021,26	3.042,71	8.978,56	Belum Terlampaui
12	Kebumen	9.625,55	5.327,63	4.297,92	Belum Terlampaui
13	Klirong	9.239,42	5.182,24	4.057,19	Belum Terlampaui
14	Kutowinangun	6.864,68	3.645,89	3.218,78	Belum Terlampaui
15	Kuwarasan	7.756,75	3.605,25	4.151,49	Belum Terlampaui
16	Mirit	10.082,95	4.799,81	5.283,14	Belum Terlampaui
17	Padureso	4.210,87	1.713,25	2.497,62	Belum Terlampaui
18	Pejagoan	5.550,07	3.270,10	2.279,97	Belum Terlampaui
19	Petanahan	9.075,38	4.582,01	4.493,38	Belum Terlampaui
20	Poncowarno	4.242,78	1.990,76	2.252,02	Belum Terlampaui
21	Prembun	4.307,33	2.128,46	2.178,87	Belum Terlampaui
22	Puring	12.280,01	5.925,42	6.354,58	Belum Terlampaui
23	Rowokele	8.153,24	4.725,66	3.427,58	Belum Terlampaui
24	Sadang	10.438,54	1.813,19	8.625,35	Belum Terlampaui
25	Sempor	15.675,93	4.454,35	11.221,58	Belum Terlampaui
26	Sruweng	7.322,43	3.983,36	3.339,08	Belum Terlampaui
	Total	244.564,00	103.812,60	140.751,40	Belum Terlampaui

Keterangan:

Perhitungan status daya dukung pangan didasarkan selisih ketersediaan dan kebutuhan total dengan ketentuan:

- Apabila selisih <0 maka dikategorikan “terlampaui” artinya kebutuhan terhadap pangan melebihi atau melampaui ketersediaan pangan yang ada; dan
- Apabila selisih >0 maka dikategorikan “belum terlampaui” artinya kebutuhan terhadap pangan masih di bawah ketersediaan pangan.

Sumber: KLHS RPJMD Kab. Kebumen Tahun 2025-2029, 2023

Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Berbasis Jasa Lingkungan Hidup (JLH) Penyedia Pangan menunjukkan Kabupaten Kebumen masih mempunyai lahan yang potensial terhadap penyediaan pangan. Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap makhluk hidup untuk dapat bertahan hidup selain air. Hal ini membuat ketersediaan pangan di suatu wilayah merupakan hal yang penting dan harus selalu terjamin ketersediaannya. Alam diciptakan terdiri dari berbagai ekosistem yang memberikan bermacam-macam manfaat bagi makhluk hidup. Salah satu manfaat ini adalah penyediaan bahan pangan, yakni segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati baik tumbuhan maupun hewan yang dapat diperuntukan bagi konsumsi manusia. JLH Penyedia Pangan merupakan hasil pangan dari hutan (tanaman dan hewan), hasil pertanian dan perkebunan serta hasil peternakan serta perikanan, dengan tujuan untuk peningkatan kualitas lingkungan untuk mendukung penyediaan pangan.

JLH penyedia pangan di Kabupaten Kebumen didominasi oleh kelas sedang sebesar 30,58 persen atau seluas 40.728,23 ha, dan terdapat 26,64 persen

berada pada kelas sangat tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Kebumen masih mempunyai lahan yang potensial terhadap penyediaan pangan. Sementara itu juga terdapat 24,65 persen yang berada pada kelas rendah, yang menunjukkan bahwa sekitar 32.285,74 ha yang tidak potensial terhadap penyediaan pangan. Jika disandingkan dengan penggunaan lahan maka kelas rendah berada pada wilayah yang sudah terbangun/permukiman, sementara untuk kelas tinggi berada pada penggunaan lahan sawah, dan perkebunan. Penggunaan lahan dan kondisi bentang alam merupakan faktor penentu kelas JLH.

Tabel II.4

Tabel Kelas Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan Kabupaten Kebumen

Kelas JLH	Luas (Ha)	Persentase (%)
Sangat Rendah	7.686,32	5,77
Rendah	32.825,74	24,65
Sedang	40.728,23	30,58
Tinggi	17.785,25	13,36
Sangat Tinggi	34.143,20	26,64
Total	133.168,75	100

Sumber: KLHS RPJMD Kab. Kebumen Tahun 2025-2029, 2023

Gambar II.9

Peta JLH Penyedia Pangan Kabupaten Kebumen



Sumber: KLHS RPJMD Kab. Kebumen Tahun 2025-2029, 2023

JLH Penyedia Air menunjukkan ketersediaan air di Kabupaten Kebumen sangat kecil. Daya dukung daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa lingkungan penyedia air bersih berkaitan dengan segala sumber air permukaan, air tanah, ataupun air hujan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Penyediaan jasa air bersih bergantung pada beberapa faktor diantaranya curah hujan, lapisan tanah dan jenis batuan yang dapat menyimpan air, bentang lahan, tutupan lahan, serta tutupan vegetasi.

Ekosistem mampu menyediakan air, baik yang berasal dari air permukaan maupun air tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya). Jasa lingkungan sebagai penyedia air sangat dipengaruhi oleh kondisi curah hujan dan lapisan tanah atau lapisan batuan yang dapat menyimpan air (akuifer), serta faktor yang dapat mempengaruhi sistem penyimpanan air tanah seperti ekoregion (bentang alam). Wilayah yang memberikan jasa lingkungan tinggi bagi penyediaan air ada pada daerah tangkapan air yang memiliki daya resap tinggi untuk menampung air dan masih banyak terdapat lahan yang berpotensi tinggi dan sangat tinggi bagi penyediaan air.

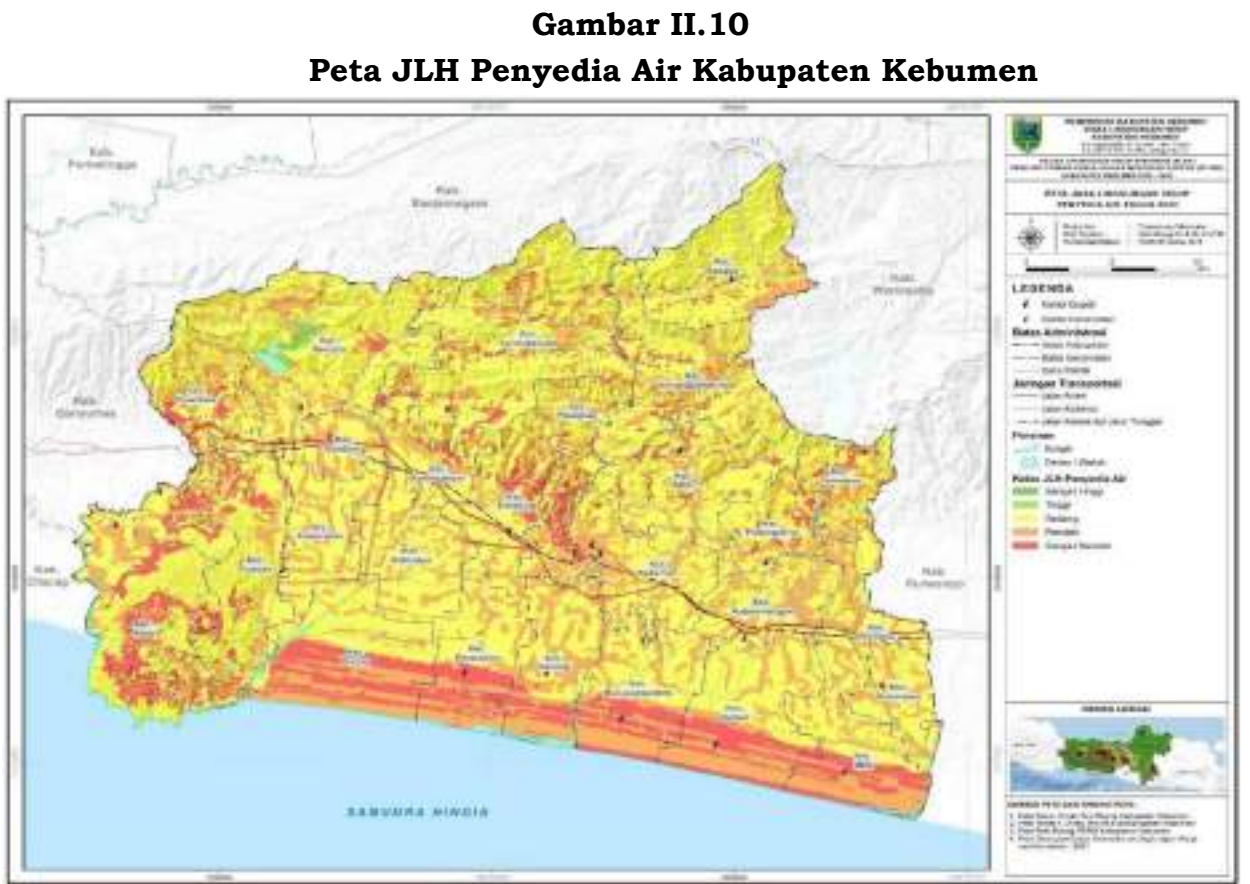
Jasa lingkungan penyedia air Kabupaten Kebumen didominasi oleh kelas rendah sebesar 58,45 persen atau 77.837,33 ha dan kelas sedang sebesar 36,08 persen atau seluas 48.047,70 ha. Sementara itu, jasa lingkungan penyedia air di yang berada pada kelas tinggi dan sangat tinggi persentasenya sangat kecil. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan air di Kabupaten Kebumen sangat kecil, mengingat jumlah ketersediaan air permukaan/sungai yang ada jumlahnya relatif kecil.

Tabel II.5

Tabel Kelas Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air Kabupaten Kebumen

Kelas JLH	Luas (Ha)	Persentase (%)
Sangat Rendah	6.591,18	4,95
Rendah	77.837,33	58,45
Sedang	48.047,70	36,08
Tinggi	213,96	0,16
Sangat Tinggi	478,58	0,36
Total	133.168,75	100,00

Sumber: KLHS RPJMD Kab. Kebumen Tahun 2025-2029, 2023



Sumber: KLHS RPJMD Kab. Kebumen Tahun 2025-2029, 2023

JLH Pengatur Iklim menunjukkan Kabupaten Kebumen berpotensi mempunyai peran penting dalam pengaturan iklim. Jasa lingkungan pengaturan iklim merupakan jasa yang dimiliki oleh ekosistem secara alamiah untuk mengatur suhu, kelembaban dan hujan, angin, pengendalian gas rumah kaca serta penyerapan karbon. Faktor yang mempengaruhi jasa lingkungan pengaturan iklim adalah tutupan vegetasi, ketinggian tempat, serta bentuk lahan. Wilayah yang terdapat pada ketinggian yang tinggi dengan tutupan vegetasi yang rapat akan cenderung memiliki sistem pengaturan iklim yang lebih baik jika dibandingkan dengan wilayah yang terletak pada dataran rendah dengan tutupan vegetasi yang sedikit. Iklim menjadi salah satu hal yang mempengaruhi kondisi keseimbangan ekosistem pada suatu wilayah.

Kondisi pengatur iklim di Kabupaten Kebumen digambarkan melalui kondisi kelas jasa lingkungan pengatur iklim, dimana terdapat 58,10 persen atau seluas 77.372,48 ha memiliki kelas JLH sedang dan 30,52 persen atau seluas 40.646,48 ha memiliki kelas JLH rendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat wilayah di Kabupaten Kebumen yang berpotensi mempunyai peran penting dalam pengaturan iklim.

Tabel II.6
Tabel Kelas JLH Pengatur Iklim Kabupaten Kebumen

Kelas JLH	Luas (Ha)	Persentase (%)
Sangat Rendah	14.786,82	11,1
Rendah	40.646,48	30,52
Sedang	77.372,48	58,1
Tinggi	362,96	0,27
Sangat Tinggi	-	-
Total	133.168,75	100

Gambar II.11
Peta JLH Pengatur Iklim Kabupaten Kebumen



Sumber: KLHS RPJMD Kab. Kebumen Tahun 2025-2029, 2023

JLH Pengatur Air, menunjukkan pengatur tata air Kabupaten Kebumen didominasi pertanian lahan kering. Jasa lingkungan pengaturan tata air dan banjir berkaitan dengan kemampuan ekosistem dalam pengaturan tata air yang meliputi penyimpanan air, pengendalian banjir, serta pemeliharaan ketersediaan air. Jasa lingkungan pengaturan tata air dan banjir sangat dipengaruhi oleh kondisi fisiografi wilayah serta tutupan lahan. Semakin rapat tutupan lahan, maka potensi pengaturan tata aliran air dan banjir akan semakin baik karena keberadaan tumbuhan dapat menjadi penyimpan cadangan air dari proses hidrologi. Selain itu kondisi kelerengan juga menjadi penentu potensi tata aliran air dan banjir yang berkaitan dengan kemiringan lereng suatu wilayah. Kondisi kelerengan terutama berkaitan dengan potensi ancaman banjir akibat aliran ataupun limpasan air permukaan. Kawasan bencana salah satunya bencana banjir dapat dipengaruhi oleh kondisi kemampuan lingkungan dalam memberikan Jasa lingkungan berupa pengaturan tata aliran air dan banjir. Kondisi tata aliran air yang baik kemungkinan akan dapat mengurangi potensi kerawanan bencana banjir pada suatu wilayah.

Kondisi jasa lingkungan pengatur tata air pada tahun 2022 didominasi oleh kelas sedang sebesar 61,71 persen atau setara dengan 82.176,25 ha, sedangkan untuk JLH kelas tinggi dan sangat tinggi hanya 0,52 persen atau 692,54 Ha pada kelas sangat tinggi. Hal ini disebabkan oleh penggunaan lahan di Kabupaten Kebumen didominasi oleh pertanian lahan kering. Selain itu terdapat 37,77 persen dari total luas wilayah di Kabupaten Kebumen berada pada kelas rendah. Wilayah dengan kelas rendah dipengaruhi oleh tipe penggunaan lahan berupa permukiman/lahan terbangun dan sawah.

Tabel II.7
Tabel Kelas JLH Pengatur Tata Air Kabupaten Kebumen

Kelas JLH	Luas (Ha)	Persentase (%)
Sangat Rendah	3,87	0
Rendah	50.296,08	37,77
Sedang	82.176,25	61,71
Tinggi	-	-
Sangat Tinggi	692,54	0,52
Total	133.168,75	100

Sumber: KLHS RPJMD Kab. Kebumen Tahun 2025-2029, 2023

Gambar II.12
Peta JLH Pengatur Tata Air Kabupaten Kebumen



Sumber: KLHS RPJMD Kab. Kebumen Tahun 2025-2029, 2023

JLH Mitigasi Bencana Longsor menunjukkan sebagian besar wilayah Kabupaten Kebumen termasuk dalam mitigasi longsor kelas sedang. Jasa lingkungan mitigasi perlindungan bencana longsor adalah kapasitas lingkungan dalam bentuk ekosistem untuk pencegahan dan perlindungan terhadap bencana tanah longsor. Seperti halnya bencana banjir, bencana longsor juga dapat dicegah oleh tempat-tempat yang memiliki liputan vegetasi yang rapat. Selain itu bentuk lahan secara spesifik berdampak langsung terhadap sumber bencana. Sebagai contoh, bencana erosi dan longsor umumnya terjadi pada bentuk lahan struktural dan denudasional dengan morfologi perbukitan. Indikator keadaannya berupa karakteristik bentang alam, vegetasi, dan tutupan lahan, sedangkan indikator kinerjanya adalah luasan karakteristik bentang alam, vegetasi, dan penutupan lahan yang berfungsi sebagai pencegahan dan perlindungan terhadap tanah longsor.

Berdasarkan hasil perhitungan jasa lingkungan mitigasi perlindungan bencana tanah longsor dengan menggunakan peta penutupan lahan, sebagian besar wilayah Kabupaten Kebumen berada di kelas sedang 54,08 persen atau setara dengan 72.012,06 ha. Sementara itu juga terdapat 0,17 persen pada kelas tinggi, dipengaruhi oleh penggunaan lahan yang masih terdapat kawasan hutan dan perkebunan.

Tabel II.8

Tabel Kelas Jasa Lingkungan Hidup Mitigasi Longsor Kabupaten Kebumen

Kelas JLH	Luas (Ha)	Persentase (%)
Sangat Rendah	14.204,49	10,67
Rendah	46.720,92	35,08
Sedang	72.012,06	54,08
Tinggi	231,27	0,17
Sangat Tinggi	-	-
Total	133.168,75	100,00

Sumber: KLHS RPJMD Kab. Kebumen Tahun 2025-2029, 2023

Gambar II.13

Peta JLH Mitigasi Longsor Kabupaten Kebumen



Sumber: KLHS RPJMD Kab. Kebumen Tahun 2025-2029, 2023

JLH Mitigasi Bencana Banjir menunjukkan mitigasi banjir Kabupaten Kebumen didominasi kelas sangat rendah dan rendah. Jasa lingkungan mitigasi perlindungan bencana banjir dapat diartikan sebagai kapasitas lingkungan dalam bentuk ekosistem untuk pencegahan dan perlindungan terhadap bencana banjir di suatu wilayah. Indikator keadaannya berupa karakteristik bentang alam, vegetasi, dan tutupan lahan, sedangkan indikator kinerjanya adalah luasan karakteristik bentang alam, vegetasi dan penutupan lahan yang berfungsi sebagai pencegahan dan perlindungan terhadap bencana banjir.

Kabupaten Kebumen didominasi oleh kelas rendah seluas 25.170,31 ha atau 18,90 persen dari total luas wilayah dan kelas sangat rendah seluas 35,11 persen atau setara dengan 46.754,22 ha. Sementara itu, wilayah yang mempunyai potensi baik dalam mitigasi perlindungan bencana banjir relatif kecil yaitu 2,99 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mitigasi perlindungan bencana banjir sangat kecil dan berpotensi terjadi banjir hampir di semua kecamatan di terutama di bagian tengah dan selatan.

Tabel II.9

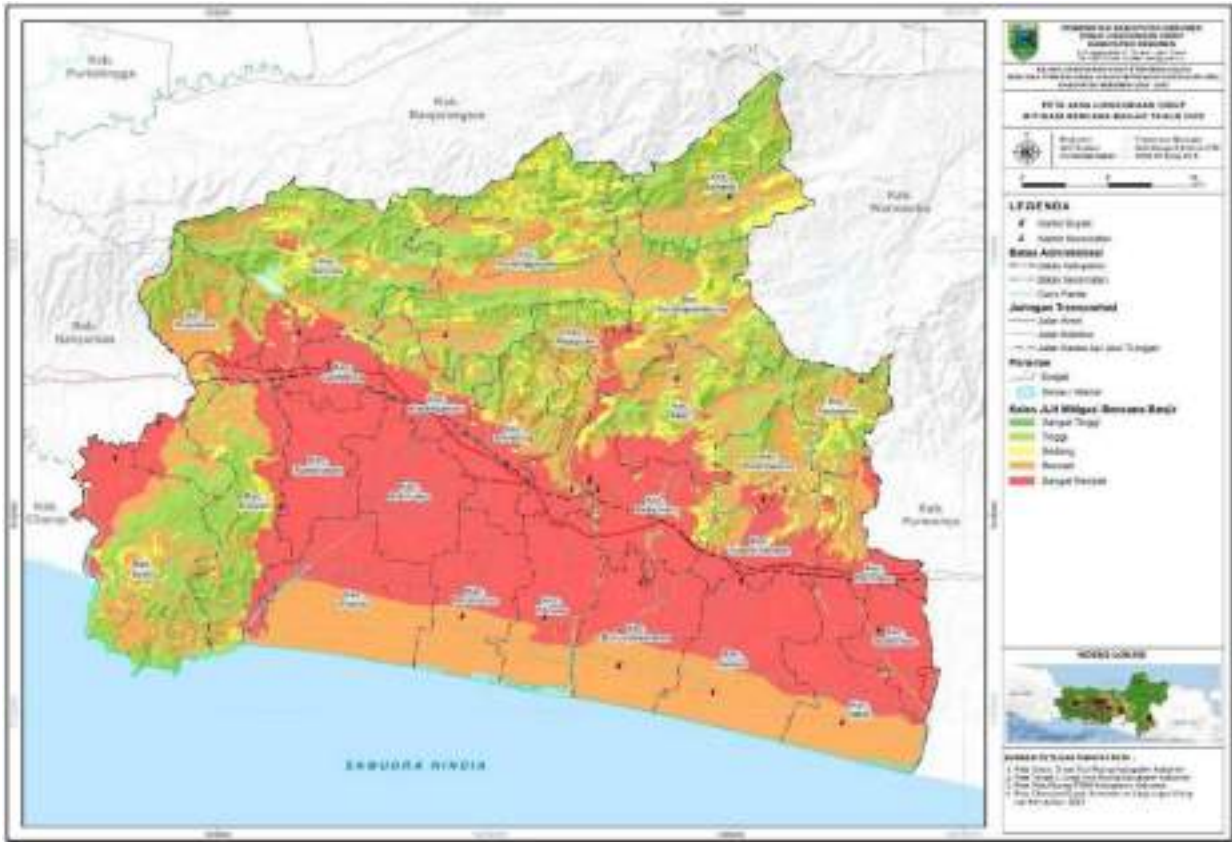
Tabel Kelas Jasa Lingkungan Hidup Mitigasi Banjir Kabupaten Kebumen

Kelas JLH	Luas (Ha)	Persentase (%)
Sangat Rendah	46.754,22	35,11
Rendah	25.170,31	18,90
Sedang	57.259,05	43,00
Tinggi	3.985,16	2,99
Sangat Tinggi	-	-
Total	133.168,75	100,00

Sumber: KLHS RPJMD Kab. Kebumen Tahun 2025-2029, 2023

Gambar II.14

Peta JLH Mitigasi Banjir Kabupaten Kebumen



Sumber: KLHS RPJMD Kab. Kebumen Tahun 2025-2029, 2023

Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam menunjukkan Kabupaten Kebumen mempunyai potensi sumber daya mineral, sumber daya air berupa CAT dan non CAT serta sumber daya hutan. Kondisi sumber daya alam untuk mendukung kegiatan pembangunan berhubungan dengan sumber daya mineral atau pertambangan. Kabupaten Kebumen memiliki potensi bahan tambang yang dapat mendukung kegiatan pembangunan. Meskipun demikian, pemanfaatannya tidak serta merta dapat dilakukan untuk kegiatan pertambangan karena pertimbangan lokasi dan penggunaan lahan di atasnya. Bahan tambang yang berada pada kawasan hutan lindung di sebelah selatan

CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung. Kabupaten Kebumen mempunyai potensi CAT yaitu CAT Kroya, CAT Banyumudal dan CAT Kebumen-Purworejo. Jika dilihat berdasarkan persebarannya, maka potensi CAT tersebut berada di bagian tengah dan selatan, sementara bagian utara merupakan wilayah non CAT. Kabupaten Kebumen memiliki dua waduk yang berada di wilayah utara yaitu Waduk Sempor dan Waduk Wadaslintang. Kedua waduk tersebut berfungsi untuk meningkatkan ketersediaan air baku terutama di wilayah utara.

Tabel II.10

Cekungan Air Tanah	Luas (Ha)	Cakupan (%)
CAT Kroya	2.404,64	3,44
CAT Banyumudal	6.961,48	9,97
CAT Kebumen-Purworejo	60.440,13	86,58
Total	69.806,25	100

Sumber: KLHS RPJMD Kab. Kebumen Tahun 2025-2029, 2023

Gambar II.15



Sumber: KLHS RPJMD Kab. Kebumen Tahun 2025-2029, 2023

Kabupaten Kebumen masih mempunyai sumber daya hutan yang tersebar di beberapa wilayah, terdiri dari hutan lindung 3.819,81 ha, hutan produksi tetap 664,88 ha, hutan produksi terbatas 13.077,29 ha dan area penggunaan lain mencapai 115.847,98 ha. Lokasi hutan mayoritas berada di wilayah utara yaitu

di Kecamatan Sadang, Kecamatan Karanggayam, Kecamatan Sempor dan Kecamatan Karangsambung. Sementara itu, di wilayah selatan terdapat kawasan hutan di Kecamatan Ayah.

Gambar II.16
Peta Kawasan Hutan Kabupaten Kebumen



Sumber: KLHS RPJMD Kab. Kebumen Tahun 2025-2029, 2023

Sebagian besar wilayah kecamatan masuk kategori kerentanan sedang, serta risiko banjir dan kekeringan sedang. Tingkat kerentanan terhadap iklim ditentukan oleh indikator yang mempengaruhi keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi suatu sistem. Ketiga faktor tersebut berubah menurut waktu sejalan dengan kegiatan pembangunan dan upaya-upaya adaptasi. Tingkat keterpaparan dan tingkat sensitivitas dapat dicerminkan oleh kondisi biofisik dan lingkungan serta sosial-ekonomi. Untuk mendukung pengurangan risiko dan dampak iklim tersebut, Dirjen Pengendalian Iklim melalui Direktorat Adaptasi iklim mengembangkan Sistem Informasi Indeks dan Data Kerentanan Iklim (SIDIK) yang menyajikan data informasi kerentanan iklim di seluruh Indonesia untuk mendukung kebijakan pembangunan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam upaya perencanaan adaptasi serta pengurangan risiko dan dampak iklim. Saat ini SIDIK memanfaatkan data sosial ekonomi, demografi, geografi, dan lingkungan infrastruktur dari PODES. Sebagian besar wilayah berada pada tingkat kerentanan sedang (skor 3), hanya terdapat satu wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi (skor 5) yaitu di Kecamatan Adimulyo. Begitu juga dengan risiko banjir dan kekeringan hanya di Kecamatan Adimulyo yang mempunyai risiko tinggi (skor 5).

Tabel II.11
Tabel Tingkat Kerentanan terhadap Perubahan Iklim di Kabupaten Kebumen

Kecamatan	Kerentanan	Risiko Banjir	Risiko Kering
Ayah	3	3	3
Buayan	3	3	3
Puring	3	3	3
Petanahan	3	3	3
Klirong	3	3	3
Buluspesantren	3	3	3
Ambal	3	3	3
Mirit	3	3	3
Bonorowo	3	3	3
Prembun	3	3	3
Padureso	3	3	3
Kutowinangun	3	3	3
Alian	3	3	3
Poncowarno	3	3	3
Kebumen	3	3	3
Pejagoan	3	3	3
Sruweng	3	3	3
Adimulyo	5	5	5
Kuwarasan	3	3	3
Rowokele	3	3	3
Sempor	3	3	3
Gombong	3	3	3
Karanganyar	3	3	3
Karanggayam	3	3	3
Sadang	3	3	3
Karangsambung	3	3	3

Sumber: KLHS RPJMD Kab. Kebumen Tahun 2025-2029, 2023

Pemerintah Kabupaten Kebumen mendukung komitmen penurunan emisi Nasional. Isu perubahan iklim saat ini telah menjadi bagian dari pembangunan nasional untuk menurunkan emisi 26 persen dengan upaya sendiri dan 41 persen dengan bantuan internasional. Upaya penurunan emisi nasional ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dan peran serta pemerintah daerah untuk bersama-sama memerangi ancaman perubahan iklim global. Dalam upaya mengurangi emisi GRK nasional, sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2011 tentang Inventarisasi Gas Rumah Kaca nasional maka provinsi dan kabupaten/kota juga diwajibkan untuk melakukan inventarisasi gas rumah kaca. Sebagai salah satu kabupaten yang peduli dengan isu perubahan iklim, Kabupaten Kebumen telah menyusun dokumen profil emisi GRK tahun 2023 sebagai dokumen inventarisasi GRK yang pertama, yang meliputi empat sektor yaitu sektor energi, sektor IPPU (*Industrial Processes and Product Use*), sektor AFOLU/pertanian dan sektor limbah sebagai penghasil/penyerap emisi. Pada tahun 2023 Kabupaten Kebumen berhasil menurunkan emisi GRK sebesar 146.155,91 ton CO₂eq.

Kabupaten Kebumen mempunyai potensi keanekaragaman hayati terutama pada kawasan bentang alam karst Gombong. Hutan karst Gombong merupakan salah satu deretan hutan karst yang terletak lebih kurang 44 km di sebelah barat daya perkotaan Kebumen dan sekitar 23 km sebelah selatan perkotaan

Gombang tepatnya pada posisi 109–110° bujur timur dan 7–8° lintang selatan. Hutan ini memiliki keunikan pada bentang alam serta kekayaan jenis tumbuhannya. Jumlah keanekaragaman hayati sebanyak 382 spesies flora yang terbagi ke dalam 102 famili dan 204 spesies fauna yang tercakup dalam 103 famili. Jenis fauna ini terbagi ke dalam 178 spesies fauna terestrial dengan 84 famili dan 26 spesies fauna akuatik dengan 19 famili. Keberadaan jenis flora dan fauna tersebut pada umumnya mudah dijumpai di desa-desa, kecuali beberapa spesies.

Tabel II.12
Tabel Keadaan Flora dan Fauna Kabupaten Kebumen

Golongan	Nama Spesies		Status			
	Nama Latin	Nama Lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Dilindungi
Mamalia	<i>Muntiacus muntjac</i>	Kijang muncak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
	<i>Panthera pardus melas</i>	Macan tutul	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
	<i>Prionailurus bengalensis</i>	Kucing kuwuk	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
	<i>Manis javanica</i>	Trenggiling	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
	<i>Hystrix javanisa</i>	Landak jawa	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
	<i>Nycticebus javanicus</i>	Kukang jawa	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Aves	<i>Gallus gallus</i>	Ayam Hutan	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
	<i>Ictinateus malayensis</i>	Elang Hutan	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
	<i>Haliaeetus leucogaster</i>	Elang laut perut-putih	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
	<i>Nisaetus bartelsi</i>	Elang jawa	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
	<i>Spilornis cheela</i>	Elang ular bido	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
	<i>Accipiter trivirgatus</i>	Elang alap jambul	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
	<i>Himantopus himantopus</i>	Gagang bayam belang	Tidak	Tidka	Ya	Tidak
	<i>Falco moluccensis</i>	Alap-alap sapi	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
	<i>Lonchura oryzivora</i>	Gelatik jawa	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
	<i>Zosterops flavus</i>	Kacamata jawa	Tidak	Tidka	Ya	Tidak
Malacostraca	Otus angelinae	Celepuk jawa	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
	<i>Sylla serrate</i>	Kepiting	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
	<i>Portunus pelagicus</i>	Rajungan	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
	<i>Panulirus homarus</i>	Lobster hijau	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
	<i>Panulirus polyphafus</i>	Lobster bambu	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
	<i>Panulirus pencillatus</i>	Lobster batu	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
	<i>Panulirus longipes</i>	Lobster merah	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
	<i>Panulirus ornatus</i>	Lobster mutiara	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Pisces	<i>Anguilla spp.</i>	Sidat	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Reptil	<i>Crocodylus porosus</i>	Buaya muara	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
	<i>Chelonia mydas</i>	Penyu hijau	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
	<i>Lepidochelys olivacea</i>	Penyu lekang	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
	<i>Dermochelys coriacea</i>	Penyu belimbing	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Insecta	<i>Troides helena</i>	Kupu-kupu raja Helena	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
	<i>Aerides adorate</i>	Anggrek asam	Tidak	Ya	Ya	Tidak

Golongan	Nama Spesies		Status			
	Nama Latin	Nama Lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Dilindungi
Flora yang dilindungi	Dalbergia latifolia	Sonokeling	Tidak	Ya	Ya	Tidak
	Nypa fruiticans	Nipah	Tidak	Ya	Ya	Tidak
	Pteropermum javanicum	Bayur	Tidak	Ya	Ya	Tidak
	Alstonia scholaris	Pulai	Tidak	Ya	Ya	Tidak
	Antidesma bunius	Buni	Tidak	Ya	Ya	Tidak
	Archidendron pauciflorum	Jengkol	Tidak	Ya	Ya	Tidak
	Artocarpus elasticus	Terap	Tidak	Ya	Ya	Tidak
	Baccaurea dulcis	Gowok	Tidak	Ya	Ya	Tidak
	Baccaurea racemose	Kepundung	Tidak	Ya	Ya	Tidak
	Chrysophyllum cainito	Sawo kenitu	Tidak	Ya	Ya	Tidak
	Cinnamomum iners	Kiteja	Tidak	Ya	Ya	Tidak
	Crescentia cujete	Buah maja	Tidak	Ya	Ya	Tidak
	Ctnometra cauliflora	Nam-nam	Tidak	Ya	Ya	Tidak
	Ficus variegata	Gondang putih	Tidak	Ya	Ya	Tidak
	Flocuurtia rukam	Rukem	Tidak	Ya	Ya	Tidak
	Garcinia renghas	Mundu	Tidak	Ya	Ya	Tidak
	Inocarpus fagifer	Rengas	Tidak	Ya	Ya	Tidak
	Nauclea orientalis	Gayam	Tidak	Ya	Ya	Tidak
	Pangium edule	Klepu	Tidak	Ya	Ya	Tidak
	Sandoricum koetjape	Kluwek	Tidak	Ya	Ya	Tidak
	Pavona spp.	Kecapi	Tidak	Ya	Ya	Tidak
	Favia spp.	Terumbu karang	Tidak	Ya	Ya	Tidak
	Favites spp.	Terumbu karang	Tidak	Ya	Ya	Tidak
	Karang	Terumbu karang	Tidak	Ya	Ya	Tidak
	Goniastrea spp.	Terumbu karang	Tidak	Ya	Ya	Tidak

Sumber: KLHS RPJMD Kab. Kebumen Tahun 2025-2029, 2023

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Kebumen termasuk dalam kategori sedang. IKLH merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKLH Kabupaten Kebumen cenderung fluktuatif dikarenakan perbedaan metodologi penghitungan. Namun secara umum, pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Kebumen terus digalakkan sehingga IKLH pada tahun 2024 mencapai 69,86. Adapun kenaikan indeks ini dari tahun-tahun sebelumnya dikarenakan meningkatnya komponen Indeks Kualitas Air (53,11), Indeks Kualitas Udara (91,42), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (58,73).

Tabel II.13

Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Kebumen 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	73,92	64,43	68,17	67,16	69,86
Indeks Kualitas Air (IKA)	57,69	52,37	54,49	51,74	53,11
Indeks Kualitas Udara (IKU)	90,75	89,99	90,94	90,41	91,42
Indeks Kualitas Tutupan Lahan / Indeks Kualitas Lahan (IKTL/IKL)	70,66	37,86	49,53	50,63	58,73

Keterangan:

Penyelenggaraan perhitungan IKLH sejak tahun 2023 mengalami beberapa perubahan, yaitu:

- a. Metode perhitungan IKA dihitung dengan menggunakan rumus baru yang disebut IKA- INA. Metode IKA INA mengacu pada NSF-WQI (National Sanitation Foundation Water Quality Index).
- b. Parameter untuk perhitungan IKU mengalami perubahan dengan adanya penambahan parameter baru yaitu Particulate Matter 2.5 mikron (PM 2.5).
- c. Rumus perhitungan IKL/IKTL mengalami perubahan yaitu, semua kelas tutupan lahan (23 kelas tutupan lahan) diperhitungkan dalam menentukan besarnya nilai IKL.

Sumber: OPD Urusan Lingkungan Hidup, diolah

Peningkatan kenyamanan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan keseharian diupayakan oleh pemerintah melalui pelestarian dan pengelolaan lingkungan yang bersih dan rapi. Salah satunya dengan meningkatkan capaian pengelolaan sampah Kabupaten Kebumen. Kinerja pengelolaan sampah dilihat dari seberapa banyak sampah yang ditangani oleh pemerintah daerah dan pengurangan sampah dibagi dengan timbulan sampah dalam satu tahun, semula 37,38 persen (2020) menjadi 53,26 persen (2024). Nilai capaian ini masih belum optimal dibandingkan dengan target sampah yang harus terangkut 100 persen. Program yang dilakukan antara lain peningkatan unit penampungan sampah seperti TPS (Tempat Penampungan Sementara), TD (Transfer Depo), TPST (Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu), TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah 3R – Reduce Reuse Recycle), TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) dan Bank Sampah.

Tabel II.14

Capaian Pengelolaan Sampah Kabupaten Kebumen 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	37,38	37,16	21,34	52,45	53,26
Timbulan Sampah (ton/tahun)	148.846,66	167.590,85	169.013,40	176.363,85	178.127,49
Pendauran Ulang Sampah (ton/tahun)	19.758,18	26.214,03	32.789,78	75.952,82	78.079,50
Pengolahan Sampah (ton/tahun)	35.879,50	36.065,65	3.328,00	16.543,63	16.791,78

Pemrosesan Akhir Sampah (ton/tahun)	35.040,00	54.020,00	98.984,35	36.857,70	36.857,70
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Sumber: DLHKP Kabupaten Kebumen, diolah

Pemantapan Infrastruktur Daerah memperhatikan rencana struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis dalam Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang RTRW 2024-2044. Kebijakan pemantapan infrastruktur daerah harus memedomani kebijakan pengembangan struktur wilayah dalam rangka mendukung pengembangan sistem pusat permukiman dan jaringan prasarana wilayah. Selain itu, juga harus memperhatikan kebijakan pengembangan pola ruang wilayah yang terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya sebagai upaya mewujudkan tertib tata ruang. Pemantapan infrastruktur diprioritaskan pada kawasan strategis yang memiliki pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Kemantapan infrastruktur dilihat dari Indeks Infrastruktur Daerah yang dibentuk dari 3 indikator infrastruktur, yaitu Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum, Indeks Infrastruktur Perumahan dan Indeks Infrastruktur Perhubungan. Indeks Infrastruktur Daerah tahun 2022 sebesar 55,57 persen meningkat pada tahun 2023 menjadi 64 persen dan 63,79 persen di tahun 2024. Pencapaian indikator pembentuk Indeks Infrastruktur Daerah selama 3 tahun terakhir (2022-2023) mengalami peningkatan, yaitu Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum dari 57,89 persen (2022) menjadi 57,95 persen (2023) dan 2024 menjadi 59 persen; Indeks Infrastruktur Perumahan dari 35,26 persen (2022) menjadi 58,70 persen (2023) dan 56,6 persen di tahun 2024; dan Indeks Infrastruktur Perhubungan dari 73,55 persen (2022) menjadi 75,3 persen (2023) dan 75,78 persen di tahun 2024. Kinerja persentase pemanfaatan ruang sesuai RTRW yang dimulai sejak Tahun 2020 menunjukkan peningkatan dari 75% pada Tahun 2020 menjadi 92,35% di tahun 2024 ~~91,25% pada Tahun 2023~~ . Sementara itu, infrastruktur energi juga menjadi hal yang penting diantaranya dalam upaya mencapai ketahanan energi khususnya energi listrik dimana berdasarkan data BPS menunjukkan rumah tangga di Kabupaten Kebumen pada Tahun 2023 telah 100 persen telah memiliki sumber penerangan listrik, baik yang dikelola pemerintah maupun swadaya serta beberapa rumah tangga mendapatkan sumber daya listrik tanpa meteran. Angka ini meningkat jika dibandingkan pada Tahun 2019 sebesar 99,87 persen.

Pemenuhan jaringan irigasi dalam mendukung produktivitas kawasan budidaya pertanian terus diupayakan. Kabupaten Kebumen memiliki kawasan budidaya pertanian dengan luasan mencapai 120.695,42 ha dengan luas lahan produktif sebesar 59.723,48 ha (49,48 persen) dan tersebar di 26 kecamatan (berdasarkan analisis citra satelit bagi dasar penyusunan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang RTRW 2024-2044). Peningkatan produktivitas kawasan budidaya pertanian perlu didukung oleh penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi berupa jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier. Luasan irigasi kewenangan kabupaten mencapai 10.539 ha dan rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi dalam kondisi baik tahun 2024 sebesar 78,75 persen sehingga capaian indeks kinerja sistem irigasi kewenangan Kabupaten Kebumen pada tahun 2024 sebesar 59,21.

Peningkatan kondisi jalan mantap untuk pemenuhan sistem jaringan jalan sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang RTRW 2024-2044 dalam rangka peningkatan konektivitas intrawilayah dan antarwilayah. Jaringan jalan yang berkualitas meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas yang berdampak pada kegiatan sosial ekonomi masyarakat berjalan lancar secara merata. Proporsi jalan kondisi mantap di Kabupaten Kebumen menurun semula 78,88 persen (2019) menjadi 73,48 persen di tahun 2024. Kondisi ini tentu menjadi perhatian stakeholder dalam mewujudkan jalan yang berada dalam kondisi baik dan layak untuk dilalui, baik dari segi permukaan, struktur, maupun daya dukung terhadap beban kendaraan.

Keselamatan dan keamanan lalu lintas perlu ditingkatkan. Angka kecelakaan di Kabupaten Kebumen meningkat dari 694 kejadian (2019) menjadi 1.178 kejadian (2024) dengan jumlah korban meninggal akibat kecelakaan rata-rata mencapai 131 orang per tahun. Pemerintah Kabupaten Kebumen berkomitmen meningkatkan keselamatan dan keamanan lalu lintas dengan pemasangan rambu-rambu sebanyak 2.811 unit, APILL 58 unit dan LPJU yang terpasang 2.719 unit (2024). Berdasarkan data pada Tahun 2024 menunjukkan persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten sebesar 75,78 persen.

Kabupaten Kebumen masih menghadapi masalah permukiman kumuh, penyediaan akses hunian layak, serta pemenuhan akses terhadap sanitasi dan air minum yang aman. Kondisi luasan kawasan kumuh yang tertangani di Kabupaten Kebumen meningkat dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2022 luasan kawasan kumuh yang tertangani mencapai 52,35 hektar dan terus meningkat di setiap tahunnya hingga mencapai 83,82 hektar pada tahun 2023 dan seluas 125,92 hektar pada tahun 2024.

Gambar II.17
Grafik Luasan Kawasan Kumuh yang Tertangani, 2020-2024 (Ha)



Sumber: Disperkimhub Kabupaten Kebumen, diolah

Gambar II.18

Grafik Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, 2020-2024



Sumber: Disperkimhub Kabupaten Kebumen, diolah

Pada tahun 2024, persentase rumah tangga yang memiliki akses hunian layak telah mencapai 93,67 persen, menunjukkan cukup tingginya hunian layak oleh masyarakat Kebumen. Namun, akses terhadap sarana, prasarana dan utilitas perumahan seperti sanitasi aman dan air minum aman masih menjadi tantangan. Hingga tahun 2024, rumah tangga yang memiliki akses sanitasi aman baru mencapai 3,67 persen, sementara Penduduk dengan akses air minum aman tercatat sebesar 39,54 persen pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan perlunya upaya lebih lanjut dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dasar untuk memastikan hunian yang benar-benar layak dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

Tabel II.15

Capaian Akses Sanitasi Aman dan Akses Air Minum Aman Kabupaten Kebumen 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Akses Sanitasi Aman (%)	2,80	2,94	2,43	2,02	3,67
Akses Air Minum Aman (%)	17,54	19,05	19,64	26,74	39,54

Sumber: DISPERKIMHUB dan DPUPR Kabupaten Kebumen, diolah

2.1.2 DEMOGRAFI

Jumlah penduduk Kabupaten Kebumen akan terus bertambah berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS). BPS telah melakukan proyeksi penduduk hingga Tahun 2035 mendasari hasil Sensus Penduduk Tahun 2020. Hasil proyeksi penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2025 hingga Tahun 2029 seperti tercantum pada Tabel berikut:

Tabel II.16

Proyeksi Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029

Kelompok Usia	Penduduk Tahun 2020	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
		2025	2026	2027	2028	2029
0-4	101.069	112.365	112.590	112.678	112.617	112.400
5-9	98.436	102.177	105.010	107.681	110.077	112.133
10-14	104.958	99.121	98.869	99.126	99.897	101.126
15-19	106.148	104.958	103.936	102.595	101.155	99.923
20-24	111.865	108.407	107.849	107.738	107.825	107.731
25-29	108.222	116.596	116.869	116.319	115.228	114.015
30-34	105.747	111.761	113.487	115.502	117.560	119.284
35-39	94.901	107.535	109.205	110.392	111.311	112.317
40-44	89.804	95.606	97.835	100.511	103.390	106.093
45-49	86.478	90.010	90.872	91.769	92.804	94.140
50-54	83.879	85.735	86.243	86.878	87.625	88.443
55-59	76.029	81.862	82.438	82.825	83.114	83.412
60-64	63.238	72.490	73.970	75.312	76.486	77.465
65-69	48.767	58.018	59.873	61.730	63.544	65.256
70-74	31.856	41.940	43.761	45.452	47.065	48.677
75+	33.831	43.196	45.756	48.536	51.494	54.564
TOTAL	1.345.228	1.431.777	1.448.563	1.465.044	1.481.192	1.496.979

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Dari hasil proyeksi penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 menunjukkan tingkat kepadatan penduduk terus meningkat dari 1.073 orang/km2 menjadi 1.122 orang/km2. Sementara itu jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) terus meningkat dari 974.960 jiwa pada Tahun 2025 menjadi 1.002.823 jiwa pada Tahun 2029. Namun demikian secara proporsi terhadap total penduduk menunjukkan penurunan dari 68,09 persen pada Tahun 2025 menjadi 66,99 persen pada Tahun 2029. Penduduk usia non produktif (14 tahun ke bawah dan 65 tahun ke atas) terus meningkat baik dalam jumlah jiwa maupun proporsinya terhadap total penduduk. Penduduk usia non produktif meningkat dari 458.817 jiwa atau 31,91 persen pada Tahun 2025 menjadi 494.156 jiwa atau 33,01 persen pada Tahun 2029. Dengan meningkatnya proporsi penduduk usia non produktif dibandingkan penduduk usia produktif mengakibatkan terjadinya peningkatan angka ketergantungan dari 46,85 persen pada Tahun 2025 menjadi 49,28 persen pada Tahun 2029, menunjukkan semakin menjauh dari bonus demografi karena semakin mendekati batasan 50 persen. Dengan demikian beban yang ditanggung penduduk usia produktif semakin berat. Dikarenakan semakin meningkatnya usia harapan hidup, jumlah maupun proporsi penduduk usia lanjut semakin meningkat dari 143.154 jiwa atau 10 persen pada Tahun 2025 menjadi 168.497 jiwa atau 11,26 persen pada Tahun 2029 yang dapat meningkatkan masalah sosial utamanya bagi lansia yang kurang mampu serta munculnya penyakit

degeneratif. Secara lengkap proyeksi komposisi penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 seperti tercantum pada Tabel berikut.

Tabel II.17
Proyeksi Komposisi Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029

Uraian	Penduduk Tahun 2020	Proyeksi				
		2025	2026	2027	2028	2029
Tingkat kepadatan penduduk (orang/km ²)	1.008	1.073	1.086	1.098	1.110	1.122
Jumlah penduduk usia produktif (jiwa)	926.311	974.960	982.704	989.841	996.498	1.002.823
Persentase penduduk usia produktif terhadap total jumlah penduduk (%)	68,86	68,09	67,84	67,56	67,28	66,99
Jumlah penduduk usia non produktif (jiwa)	418.917	456.817	465.859	475.203	484.694	494.156
Persentase penduduk usia non produktif terhadap total jumlah penduduk (%)	31,14	31,91	32,16	32,44	32,72	33,01
Angka ketergantungan (%)	45,22	46,85	47,41	48,01	48,64	49,28
Jumlah penduduk usia lanjut (jiwa)	114.454	143.154	149.390	155.718	162.103	168.497
Persentase penduduk usia lanjut (I%)	8,51	10,00	10,31	10,63	10,94	11,26

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023 (data diolah)

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1 KESEJAHTERAAN EKONOMI

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kebumen meningkat. Tinjauan ekonomi Kabupaten Kebumen dapat dilihat dari Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) yang mengalami peningkatan dari Rp28.014,91 milyar (2020) menjadi Rp38.605,46 milyar (2024). Hal tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi. Distribusi PDRB Kabupaten Kebumen menurut lapangan usaha dalam setahun terakhir masih didominasi oleh Industri Pengolahan sebesar 22,69 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 19,86 persen; serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 14,34 persen. Distribusi terendah ada pada lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang yakni sebesar 0,04 persen.

Pada tahun 2024, produk yang dikonsumsi sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, yang ditunjukkan melalui Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 73,74 persen. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) memberikan kontribusi sebesar 18,50 persen sedangkan kontribusi Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 7,58 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik tidak terlalu besar. Produk Kebumen diperdagangkan ke luar daerah, baik ke luar negeri, ke provinsi lain maupun ke kabupaten lain di Indonesia. Meskipun demikian, impor mempunyai peran yang relatif besar karena permintaan domestik masih harus dipenuhi oleh produk dari impor. Perdagangan Kebumen yang direpresentasikan oleh transaksi ekspor dan impor menunjukkan bahwa nilai ekspor selalu lebih rendah dari nilai impor. Perdagangan Kebumen selalu menunjukkan posisi defisit 3-7 persen selama lima tahun terakhir. Komponen Net Ekspor Barang dan Jasa yang terus mengalami kontraksi meskipun besarnya terus berkurang menggambarkan bahwa ekonomi Kabupaten Kebumen sangat tergantung pada pengeluaran konsumsi rumah tangga.

Berdasarkan data PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2010, nilai PDRB Kabupaten Kebumen mengalami peningkatan dari Rp19.527,66 milyar (2020) menjadi Rp23.837,83 milyar (2024). Kenaikan PDRB ADHK 2010 murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,30 persen pada tahun 2024.

Pada tahun 2020, ekonomi Kabupaten Kebumen sempat mengalami kontraksi sebesar -1,45 persen. Namun, dengan berbagai upaya pemulihan ekonomi, pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 3,71 persen pada 2021; 5,79 persen pada 2022; dan sedikit melambat menjadi 5,66 persen pada 2023. Adapun pada tahun setelahnya, perlambatan masih terjadi dengan capaian pertumbuhan ekonomi 5,30 persen pada 2024.

Berdasarkan rilis data BPS, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen pada tahun 2024 yang mencapai 5,30 persen masih lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,05 persen dan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 4,98 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen Tahun 2024 ini tetap berada di posisi yang kompetitif di antara kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Gambar II.19

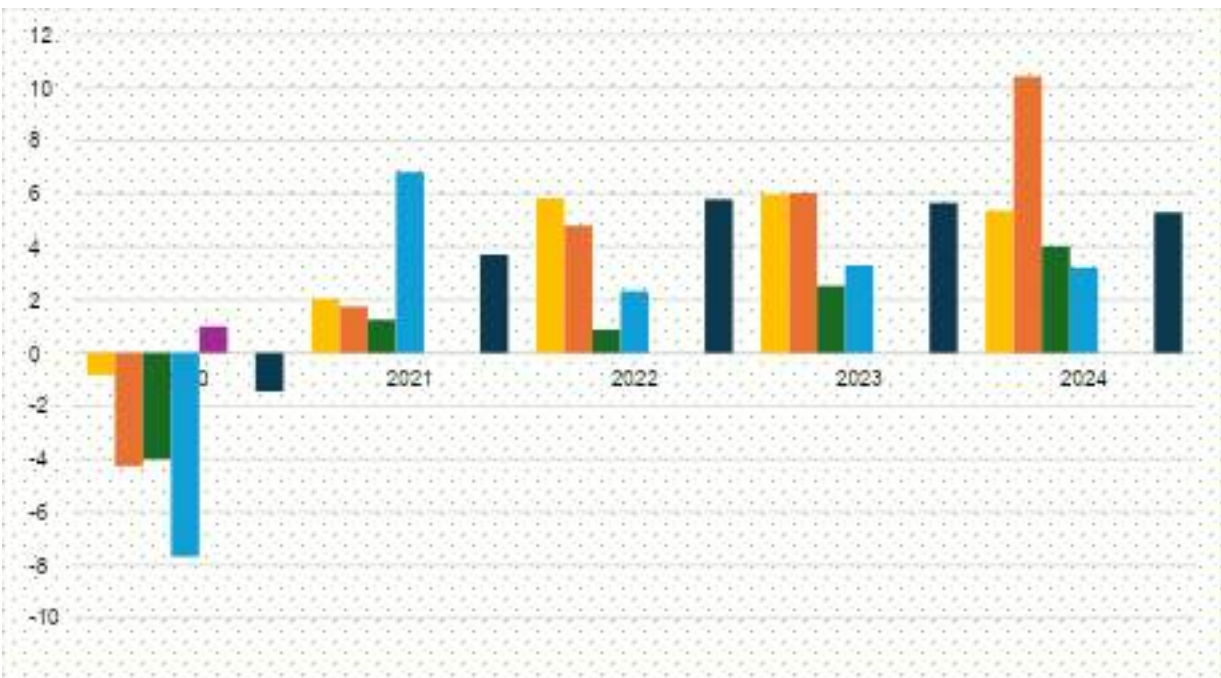
Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kebumen, 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Gambar II.20

Grafik Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran Kabupaten Kebumen, 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik,

Tingkat kesejahteraan pertanian dalam arti luas, kehutanan serta perikanan dapat dilihat melalui meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di Kabupaten Kebumen dalam rentang tahun 2020-2024. Pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi dalam rentang tahun tersebut, pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi sebesar 0,37 persen yang kemudian meningkat menjadi 4,52 persen pada tahun 2021. Terjadi penurunan yang signifikan pada tahun 2022 menjadi -1,18 persen. Pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di Kabupaten Kebumen mulai membaik pada tahun 2023 yang meningkat

menjadi 2,25 persen. Tren yang baik terus ditunjukkan hingga tahun 2024 dimana pertumbuhan ekonomi menjadi 2,59 persen.

Gambar II.21
Grafik Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kabupaten Kebumen, 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Secara umum, kontribusi sektor industri pengolahan dalam PDRB ADHB Kabupaten Kebumen mengalami kenaikan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap struktur ekonomi daerah mencapai 21,61 persen, kemudian mengalami sedikit penurunan menjadi 21,31 persen pada 2021. Selanjutnya, pada 2022, kontribusi sektor industri pengolahan mengalami peningkatan menjadi 21,78 persen dan terus bertumbuh hingga 22,24 persen pada 2023 dan 22,69 persen pada tahun 2024. Pergerakan angka ini mencerminkan peningkatan nilai tambah sektor industri pengolahan di Kabupaten Kebumen, yang terus mengalami pertumbuhan meskipun sempat mengalami penurunan kontribusi dalam perkembangannya dari tahun ke tahun.

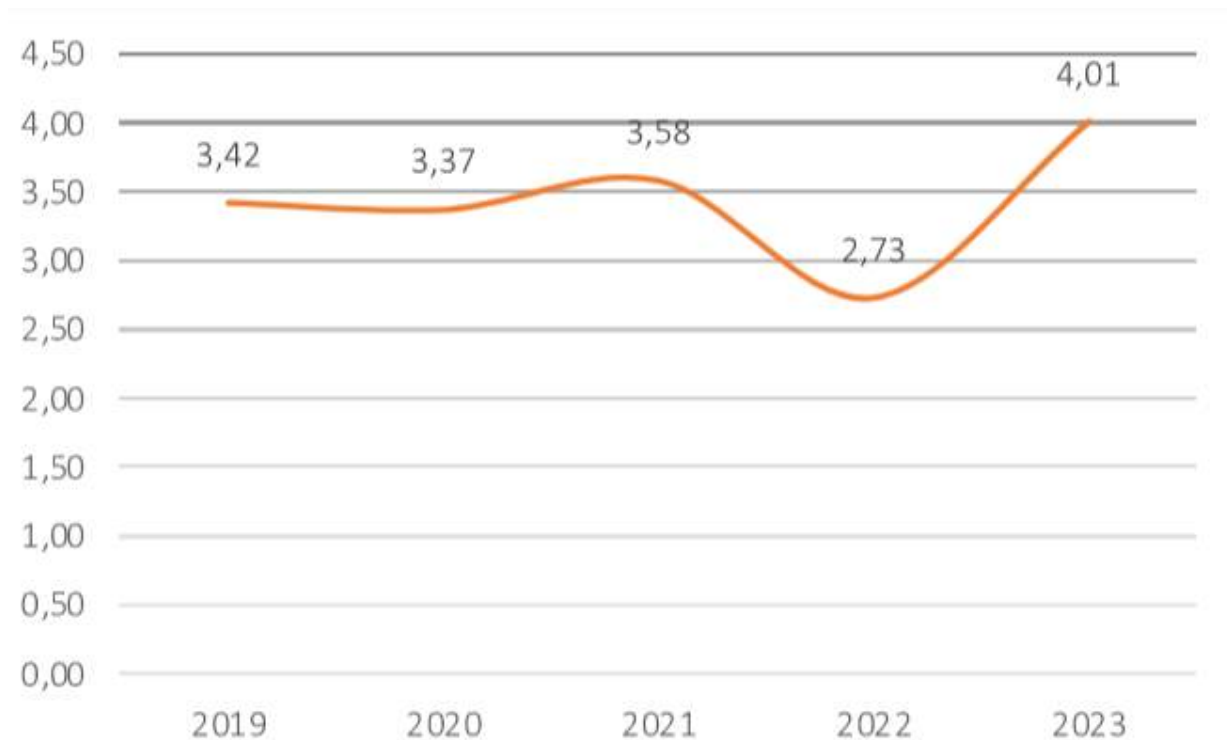
Gambar II.22.
Grafik Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB ADHB, 2020-2024 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Pemerintah Kabupaten Kebumen dapat mengembangkan sektor industri pengolahan melalui pengembangan BUMD. Tingkat *Return on Asset* (ROA) BUMD Kabupaten Kebumen tahun 2023 telah mencapai 4,01 persen. Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Kebumen telah membentuk BUMD baru yaitu Aneka Usaha Kebumen Jaya yang bergerak di beberapa sektor usaha. Diharapkan dengan pengembangan BUMD yang merupakan salah satu pendorong kenaikan derajat otonomi fiskal mampu mewujudkan kemandirian pembangunan melalui Pendapatan Asli Daerah hasil dari BUMD Kabupaten Kebumen.

Gambar II.23.
Grafik Tingkat Return on Asset (ROA) BUMD Kabupaten Kebumen, 2019-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi untuk meningkatkan produktivitas ekonomi. Persentase koperasi aktif secara umum mengalami kenaikan dari 87,11 persen pada Tahun 2020 menjadi 90,17 persen di Tahun 2024. Meskipun begitu, koperasi aktif sempat mencapai titik tertinggi di tahun 2022 dengan capaian persentase koperasi aktif sebesar 92,66 persen. Kenaikan jumlah koperasi aktif ini kurang relevan dibandingkan dengan omset koperasi yang berbanding terbalik dengan keaktifan koperasi di mana omset koperasi mengalami penurunan dari 507 milyar rupiah di tahun 2020 menjadi 180 milyar rupiah di tahun 2023. Adapun pada tahun 2024, terjadi kenaikan omset koperasi yang cukup signifikan hingga mencapai 496 milyar rupiah.

Selain geliat koperasi, kinerja usaha mikro dan kecil juga cukup baik dimana terjadi kenaikan unit usaha hingga tahun 2024 menjadi sebanyak 50.321 unit. Namun kenaikan ini tidak dibarengi dengan pembinaan usaha mikro kecil dikarenakan pada tahun 2024 hanya sebanyak 1.622 unit usaha saja yang mendapatkan pembinaan. Selain itu, terjadi penurunan usaha mikro kecil yang naik kelas dari 1.047 unit usaha di tahun 2023 menjadi hanya sebanyak 195 unit usaha di tahun 2024.



Tabel II.18
Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

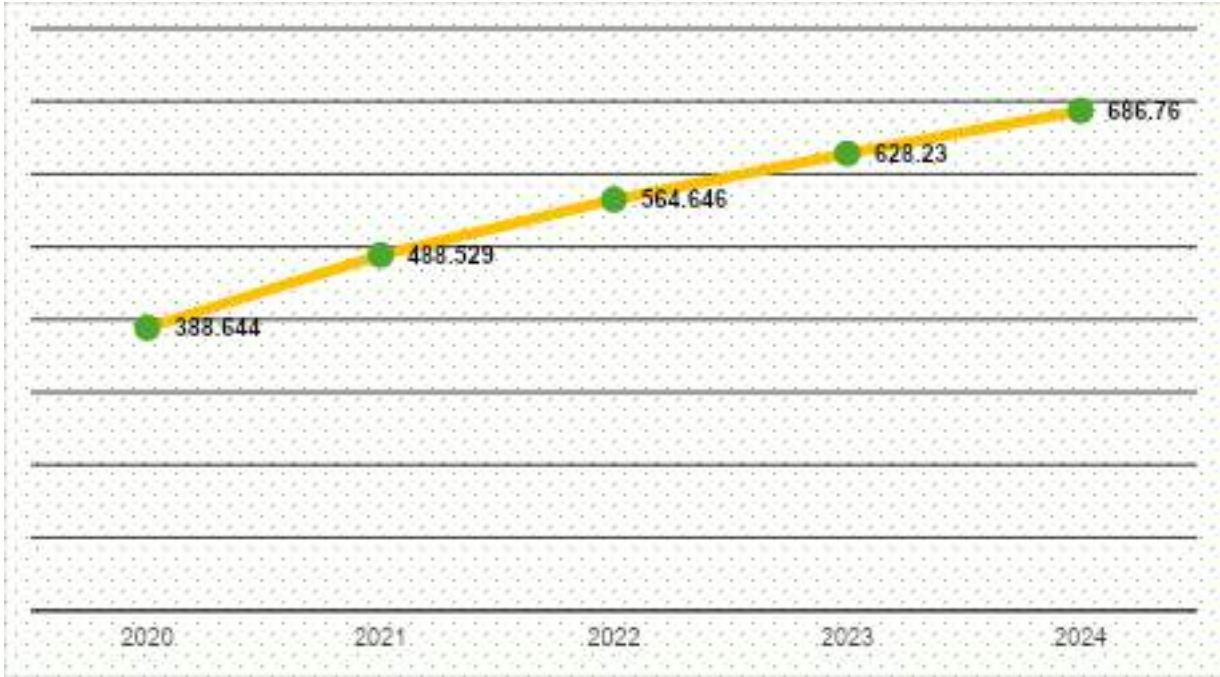
No	Uraian Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase koperasi aktif (%)	87,11	92,36	92,66	90	90,17
2	Omset Koperasi (Rp 000)	507.951.289	543.426.605	288.892.274	180.283.160	496.976.951
3	Omset per koperasi (Rp 000)	1.455.703	1.430.070	789.323	498.019.780	1.221.074
4	Usaha Mikro dan Kecil (unit)	46.460	46.100	46.100	46.095	50.321
5	Jumlah usaha mikro dan kecil yang dibina (unit)	5.500	250	1.450	1.460	1.622
6	Usaha Mikro dan Kecil yang naik kelas (unit)	76	35	1.044	1.047	195

Sumber: OPD Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2025

Peningkatan pembangunan bidang penanaman modal berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen. Nilai investasi di daerah ini menunjukkan tren yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, nilai investasi tercatat sebesar Rp388,644 miliar, kemudian mengalami peningkatan menjadi Rp488,529 miliar pada tahun 2021. Kenaikan ini terus berlanjut pada tahun 2022 dengan nilai investasi mencapai Rp564,646 miliar dan kembali meningkat menjadi Rp628,23 miliar pada tahun 2023 dan Rp686,76 miliar pada tahun 2024.

Peningkatan investasi ini mencerminkan kepercayaan investor terhadap potensi ekonomi yang dimiliki Kabupaten Kebumen, didukung oleh berbagai upaya pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Berbagai kemudahan dalam perizinan, insentif bagi investor, serta pengembangan infrastruktur menjadi faktor utama dalam menarik minat investasi. Dengan tren yang positif ini, Kabupaten Kebumen memiliki peluang besar untuk terus meningkatkan daya saing dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat.

Gambar II.24.
Grafik Realisasi Investasi (Miliar Rp.), 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Pembangunan bidang pariwisata untuk pengembangan investasi sebagai pusat pertumbuhan baru terus ditingkatkan. Jumlah kunjungan wisatawan terus meningkat dari 854.315 orang pada tahun 2020 menjadi 2.614.639 orang pada tahun 2024. Data BPS juga menunjukkan terdapat 23 wisatawan mancanegara yang mengunjungi Kabupaten Kebumen pada tahun 2024, meningkat dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebanyak 11 orang. Kunjungan wisata yang meningkat ini berpengaruh pada sektor penyediaan akomodasi makan dan minum. Dengan tren pertumbuhan wisatawan yang positif, sektor ini berpotensi terus berkembang, memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat Kabupaten Kebumen.

Gambar II.25.
Grafik Jumlah Kunjungan Wisatawan, 2020-2024

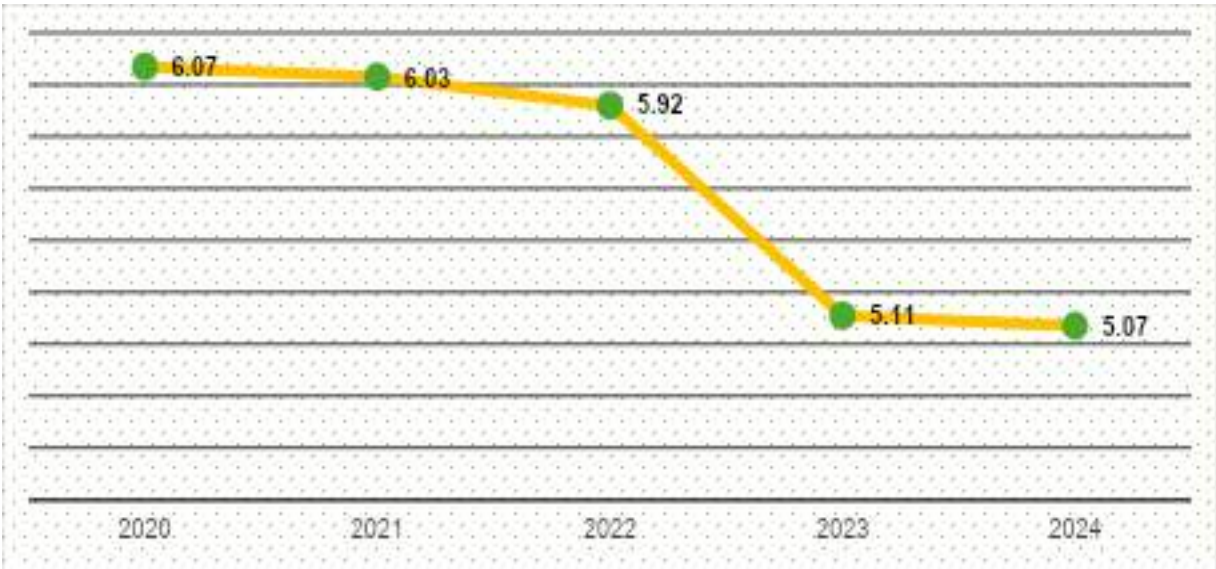


Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Pembangunan bidang ketenagakerjaan harus terus ditingkatkan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Proporsi penduduk berusia 15-64 tahun (usia produktif) Kabupaten Kebumen meningkat semula 63,77 persen (2011) menjadi 68,49 persen (2022). Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) yang mencerminkan kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja di Kabupaten Kebumen juga meningkat dari 68,48 persen (2019) menjadi 74,54 persen (2023).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kebumen memiliki pola positif dalam lima tahun terakhir pelaksanaan pembangunan. TPT mengalami penurunan dari 6,07 persen pada 2020 menjadi 6,03 persen pada 2021. Selanjutnya, angka pengangguran kembali menurun dari 5,92 persen pada 2022 menjadi 5,11 persen pada 2023 dan mencapai 5,07 persen pada 2024. Penurunan ini mencerminkan adanya peningkatan penyerapan angkatan kerja yang lebih baik. Namun perlu dikaji kembali terkait kualitas dan produktivitas tenaga kerjanya agar mampu meningkatkan kesejahteraan rumah tangga di masa mendatang.

Gambar II.26.
Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kabupaten Kebumen, 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah.

PDRB per kapita Kabupaten Kebumen mengalami peningkatan dari Rp20.800 ribu pada tahun 2020 menjadi Rp21.690 ribu pada tahun 2021. Kenaikan ini menunjukkan adanya pemulihan ekonomi di tengah tantangan pandemi COVID-19. Selanjutnya, pada tahun 2022 hingga 2023, PDRB per kapita terus meningkat dari Rp23.630 ribu menjadi Rp25.590 ribu, dan meningkat kembali menjadi Rp27.290 ribu pada tahun 2024, yang mengindikasikan daya dorong ekonomi yang tetap kuat. Peningkatan ini didukung adanya peningkatan kinerja produksi sektor-sektor unggulan khususnya sektor ekonomi industri pengolahan, pertanian dan perdagangan.

Gambar II.27.

Grafik PDRB Per Kapita Kabupaten Kebumen, 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah.

Tabel II.19

Perbandingan Indeks Harga Konsumen dan Inflasi di 6 Kota
Lokasi Survei Biaya Hidup di Jawa Tengah Tahun 2023

Lokasi Survei Biaya Hidup (SBH)	IHK	Inflasi
Gabungan 6 Kota di Jawa Tengah	116,62	2,89
Cilacap	116,49	2,69
Purwokerto	117,08	2,61
Kudus	116,47	2,96
Kota Surakarta	118,52	3,2
Kota Semarang	116,05	2,84
Kota Tegal	118,46	3,28

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Gambar II.28.

Inflasi Antar Wilayah Cakupan IHK, Desember 2024

Kabupaten/Kota	IHK	Inflasi Y-on-Y (%)	Inflasi M-to-M (%)	Inflasi Y-to-D (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Cilacap	106,78	1,82	0,52	1,82
Purwokerto	106,16	1,51	0,59	1,51
Kabupaten Wonosobo	109,00	1,52	0,72	1,52
Kabupaten Wonogiri	107,90	1,77	0,75	1,77
Kabupaten Rembang	110,43	1,54	0,56	1,54
Kudus	107,08	1,71	0,59	1,71
Kota Surakarta	107,07	1,50	0,53	1,50
Kota Semarang	106,09	1,69	0,50	1,69
Kota Tegal	107,57	2,19	0,48	2,19
JAWA TENGAH	107,07	1,67	0,57	1,67

Sumber: Rilis BPS 2 Januari 2025

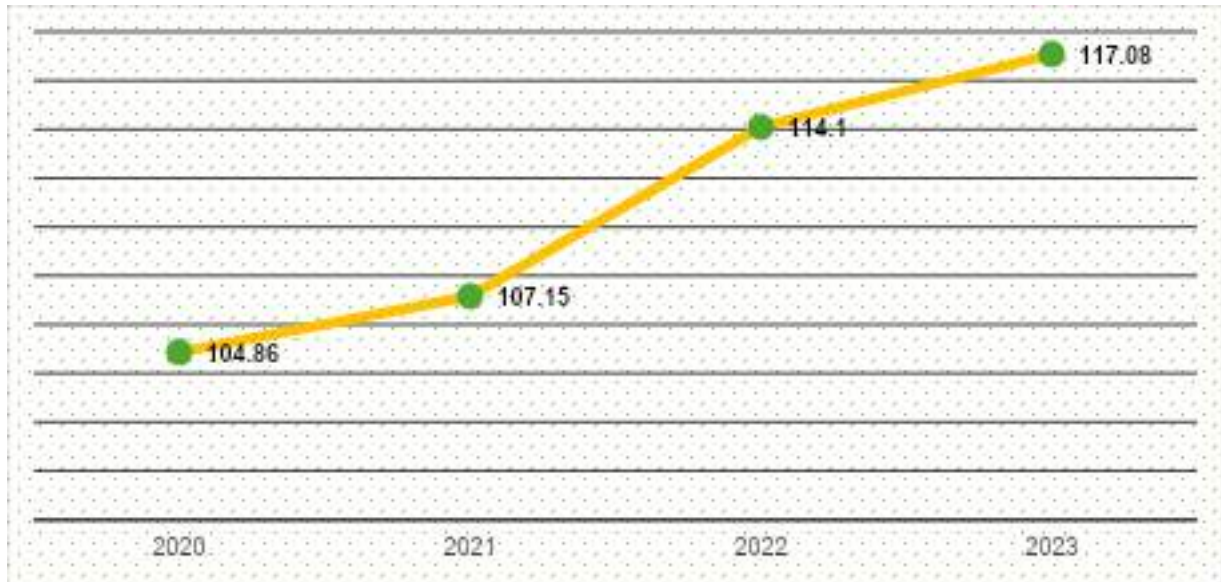
Perkembangan inflasi Kabupaten Kebumen dari representasi inflasi Purwokerto menunjukkan tingkat inflasi tahun ke tahun (Desember 2023 terhadap Desember 2022) sebesar 2,61 persen, meningkat dibandingkan tingkat inflasi tahun ke tahun (Desember 2020 terhadap Desember 2019) sebesar 1,9 persen. Indeks Harga Konsumen (IHK) tahun ke tahun (Desember 2023 terhadap Desember 2022) sebesar dari 117,08 meningkat dibandingkan IHK tahun ke tahun (Desember 2020 terhadap Desember 2019) sebesar 104,86 pada Desember 2023.

Gambar II.29.
Grafik Inflasi Tahunan Purwokerto Tahun 2020-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Gambar II.30.
Grafik IHK Tahunan Purwokerto Tahun 2020-2023

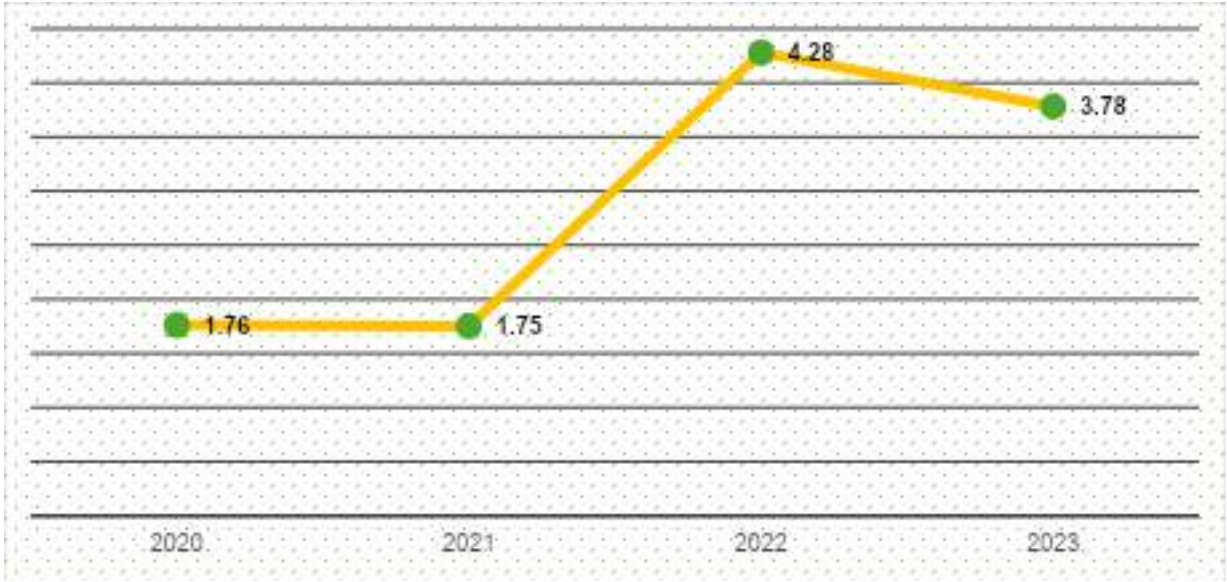


Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Sebagai perbandingan berdasarkan PDRB deflator, data Laju Indeks Implisit PDRB Kabupaten Kebumen pada Tahun 2023 sebesar 3,78 yang menunjukkan perubahan harga. Berbeda dengan perhitungan inflasi secara umum yang biasanya menggunakan IHK dan IHP (Indeks Harga Produsen), sebagai

perbandingan perhitungan inflasi secara deflator ini menunjukkan perubahan harga seluruh sektor PDRB mencakup semua barang dan jasa dalam perekonomian baik harga bahan baku, produk setengah jadi, produk akhir, dan layanan/jasa.

Gambar II.31.
Grafik Laju Implisit PDRB Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Pembangunan daerah dimulai dari keberhasilan pembangunan desa. Sesuai Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, indikator keberhasilan pembangunan desa yaitu Indeks Desa Membangun (IDM) yang merupakan Indeks Komposit dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/ Lingkungan. IDM menggambarkan kemandirian desa berdasarkan konsepsi bahwa desa maju mandiri mengedepankan pembangunan berkelanjutan di seluruh aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan saling mengisi dalam menjaga potensi desa untuk menyejahterakan kehidupan desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Semakin tingginya jumlah desa mandiri menunjukkan tingkat pembangunan desa yang semakin baik yang didukung dengan komponen pendukung yang termuat dalam 6 (enam) dimensi pengukurannya yaitu layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan desa.

Dari 449 total desa di Kabupaten Kebumen, hingga tahun 2024 telah mencapai 152 desa yang masuk kategori desa mandiri. Kenaikan yang signifikan jumlah desa dengan status mandiri sejak tahun 2023 dikarenakan semakin intensifnya pendampingan dalam pengisian indikator dan pemutakhiran data kepada desa sehingga dapat meningkatkan nilai dan juga disebabkan oleh meningkatnya pemahaman para kepala desa beserta

jajarannya untuk mengisi indikator sesuai dengan keadaan di desanya masing-masing. Motivasi desa juga semakin meningkat karena bagi desa yang dapat mencapai kategori mandiri akan mendapatkan tambahan dana alokasi kinerja. Hal ini menyebabkan persentase desa mandiri di Kabupaten Kebumen terus meningkat dari 0,22% pada Tahun 2020 menjadi 33,85% pada Tahun 2024.

Sementara itu, jumlah desa maju juga terus meningkat dari 90 desa pada Tahun 2020 menjadi 246 desa pada Tahun 2024. Hal ini menyebabkan Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Kebumen terus meningkat dari 0,6709 pada Tahun 2020 menjadi 0,8864 pada Tahun 2024. Selain itu sejak Tahun 2022 sudah tidak ada lagi desa di Kabupaten Kebumen yang masuk kategori desa tertinggal maupun sangat tertinggal.

Tabel II.20
Profil Kemajuan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2020 – Tahun 2024

No	Klasifikasi	2020	2021	2022	2023	2024
1	Desa mandiri	1	1	5	60	152
2	Desa maju	90	123	194	261	246
3	Desa berkembang	348	319	250	128	51
4	Desa tertinggal	10	6	0	0	0
5	Desa sangat tertinggal	0	0	0	0	0
6	Persentase Desa Mandiri (%)	0,22	0,22	1,11	13,36	33,85
7	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,6709	0,6861	0,6978	0,758	0,8864

Sumber: Dinas PMD Kabupaten Kebumen, 2024

Pembangunan Manusia (IPM) mengalami perbaikan dan tumbuh lebih baik. Konsep pembangunan manusia pertama kali diperkenalkan pada tahun 1990 oleh *United Nation Development Programme* (UNDP). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu mencakup umur yang panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*); pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kebumen pada tahun 2024 mencapai 72,48. Angka tersebut mengalami peningkatan 0,83 poin dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 71,88. Berdasarkan skala internasional (UNDP), capaian IPM dikategorikan menjadi kategori sangat tinggi ($IPM \geq 80$), kategori tinggi ($70 \leq IPM < 80$), kategori sedang ($60 \leq IPM < 70$), dan kategori rendah ($IPM < 60$). Dengan demikian sejak Tahun 2020, kualitas pembangunan manusia Kabupaten Kebumen telah dianggap masuk kategori tinggi.

Gambar II.32.
Grafik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kebumen, 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Kebumen, 2025

Dalam empat tahun terakhir, pembangunan manusia di Kabupaten Kebumen terus mengalami kemajuan. IPM Kabupaten Kebumen meningkat dari 69,81 pada tahun 2020 menjadi 72,48 pada tahun 2024. Selama periode tersebut, IPM Kabupaten Kebumen rata-rata tumbuh sebesar 0,90 persen per tahun. IPM Kabupaten Kebumen tahun 2021 tercatat sebesar 70,56 atau tumbuh 1,03 persen. Namun demikian, setelah dua tahun lebih pandemi COVID-19 melanda Kabupaten Kebumen, IPM mulai mengalami pemulihan di tahun 2023 dengan pertumbuhan sebesar 0,83 persen dan di tahun 2024 tumbuh sebesar 0,83 persen. Pertumbuhan IPM pada tahun 2024 meningkat meskipun terjadi perlambatan pada capaian rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

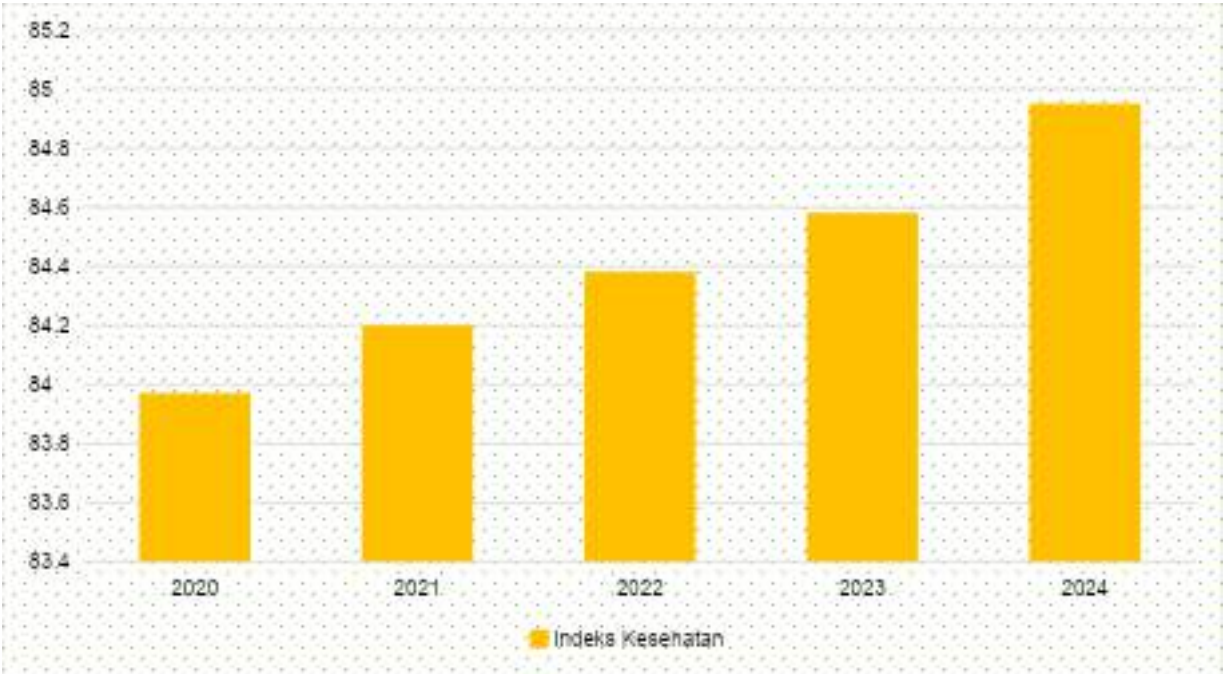
Gambar II.33.
Grafik Usia Harapan Hidup, 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik 2025, diolah

Peningkatan IPM terjadi pada semua dimensi. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diukur dengan Usia Harapan Hidup (UHH). UHH menunjukkan derajat kesehatan suatu negara dimana semakin tinggi harapan hidup saat lahir suatu negara, maka semakin tinggi pula derajat kesehatannya. Capaian UHH mengalami peningkatan dari 74,73 pada tahun 2021 menjadi 75,22 pada tahun 2024. Pada 2021, UHH Kabupaten Kebumen mampu tumbuh sebesar 0,20 persen, kemudian pada periode berikutnya terus melambat hingga pada 2023 tercatat tumbuh 0,17 persen. Pada tahun 2024, pertumbuhan UHH Kabupaten Kebumen meningkat yaitu sebesar 0,32 persen. Banyak faktor yang mempengaruhi pencapaian ini, diantaranya angka kematian (mortalitas), angka kesakitan (morbiditas) serta sumber daya dalam sistem kesehatan seperti jumlah dokter, lama rawat inap, tingkat imunisasi, level edukasi, dan teknologi. Adapun indikator pengukur keberhasilan Kesehatan dapat dilihat melalui indeks kesehatan. Terjadi peningkatan indeks kesehatan dalam rentang tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada tahun 2020 indeks kesehatan sebesar 83,97 yang meningkat menjadi 84,95 pada tahun 2024. Hal tersebut juga mendukung meningkatnya indeks Pembangunan manusia di Kabupaten Kebumen.

Gambar II.34.
Grafik Indeks Kesehatan, 2020-2024



Sumber: Data diolah

Pada dimensi pendidikan yang diwakili oleh indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, secara umum kedua indikator ini memiliki peningkatan di setiap tahunnya dimana angka rata-rata lama sekolah 7,87 tahun dan harapan lama sekolah 13,39 tahun. Rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2022 hingga mencapai 3,97 persen, namun melandai kembali hingga tahun 2024 7,87 tahun. Angka ini mengindikasikan bahwa masyarakat yang berusia 25 tahun ke atas memiliki rata-rata mengenyam pendidikan selama 7,87 tahun atau baru menduduki jenjang pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama).

Gambar II.35.
Grafik Rata-Rata Lama Sekolah, 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik 2025, diolah

Adapun pada pencapaian harapan lama sekolah, terjadi peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2024 dengan peningkatan mencapai 0,15 persen. Meskipun demikian, kenaikan harapan lama sekolah sebelum tahun 2024 cukup rendah di setiap tahunnya, hanya berkisar 0,01 poin dimana pada tahun 2020 memiliki harapan lama sekolah selama 13,34 tahun dan menjadi 13,39 tahun pada tahun 2024.

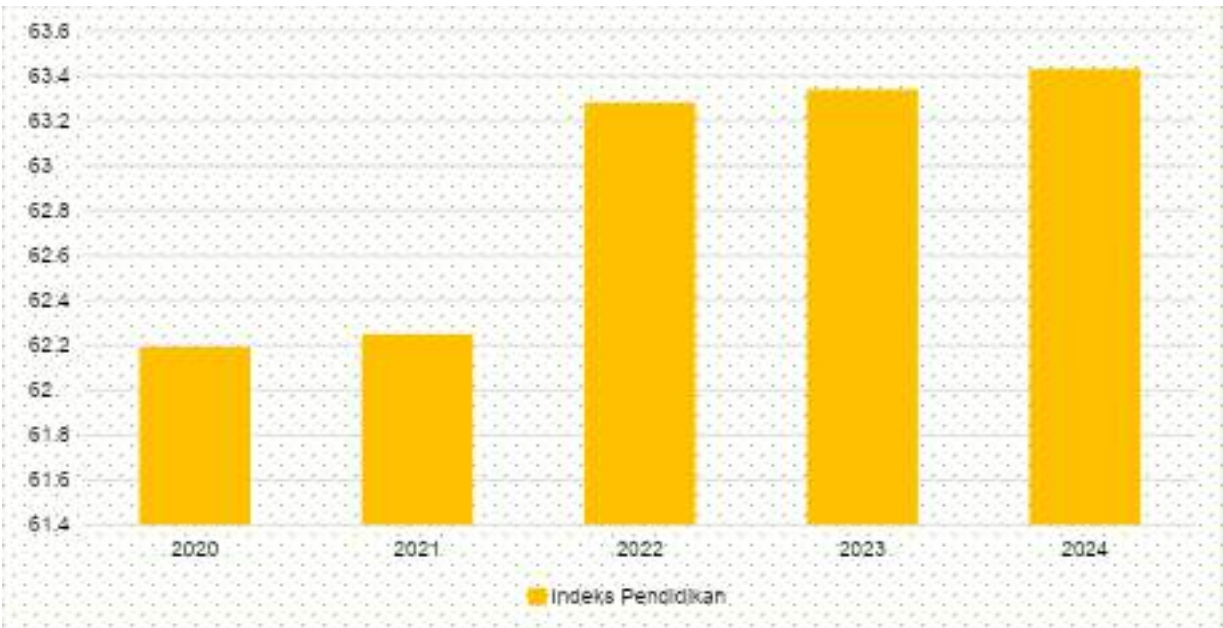
Gambar II.36.
Grafik Harapan Lama Sekolah, 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik 2025, diolah

Meningkatnya indeks pembangunan manusia juga didukung oleh indikator pengukur pendidikan lainnya yaitu indeks pendidikan. Indeks pendidikan mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2024 sebesar 63,43 jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang hanya sebesar 62,19.

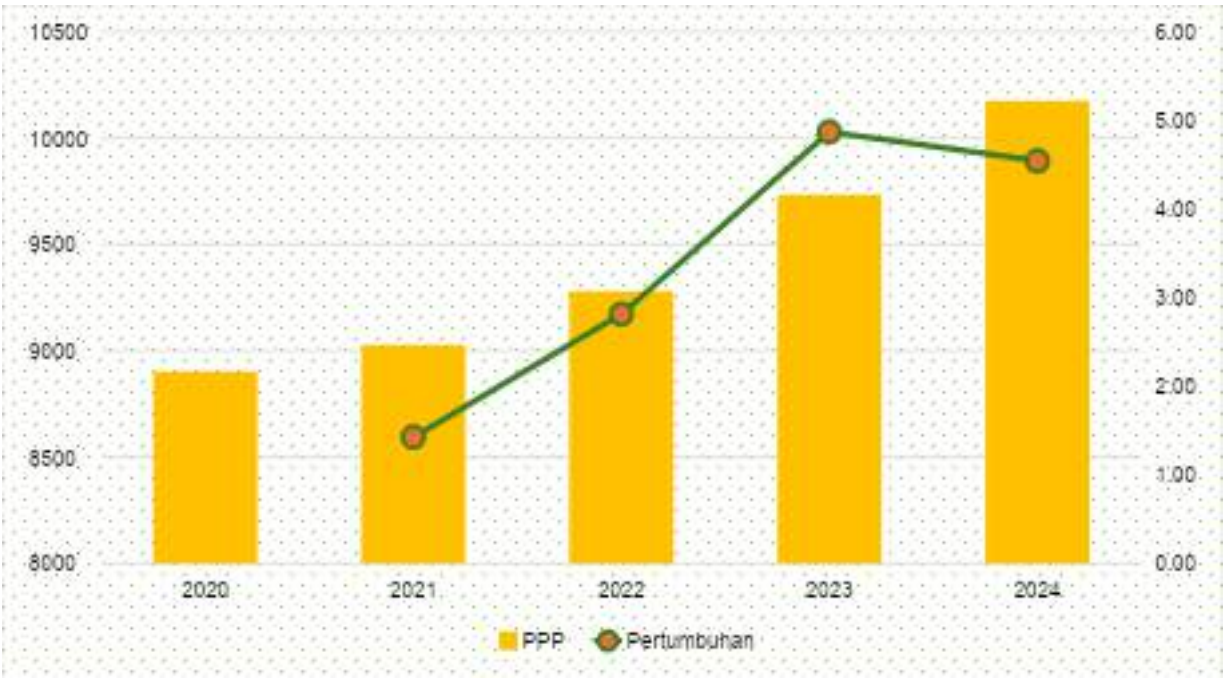
Gambar II.37.
Grafik Indeks Pendidikan, 2020-2024



Sumber: Data diolah

Dimensi standar hidup layak diwakili oleh indikator pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan, menggambarkan kemampuan daya beli masyarakat selama periode tertentu. Capaian pengeluaran riil per kapita memiliki tren yang terus meningkat sepanjang tahun. Pengeluaran per kapita di tahun 2020 sebesar Rp.8.901 ribu meningkat menjadi Rp.10.176 ribu pada tahun 2024. Peningkatan ini selain disebabkan adanya inflasi, juga mengindikasikan semakin meningkatnya pendapatan masyarakat Kebumen sehingga mampu meningkatkan pengeluaran konsumsi hingga mencapai 4,54 persen di tahun 2024.

Gambar II.38.
Grafik Pengeluaran per Kapita, 2020-2024 (Ribu)



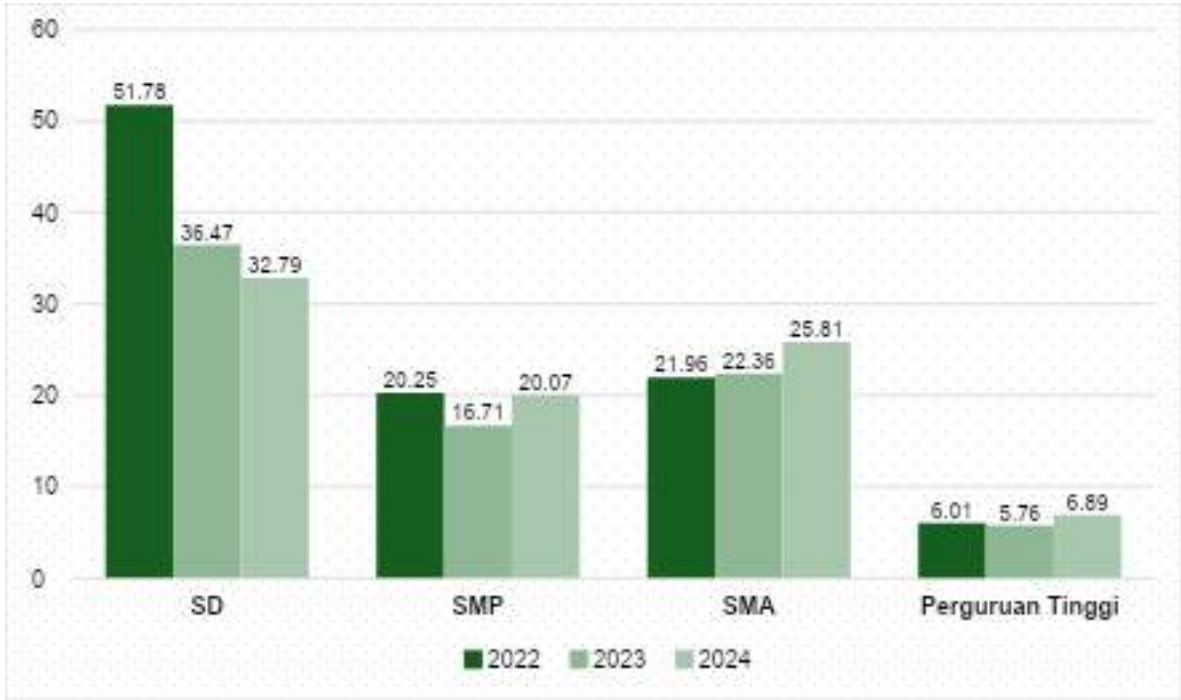
Sumber: Badan Pusat Statistik 2025, diolah

Berdasarkan data Susenas 2022 hingga 2024, mayoritas **penduduk usia 15 tahun ke atas yang termasuk dalam angkatan kerja** memiliki tingkat pendidikan tertinggi pada jenjang SD. Pada tahun 2022, proporsi angkatan kerja dengan pendidikan tertinggi SD mencapai 51,78 persen, tetapi mengalami penurunan signifikan menjadi 32,79 persen pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan adanya pergeseran ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan peningkatan proporsi lulusan SMA dalam angkatan kerja, dari 21,96 persen pada 2022 menjadi 25,81 persen pada 2024. Begitu pula dengan lulusan perguruan tinggi yang meningkat dari 6,01 persen pada 2022 menjadi 6,89 persen pada 2024. Sementara itu, proporsi lulusan SMP mengalami sedikit penurunan dari 20,25 persen pada 2022 menjadi 20,07 persen pada 2024.

Tren ini mengindikasikan adanya peningkatan akses dan partisipasi dalam pendidikan menengah dan tinggi, yang dapat berdampak positif pada peningkatan kualitas tenaga kerja di masa depan. Namun, meskipun proporsi lulusan SD dalam angkatan kerja terus menurun, angka tersebut masih cukup tinggi, sehingga peningkatan keterampilan melalui pendidikan vokasi dan pelatihan kerja perlu didorong untuk memastikan daya saing tenaga kerja yang lebih baik. Selain itu, peningkatan proporsi lulusan SMA dan perguruan tinggi

menunjukkan adanya potensi peningkatan kualitas tenaga kerja, tetapi harus diimbangi dengan kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan kerja yang sesuai dengan kualifikasi mereka.

Gambar II.39.
Grafik Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Terakhir Ditamatkan, 2022-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Partisipasi pendidikan harus ditingkatkan. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun pada tingkat pendidikan PAUD meningkat dari 41 persen (2019) menjadi 82,57 persen (2023), namun partisipasi pada pendidikan dasar cenderung menurun. Masih terdapat penduduk yang tidak sedang mengikuti pendidikan formal akibat putus sekolah atau bahkan tidak/belum pernah sekolah, dimana Angka Putus Sekolah SD/MI sebesar 0,0083 persen dan SMP/MTs sebesar 0,12 persen. Upaya peningkatan partisipasi pendidikan dilakukan melalui pendidikan kesetaraan. Penduduk usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan mencapai 100 persen setiap tahunnya dari tahun 2019 hingga tahun 2023.

Tabel II.21
Capaian Kinerja Partisipasi Pendidikan Menurut Kelompok Usia dan Jenjang Pendidikan Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	41	41,38	44,86	47,85	82,57
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	110	108,57	107,92	108,17	108,92
Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	90	90,69	92,67	71,75	95,25
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan	100	100	100	100	100

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan					
Angka Putus Sekolah SD/MI	0	0,06	0,09	0,0059	0,0083
Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0	0,16	0,3	0,016	0,12

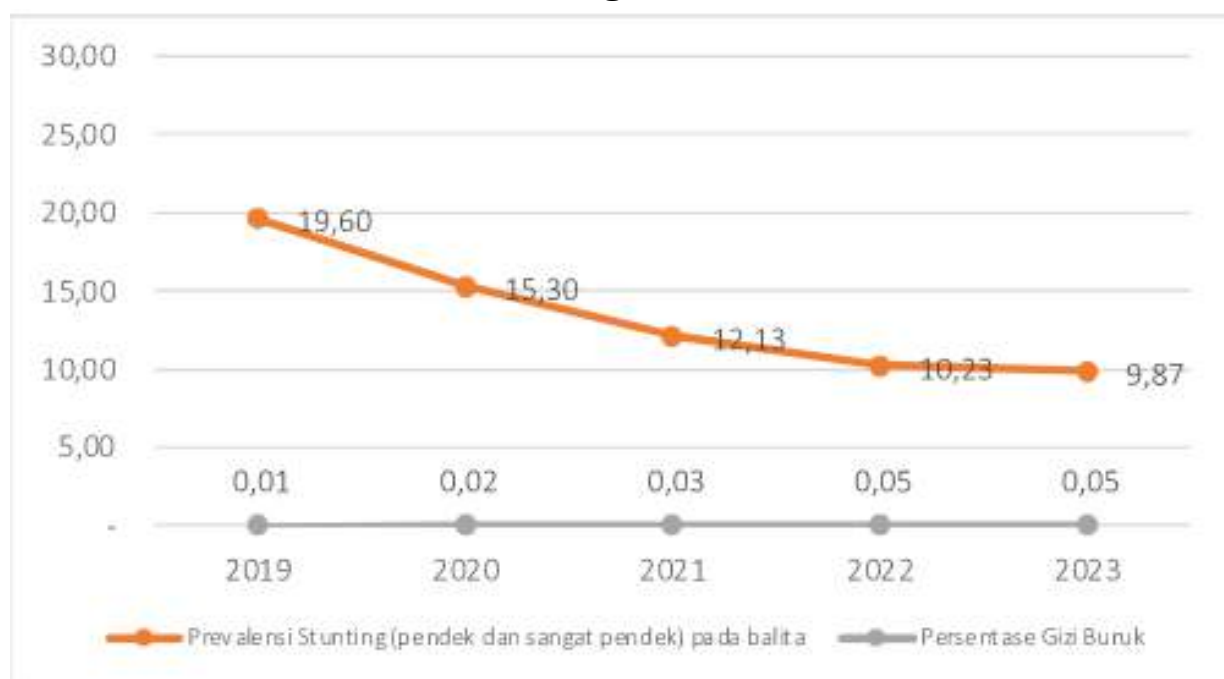
Sumber: OPD Urusan Pendidikan, diolah, 2024

Peningkatan kualitas pendidikan sangat bergantung pada **kemampuan literasi dan numerasi** siswa, yang menjadi fondasi utama dalam pengembangan keterampilan berpikir kritis dan analitis. Berdasarkan data Rapor Pendidikan, terjadi peningkatan signifikan dalam kemampuan literasi membaca dan numerasi siswa SD dan SMP antara tahun 2022 hingga 2024. Kemampuan literasi membaca siswa SD meningkat dari 58,59 persen pada 2022 menjadi 84,28 persen pada 2024, sementara siswa SMP mengalami peningkatan dari 79,1 persen pada 2022 menjadi 87,29 persen pada 2024. Tren positif ini menunjukkan bahwa berbagai upaya peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah mulai membuahkan hasil, terutama dalam aspek pemahaman teks dan kemampuan membaca yang lebih mendalam.

Di sisi lain, kemampuan numerasi siswa juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Numerasi siswa SD meningkat dari 42,83 persen pada 2022 menjadi 73,69 persen pada 2024, sementara numerasi siswa SMP mengalami kenaikan dari 57,69 persen pada 2022 menjadi 82,34 persen pada 2024. Meskipun peningkatan ini menggembirakan, numerasi siswa SD masih berada di bawah standar kompetensi minimum 75 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa masih diperlukan intervensi lebih lanjut, seperti metode pembelajaran yang lebih aplikatif dan berbasis pemecahan masalah, agar siswa dapat lebih memahami konsep-konsep matematika secara lebih baik. Secara keseluruhan, peningkatan ini mencerminkan kemajuan dalam mutu pendidikan, tetapi juga menegaskan perlunya strategi yang lebih intensif untuk memastikan semua siswa mencapai kompetensi dasar yang diharapkan.

Sumber: OPD Urusan Perpustakaan, diolah

Grafik Stunting dan Gizi Buruk, 2019-2023



Sumber: OPD Urusan Kesehatan, diolah

Keterangan: *) data tahun sebelumnya

Kondisi kesehatan yang buruk akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan dan angka mortalitas. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Blum (1974), bahwa derajat kesehatan penduduk suatu negara dapat diukur dari angka kematian (mortalitas) dan angka kesakitan (morbiditas). Angka morbiditas di Kabupaten Kebumen tahun 2019 hingga saat pandemi COVID-19 tahun 2020 mengalami peningkatan, yakni dari 20,18 (2019) naik menjadi menjadi 21,52 pada 2020, kemudian turun menjadi 14,24 pada tahun 2021 dan 2022. Kondisi 2021 dan 2022 mengindikasikan keberhasilan upaya pemulihan pasca pandemi COVID-19. Pada tahun 2023 kembali terjadi kenaikan, mengindikasikan terjadi perubahan gaya hidup, peningkatan penyakit menular, masalah lingkungan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Tuberkulosis (TBC) saat ini masih merupakan masalah kesehatan masyarakat baik di Indonesia maupun internasional sehingga menjadi salah

satu tujuan pembangunan kesehatan berkelanjutan (SDGs). TBC adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh kuman *Mycobacterium tuberculosis*. Indonesia merupakan negara ke-2 tertinggi penderita TBC. Hal tersebut mendorong pengendalian TBC nasional terus dilakukan dengan intensifikasi, akselerasi, ekstensifikasi dan inovasi program. Angka notifikasi kasus atau *Case Notification Rate* (CNR) di wilayah Kabupaten Kebumen meningkat, semula 180 per 100.000 penduduk (2019) naik menjadi 209 per 100.000 penduduk (2023). Upaya penanganan TBC hingga tahun 2023 terus dilakukan, ditunjukkan cakupan penemuan dan pengobatan kasus TBC (*treatment coverage*) mencapai sebesar 95 persen serta angka keberhasilan pengobatan TBC (*treatment success rate*) mencapai sebesar 83 persen.

Tabel II.23
Capaian Kinerja Pencegahan dan Penanganan Kasus Tuberculosis Kabupaten Kebumen, Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka Notifikasi Kasus (Case Notivication Rate/CNR) Per 100.000	180	99	151	192	209
2	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberculosis (<i>treatment coverage</i>)	n/a	n/a	79	106	95
3	Angka Keberhasilan Pengobatan	n/a	n/a	81	77	83

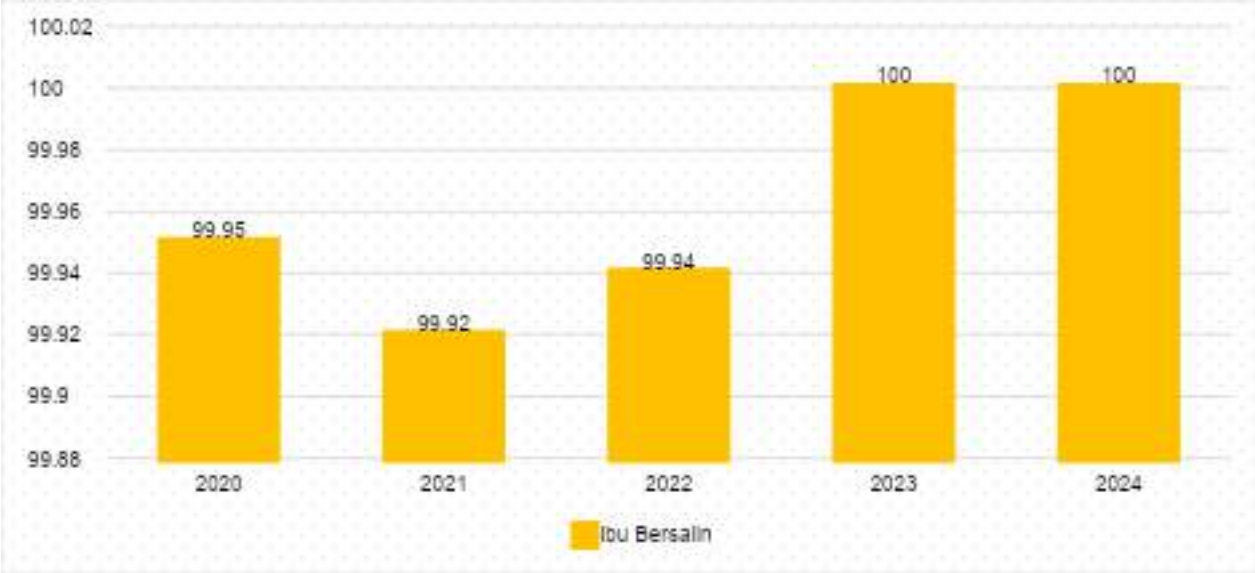
Sumber: OPD Urusan Kesehatan, diolah

Keberadaan tenaga kesehatan dalam proses persalinan sangat penting untuk memastikan penanganan cepat terhadap komplikasi seperti perdarahan atau infeksi, yang dapat mengurangi risiko kematian ibu. Berdasarkan data, persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan meningkat dari 99,95 persen pada tahun 2020 menjadi 100 persen pada tahun 2023 dan 2024. Peningkatan ini mencerminkan semakin luasnya cakupan pelayanan persalinan oleh tenaga kesehatan. Namun, meskipun akses layanan kesehatan sudah optimal, angka kematian ibu memiliki pola yang fluktuatif. Angka kematian ibu meningkat dari 76,75 per 100.000 kelahiran hidup pada 2020 menjadi 201,6 pada 2021, lalu menurun menjadi 165,3 pada 2022 dan 92,26 pada 2023, sebelum kembali meningkat menjadi 108,96 pada 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa selain akses layanan kesehatan, faktor lain seperti kualitas pelayanan, kondisi kesehatan ibu sebelum melahirkan, serta penanganan komplikasi masih menjadi tantangan utama dalam menekan angka kematian ibu.

Sementara itu, angka kematian bayi menunjukkan tren yang cenderung meningkat dari 6,96 per 1.000 kelahiran hidup pada 2020 menjadi 9,23 per 1.000 pada 2021, 10,26 per 1.000 pada 2022, dan mencapai angka tertinggi 12,49 per 1.000 pada 2023 sebelum mengalami sedikit penurunan menjadi 10,46 pada 2024. Kenaikan ini menunjukkan bahwa meskipun cakupan pelayanan persalinan telah mencapai 100 persen, kualitas perawatan bayi baru lahir masih perlu ditingkatkan. Faktor-faktor seperti deteksi dini komplikasi pada bayi, peningkatan layanan neonatal, serta edukasi kepada ibu mengenai

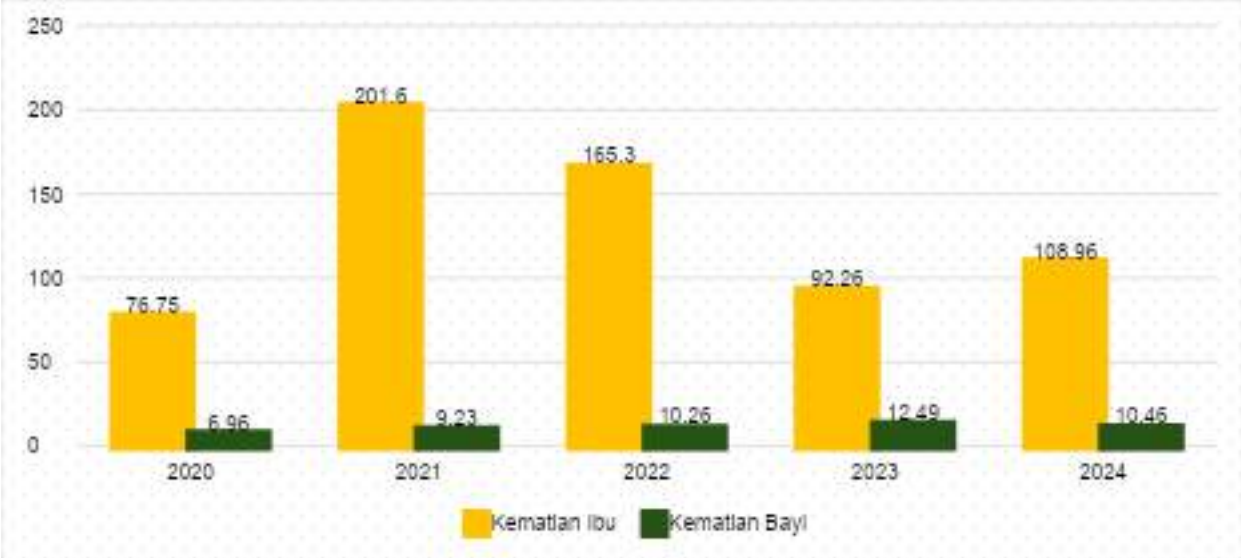
perawatan bayi baru lahir perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Oleh karena itu, selain memperluas cakupan layanan, peningkatan kualitas layanan maternal dan neonatal harus menjadi prioritas guna menekan angka kematian ibu dan bayi secara efektif.

Gambar II.42.
Grafik Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan, 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Kebumen, 2025

Gambar II.43.
Grafik Kematian Ibu dan Bayi, 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Kebumen, 2025

Selain itu, sangat penting melihat kondisi kesehatan pada satuan keluarga yang memiliki lingkup dan akses hidup sehat yang memadai. Kinerja kesehatan keluarga ditunjukkan dengan Indeks Keluarga Sehat (IKS) untuk Kabupaten Kebumen pada Tahun 2021 sebesar 0,15 meningkat menjadi 0,2 pada Tahun 2023. Berdasarkan penilaian, jika $IKS < 0,5$ maka berarti IKS Kabupaten Kebumen masih masuk pada kategori keluarga tidak sehat.

Akses layanan kesehatan di Kabupaten Kebumen terus ditingkatkan. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional meningkat dari 83,7 persen (2019) menjadi 96,76 persen (2023). Terkait pelayanan dan sarana prasarana

kesehatan, jumlah rumah sakit di Kabupaten Kebumen sebanyak 11 dan telah terakreditasi. Upaya pemenuhan SPM Bidang Kesehatan yang terdiri dari 12 jenis layanan seluruhnya tercapai 100 persen, meskipun masih terdapat kendala pada pelaksanaan posbindu dimana masyarakat yang sehat enggan datang pada kegiatan *screening* kesehatan usia produktif.

Distribusi pendapatan merupakan aspek penting dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan pengeluaran riil per kapita. Indeks Gini Kabupaten Kebumen didasarkan data SUSENAS mengenai pengeluaran rumah tangga di Kabupaten Kebumen. Capaian Indeks Gini Kabupaten Kebumen lima tahun terakhir sempat meningkat menjadi 0,350 pada tahun 2021 dan 0,354 pada tahun 2022 walaupun kemudian menurun kembali menjadi 0,327 pada tahun 2024. Kondisi ini mengindikasikan semakin meratanya pendapatan dan menurunnya kesenjangan kesejahteraan masyarakat.

Gambar II.44.
Grafik Indeks Gini Kabupaten Kebumen, 2020-2024



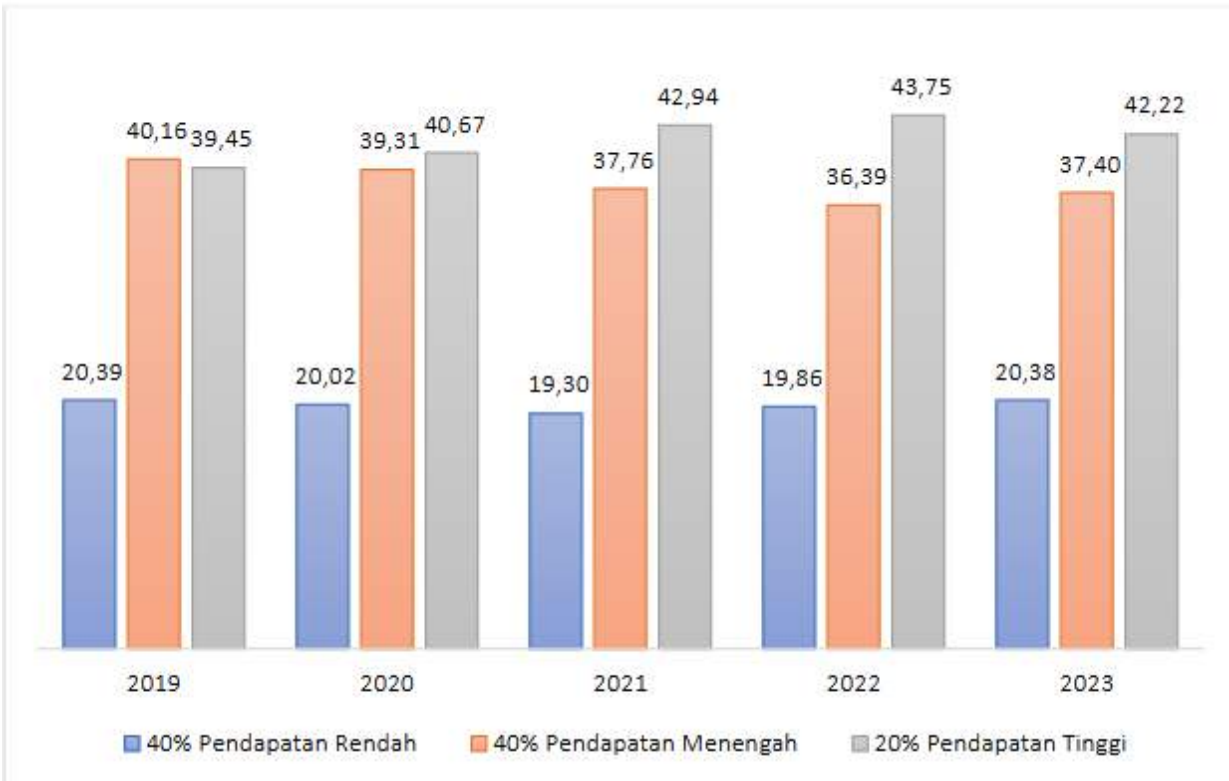
Sumber: BPS Kabupaten Kebumen, 2025

Pola distribusi pendapatan masyarakat yang didasarkan pada hasil perhitungan indeks gini hanya bisa menggambarkan tingkat pemerataan pendapatan secara umum, tetapi belum menjelaskan besarnya porsi yang diterima oleh kelompok berpendapatan rendah/miskin dari keseluruhan pendapatan wilayah. Bank Dunia mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok sesuai dengan besarnya pendapatan yaitu 40 persen penduduk dengan pendapatan rendah, 40 persen penduduk dengan pendapatan menengah, dan 20 persen penduduk dengan pendapatan tinggi. Ketimpangan pendapatan diukur dengan persentase jumlah pendapatan dari kelompok yang berpendapatan 40 persen terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk. Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah lebih kecil dari 12%, maka dikatakan terdapat ketimpangan pendapatan tinggi. Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah antara 12% sampai dengan 17%, maka dikatakan terdapat ketimpangan pendapatan moderat/sedang/menengah. Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah

lebih besar dari 17%, maka dikatakan terdapat ketimpangan pendapatan rendah.

Distribusi pendapatan Kabupaten Kebumen dilihat dari kelompok 40 persen penduduk dengan pendapatan rendah meningkat pasca COVID-19 pada tahun 2020, semula 19,30 persen (2021) menjadi 20,38 persen (2023). Posisi relatif ketimpangan pendapatan dari kelompok 40 persen penduduk pendapatan rendah Kabupaten Kebumen lebih baik dari Provinsi Jawa Tengah (18,74 persen), serta dari Kabupaten Banjarnegara (18,48 persen), Banyumas (17,32 persen), Cilacap (19,27 persen) dan Kabupaten Purbalingga (20,18 persen). Berdasarkan kriteria ketimpangan pendapatan menurut Bank Dunia, ketimpangan pendapatan dari kelompok 40 persen penduduk dengan pendapatan rendah Kabupaten Kebumen tergolong ketimpangan pendapatan rendah.

Gambar II.45.
Grafik Distribusi Pendapatan, 2019-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Tingkat kemiskinan Kabupaten Kebumen mengalami penurunan. Selama periode lima tahun terakhir, persentase penduduk miskin turun dari 17,59 persen (2020) menjadi 15,71 persen (2024). Setelah peningkatan pada 2020 dan 2021 yang mencapai 17,59 persen dan 17,83 persen sebagai dampak Pandemi Covid-19, tingkat kemiskinan mulai mengalami tren penurunan pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi berjalan dengan baik, seiring dengan meningkatnya aktivitas sosial-ekonomi masyarakat. Penurunan kemiskinan juga didukung oleh berbagai program pemberdayaan ekonomi dan bantuan sosial yang berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk

Gambar II.46.
Grafik Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kebumen, 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan yang tercermin dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, mengalami sedikit penurunan dari 54,00 persen pada 2022 menjadi 53,71 persen pada 2024. Penurunan ini dipengaruhi oleh penutupan empat perusahaan selama 2024, yang berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 252 tenaga kerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa dinamika ketenagakerjaan di Kabupaten Kebumen masih rentan terhadap faktor eksternal, seperti ketidakstabilan ekonomi dan efisiensi operasional perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis untuk meningkatkan cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, baik melalui perluasan kepesertaan di sektor informal maupun dengan mendorong keberlanjutan usaha di sektor formal guna menjaga perlindungan tenaga kerja secara lebih optimal.

Gambar II.47.
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kabupaten (%)
Kabupaten Kebumen Tahun 2022-2024



Sumber: Disnaker Kabupaten Kebumen, 2025

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu wilayah mampu menyediakan pangan yang cukup, aman, dan bergizi bagi

seluruh penduduknya secara berkelanjutan. Indeks ini mencerminkan aspek ketersediaan, akses, pemanfaatan, serta stabilitas pangan. Kabupaten Kebumen menunjukkan tren peningkatan IKP dalam periode 2020-2024, meskipun sempat mengalami penurunan pada 2021. IKP tercatat sebesar 80,41 pada 2020, menurun menjadi 78,56 pada 2021. Capaian IKP mengalami peningkatan menjadi 79,29 pada 2022; 80,34 pada 2023; dan mencapai 81,21 pada 2024. Dengan skor di atas 80, Kabupaten Kebumen menunjukkan tingkat ketahanan pangan yang sangat baik, menandakan bahwa daerah ini tidak hanya terbebas dari kerawanan pangan, tetapi juga memiliki sistem pangan yang stabil dan berkelanjutan. Selain itu, peningkatan persentase ketersediaan pangan dari 6,4 persen pada 2020 menjadi 33,42 persen pada 2024 menunjukkan adanya upaya untuk memperkuat ketahanan pangan. Namun, angka ini juga mengindikasikan bahwa sebagian besar pangan di Kabupaten Kebumen masih bergantung pada pasokan dari luar daerah, sehingga upaya untuk meningkatkan produksi lokal perlu terus diperkuat.

Gambar II.48.
Grafik Indeks Ketahanan Pangan, 2020-2024

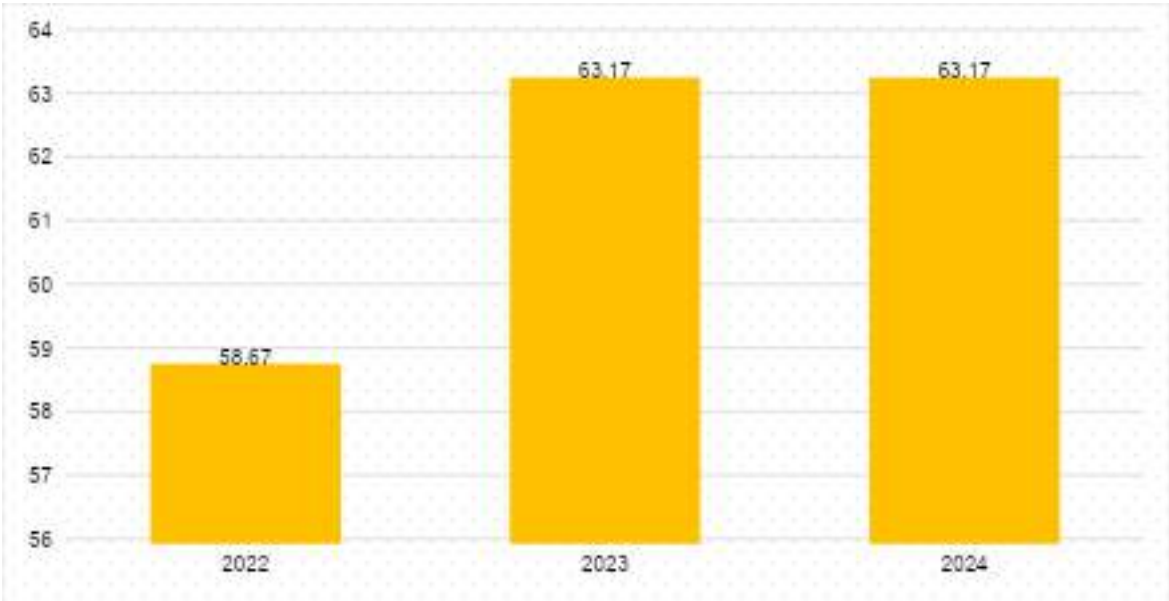


Sumber: Distapang Kab. Kebumen, 2025

2.2.2 KESEJAHTERAAN SOSIAL BUDAYA
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) digunakan sebagai alat ukur kualitas keluarga berdasarkan ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan, serta mencerminkan peran dan fungsi keluarga di berbagai wilayah di Indonesia. Di Kabupaten Kebumen, kinerja iBangga mengalami peningkatan dari 58,67 pada 2022 menjadi 63,17 pada 2024. Meskipun mengalami perbaikan, angka ini masih berada di bawah nilai 70, yang berarti kualitas keluarga di Kabupaten Kebumen baru masuk dalam kategori cukup baik atau berkembang. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga agar dapat mencapai kategori baik dengan nilai di atas 70. Selain peningkatan kualitas keluarga, Kabupaten Kebumen juga menunjukkan perkembangan dalam aspek kesetaraan gender dan perlindungan sosial. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) membaik dari 0,400 pada 2019 menjadi 0,344 pada

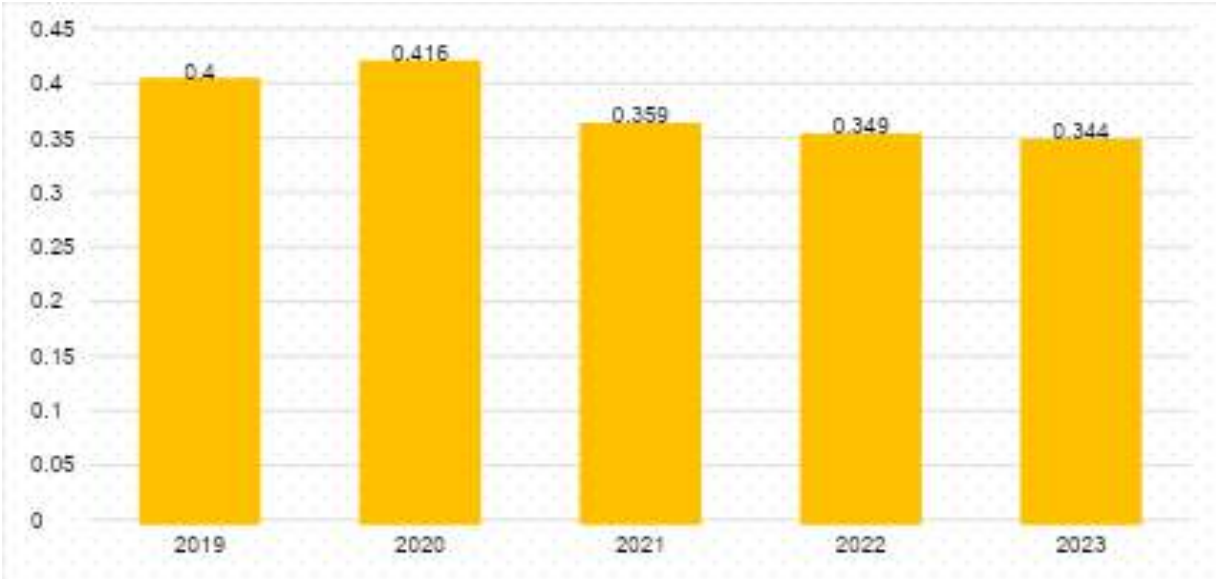
2023, menunjukkan pengurangan ketimpangan dalam akses dan partisipasi gender di berbagai sektor. Sementara itu, Indeks Perlindungan Anak (IPA) pada 2022 tercatat sebesar 65,21, yang masih berada di bawah batas minimal kategori baik (nilai 80). Hal ini mengindikasikan bahwa masih ada tantangan dalam memastikan perlindungan hak-hak anak secara optimal. Secara keseluruhan, meskipun terdapat peningkatan pada berbagai indikator pembangunan keluarga, kesetaraan gender, dan perlindungan anak, masih diperlukan strategi kebijakan yang lebih komprehensif untuk memastikan keberlanjutan peningkatan kualitas hidup keluarga dan masyarakat di Kabupaten Kebumen.

Gambar II.49.
Grafik Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
2022-2024



Keterangan:
*) Pengukuran Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merujuk pada Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengukuran Keberhasilan Pembangunan Keluarga Melalui Indeks Pembangunan Keluarga, data yang dihasilkan yang tersedia sejak tahun 2021
Sumber: BPS Kabupaten Kebumen, 2025

Gambar II.50.
Grafik Indeks Ketimpangan Gender, 2019-2023



Sumber: BPS Kabupaten Kebumen, 2025

Berdasarkan data yang ditampilkan pada grafik, **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan** di Kabupaten Kebumen menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, TPAK perempuan tercatat sebesar 57,67 kemudian mengalami sedikit penurunan menjadi 55,59 pada tahun 2021. Namun, tren ini berbalik dengan peningkatan signifikan pada tahun 2022 sebesar 60,96, tahun 2023 sebesar 62,49, dan mencapai 66,46 pada tahun 2024. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa semakin banyak perempuan yang berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja, meskipun masih berada di bawah tingkat partisipasi laki-laki yang mencapai 88,08 pada tahun 2024.

Meskipun peningkatan TPAK perempuan cukup konsisten, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan. Faktor-faktor seperti peran gender tradisional yang membatasi perempuan dalam urusan domestik, akses terbatas terhadap pendidikan dan pelatihan kerja, serta keterbatasan fasilitas pendukung seperti tempat penitipan anak dan kebijakan cuti melahirkan dapat menjadi hambatan bagi perempuan untuk lebih aktif di dunia kerja. Selain itu, kesenjangan upah dan norma sosial yang masih membatasi mobilitas serta pilihan pekerjaan bagi perempuan juga dapat berkontribusi terhadap kesenjangan ini. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam angkatan kerja, seperti penyediaan fasilitas pendukung bagi pekerja perempuan dan peningkatan akses pendidikan serta pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Gambar II.51.

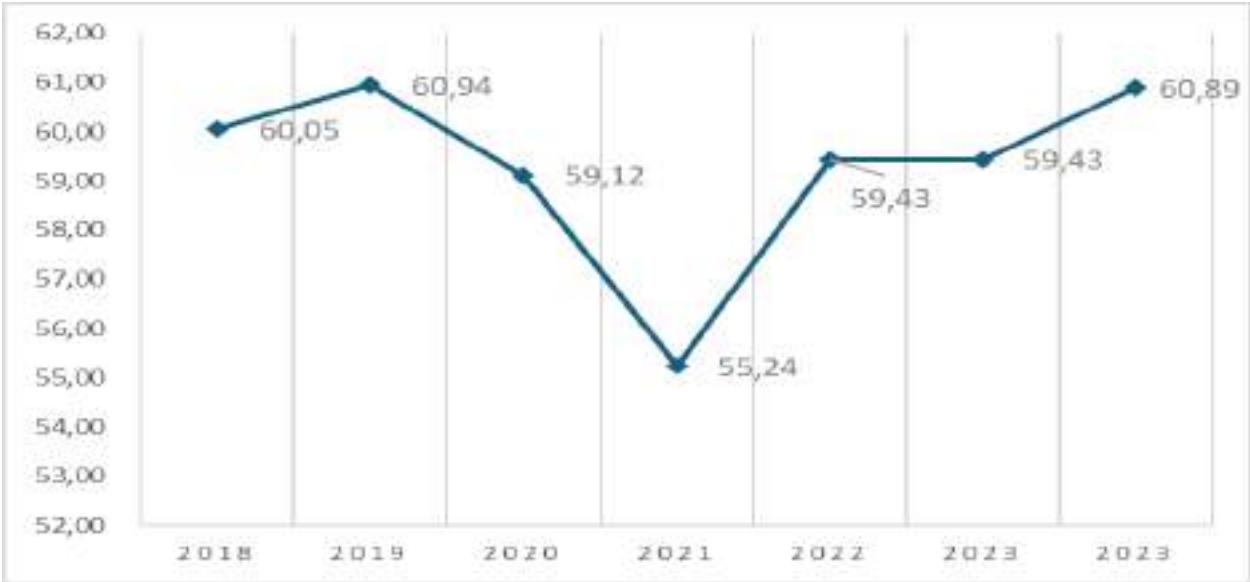
Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan, 2020-2024



Sumber: OPD Urusan Tenaga Kerja, Badan Pusat Statistik, diolah

Pembangunan kebudayaan memiliki peran penting dalam pembangunan pendidikan. Pemajuan kebudayaan diharapkan akan meningkatkan kualitas pendidikan karakter. Pembangunan kebudayaan terus ditingkatkan dan diimplementasikan ke dalam norma dan praktik kehidupan, karakter, dan jati diri masyarakat dalam menghadapi peningkatan ancaman negatif budaya global. Kearifan lokal dan nilai budaya dioptimalkan sebagai modal dasar pembangunan masyarakat. Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Kebumen~ (data Provinsi Jawa Tengah) cenderung menurun fluktuatif dari 60,05 (2018) menjadi 59,43 (2022) 60,89 (2023). Sebagai upaya melestarikan budaya, pada tahun 2023 tercatat sebanyak 4,01 persen cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) telah dilestarikan di Kabupaten Kebumen. Dukungan masyarakat dalam mengapresiasi warisan budaya dan sejarah ditunjukkan dengan jumlah kunjungan ke tempat sejarah sebesar 50.402 orang pada tahun 2023. Selain itu, upaya pemanfaatan kesenian juga terus dilakukan dengan berbagai even yang telah diselenggarakan. Pada tahun 2023 terdapat 18,33 persen kelompok kesenian aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian. Pengembangan kebudayaan juga terus dilakukan di lembaga pendidikan dengan adanya 63,57 persen satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan.

Gambar II.52.
Grafik Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK), Kabupaten
Kebumen 2018-2023



Keterangan:
) Pengukuran Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merujuk pada UU No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan data bersumber dari BPS dan Kementerian/Lembaga lainnya yang merujuk pada framework Culture Development Indicators (CDIs) yang dikembangkan oleh UNESCO, data yang dihasilkan yang tersedia sejak tahun 2018, serta data terakhir dirilis data tahun 2022. Data IPK yang tersedia hanya di tingkat Provinsi.
Sumber: OPD Urusan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diolah

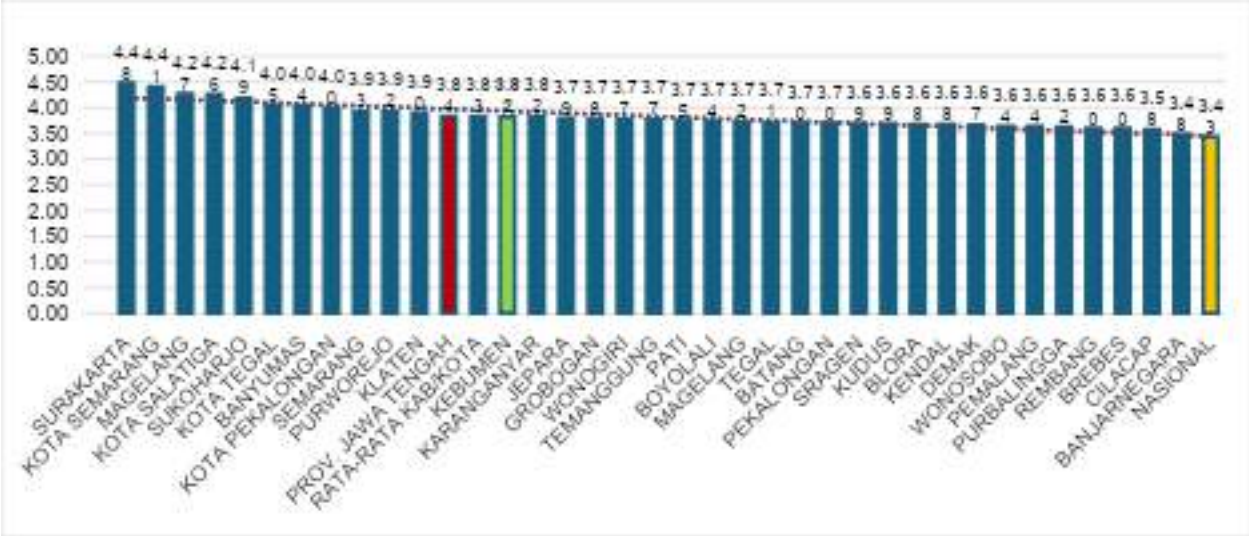
Selain aspek kebudayaan, kondisi pemuda sebagai sumber daya manusia potensial juga harus menjadi perhatian. Untuk melihat hal tersebut terdapat indikator Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), dimana sampai saat ini baru dihitung hingga level provinsi. Merujuk kinerja IPP Jawa Tengah yang terus mengalami peningkatan dari 69,6 pada Tahun 2019 menjadi 71,37 pada Tahun 2023. Pada Tingkat Kabupaten Kebumen kita bisa melihat tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri yang terus meningkat dari 15% pada Tahun 2019 menjadi 50% pada Tahun 2023. Pemuda yang dihitung adalah persentase pemuda berusia antara 16-30 tahun yang berwirausaha terhadap total populasi pemuda berusia antara 16-30 tahun di Kabupaten Kebumen.

2.3 ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing daerah merupakan kemampuan suatu wilayah dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menarik investasi dan tenaga kerja berkualitas. Beberapa faktor yang ditengarai akan menjadi penentu daya saing daerah seperti infrastruktur yang memadai, kebijakan pemerintah yang mendukung dunia usaha, kualitas sumber daya manusia, inovasi, stabilitas ekonomi, dan kemudahan berinvestasi.
Berdasarkan data Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Kebumen tahun 2024, skor yang dicapai adalah 3,82, yang menunjukkan kategori daya saing tinggi. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan kualitas ekosistem ekonomi dan inovasi di Kabupaten Kebumen. Namun, skor ini masih berada di bawah

rata-rata Provinsi Jawa Tengah (3,84) dan beberapa daerah lainnya seperti Kabupaten Banyumas (4,04). Meski demikian, Kabupaten Kebumen memiliki skor IDSD yang lebih tinggi dibandingkan beberapa wilayah lainnya, seperti Kabupaten Cilacap (3,48), Kabupaten Banjarnegara (3,43), dan beberapa kabupaten lainnya. Pengukuran IDSD 2024 masih mengacu pada empat aspek utama, yaitu ekosistem inovasi, aspek penguat, sumber daya manusia (SDM), dan aspek pasar, yang kemudian dielaborasi ke dalam 12 pilar daya saing. Kerangka pengukuran IDSD 2023 terdiri dari 4 aspek yang dielaborasi ke dalam 12 pilar daya saing. Pencapaian IDSD Kabupaten Kebumen tidak terlepas dari pencapaian 4 aspek, yaitu aspek ekosistem inovasi, aspek penguat, aspek sdm, dan aspek pasar. IDSD Kabupaten Kebumen unggul pada pilar dinamisme bisnis (4,89), institusi (4,82), adopsi TIK (4,74), ukuran pasar (4,47), infrastruktur (4,26) dan pasar produk (4,14).

Gambar II.53.
Grafik Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Kebumen, 2024



Berdasarkan 12 pilar daya saing, Kabupaten Kebumen telah memiliki skor lebih tinggi dari skor Provinsi Jawa Tengah pada 3 pilar yaitu institusi, pasar produk, dan adopsi TIK. Akan tetapi, Kabupaten Kebumen perlu upaya keras untuk meningkatkan skor pada 9 pilar lainnya yaitu infrastruktur, stabilitas ekonomi makro, kesehatan, keterampilan, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, ukuran pasar, dinamisme bisnis dan kapabilitas inovasi yang memiliki skor lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Tengah. Dalam subbab berikut akan dijelaskan aspek daya saing daerah berdasarkan komponen indeks daya saing daerah dan terbagi sesuai urutan sistematika pembahasan yaitu daya saing ekonomi daerah, sumber daya manusia, fasilitas/ infrastruktur wilayah dan iklim investasi.

Gambar II.54.
Grafik Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Kebumen Menurut
Pilar IDSD, 2024



Sumber: BRIN, diolah

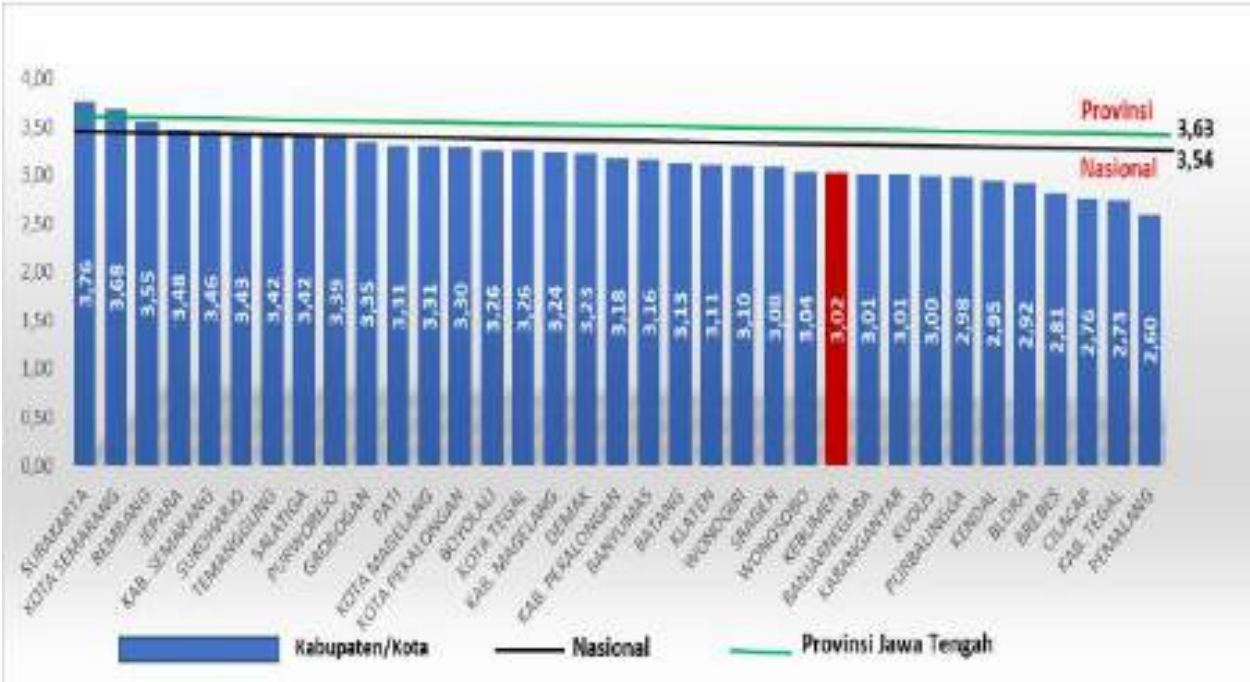
2.3.1 DAYA SAING EKONOMI DAERAH

Dalam meningkatkan kapasitas pembangunan maka daya saing ekonomi daerah harus ditingkatkan. Pilar IDSD yang menggambarkan daya saing ekonomi daerah, meliputi empat pilar, yaitu stabilitas ekonomi makro, pasar produk, sistem keuangan dan ukuran pasar. Pilar stabilitas ekonomi makro yang meliputi penciptaan nilai tambah, akumulasi kapital, tingkat konsumsi, kinerja sektoral, perekonomian, dan tingkat biaya hidup. Pilar pasar produk mendorong efisiensi di dalam sistem produksi. Pilar sistem keuangan merefleksikan kemampuan sistem finansial perbankan dan nonperbankan di daerah untuk memediasi aktivitas perekonomian, dan pilar ukuran pasar yang menguatkan struktur industri dalam menghasilkan nilai tambah akibat berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Skor Pilar Stabilitas Ekonomi Makro IDSD Kabupaten Kebumen sebesar 3,02 (2023) lebih rendah dari skor Provinsi Jawa Tengah (3,63) dan skor Nasional (3,54). Pilar stabilitas ekonomi makro meliputi kapasitas fiskal daerah, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, indeks ketahanan pangan dan nilai ICOR (investasi).

Pertama, Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Kebumen pada tahun 2023 sesuai dengan PMK Nomor: 84 Tahun 2023 adalah 0,998 termasuk dalam kategori rendah sedangkan rasio pajak daerah terhadap PDRB pada tahun 2023 sebesar 0,38 persen. Kedua, Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kebumen Tahun 2023 sebesar 5,66 persen. Pertumbuhan ekonomi akan lebih optimal jika terus meningkatnya kewirausahaan diantaranya pada Koperasi dan UMKM. persentase koperasi aktif berfluktuatif dari 84 unit persen pada Tahun 2019 menjadi 90 unit di Tahun 2023 90,17 persen di Tahun 2024 dengan total omset meningkat signifikan dari Rp 461.458.055,00 pada Tahun 2019 menjadi Rp180.283.160.378,00 496.976.951,00 pada Tahun 2023 2024. Namun demikian angka ini masih sangat kecil jika diproporsikan terhadap total PDRB

yaitu hanya sekitar 0,5 persen. Sementara itu, jumlah UMKM juga terus meningkat dari 45.715 unit pada tahun 2019 menjadi 46.095 50.321 unit pada Tahun 2023 2024 dengan UMKM yang naik kelas dari 31 unit pada Tahun 2019 menjadi 1.047 195 unit di Tahun 2023 2024. Ketiga, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kebumen sebesar 5,07 persen pada tahun 2024 menurun dibandingkan TPT tahun 2023 sebesar 5,11 persen. Keempat, Stabilitas harga dan peningkatan daya beli masyarakat dapat ditunjukkan dengan laju indeks implisit PDRB yang mencapai 4,28 persen 3,78 persen pada tahun 2023. Kelima, Nilai ICOR Kabupaten Kebumen belum tersedia, oleh karena diproksi dengan kinerja PMTB yang secara nominal pada Tahun 2023 sebesar Rp.6.729.204,56 juta atau tumbuh 3,30 persen dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp.6.022.328,52 juta. Walaupun tumbuh secara nominal, akan tetapi kontribusi PMTB terhadap PDRB pada tahun 2023 menurun yaitu sebesar 18,82 persen dibandingkan tahun 2021 sebesar 20,37 persen. Selain itu, upaya peningkatan akses permodalan di Lembaga keuangan oleh dunia usaha di Kabupaten Kebumen juga harus dilakukan. Pada Tahun 2023 menunjukkan proporsi kredit terhadap PDRB di Kabupaten Kebumen mencapai 17,99 persen. Namun sebelumnya juga perlu upaya peningkatan simpanan dana pihak ketiga atau Tabungan Masyarakat Kebumen di Lembaga perbankan dan keuangan. Pada tahun 2023 proporsi total dana pihak ketiga terhadap PDRB mencapai sebesar 17,29 persen.

Gambar II.55.
Grafik Skor Pilar Stabilitas Ekonomi Makro, 2023

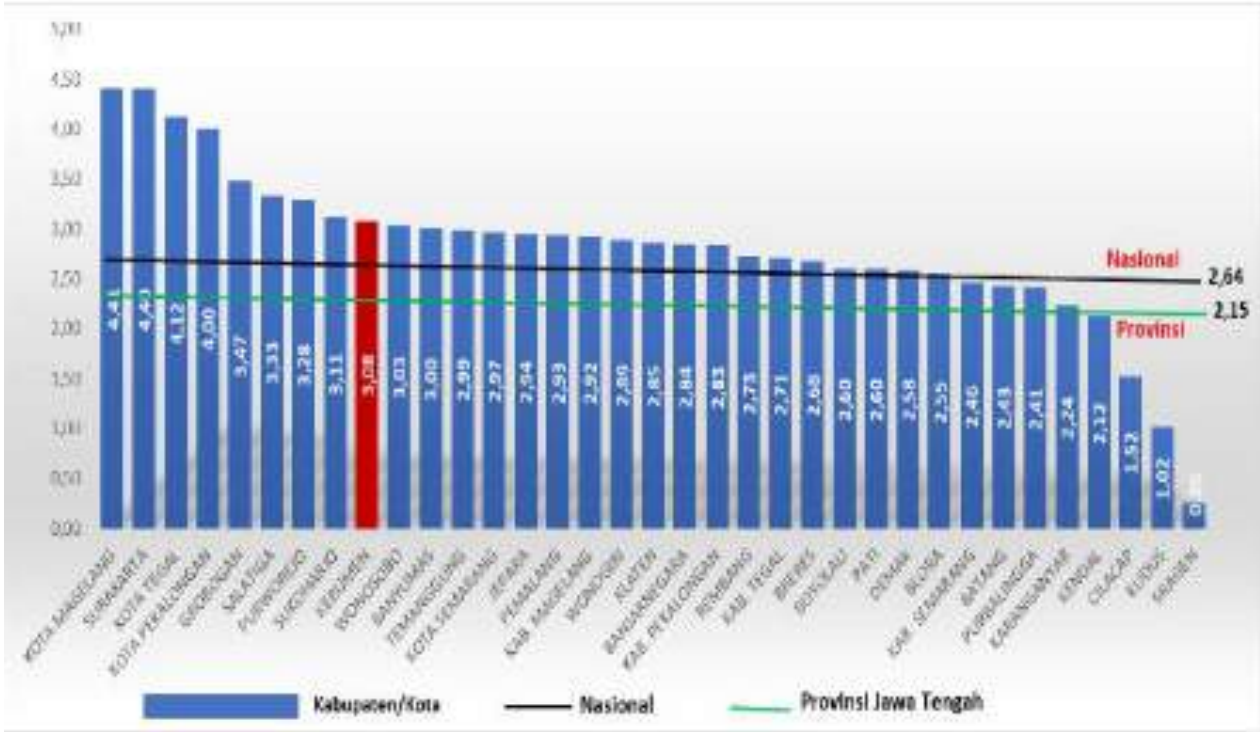


Sumber: BRIN, diolah

Skor Pilar Pasar Produk (Gambar 2.62) sebesar 3,08 (2023) lebih tinggi dari skor Provinsi Jawa Tengah (2,15) dan Nasional (2,64). Pencapaian skor Pilar Pasar Produk menunjukkan kemampuan usaha kecil dan menengah bersaing di antara kelompok usaha sedang dan besar. Kondisi tersebut disebabkan peningkatan nilai tambah sektor pertanian tidak optimal akibat menurunnya kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB ADHB pada sektor tersier Kabupaten Kebumen Tahun 2023 sebesar 16.239.397,29 juta. Selain itu, data net ekspor barang dan jasa secara riil masih menunjukkan

defisit walaupun terus mengalami perbaikan dari minus 8,08 pada tahun 2019 menjadi minus 4,56 pada tahun 2023 yang menunjukkan bahwa jumlah barang dan jasa yang masuk ke wilayah Kebumen (impor) lebih dominan dibandingkan jumlah barang dan jasa dari Kebumen yang dijual keluar wilayah (ekspor).

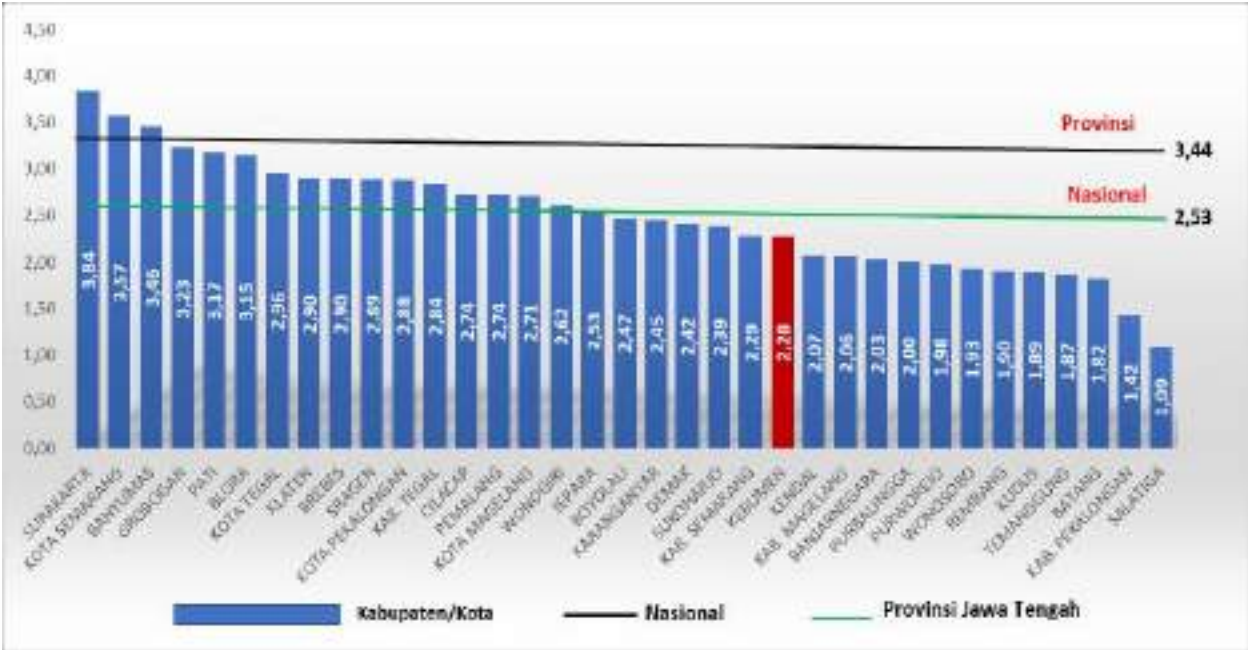
Gambar II.56.
Grafik Skor Pilar Pasar Produk, 2023



Sumber: BRIN, diolah

Skor Pilar Sistem Keuangan IDSD Kabupaten Kebumen (Gambar 2.63) pada tahun 2023 sebesar 2,28 lebih rendah dari skor Provinsi Jawa Tengah (3,44) dan Nasional (2,53). Sistem keuangan merefleksikan kemampuan sistem finansial perbankan dan nonperbankan di daerah untuk memediasi aktivitas perekonomian dilihat dari persentase kredit swasta terhadap PDRB harga berlaku dan nilai akad Kredit Usaha Rakyat. Pencapaian proporsi kredit UMKM terhadap total kredit berdasarkan statistik ekonomi Bank Indonesia posisi kredit UMKM yang diberikan bank umum di Kabupaten Kebumen sebesar Rp 4.281.513 juta (2023) terdiri skala usaha mikro Rp 2.534.141 juta, skala usaha kecil sebesar Rp 1.442.594 juta, dan skala usaha menengah sebesar Rp 304.779 juta.

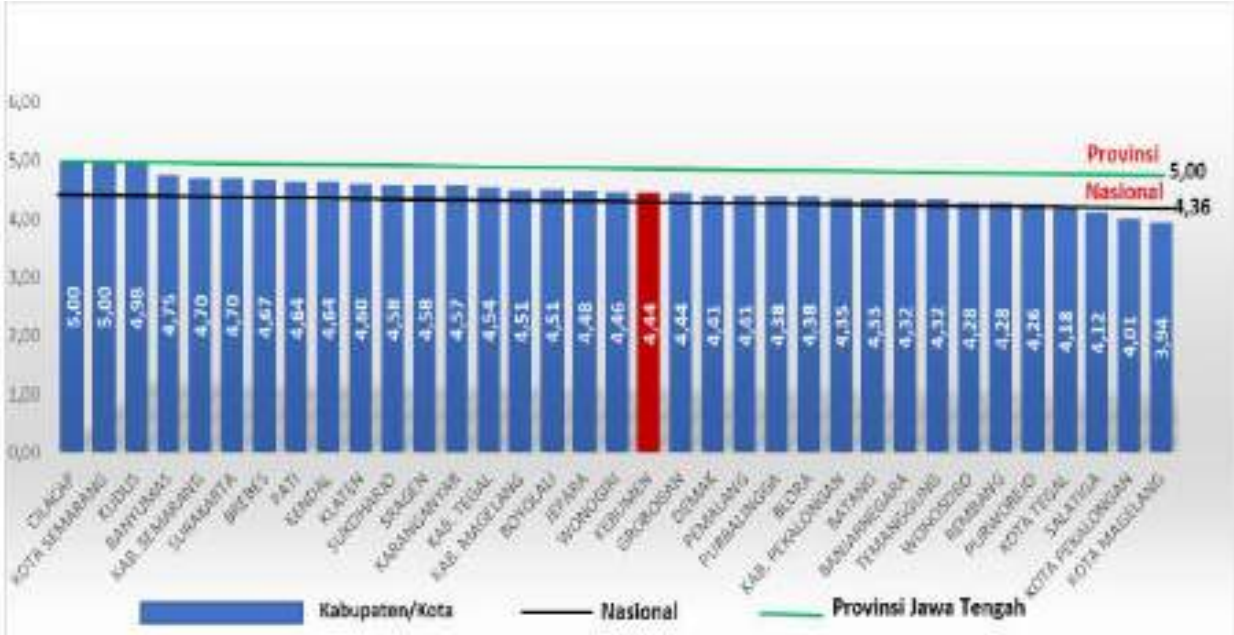
Gambar II.57.
Grafik Skor Pilar Sistem Keuangan, 2023



Sumber: BRIN, diolah

Skor Pilar Ukuran Pasar IDSD Kabupaten Kebumen (Gambar 2.64) tahun 2023 sebesar 4,44 lebih rendah dari skor Provinsi Jawa Tengah (5,00) akan tetapi lebih tinggi dari skor Nasional (4,36). Pilar Ukuran Pasar menguatkan struktur industri dalam menghasilkan nilai tambah akibat berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Hal ini ditunjukkan oleh pencapaian PDRB ADHK 2010 19.815.062,62 juta pada tahun 2019 menjadi 22.63.895,33 juta pada Tahun 2023. Namun demikian jika dilihat dari PDRB ADHK 2010 per kapita menunjukkan adanya penurunan dari Rp.16,54 Juta pada Tahun 2019 menjadi Rp.16,20 Juta pada Tahun 2023 yang menunjukkan menurunnya pendapatan riil masyarakat.

Gambar II.58.
Grafik Skor Pilar Ukuran Pasar, 2023



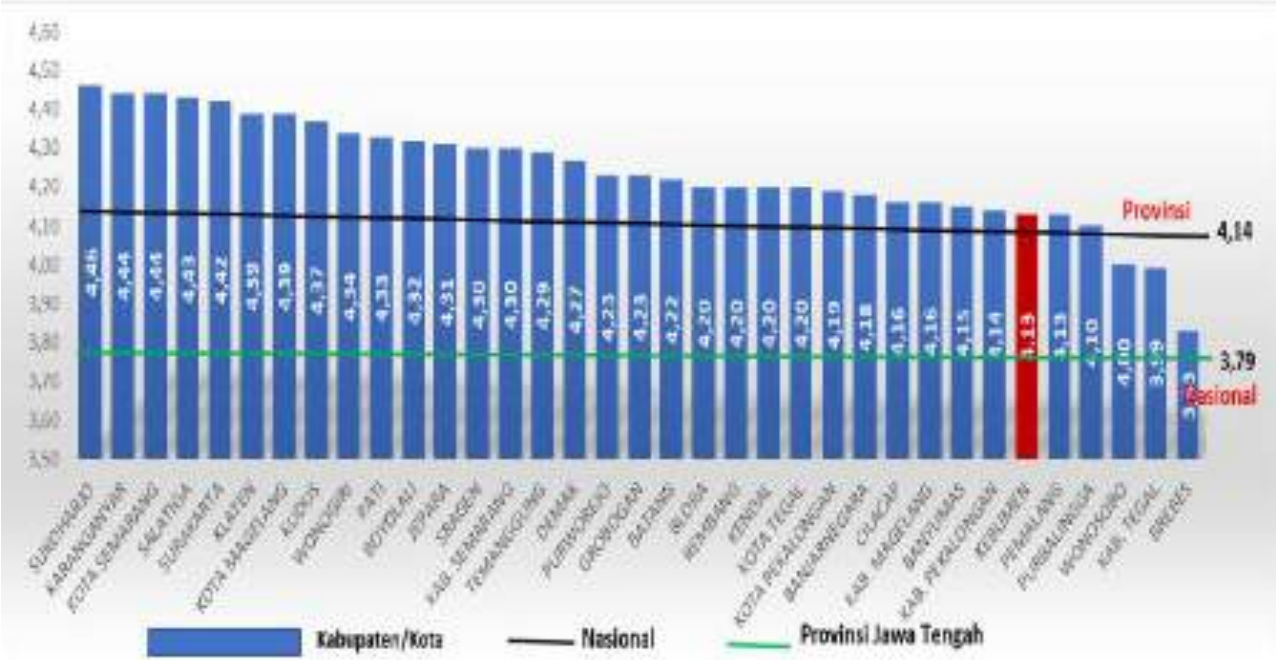
Sumber: BRIN, diolah

2.3.2 DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA

Daya saing sumber daya manusia harus ditingkatkan. Pilar IDSD yang menggambarkan daya saing sumber daya manusia, meliputi tiga pilar, yaitu kesehatan, keterampilan, dan pasar tenaga kerja. Pilar Kesehatan merepresentasikan kualitas hidup manusia yang diukur dari angka harapan hidup dan pilar keterampilan yang erat keterkaitannya dengan penciptaan tenaga kerja produktif sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Pilar Pasar Tenaga Kerja mampu menekan pengangguran dengan merangsang terciptanya kesempatan kerja. Hal ini penting mengingat Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Kebumen terus meningkat dari 68,48 persen pada Tahun 2019 menjadi 74,54 persen pada Tahun 2023 dikarenakan peningkatan proporsi penduduk berusia 15- 64 tahun (usia produktif) Kabupaten Kebumen meningkat semula 64,11 persen (2019) menjadi 68,49 persen (2023).

Skor Pilar Kesehatan IDSD Kabupaten Kebumen tahun 2023 (Gambar 2.65) sebesar 4,13 lebih rendah dibandingkan skor Provinsi Jawa Tengah (4,14), tetapi lebih tinggi dibandingkan skor Nasional (3,79). Pilar Kesehatan menggambarkan tahun hidup masyarakat melalui angka harapan hidup yang menunjukkan peningkatan dari semula 73,22 pada tahun 2019 menjadi 74,98 pada tahun 2023. Namun, pencapaian status kesehatan masyarakat Kabupaten Kebumen belum optimal karena Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) masih tinggi sebesar 92,26 per 100.000 KH (2023), Angka Kematian Bayi (AKB) tinggi sebesar 10,82 per 1.000 KH (2023), Angka Kesakitan masih sebesar 9,88 persen (2023), dan Prevalensi *Stunting* masih menunjukkan angka sebesar 9,87 persen (2023).

Gambar II.59.
Grafik Skor Pilar Kesehatan, 2023

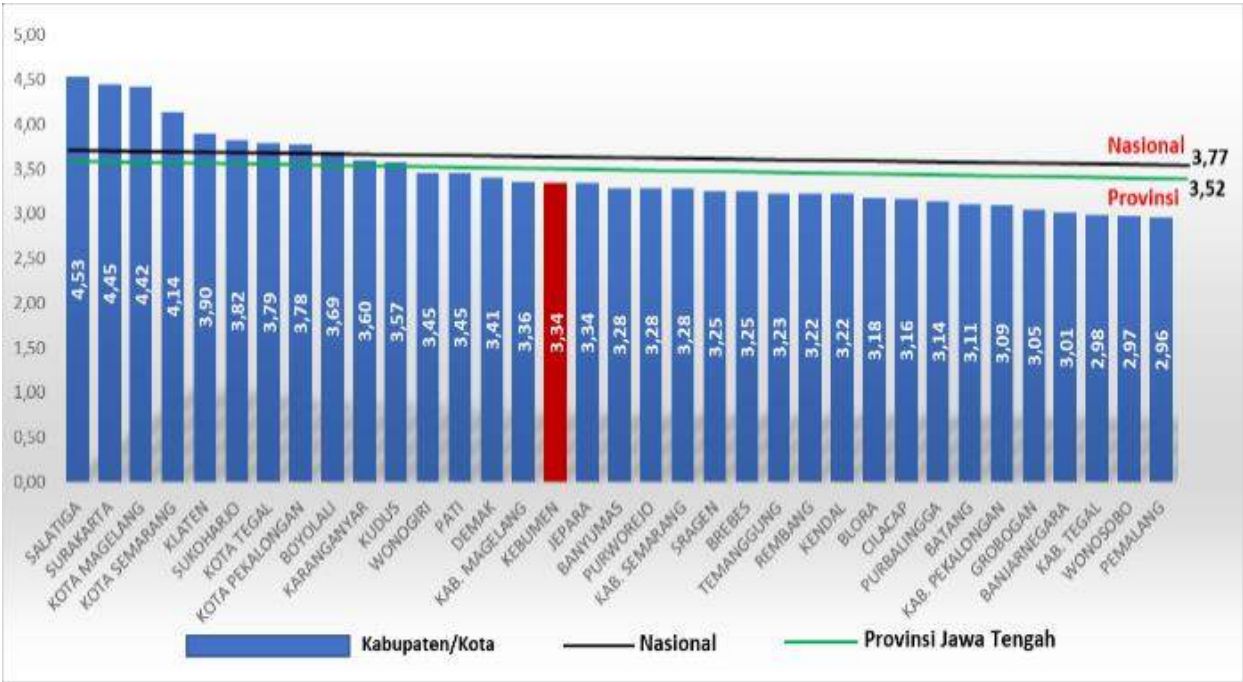


Sumber: BRIN, diolah

Skor pilar Keterampilan IDSD Kabupaten Kebumen tahun 2023 (Gambar 2.66) sebesar 3,34 lebih rendah dari skor Provinsi Jawa Tengah (3,52) dan Nasional (3,77). Peningkatan pendidikan dan keterampilan tenaga kerja dalam mendukung keunggulan kompetitif saat ini maupun masa depan. Kondisi tenaga kerja saat ini dilihat dari rata-rata lama sekolah tercermin dalam RLS Kabupaten Kebumen tahun 2023 sebesar 7,86 tahun. Angka tersebut merepresentasikan bahwa penduduk Kabupaten Kebumen pada tahun 2023 rata-rata menjalani pendidikan formal setara 7,86 tahun atau hampir menamatkan Kelas VIII (SMP). Nilai tersebut masih lebih rendah dari nilai RLS Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 8,01 dan Nasional yang mencapai sebesar 8,77. Keterampilan lulusan tercermin dalam pencapaian Persentase Penduduk Bekerja di Kabupaten Kebumen sebesar 94,89 persen (2023) dan Persentase tenaga kerja ditempatkan sebesar 53,54 persen (2023). Kondisi ini tercermin juga pada Persentase Penduduk Bekerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebesar 46,03 persen, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 20,67 persen, Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 26,09 persen, dan Perguruan Tinggi (PT) sebesar 7,2 persen.

Sedangkan untuk kondisi tenaga kerja masa depan dapat dilihat dari angka harapan sekolah Kabupaten Kebumen pada tahun 2023 adalah sebesar 13,37 tahun, lebih tinggi dari HLS di Jawa Tengah maupun Nasional. Angka tersebut mengindikasikan lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak di Kabupaten Kebumen adalah 13,37 tahun (Diploma 2). Kedua, berpikir kritis dalam mengajar yang saat ini datanya belum tersedia. Ketiga, rasio murid- guru pendidikan dasar. Rasio Guru-Murid pada jenjang SD/MI Tahun 2023 menurun dibanding tahun sebelumnya yaitu menjadi 1:16,75. Rasio ideal guru per murid adalah satu guru untuk 20 siswa. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio guru dibandingkan dengan murid di Kabupaten Kebumen untuk tiap jenjang pendidikan dasar ada pada rasio ideal yaitu rata-rata satu guru untuk 16-17 siswa. Sementara itu jika dilihat dari kualitas kecerdasan siswa sekolah dapat diukur berdasarkan kemampuan literasi membaca dan numerasi yang menjadi dasar dalam pengembangan kemampuan analitikal nantinya. Berdasarkan data Rapor Pendidikan pada Tahun 2022 dan 2023 menunjukkan kemampuan literasi membaca siswa SD dan SMP di Kabupaten Kebumen meningkat, yaitu Siswa SD dari sebesar 78,07 persen menjadi 84,28 persen dan siswa SMP dari sebesar 84,12 persen menjadi 87,29 persen. Kemampuan numerasi siswa SD dan SMP juga menunjukkan peningkatan, yaitu siswa SD dari 60,38 persen menjadi 73,68 persen dan siswa SMP dari 61,71 persen menjadi sebesar 82,34 persen. Berdasarkan rapor Pendidikan tahun 2023 tersebut menunjukkan kemampuan numerasi siswa SD di Kabupaten Kebumen masih di bawah kompetensi minimum karena masih di bawah 75 persen, sementara untuk kemampuan literasi siswa SD dan SMP, serta numerasi siswa SMP berada di atas kategori kompetensi minimum.

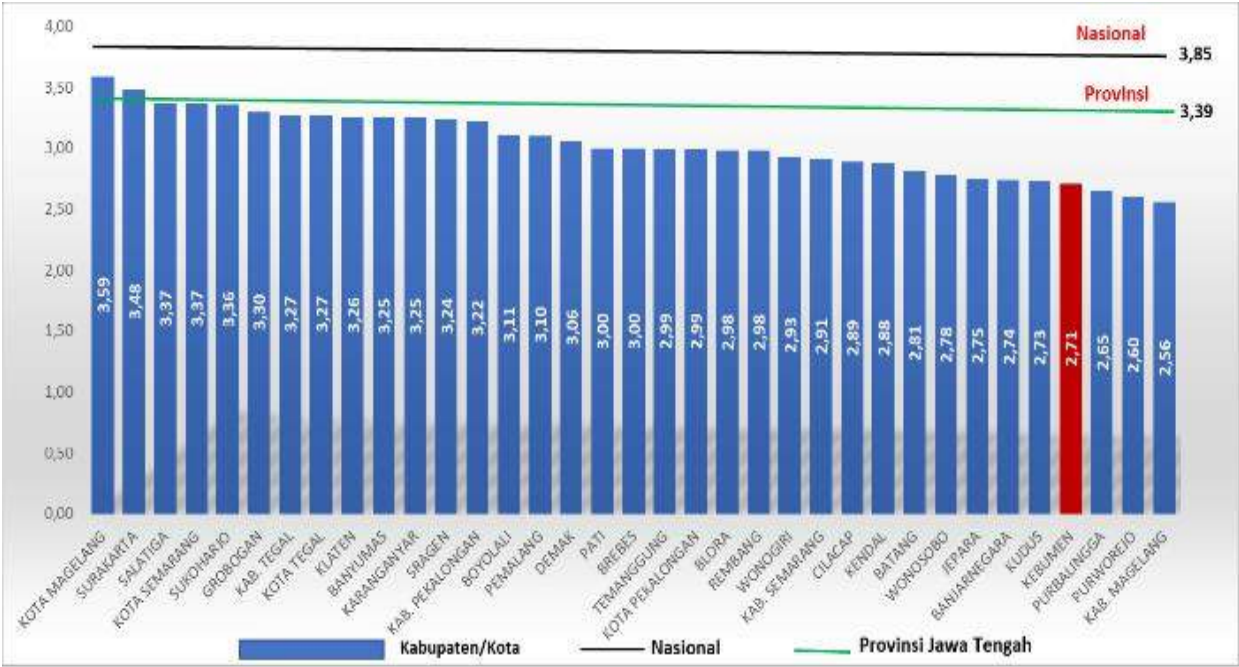
Gambar II.60.
Grafik Skor Pilar Ketrampilan, 2023



Sumber: BRIN, diolah.

Skor Pilar Pasar Tenaga Kerja IDSD Kabupaten Kebumen (Gambar 2.67) sebesar 2,71 (2023) lebih rendah dari Skor Provinsi Jawa Tengah (3,39) dan Nasional (3,85). Pencapaian skor Pilar Pasar Tenaga Kerja menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen dalam menekan pengangguran dengan merangsang terciptanya kesempatan kerja dilihat dari kebijakan pasar tenaga kerja aktif, upah pekerja dan kesetaraan upah perempuan dan laki-laki. Upah pekerja mengalami perbaikan selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir. UMK Kabupaten Kebumen Tahun 2019 sebesar Rp. 1.700.000 menjadi Rp. 2.035.890 pada Tahun 2023.

Gambar II.61.
Grafik Skor Pilar Pasar Tenaga Kerja, 2023



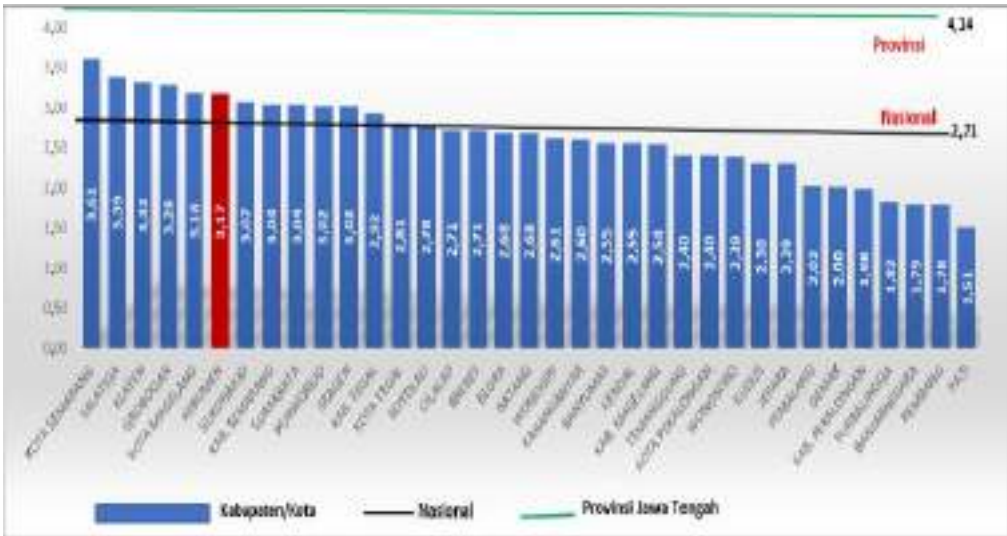
Sumber: BRIN, diolah

2.3.3 DAYA SAING FASILITAS/INFRASTRUKTUR WILAYAH

Daya saing fasilitasi/ infrastruktur wilayah harus ditingkatkan. Pilar IDSD yang menggambarkan daya saing fasilitasi/infrastruktur wilayah, meliputi dua pilar, yaitu infrastruktur dan adopsi TIK. Pilar infrastruktur yang dapat mendukung aktivitas perekonomian sedangkan pilar adopsi TIK yang merupakan faktor determinan bagi kemajuan Industri 4.0. Skor Pilar Infrastruktur IDSD Kabupaten Kebumen sebesar 3,17 (2023) lebih rendah dari skor Provinsi Jawa Tengah (4,14) dan skor Nasional (2,71). Pilar infrastruktur mengukur keberadaan dan kualitas sarana dan prasarana pendukung aktivitas ekonomi di suatu daerah yang dielaborasi ke dalam 6 dimensi. Pertama, dimensi infrastruktur transportasi (jalan darat), dapat diproksi dengan pencapaian tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota (persentase jalan kondisi mantap) sebesar 73,96 persen (2023). Kedua, dimensi infrastruktur transportasi (jalur kereta api) yang diproksi dari layanan infrastruktur stasiun kereta api. Jumlah stasiun kereta api di Kabupaten Kebumen sebanyak 4 stasiun pemberhentian penumpang terdiri dari Stasiun Gombong, Stasiun Karanganyar, Stasiun Kebumen, dan Stasiun Kutowinangun. Jumlah perlintasan kereta api di Kabupaten Kebumen sampai dengan tahun 2023 sebanyak 36 perlintasan kereta api. Perlintasan kereta api yang dijaga oleh PT. KAI sebanyak 18 perlintasan dimana 14 perlintasan kereta api dijaga oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen dan 3 perlintasan kereta api dijaga oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen bersama masyarakat, dan 1 Perlintasan Kereta api dijaga oleh desa. Ketiga, dimensi infrastruktur transportasi (udara). Kabupaten Kebumen mendapatkan akses layanan infrastruktur transportasi udara dari Yogyakarta International Airport. Keempat, dimensi infrastruktur transportasi (pelabuhan) dilihat dari akses layanan pelabuhan dari Pelabuhan Laut Tanjung Intan di Cilacap Kelima dimensi infrastruktur utilitas kelistrikan melalui pencapaian rasio elektrifikasi sebesar 99,67 (2021). Keenam, dimensi utilitas air minum ditunjukkan dengan persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses

terhadap air minum perpipaan di Kabupaten Kebumen masih sebesar 7 persen (2023).

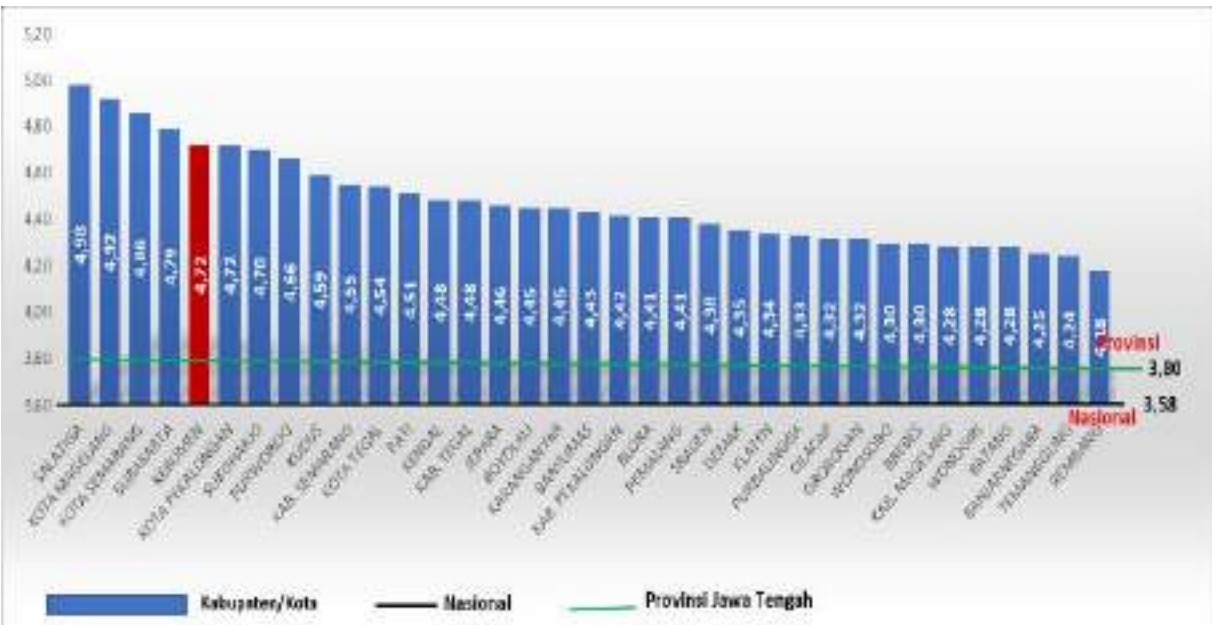
Gambar II.62.
Grafik Skor Pilar Infrastruktur, 2023



Sumber: BRIN, diolah

Skor Pilar Adopsi TIK IDSD Kabupaten Kebumen (Gambar 2.69) sebesar 4,72 (2023) lebih tinggi dari skor Provinsi Jawa Tengah (3,80) dan skor Nasional (3,58). Pilar Adopsi TIK yang merupakan faktor determinan bagi kemajuan Industri 4.0 yang dielaborasi ke dalam satu dimensi. Dimensi Adopsi TIK ditunjukkan dengan persentase rumah tangga dengan akses internet sebesar 74,74 persen, persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang mengakses internet dalam 3 bulan terakhir masih sebesar 74,74 persen (Susenas 2023) dan persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang menggunakan HP/komputer sebesar 83,22 persen serta jangkauan jaringan 4G.

Gambar II.63.
Grafik Skor Pilar Adopsi TIK, 2023



Sumber: BRIN, diolah

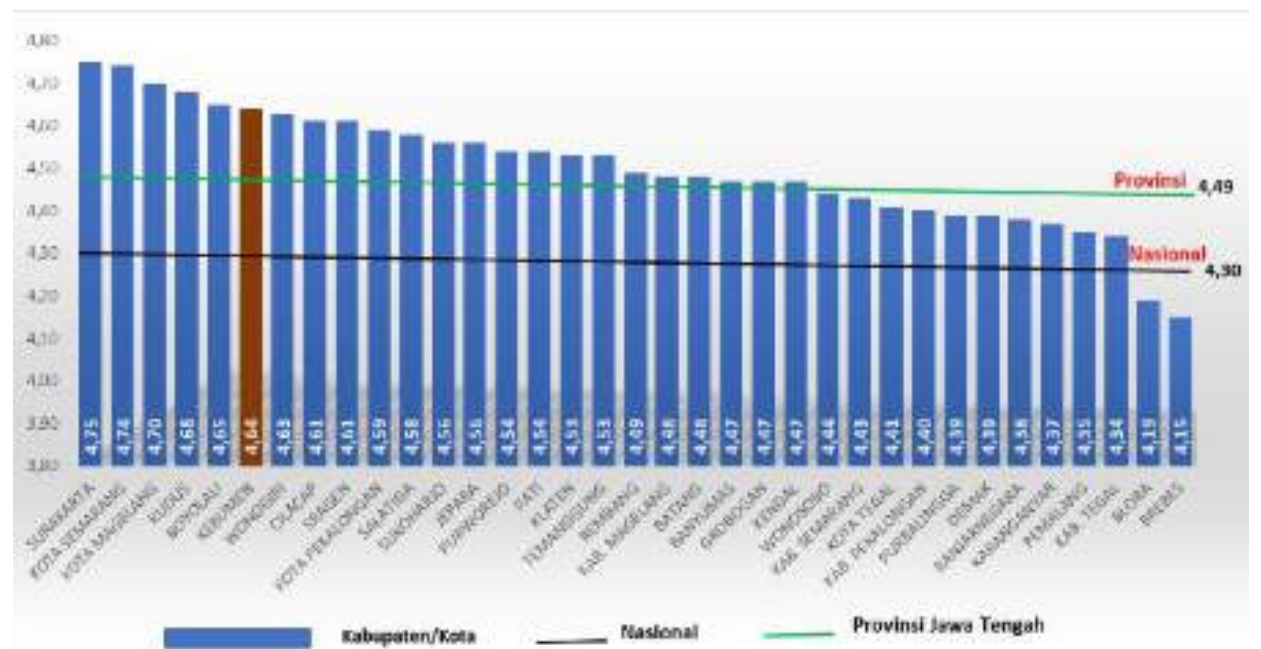
2.3.4 DAYA SAING IKLIM INVESTASI

Daya saing iklim investasi harus ditingkatkan. Pilar IDSD yang menggambarkan daya saing iklim investasi, meliputi tiga pilar, yaitu institusi, dinamika bisnis dan kapabilitas inovasi. Pilar Institusi yang mengukur seberapa jauh iklim sosial, politik, hukum, dan keamanan. Pilar Dinamika Bisnis yang menggambarkan kemudahan entitas bisnis memulai usaha untuk penciptaan dan perluasan lapangan kerja dan pilar kapabilitas inovasi yang mengukur kemampuan daerah dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya dalam aktivitas ekonomi bernilai tambah.

Skor Pilar Institusi IDSD Kabupaten Kebumen sebesar 4,64 (2023) lebih tinggi dibandingkan skor Provinsi Jawa Tengah (4,49) dan skor Nasional (4,30). Pilar Institusi yang mengukur seberapa jauh iklim sosial, politik, hukum, dan keamanan yang dielaborasi ke dalam 5 dimensi (keamanan, *check and balance*, transparansi, hak atas kepemilikan, dan orientasi masa depan pemerintah). Hal ini sejalan dengan kinerja beberapa indikator daerah yang ada sebagai berikut:

Pertama, dimensi keamanan dapat diproksi dengan jumlah kejadian SARA dimana masih terdapat 5 kasus walaupun telah dapat tertangani semua (2023). Kedua, dimensi *check and balance* dapat diproksi dengan pencapaian SAKIP Kabupaten Kebumen sebesar 66,11 (2023). Ketiga, dimensi transparansi dapat diproksi dengan pencapaian Indeks Integritas Nasional dimana pada Tahun 2023 mencapai sebesar 78,19. Keempat, dimensi hak atas kepemilikan dimana pencapaian hak kepemilikan atas tanah belum optimal yaitu baru mencapai 70 persen bidang tanah di Kabupaten Kebumen yang telah bersertifikat. Kelima, dimensi orientasi masa depan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan. Hal ini dapat diproksi dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Kebumen pada tahun 2023 mencapai sebesar 67,19.

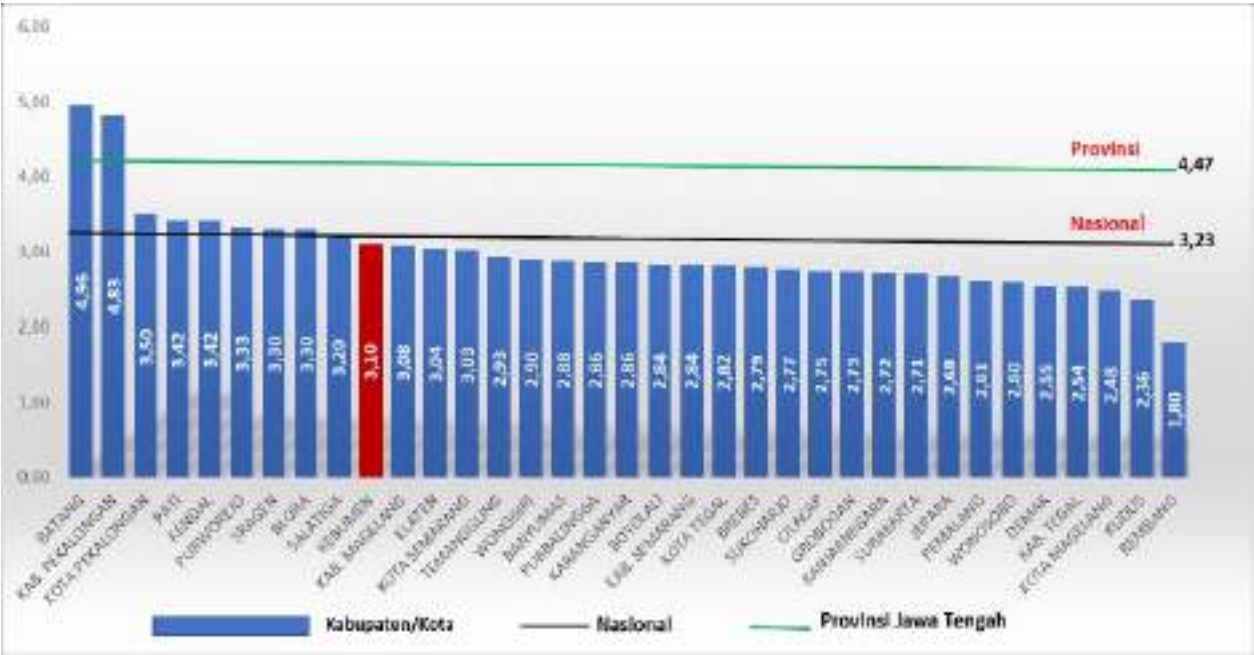
Gambar II.64.
Grafik Skor Pilar Institusi, 2023



Sumber: BRIN, diolah

Skor dinamika bisnis IDSD Kabupaten Kebumen telah mencapai 3,10 (2023), berada di bawah skor Provinsi Jawa Tengah (4,47) dan skor Nasional (3,23). Hal ini dilihat dari pertumbuhan Nomor Induk Berusaha dan kinerja pelayanan publik, jumlah perizinan berusaha yang dikeluarkan pada Tahun 2023 sebesar 21.887 dengan total nilai investasi 628,23 miliar. Kinerja pelayanan publik dapat dilihat dari Indeks Pelayanan Publik tahun 2023 sebesar 4,55 meningkat dari tahun 2020 yang nilainya sebesar 3,23.

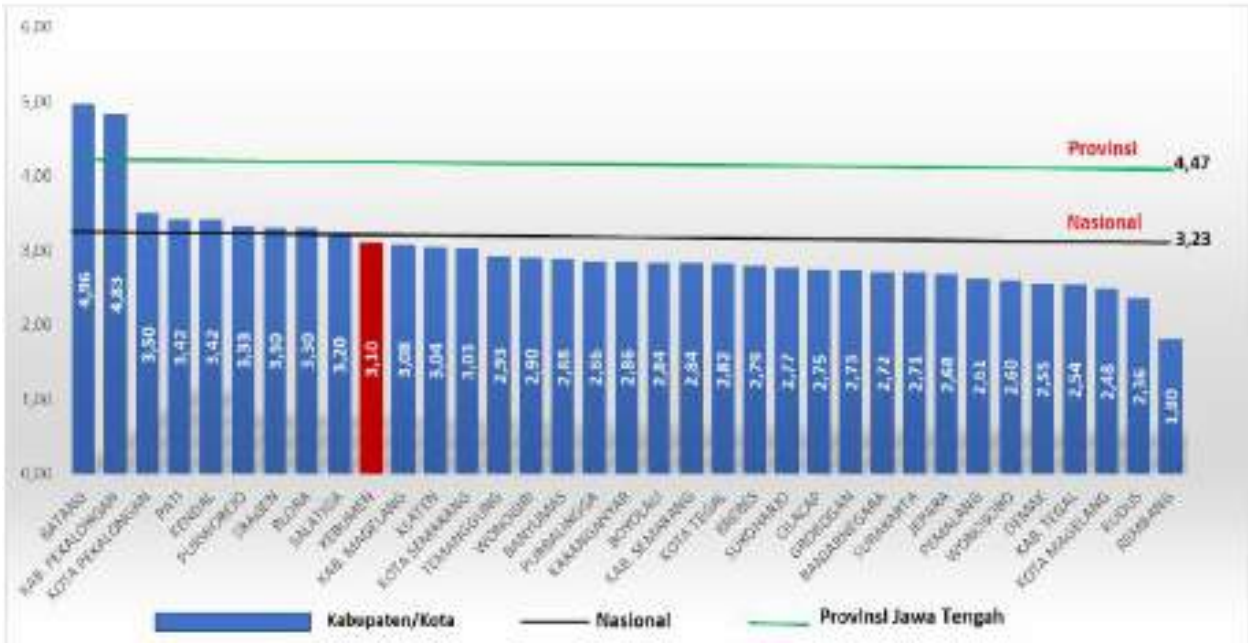
Gambar II.65.
Grafik Skor Pilar Dinamika Bisnis, 2023



Sumber: BRIN, diolah

Skor pilar kapabilitas inovasi IDSD Kabupaten Kebumen (Gambar 2.72) sebesar 2,30 (2023) masih dibawah skor Provinsi Jawa Tengah (4,51) dan skor Nasional (3,03). Kondisi pencapaian skor kapabilitas inovasi tercermin dari keanekaragaman tenaga kerja, publikasi ilmiah, aplikasi kekayaan intelektual, belanja riset, indeks keunggulan lembaga riset dan aplikasi merk dagang. Selain itu, pencapaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kebumen sebesar 49,28 (2023) dibawah Indeks Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar 65,40.

Gambar II.66.
Grafik Skor Pilar Kapabilitas Inovasi, 2023

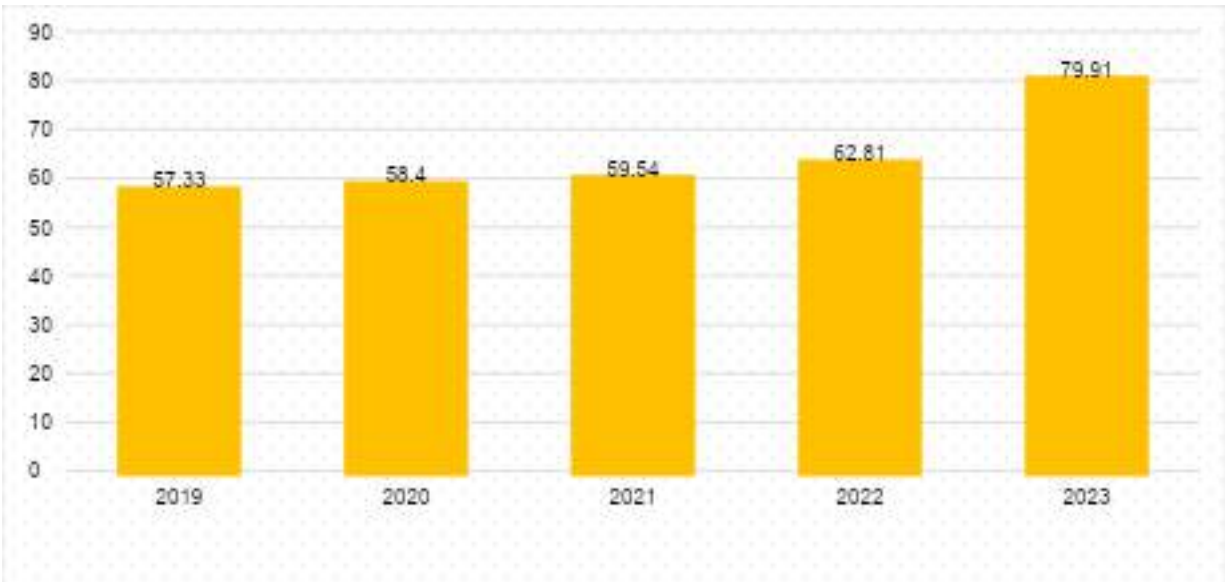


Sumber: BRIN, diolah

2.4 ASPEK PELAYANAN UMUM

Peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi profesional. Pemerintah Daerah berupaya melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) yang ditunjukkan dengan pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Mendasari Peraturan Menteri PAN dan RB No 9 Tahun 2023, pelaksanaan Reformasi Birokrasi diarahkan untuk dapat memberikan kontribusi nyata khususnya pada capaian pembangunan nasional. Terdapat penajaman tujuan Reformasi Birokrasi yaitu birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik melalui sasaran strategis general dan tematik. Pada periode 2019-2023 terjadi peningkatan capaian dalam mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, dimana IRB meningkat semula 57,33 (2019) menjadi 79,91 (2023, yang diperoleh dari 68,3 berasal dari RB General dan 11,61 dari RB Tematik. Perolehan indikator penilaian IRB yang cukup besar meliputi tingkat implementasi rencana aksi pembangunan RB General (4,14), persentase penyederhanaan struktur organisasi (1,86), tingkat maturitas SPIP (2,55), SAKIP (2,64), tingkat digitalisasi arsip (2,18), Indeks Kualitas Kebijakan (1,7), Indeks Reformasi Hukum (1,44), Indeks Tata Kelola Pengadaan (1,84), Indeks Sistem Merit (2,47), Indeks SPBE (6,66), capaian indikator non makro (4,03), Survei Penilaian Integritas (7,82) dan Survei kepuasan Masyarakat (7,14).

Gambar II.67.
Grafik Indeks Reformasi Birokrasi, 2019-2023



Sumber: Sekretariat Daerah, diolah

Penguatan tata kelola pemerintahan digital Kabupaten Kebumen termasuk dalam kategori baik. Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Kebumen yang diukur melalui Indeks SPBE meningkat dari 2,64 (2019) menjadi 4,07 (2024) 3,44 (2023), termasuk kategori Baik. Peningkatan tata kelola pemerintahan digital dalam mewujudkan reformasi birokrasi memerlukan peningkatan aspek teknologi informasi dan komunikasi, penerapan manajemen SPBE, dan audit TIK.

Pemerintah Kabupaten Kebumen terus berupaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terkait keberlanjutan fiskal, tantangan yang dihadapi yaitu rendahnya penerimaan daerah, terutama perpajakan yang tercermin dari rasio pajak hanya sebesar 0,38 persen dari PDRB ADHB pada tahun 2023 walaupun terus meningkat dari Tahun 2019 sebesar 0,40 persen. Pendapatan daerah ke depan akan sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan produktivitas penduduk. Hal tersebut berpotensi meningkatkan penerimaan daerah. Pergeseran komposisi demografi yang menuju *ageing population* akan menentukan komposisi belanja negara yang lebih didominasi oleh komponen belanja perlindungan sosial bagi penduduk usia lanjut yang tidak produktif lagi.

Upaya optimalisasi pengendalian pembangunan daerah Kabupaten Kebumen terus dilakukan. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mengalami peningkatan. Maturitas SPIP Kabupaten Kebumen telah mencapai level 3 sedangkan kapabilitas APIP Kabupaten Kebumen juga telah mencapai level 3. Pada Tahun 2023, Indeks Integritas Nasional berdasarkan Survei Penilaian Integritas telah mencapai 78,19. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) laporan keuangan Kabupaten Kebumen sejak tahun 2019 selama 5 tahun berturut-turut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini mengindikasikan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar semua hal yang terkait material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Nilai SAKIP mengalami peningkatan pada tahun 2024

menjadi 67,54 jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang hanya sebesar 66,11.

Tabel II.24
Capaian Indikator Urusan Pengawasan Kabupaten Kebumen

No	Kinerja Pengawasan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tingkat Maturitas SPIP (Nilai)	3	3	3,13	3,191	3,301
2.	Tingkat Kapabilitas APIP (Level)	2 Plus	3	3,12	3,18	3,27 (Level 3)
3	Nilai SAKIP	NA	NA	NA	66,11	67,54

Sumber: Inspektorat, 2025

Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mewujudkan reformasi birokrasi Kabupaten Kebumen tergolong tinggi. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan metode mengukur tingkat kepuasan dan persepsi masyarakat terhadap pelayanan atau layanan yang diberikan oleh pemerintah, organisasi, atau lembaga tertentu. IKM menilai kualitas pelayanan yang diterima dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. IKM Kabupaten Kebumen semula 80,61 (2019) meningkat menjadi 90,16 (2023). Selain itu, indeks pelayanan publik Kabupaten Kebumen pada Tahun 2023 juga telah mencapai 4,55 atau telah mencapai kategori pelayanan prima. Kepuasan Masyarakat secara umum juga perlu didukung dengan terciptanya kondusivitas wilayah. Pada Tahun 2023 masih terdapat 5 kejadian konflik SARA yang dapat tertangani. Ke depan konflik SARA diharapkan dapat terus diminamilisir.

Pemerintah Kabupaten Kebumen terus berupaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan berpedoman pada visi dan misi pembangunan daerah serta selaras dengan kebijakan nasional, berbagai program strategis telah diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat daya saing daerah. Adapun capaian pembangunan daerah yang telah dilaksanakan selama ini tersaji pada tabel berikut.

Tabel II.25
Capaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	Capaian Indikator Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	
I ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI							
1	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	80,41	78,56	79,29	80,34	81,21
2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	%	13,52	12,46	12,00	9,20	9,20
3	Produksi Listrik per Kapita	kWh/kapita					
4	Intensitas Energi Primer (Produksi Energi PLN)	SBM/Rp milyar					
5	Kapasitas Air Baku	m3/detik					
6	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipa	%	22.11	23.91	17.96	18.42	18.74
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Poin	73,92	64,43	68,17	67,16	69,86

NO .	INDIKATOR	SATUAN	Capaian Indikator Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
8	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	% RT	0,78	0,85	1,18	2,02	3,67
9	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Liter/Kg	37,38	37,16	21,34	52,45	53,26
10	Persentase terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab. Kebumen	%					
11	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	% RT					
12	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	-	-	-	145.971,89 TonCO2Eq	151.888,21 TonCO2Eq
13	Indeks Risiko Bencana	poin	114.67	114.67	102.05	110.78	123
14	Laju Pertumbuhan Penduduk	%			1,11	1,28	1,27
15	Rasio Penduduk	%					103
16	Kepadatan Penduduk	Orang/m ²	1093	1098	1109	1119	1125
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	-1,45	3,71	5,79	5,66	5,3
2	Tingkat Kemiskinan	%	17,59 %	17,83 %	16,41 %	16,34%	15,71%
3	PDRB Per Kapita	Rp Juta	20,80	21,69	23,63	25,59	27,29
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,07	6,03	5,92	5,11	5,07
5	Indeks Gini	angka	0,328	0,35	0,354	0,333	0,327
6	Indeks Pembangunan Manusia	angka	70,32	70,56	71,29	71,88	72,48
7	Usia Harapan Hidup	tahun	74,58	74,73	74,85	74,98	75,22
8	Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH	15	38	29	15	15
9	Prevalensi Stunting	%	15,35	12,13	10,23	9,87	9,17
10	Persentase penemuan kasus TB di Kabupaten Kebumen	%	65,3	51,88	100	100	100
11	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	71	79	106	95	74
12	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan Nasional	%	86	89,10	90,3	96,8	99,07
13	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	7,54	7,55	7,85	7,86	7,87
14	Harapan Lama Sekolah	tahun	13,34	13,35	13,36	13,37	13,39
15	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk SD						
	- Literasi Membaca	%			58,59	78,08	84,28
	- Numerasi	%			42,83	60,38	73,69
16	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk SMP						
	- Literasi Membaca	%			79,1	84,12	87,29
	- Numerasi	%			57,69	61,72	82,34
17	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	-	-	54	61	53,71
18	Indeks Kerukunan Umat Beragama	skor					
19	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan benda	angka	21,98	0	26,92	76,15	14,29

NO .	INDIKATOR	SATUAN	Capaian Indikator Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
20	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan non benda						
21	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	0-100			58,67	63,17	63,17
22	Indeks Ketimpangan Gender	poin	0,416	0,359	0,349	0,344	0,344
23	Persentase Penduduk Usia Kerja yang Bekerja	%					
24	Persentase Penduduk Bekerja yang Memiliki Jenjang Pendidikan SLTA ke Atas	%					
25	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	%					
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH						
1	Angka Ketergantungan	%	45,22	46,85	47,41	48,01	48,64
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	21,26	21,31	21,78	22,24	22,69
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	2,04	2,08	2,55	2,73	2,85
4	Jumlah kamar yang terjual	Unit					
5	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%					
6	Rasio Kewirausahaan	%	2,78	2,21	4,06	2,17	
7	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten	%					
8	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten	%					
9	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	1,65	1,84	2,61	0,5	1,55
10	Return on Aset (ROA) BUMD (BPR)	%					
11	Return on Aset (ROA) BUMD (PDAM)	%					
12	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	69,63	67,76	71,57	74,54	77,37
13	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%					
14	Indeks Inovasi Daerah	skor					
15	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer pada PJU di Kabupaten Kebumen	%					
16	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	0-10					
17	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	19,79	20,37	19,63	18,82	18,5
18	Net Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	-7,36	-5,54	-4,71	-4,56	-3,71
19	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%					
20	Persentase Desa Mandiri	%	0,22	0,22	1,11	13,36	33,85
21	Rasio PAD terhadap PDRB (%)	%					
22	Tingkat Inflasi (%)	%					
23	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Kab/Kota	nilai					

NO .	INDIKATOR	SATUAN	Capaian Indikator Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
24	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	0,37	4,52	-1,18	2,25	2,59
25	LPE Kategori Industri Pengolahan	%	0,67	3,07	6,84	6,31	6
26	Kontribusi PDRB Kab. Kebumen ke Provinsi	%					
27	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Harga Berlaku	%					
28	Kontribusi Seluruh Sektor PDRB diluar Sektor Pertambangan dan Penggalan (%)	%					
29	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	%					
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM						
1	Indeks Reformasi Birokrasi	poin	58.4	59.54	62.81	79.91	86,16 (belum final)
2	Indeks Reformasi Hukum	poin	N/A	N/A	N/A	57,54	98,52
3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	poin	3,42	3,05	3,44	3,7	4,07
4	Indeks Pelayanan Publik	poin	N/A	4.23	4.37	4.55	4,59
5	Indeks Integritas Nasional	poin	NA	76,46	74,8	78,19	75
6	Persentase Penegakan Perda	%					
7	Persentase Capaian Aksi HAM	%				100	100
8	Indeks Demokrasi Indonesia	%					
9	Indeks Daya Saing Daerah	poin		3,1	3,125	3,05	3,41
10	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	%					
11	Total Dana Pihak Ketiga (BPR)/PDRB	%					

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Perencanaan keuangan daerah merupakan elemen penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan merata. Pemerintah daerah dituntut untuk menyusun rencana anggaran yang tepat sasaran dengan mengacu pada prioritas pembangunan serta kebijakan nasional. Dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penting untuk melakukan analisis kebutuhan daerah secara komprehensif agar alokasi anggaran dapat mengakomodasi program prioritas, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, dan pendidikan. Selain itu, transparansi dan partisipasi publik dalam proses perencanaan juga diperlukan untuk memastikan anggaran digunakan secara efektif dan akuntabel.

Pada tahun 2025, perekonomian Indonesia menghadapi dinamika yang cukup kompleks di tengah upaya pemulihan pascapandemi dan tantangan global. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%, meskipun proyeksi dari Bank Dunia sedikit lebih rendah pada angka 5,1%. Kebijakan fiskal dan moneter terus diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk melalui alokasi anggaran sebesar Rp3.621,31 triliun guna mendukung pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kualitas layanan publik. Namun, ketergantungan pada ekspor komoditas masih menjadi perhatian utama, mengingat fluktuasi harga global dapat berdampak signifikan pada penerimaan negara.

Meskipun demikian, perekonomian Indonesia masih menghadapi masalah struktural, seperti menurunnya jumlah kelas menengah hingga 20% dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini berdampak pada daya beli masyarakat yang melemah, sehingga konsumsi domestik sebagai motor penggerak ekonomi melambat. Selain itu, reformasi perpajakan juga menjadi sorotan penting, terutama dalam upaya meningkatkan rasio pajak terhadap PDB menjadi 23% tanpa menaikkan tarif pajak. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen melakukan berbagai reformasi ekonomi dan sosial agar pertumbuhan yang berkelanjutan dapat tercapai, terutama melalui penguatan sektor industri dan program kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Berdasarkan pada Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah, Ruang Lingkup Keuangan Daerah meliputi:

- a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan kepada pihak ketiga;
- c. Penerimaan Daerah;

- d. Pengeluaran Daerah;
- e. Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan;
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. pengelolaan keuangan menyangkut pengelolaan sumber pendapatan daerah, pengeluaran belanja dan sumber-sumber pembiayaan. Suatu daerah yang mampu mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah dan meminimalkan sumber pendapatan transfer, maka daerah tersebut memiliki peluang untuk bisa menjadi daerah yang maju dan mandiri. Struktur ekonomi Kabupaten Kebumen secara umum masih didominasi oleh Sektor industri pengolahan menjadi kontributor utama dalam struktur ekonomi Kebumen dengan sumbangan sebesar 22,69%. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyusul dengan kontribusi 19,86%, sementara sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor memberikan sumbangan 14,34%. Hal tersebut memberikan beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan. Adapun beberapa sektor penyediaan akomodasi dan makan minum menunjukkan pertumbuhan signifikan dengan peningkatan sebesar 10,35% pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan potensi pariwisata dan kuliner di Kebumen yang semakin berkembang. Untuk mendukung pertumbuhan ini, pemerintah daerah perlu meningkatkan infrastruktur pariwisata, promosi destinasi lokal, serta pelatihan bagi pelaku usaha di sektor tersebut. Dengan strategi yang tepat, sektor pariwisata dapat menjadi pilar penting dalam diversifikasi ekonomi Kebumen. Berikut gambaran mengenai kinerja Keuangan masa lalu Kabupaten Kebumen.

3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Kinerja keuangan merupakan salah satu bentuk penilaian dengan asas manfaat dan efisiensi dalam penggunaan anggaran keuangan. Dalam organisasi sektor publik, setelah adanya operasional anggaran langkah selanjutnya adalah pengukuran kinerja untuk menilai prestasi dan akuntabilitas organisasi dan manajemen dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas yang merupakan salah satu ciri *good governance* bukan hanya sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik tersebut dibelanjakan dengan ekonomis, efektif dan efisien. Kinerja keuangan masa lalu dapat dilihat dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah.

Tahap awal dalam menganalisis kinerja keuangan daerah pada masa lalu adalah melihat kemampuan kemandirian fiskal yang mengacu pada tingkat kemandirian atau independensi pemerintahan daerah dalam mengelola keuangan dan anggarannya tanpa terlalu bergantung pada sumber pendapatan dari luar khususnya provinsi dan nasional. Dalam konteks pemerintahan daerah, ini sering kali mengacu pada kemampuan suatu pemerintah untuk menghasilkan pendapatan yang cukup dari sumber-sumber dalam Daerah

seperti pajak, cukai, dan sumber-sumber lainnya, sehingga tidak perlu terlalu bergantung pada bantuan atau transfer dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau sumber pendapatan luar lainnya.

Semakin tinggi derajat kemandirian fiskal maka semakin mandiri atau independen keuangan mereka, sehingga diartikan daerah tersebut stabil dan memiliki keberlanjutan finansial bagi Pemerintahan Daerah, mengurangi risiko ketergantungan pada pihak lain yang mungkin memiliki kepentingan politik atau ekonomi yang berbeda. Adapun klasifikasi DOFD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.1
Skala interval Otonomi Fiskal

No	Derajat Otonomi Fiskal (DOF) (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
1	0,00-10,00	Sangat Kurang
2	10,01-20,00	Kurang
3	20,01-30,00	Sedang
4	30,01-40,00	Cukup
5	40,01-50,00	Baik
6	>50	Sangat Baik

Sumber: Litbang Mendagri, 1991; Wulandari, 2001

Kondisi kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kebumen berdasarkan DOFD dalam 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024) cukup berfluktuasi yaitu mengalami peningkatan dari tahun 2020 (14,59%) sampai 2022 (17,99%) kemudian pada tahun 2023 (15,98%) mengalami penurunan cukup signifikan dan pada tahun 2024 (15,43%) kembali mengalami penurunan. Persentase rata-rata DOFD Kabupaten Kebumen dalam 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024) mencapai 16,13% dapat dikatakan bahwa kemandirian fiskal Daerah Kabupaten Kebumen masih masuk di kategori “kurang”. Agar tingkat kemandirian fiskal kedepan bisa terus meningkat maka Pemerintah Kabupaten Kebumen perlu menjaga konsistensi tumbuhnya PAD dengan terus menggali sumber-sumber keuangan daerahnya baik dari pajak maupun retribusi dengan cara yang lebih inovatif dan berkelanjutan. Adapun perkembangan DOFD Kabupaten Kebumen periode tahun 2020-2024, dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel III.2
Derajat Otonomi Fiskal Daerah
Kabupaten Kebumen, Tahun 2020-2024 (Rupiah)

Uraian	REALISASI				
	2020	2021	2022	2023	2024
PENDAPATAN	2.763.229.307.230	2.832.035.015.733	2.847.196.017.404	2.901.021.509.721	3.137.714.774.634
PENDAPATAN ASLI DAERAH	403.025.963.784	472.017.087.115	512.346.375.475	463.650.961.705	484.175.268.010
DOFD	14,59%	16,67%	17,99%	15,98%	15,43%

Sumber: BPKAD Kabupaten Kebumen, 2025 (diolah)

3.1.1. PENDAPATAN

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud sesuai dengan PP 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah, adalah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Berdasarkan PP No. 12 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur pendapatan daerah terdiri dari:

- (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- (2) Pendapatan Transfer yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Desa); dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagis Hasil dan Bantuan Keuangan);
- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Pendapatan Lainnya

Dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir perkembangan Pendapatan Kabupaten Kebumen terus mengalami pertumbuhan yang positif di mana Pendapatan tahun 2020 mencapai Rp. 2,768 triliun menjadi Rp. 3,137 triliun di tahun 2024. Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen sebagian besar berasal dari pos pendapatan transfer. Secara rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen pada tahun 2020 hingga tahun 2024 pada angka 3,23%. Secara rinci sumber pendapatan Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel III.3
Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024 (Rupiah)

Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
PENDAPATAN	2,763,229,307,230	2,832,035,015,733	2,847,196,017,404	2,901,021,509,721	3,137,714,774,634	3.23
PENDAPATAN ASLI DAERAH	403,025,963,784	472,017,087,115	512,346,375,475	463,650,961,705	484,175,268,010	4.69
Pendapatan Pajak Daerah	100,877,584,517	112,474,854,190	129,843,875,322	137,222,705,502	139,434,789,479	8.43
Pendapatan Retribusi Daerah	22,068,306,403	23,652,739,277	28,375,110,419	28,881,046,419	33,229,154,159	10.77
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	15,727,758,649	16,552,860,815	17,640,585,052	19,123,340,688	21,856,399,056	8.57
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	264,352,314,215	319,336,632,833	336,486,804,682	278,423,869,096	289,654,925,316	2.31
PENDAPATAN TRANSFER	2,223,453,074,285	2,222,632,960,883	2,329,703,641,941	2,435,850,438,454	2,634,976,497,624	4.34
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	2,074,494,939,094	2,059,293,466,080	2,123,296,694,941	2,250,967,223,263	2,366,631,446,811	3.35
Dana Perimbangan	1,624,225,405,094	1,607,599,153,080	1,706,540,321,941	1,783,201,602,063	1,884,523,490,811	3.79
Dana Bagi Hasil Pajak dan SDA	35,146,538,958	1,607,599,153,080	38,220,093,261	36,123,723,591	33,987,975,000	-0.83
Dana Alokasi Umum	1,197,504,293,000	-	1,173,705,068,800	1,239,930,914,430	1,306,369,023,000	2.20
Dana Alokasi Khusus	391,574,573,136	-	494,615,159,880	507,146,964,042	544,166,492,811	8.57

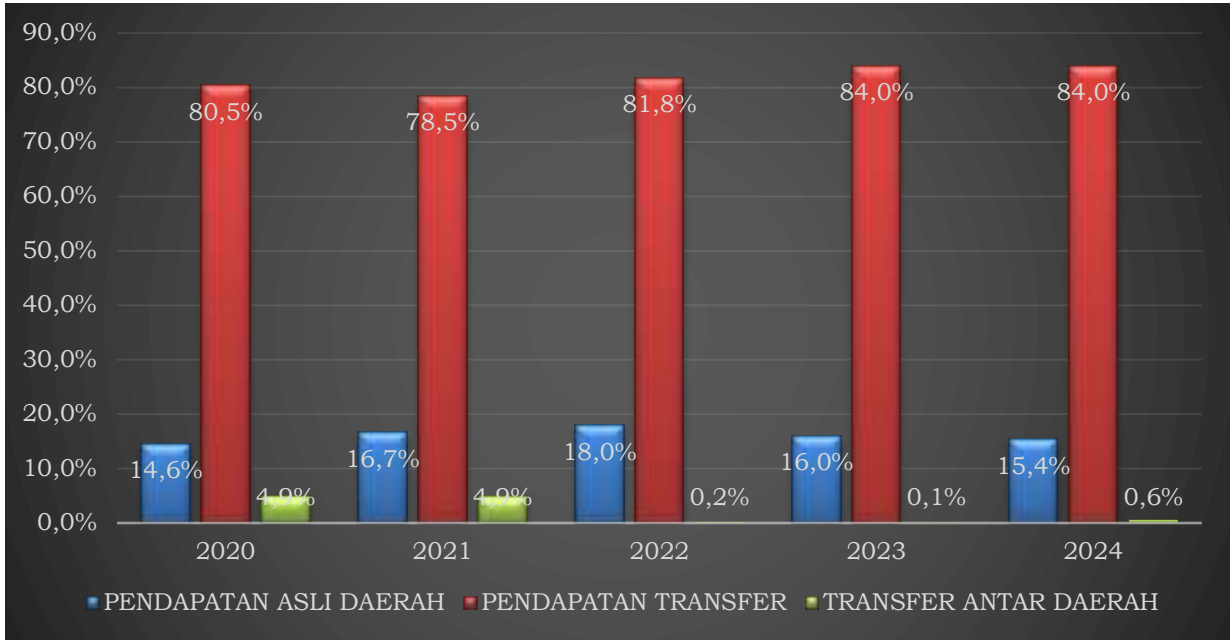


Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuha n (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
Dana Insentif Daerah	-	46,433,860,000	-	11,805,728,000	20,849,462,000	-23.43
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	450,269,534,000	-	-	-	-	-100.00
Dana Otonomi Khusus	-					
Dana Penyesuaian	450,269,534,000					-100.00
Dana Desa		405,260,453,000	416,756,373,000	455,959,893,200	461,258,494,000	4.41
TRANSFER ANTAR DAERAH	148,958,135,191	163,339,494,803	206,406,947,000	184,883,215,191	268,345,050,813	15.85
Pendapatan Bagi Hasil	130,966,524,602	157,491,424,803	175,763,136,000	174,243,934,191	181,816,080,313	8.55
Bantuan Keuangan	17,991,610,589	5,848,070,000	30,643,811,000	10,639,281,000	86,528,970,500	48.09
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	17,991,610,589	5,848,070,000	30,643,811,000	10,639,281,000	86,528,970,500	48.09
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kab/Kota	-	-	-	-	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	136,750,269,161	137,384,967,735	5,145,999,988	1,520,109,562	18,563,009,000	-39.30
Pendapatan Hibah	136,750,269,161	8,794,749,700	5,145,999,988	1,520,109,562	18,563,009,000	-39.30
Pendatan Dana Darurat	-	-	-	-	-	
Pendapatan Lainnya		128,590,218,035	-	-	-	-100.00

Sumber: Dokumen LRA Audited, 2025

Proporsi pendapatan Daerah di Kabupaten Kebumen berdasarkan jenis pendapatan daerahnya, masih didominasi oleh Pendapatan Transfer hampir di atas angka 80% di tiap tahunnya, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih tergolong sangat kecil yaitu di bawah 20%. Dapat dikatakan bahwa kemandirian Kabupaten Kebumen masih tergolong Rendah, karena Pendapatan Daerahnya masih tergantung oleh dana Transfer baik dari Pemerintah Pusat maupun antar Daerah. Selengkapnya proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen berdasarkan jenis pendapatannya dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar III.1.
Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Berdasarkan Jenis Pendapatan Tahun 2020-2024 (persen)



Sumber: Dokumen LRA Audited, diolah

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi 4 (empat) yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah, dan Lain-lain PAD yang Sah.

1) Pajak daerah

Sebagaimana diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak yang menjadi sumber pendapatan pemerintah kabupaten meliputi PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB dan Opsen BBNKB. Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai diberlakukan pada 5 Januari 2025.

Perkembangan pajak daerah mengalami tren yang positif dengan rata-rata pertumbuhan 8,43% dari tahun 2020 sampai dengan 2024, sedangkan untuk tahun 2026 s.d. 2030 pertumbuhan penerimaan pajak daerah diproyeksikan tumbuh rata-rata 5,35%. Secara keseluruhan, meskipun pajak daerah

mengalami pertumbuhan namun masih relatif kecil kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk lebih mengoptimalkan PAD dari pajak daerah, ke depannya akan dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Untuk Opsen PKB dan Opsen BBNKB akan dilakukan sinergitas dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen memungut retribusi jasa umum yang terdiri atas retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi dan/atau penyedotan kakus, retribusi pelayanan tera/tera ulang serta retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

Retribusi daerah yang termasuk Retribusi Jasa Usaha yaitu retribusi pemakaian kekayaan daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, serta Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Retribusi Perijinan Tertentu terdiri atas retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin trayek serta retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (MTA).

Pendapatan retribusi di Kabupaten Kebumen dalam tren meningkat dengan rata-rata kenaikan sebesar 10,77% dari Rp. 22,06 miliar (2019) dan meningkat di tahun 2024 menjadi Rp. 33,22 miliar. Melihat kondisi ini maka perlu dijaga momentum tumbuhnya kembali retribusi daerah terutama pada sumber pelayanan kesehatan, retribusi kebersihan/sampah, parkir dan penggunaan kekayaan daerah.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

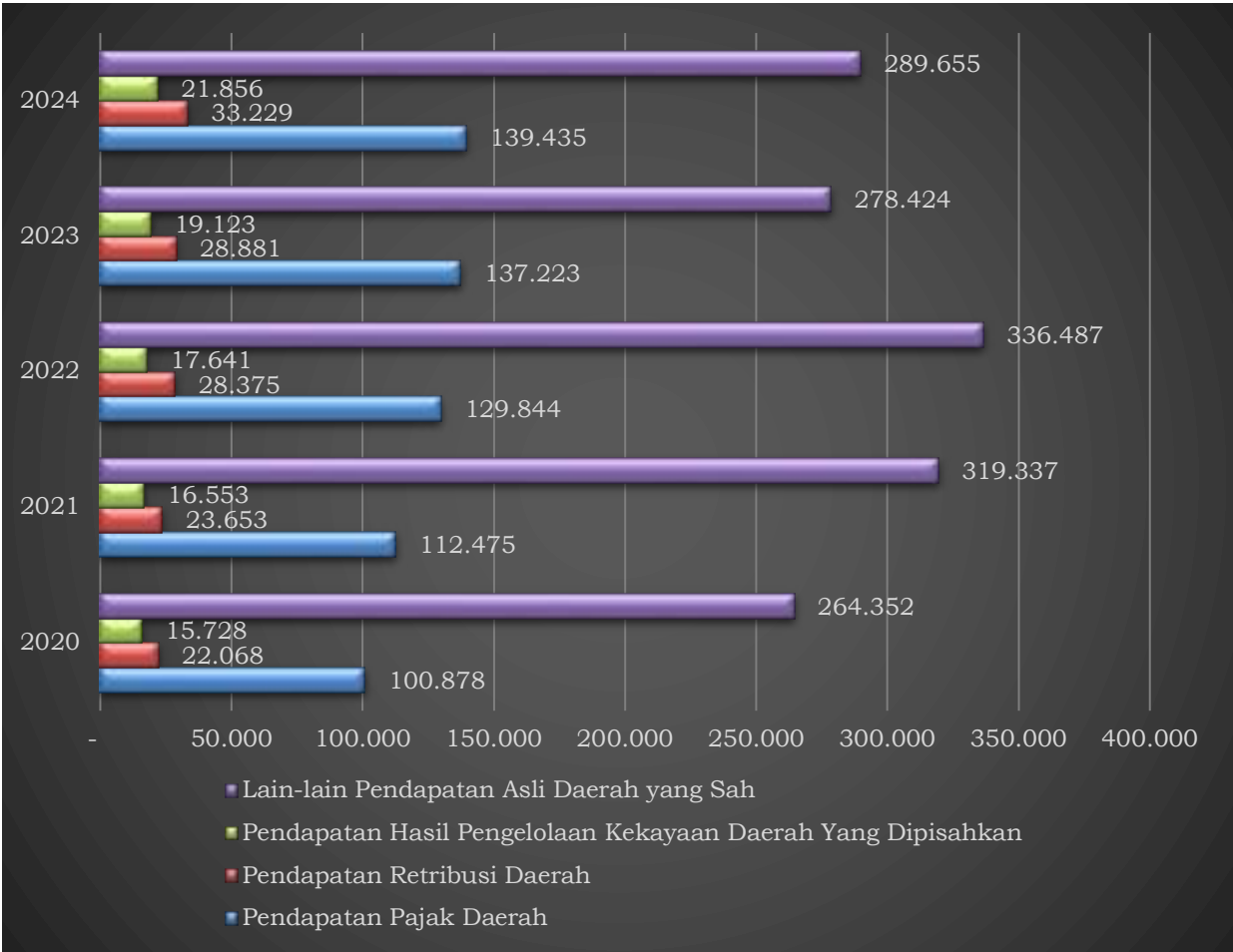
Perkembangan pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami tren positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,57% dari Rp. 15,72 miliar (2020) menjadi Rp. 21,85 miliar (2024). Untuk meningkatkan dividen BUMD ke depan, opsi peningkatan manajemen BUMD dan suntikan modal bisa menjadi pertimbangan.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami kontraksi yaitu sebesar 2,31% dari Rp. 264,35 miliar (2020) menjadi Rp. 289,65 miliar (2023). Penerimaan tertinggi dicapai pada tahun 2022 yang sebesar Rp. 336,48 miliar yang kemudian menurun drastis di tahun 2023. Penurunan tersebut sangat dipengaruhi oleh kinerja BLUD yang relatif menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Secara nominal, keseluruhan komposisi struktur PAD dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar III.2.
Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen
Berdasarkan Jenis PAD Tahun 2020-2024



Sumber: Dokumen LRA Audited, diolah

Jika dilihat berdasarkan kontribusinya, seperti kita ketahui bahwa Lain-lain PAD yang Sah dan Pendapatan Pajak Daerah memiliki kontribusi terbesar dalam pembentukan PAD Kabupaten Kebumen.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer di Kabupaten Kebumen mengalami peningkatan pada periode waktu tahun 2020 hingga tahun 2024, pada tahun 2020 pendapatan transfer sebesar Rp. 2,273. Miliar meningkat menjadi sebesar Rp. 2,634 Miliar pada tahun 2024. Selengkapnya dapat dilihat grafik berikut.

Gambar III.3.

Pendapatan Transfer Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024 (juta rupiah)



Sumber: Dokumen LRA Audited, diolah

Pendapatan Transfer Kabupaten Kebumen berasal dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) dan Transfer Antar Daerah. Secara proporsi pendapatan Transfer ini masih didominasi oleh Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) secara rata-rata di atas 90% selama lima tahun terakhir, sedangkan yang bersumber dari Transfer antar daerah di bawah 10%. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar III.4.

Proporsi Pendapatan Transfer Kabupaten Kebumen Berdasarkan Jenisnya Tahun 2020-2024 (juta rupiah)



Sumber: Dokumen LRA Audited, diolah

c. Pendapatan Lain-Lain Yang Sah

Pendapatan lain-lain yang sah di Kabupaten Kebumen mengalami penurunan cukup signifikan pada periode waktu tahun 2020 hingga tahun 2024, pada tahun 2020 pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp. 136,75 Miliar menurun menjadi sebesar Rp. 18,56 Miliar pada tahun 2024, pendapatan lain-lain yang sah di Kabupaten Kebumen ini bersumber dari Pendapatan Hibah. Selengkapnya dapat dilihat grafik berikut.

Gambar III.5.
Pendapatan Lain-Lain yang Sah Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024
(juta rupiah)



Sumber: Dokumen LRA Audited, diolah

Jika dilihat dari perkembangan Pendapat Daerah dalam lima tahun terakhir maka beberapa kebijakan yang bisa diimplementasikan dalam mengelola pendapatan daerah:

- a. Peningkatan Efisiensi: Pemerintah daerah dapat mengimplementasikan kebijakan untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang dimilikinya, sehingga dapat menghasilkan lebih banyak pendapatan dengan biaya yang lebih rendah.
- b. Diversifikasi Pendapatan: Upaya untuk mencari sumber pendapatan tambahan diluar pajak dan retribusi, seperti pengembangan aset daerah, kerja sama dengan sektor swasta, atau pendapatan dari investasi.
- c. Pembangunan Infrastruktur: Investasi dalam infrastruktur yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah dapat menghasilkan pendapatan tambahan dalam jangka panjang melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan nilai properti.
- d. Pengelolaan Utang: Manajemen utang yang baik dapat membantu pemerintah daerah memperoleh sumber pendapatan tambahan melalui

- pinjaman yang diinvestasikan dalam proyek-proyek yang menghasilkan pendapatan.
- e. Optimalisasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK): Memastikan penggunaan dana perimbangan dari pemerintah pusat sesuai dengan peruntukannya, serta mengoptimalkan penggunaan dana tersebut untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
 - f. Pengembangan Sektor Ekonomi: Mendorong pertumbuhan sektor ekonomi yang potensial di daerah, seperti pariwisata, pertanian, yang dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak dan penerimaan lainnya.
 - g. Transparansi dan Akuntabilitas: Memastikan transparansi dalam pengelolaan pendapatan daerah serta akuntabilitas dalam penggunaannya agar masyarakat dapat memonitor dan mengawasi penggunaan pendapatan tersebut secara efektif.
 - h. Kebijakan pendapatan daerah haruslah seimbang antara memastikan keberlanjutan keuangan pemerintah daerah dan memperhatikan keadilan serta kepentingan masyarakat dalam penggunaan dan penyaluran pendapatan tersebut

3.1.2. BELANJA DAERAH

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud sesuai dengan PP 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah, adalah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu belanja daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pembangunan berdasarkan pembagian kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bahkan sesuai amanat Pasal 50 ayat (2) jika daerah tidak memenuhi alokasi belanja sesuai kewenangannya maka dapat ditunda dan/atau dipotong dana transfer umum dari pemerintah pusat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah no 12 tahun 2019 tentang Keuangan Daerah, belanja daerah terdiri dari:

1) Belanja operasi

Merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

2) Belanja modal

Merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

3) Belanja tidak terduga

Merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

4) Belanja transfer

Merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Belanja Daerah Kabupaten Kebumen selama lima tahun terakhir mengalami perkembangan yang meningkat, dari sebesar Rp. 2,73 triliun pada tahun 2020 meningkat menjadi sebesar Rp. 3,12 triliun pada tahun 2023. Rerata pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen pada tahun 2020-2024 sebesar 1,46%, dimana pertumbuhan paling besar yaitu belanja transfer sebesar 6,03%. Komponen Belanja Daerah Kabupaten Kebumen meliputi belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Selengkapnya belanja daerah Kabupaten Kebumen selama kurun waktu tahun 2020-2024 sebagai berikut.



Tabel III.4
Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024 (rupiah)

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
2	BELANJA	2,737,861,916,080	2,779,840,698,100	2,824,358,293,725	2,977,141,914,829	3,126,715,028,457	3.38
2.1	BELANJA OPERASI	1,839,589,218,113	1,902,638,912,710	1,918,270,224,061	2,020,914,516,871	2,145,807,087,502	3.92
2.1.1	Belanja Pegawai	1,169,696,600,650	1,141,295,419,703	1,142,207,137,167	1,153,775,444,865	1,188,427,007,238	0.40
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	557,946,733,726	666,965,891,277	704,907,763,493	726,725,182,478	800,813,552,333	9.45
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	
2.1.4	Belanja Subsidi	-	484,527,400	313,864,348	675,656,402	1,447,997,750	44.04
2.1.5	Belanja Hibah	81,112,633,737	72,414,174,601	59,752,651,931	128,698,064,603	145,243,409,681	15.68
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	30,833,250,000	21,478,899,729	11,088,807,122	11,040,168,523	9,875,120,500	-24.77
2.1.7	Belanja keuangan	-	-	-	-		
2.2	BELANJA MODAL	288,801,049,018	266,110,950,340	272,301,599,864	278,842,913,538	278,735,832,493	-0.88
2.2.1	Belanja Modal (Tanah)	8,217,772,363	4,062,715,011	1,387,839,580	1,400,551,240	5,547,762,848	-9.36
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	89,087,259,542	112,083,903,500	102,152,506,285	65,799,396,633	117,947,198,909	7.27
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	43,302,380,801	44,827,545,305	34,758,067,305	75,265,208,901	40,299,475,917	-1.78
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	136,180,943,682	97,454,097,763	126,620,498,535	124,921,560,732	102,857,035,252	-6.78
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	12,012,692,630	7,682,688,761	6,894,828,159	11,456,196,032	12,044,972,327	0.07
2.2.6	Belanja Aset Lainnya (Belanja Modal BLUD)	-	-	487,860,000	-	39,387,240	-46.70
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	10,188,825,249	545,318,400	1,295,204,500	409,940,801	323,000,000	-57.80

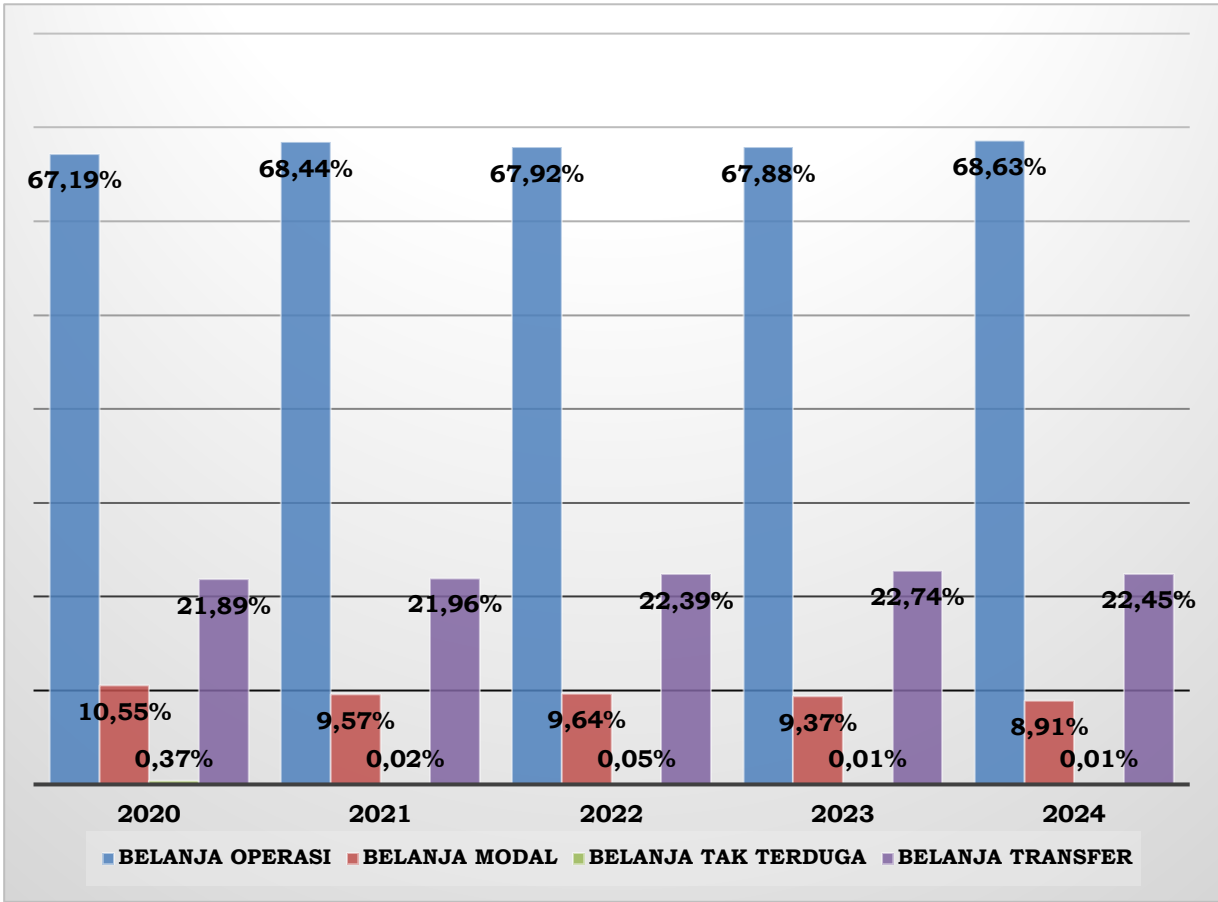


No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
2.3.1	Belanja Tak Terduga	10,188,825,249	545,318,400	1,295,204,500	409,940,801	323,000,000	-57.80
2.4	BELANJA TRANSFER	599,282,823,700	610,545,516,650	632,491,265,300	676,974,543,619	701,849,108,462	4.03
2.4.1	Belanja Transfer Bagi Hasil	13,527,756,700	13,862,929,650	12,402,615,800	13,743,166,881	15,934,319,925	4.18
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	9,657,463,900	13,862,929,650	10,087,758,000	13,743,166,881	15,934,319,925	13.34
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	-	-	2,314,857,800			
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	3,870,292,800	-		-	-	-100.00
2.4.2	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	585,755,067,000	596,682,587,000	620,088,649,500	663,231,376,738	685,914,788,537	4.03
2.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan Ke Provinsi	-	-	0			
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemda Lainnya	-	-	-	-	-	
2.4.2.3	Transfer Bantuan Keuangan KeDesa	583,690,191,000	596,682,587,000	620,088,649,500	663,231,376,738	685,914,788,537	4.12
2.4.2.4	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya (PARPOL)	2,064,876,000	-	-	-	-	-100.00
	SURPLUS / (DEFISIT)	25,367,391,150	52,194,317,633	22,837,723,679	(76,120,405,108)	10,999,746,177	(18.85)

Sumber: Dokumen LRA Audited, 2025

Jika dilihat lebih rinci, hampir semua jenis belanja daerah mengalami tren yang fluktuatif. Proporsi belanja Daerah Kabupaten Kebumen paling mendominasi yaitu Belanja Operasi dengan rasio sebesar hampir rerata di atas 67%, kemudian disusul oleh Belanja Transfer dengan rasio rerata 21% lebih, disusul Belanja Modal yang masih cukup sedikit yaitu di bawah 15% dan belanja tidak terduga rerata di bawah 1%. Seperti terlihat pada grafik berikut.

Gambar III.6.
Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Berdasarkan Jenisnya Tahun 2020-2024

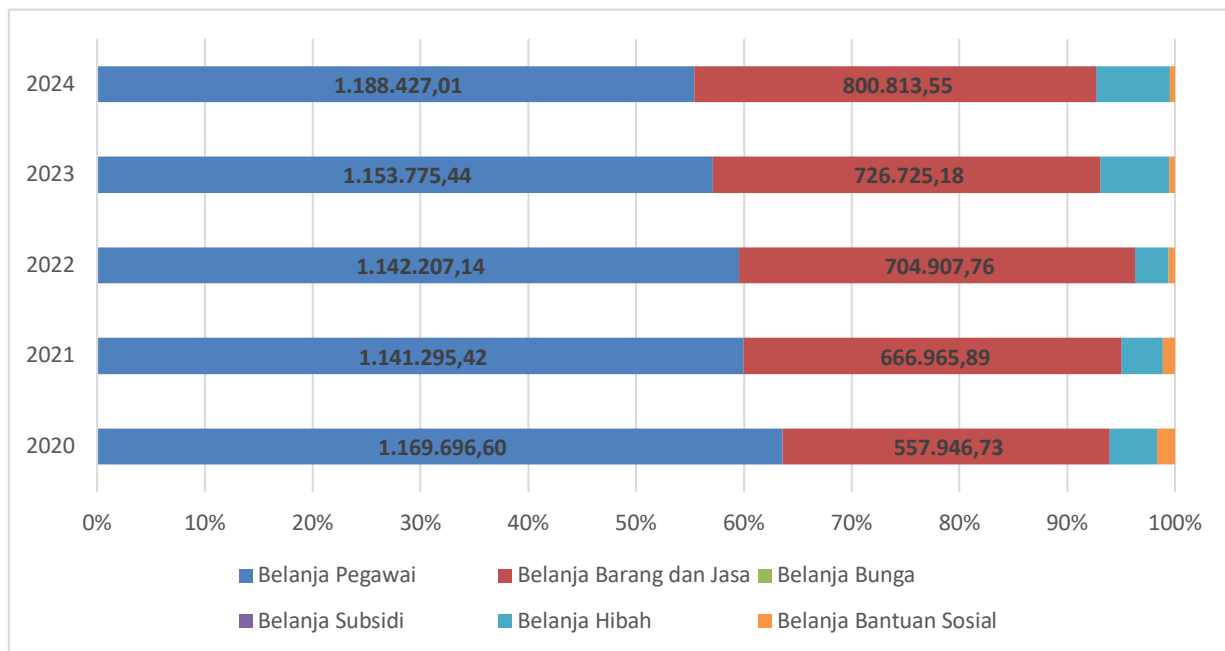


Sumber: Dokumen LRA Audited, diolah

a. Belanja Operasi

Dalam 5 (lima) tahun terakhir belanja operasi Kabupaten Kebumen telah tumbuh 3,92% pertahun dari Rp. 1,839 triliun (2020) menjadi Rp. 2,14 triliun (2024). Sebagian besar atau lebih dari separuh belanja operasi yang ada digunakan untuk belanja pegawai kemudian digunakan untuk belanja barang dan jasa. Jika dilihat perkembangannya, proporsi belanja pegawai terbesar terjadi di tahun 2020 yaitu sebesar 63,58% dari total belanja operasi yang ada, dan kemudian terus ditekan hingga mencapai 55,38% di tahun 2024. Sebaliknya proporsi belanja barang dan jasa proporsinya relatif terus meningkat setiap tahun dari 30,33% (2021) menjadi 37,32% (2024). Sementara belanja operasi lainnya (belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan bantuan sosial) proporsinya tidak pernah lebih dari 8% dan tertinggi terjadi di tahun 2024 yang mencapai 7,30%.

Gambar III.7.
Perkembangan Struktur Belanja Operasi Kabupaten Kebumen
Tahun 2020-2024



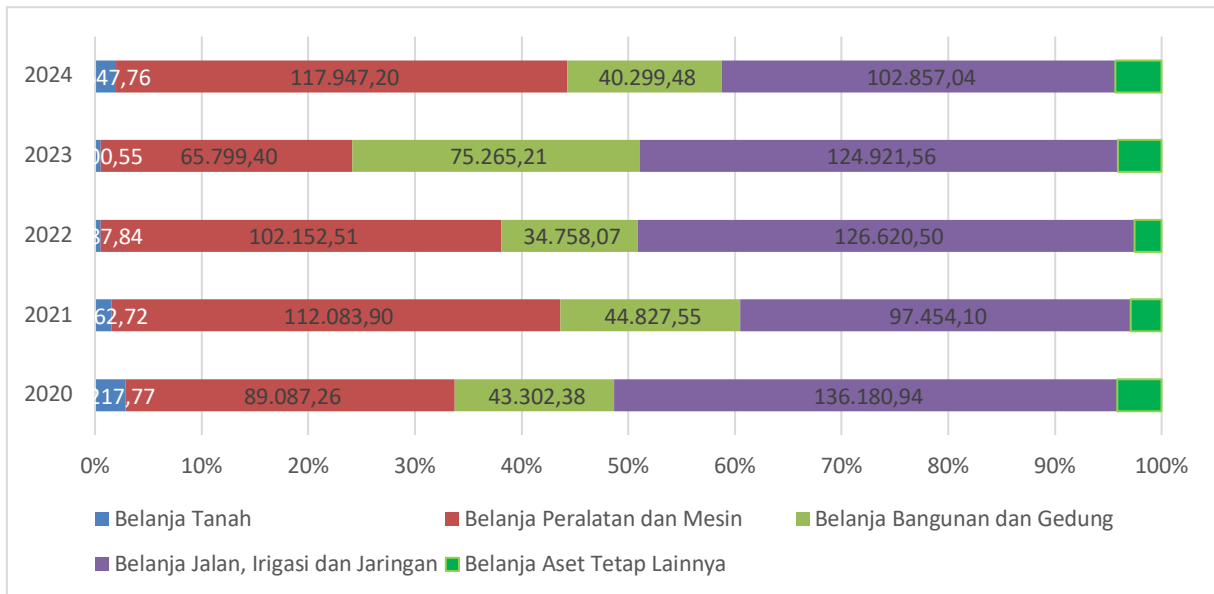
Sumber: BPKAD Kabupaten Kebumen, 2024 (diolah)

Meskipun secara proporsi belanja pegawai terus ditekan agar semakin mengecil namun secara nominal nilainya mengalami peningkatan dari Rp. 1,16 triliun (2020) menjadi Rp. 1,18 triliun (2024) atau rata-rata meningkat 3,92% pertahun. Peningkatan nominal belanja pegawai ini perlu menjadi perhatian agar kedepan tidak mengganggu alokasi proporsi dan kualitas belanja publik khususnya yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Apalagi dengan adanya Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang mengamanatkan agar proporsi belanja pegawai di tahun 2027 tidak lebih dari 30% dan meningkatkan proporsi belanja modal tentunya khususnya yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan Daerah. Posisi proporsi belanja pegawai Kabupaten Kebumen dalam 5 (lima) tahun terakhir masih berkisar 55,38% sehingga perlu Langkah-langkahs strategis untuk menurunkan rasionya baik dengan memangkas besaran tunjangan maupun memperbesar pendapatan Daerah khususnya dari sumber PAD

b. Belanja Modal

Dalam 5 (lima) tahun terakhir belanja modal Kabupaten Kebumen mengalami tren menurun cukup signifikan yaitu -0,88% pertahun dari Rp. 288,80 miliar (2020) menjadi Rp. 278,75 miliar (2024). Menurunnya belanja modal tersebut disebabkan oleh menurunnya hampir semua komponen belanja modal yaitu Belanja tanah (-9,36% pertahun), Belanja Bangunan dan Gedung (-1,78% pertahun), Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan (-6,78 pertahun), dan Belanja Aset Lainnya (-46,70% pertahun). Sementara hanya Belanja peralatan dan mesin yang mengalami peningkatan yaitu 7,27% pertahun dari Rp. 89,08miliar menjadi Rp. 117,94 miliar (2023)

Gambar III.8.
Proporsi Struktur Belanja Modal Kab Kebumen Tahun 2024-2030



Selain untuk menjalankan amanat Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dalam hal meningkatkan proporsi belanja modal, Dalam rangka mendorong perekonomian daerah maka struktur alokasi belanja modal masih perlu mendapatkan penguatan dari sisi besaran anggaran khususnya belanja modal untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, air minum, dan sistem transportasi umum yang dapat meningkatkan konektivitas dan efisiensi logistik, serta membuka peluang investasi dan perdagangan. Begitu juga dengan belanja peralatan dan mesin dalam rangka peningkatan produktivitas melalui teknologi dan inovasi yang dapat meningkatkan produktivitas di berbagai sektor ekonomi, memungkinkan untuk lebih efisien dan bersaing di pasar global. Selain itu Belanja modal dapat diarahkan ke daerah tertentu untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah yang kurang berkembang. Posisi saat ini, proporsi belanja modal rata-rata hanya sebesar - 0,88% pertahun hal ini perlu menjadi perhatian penting mengingat untuk mendorong tumbuhnya investasi yang berdampak pada perekonomian daerah secara umum diperlukan infrastrukturn yang memadai. Untuk itu arah kebijakan belanja ke depan harus berpijak pada peningkatan proporsi belanja modals ecara bertahap dan berkelanjutan.

c. Belanja Tak Terduga

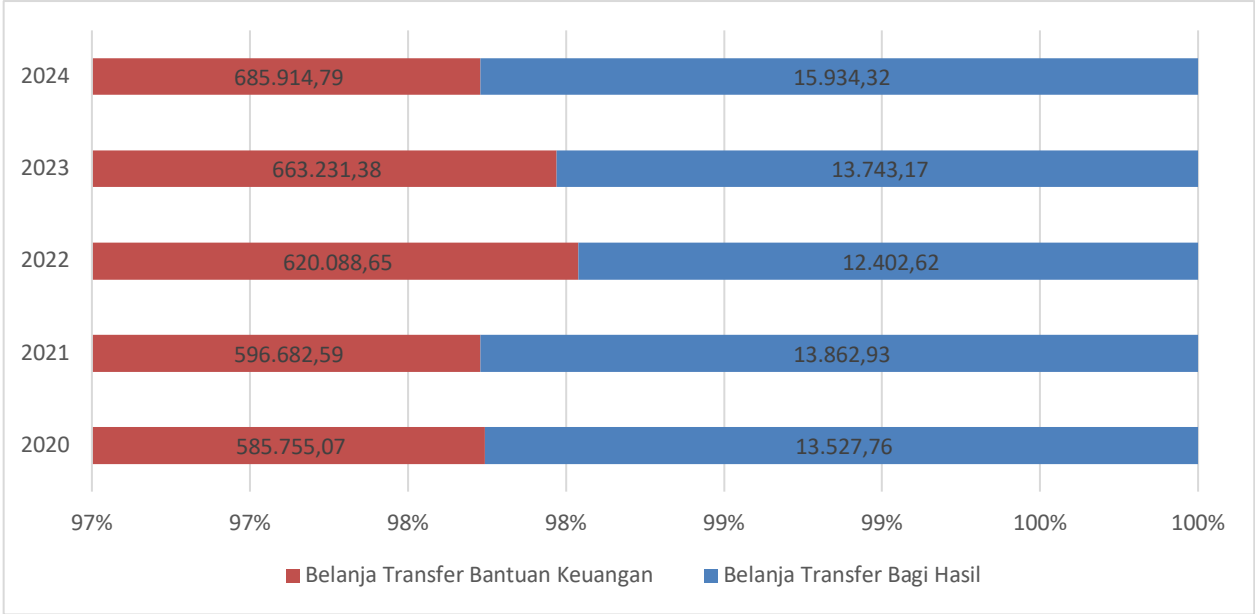
Dalam 5 (lima) tahun terakhir realisasi belanja tak terduga Kabupaten Kebumen mengalami penurunan cukup signifikan yaitu -57,80% pertahun dari Rp. 10.188 juta (2020) menjadi Rp. 323,00 juta (2024). Belanja tak terduga ini dialokasikan untuk belanja yang sifatnya darurat sesuai peraturan perundang-undangan seperti bencana dan sejenisnya.

d. Belanja Transfer

Dalam 5 (lima) tahun terakhir belanja transfer Kabupaten Kebumen relative naik sekitar 4,03% pertahun dari Rp. 599,28 miliar (2020) menjadi Rp. 701,84 miliar (2024). Kenaikan tersebut didorong oleh relative meningkatnya belanja transfer bantuan keuangan (desa) yang tumbuh sebesar 4,03% dari Rp. 585,75 miliar (2020) menjadi Rp. 685,91 miliar (2043). Belanja Transfer Bagi Hasil

mengalami pertumbuhan 4,18% pertahun dari Rp. 13,52 miliar (2020) menjadi Rp. 15,93 miliar (2024).

Gambar III.9.
Perkembangan Komposisi Belanja Transfer Kab. Kebumen
Tahun 2020-2024



Jika dilihat dari aspek surplus/defisit belanja, maka dalam 5 tahun terakhir defisit belanja terjadi di tahun 2023 yang nilai defisitnya sebesar Rp 76,120 miliar. Dengan melihat kinerja belanja daerah 5 (lima) tahun terakhir maka masih diperlukan strategi untuk memastikan pengeluaran yang efisien dan efektif, serta mengoptimalkan manfaat yang diperoleh dari anggaran belanja yang tersedia. beberapa strategi yang dapat diadopsi untuk tujuan tersebut:

- 1) Prioritas Belanja Modal: melakukan efisiensi di pos belanja lainnya khususnya belanja pegawai untuk dialokasikan pada belanja modal khususnya pada jenis belanja modal yang mempunyai daya ungkit terhadap masuknya investasi dan pertumbuhan ekonomi.
- 2) Perencanaan Anggaran yang Cermat: Melakukan analisis mendalam terhadap kebutuhan dan prioritas daerah, serta menyusun anggaran dengan cermat berdasarkan hal tersebut. Ini termasuk mengidentifikasi area-area penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan masyarakat lainnya.
- 3) Transparansi dan Akuntabilitas: Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan mengadopsi praktik akuntabilitas yang kuat. Ini mencakup publikasi anggaran secara terbuka, pelaporan keuangan yang jelas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan anggaran.
- 4) Pengadaan Barang dan Jasa yang Efisien: Memastikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara transparan, kompetitif, dan efisien. Ini dapat mencakup penggunaan sistem lelang terbuka, kerja sama dengan pihak swasta, dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi proses pengadaan.
- 5) Pengelolaan Utang yang Bijaksana: Mengelola utang daerah dengan bijaksana, termasuk pemantauan tingkat bunga dan jangka waktu, serta

memastikan bahwa pinjaman digunakan untuk proyek-proyek yang menghasilkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

- 6) Pengembangan Pendapatan Alternatif: Mencari sumber pendapatan alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada pendapatan dari sumber-sumber konvensional seperti pajak dan dana pemerintah pusat. Ini bisa meliputi pengembangan sektor pariwisata, pengembangan kawasan industri, atau kemitraan dengan sektor swasta untuk proyek-proyek investasi.
- 7) Peningkatan Efisiensi Operasional: Mengidentifikasi area-area di mana efisiensi operasional dapat ditingkatkan, termasuk pengurangan biaya administratif, penggunaan teknologi untuk otomatisasi proses, dan peningkatan produktivitas pegawai.
- 8) Pemantauan dan Evaluasi yang Berkelanjutan: Melakukan pemantauan dan evaluasi secara terus-menerus terhadap pelaksanaan anggaran dan proyek-proyek yang didanai oleh belanja daerah. Ini membantu dalam mengidentifikasi area-area di mana perbaikan dapat dilakukan dan memastikan bahwa dana digunakan secara efektif.

3.1.3. PEMBIAYAAN

Realisasi penerimaan pembiayaan Daerah dalam waktu tahun 2020-2024 mengalami perkembangan yang meningkat, dari sebesar Rp. 194,58 Miliar pada tahun 2019 meningkat menjadi sebesar Rp. 174,96 Miliar pada tahun 2024. Rata-rata pertumbuhan penerimaan pembiayaan Daerah selama tahun 2020- 2024 sebesar -2,62%, yang bersumber dari penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dengan rerata sebesar -5,06% dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah dengan rerata pertumbuhan sebesar -7,29%. Kinerja pengeluaran pembiayaan Daerah dalam waktu tahun 2020-2024 cenderung meningkat dari sebesar Rp. 9,55 Miliar pada tahun 2020 meningkat menjadi sebesar Rp. 3,440 Miliar pada tahun 2024. Rerata pertumbuhan pengeluaran pembiayaan Daerah sebesar -18,06%. Secara rinci Pembiayaan Daerah Kabupaten Kebumen pada tahun 2020-2024 terlihat pada tabel berikut.



Tabel III.5

Perkembangan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024 (Rupiah)

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
3	PEMBIAYAAN	194,582,918,416	216,985,309,566	235,979,627,199	240,811,890,878	174,965,945,878	-2.62
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	204,132,918,416	222,085,309,566	271,279,627,199	283,142,890,878	179,270,945,878	-3.19
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	202,667,918,416	219,950,309,566	269,179,627,199	258,817,350,878	164,691,485,878	-5.06
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	22,225,540,000	12,774,460,000	-42.52
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;	-	-	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah;	-	-	2,100,000,000	2,100,000,000	1,805,000,000	-7.29
3.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1,465,000,000	2,135,000,000	-	-	-	-100.00
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perutndang-undangan.	-	-	-	-	-	-
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	9,550,000,000	5,100,000,000	35,300,000,000	42,331,000,000	4,305,000,000	-18.06
3.2.1	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	-	-	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan modal daerah;	8,050,000,000	3,000,000,000	18,200,000,000	20,231,000,000	2,500,000,000	-25.35
3.2.3	Pembentukan Dana Cadangan;	-	-	15,000,000,000	20,000,000,000	-	-100.00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah;	-	2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000	1,805,000,000	-4.92
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan	1,500,000,000	-	-	-	-	-100.00
	PEMBIAYAAN NETTO	194,582,918,416	216,985,309,566	235,979,627,199	240,811,890,878	174,965,945,878	-2.62



No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN BERKENAAN	219,950,309,566	269,179,627,199	258,817,350,878	164,691,485,770	185,965,692,055	-4.11

Sumber: Dokumen LRA Audited

3.1.4. NERACA DAERAH

Neraca daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Neraca daerah merupakan data dan informasi tentang gambaran berbagai hal tentang aset (aset lancar, aset tetap dan aset lainnya), kewajiban (jangka pendek) dan ekuitas (ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi) suatu pemerintah daerah. Penyusunan neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Neraca daerah juga memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang) dan ekuitas pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan.

1) Aset

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (i) aset lancar, (ii) investasi jangka panjang, (iii) aset tetap, (iv) dana cadangan, dan (v) aset lainnya.

Secara agregat, nilai aset Kabupaten Kebumen dari tahun 2020-2024 relatif mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan mencapai 1,53% per tahun, dari Rp4,525 triliun (2020) menjadi Rp4,809 triliun (2024). Adapun jenis aset yang rata-rata pertumbuhannya positif dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah investasi jangka panjang (8,60% per tahun), aset tetap (1,75% per tahun). Aset lancar yang mengalami penurunan nilai dengan rata-rata penurunan sebesar -4,30 % per tahun, aset lainnya (-1,45% per tahun).

2) Kewajiban

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Jenis kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Kabupaten Kebumen dalam kurun waktu tahun 2020-2024 berupa kewajiban jangka pendek. Nilai kewajiban jangka pendek tersebut cukup berfluktuatif namun relatif mengalami tren meningkat cukup signifikan sebesar 8,91% per tahun dari Rp41,790 miliar (2020) menjadi Rp58,789 miliar (2024). Jika dilihat lebih dalam, maka nilai kewajiban jangka pendek terbesar disumbangkan oleh utang belanja, yang trennya juga relatif meningkat dari Rp40,507 miliar (2020) menjadi Rp56,780 miliar (2024).

3) Ekuitas Dana

Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam Dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Semakin besar nilai ekuitas dana maka akan semakin bagus juga kondisi keuangan suatu daerah. Ekuitas dana terbagi menjadi tiga kategori yakni ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan.

Kategori dana tersebut sekaligus menunjukkan kemampuan modal sendiri yang dimiliki pemerintah daerah, sehingga tidak terlalu tergantung pada utang dalam kegiatan investasinya.

Nilai ekuitas dana Kabupaten Kebumen mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, namun secara agregat mengalami sedikit kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,45% per tahun. Pada tahun 2020, ekuitas tercatat sebesar Rp4,484 triliun, meningkat menjadi Rp4,750 triliun pada tahun 2024. Ekuitas menunjukkan tren kenaikan hingga tahun 2021, tetapi kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022 sebelum kembali meningkat pada tahun 2024.

Penurunan nilai ekuitas dapat berdampak signifikan pada kesehatan keuangan suatu entitas, mengurangi kemampuannya untuk memperoleh pembiayaan tambahan, berinvestasi dalam proyek baru, atau mempertahankan keseimbangan keuangan yang sehat. Oleh karena itu, manajemen risiko dan pengelolaan keuangan yang cermat menjadi penting untuk memitigasi risiko penurunan ekuitas.

Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk menekan penurunan nilai ekuitas yaitu mencegah dan menekan kerugian investasi, mencegah dan menekan penurunan nilai aset, mengelola operasional dengan efisien untuk mencegah penurunan pendapatan atau peningkatan biaya.

Secara keseluruhan Neraca Kabupaten Kebumen disajikan pada Tabel berikut ini.



Tabel III.6
Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
	ASET						
	ASET LANCAR						
	Kas di Kas Daerah	142,972,001,462,00	-	170,249,980,751,00	113,015,912,113,00	141,417,780,235,00	(0,27)
	Kas di Bendahara Penerimaan	34,633,880,00	167,807,726,233,00	41,794,313,00	212,936,280,00	1,187,754,932,00	142,00
	Kas di Bendahara Pengeluaran	206,799,00	400,000,00	1,429,217,00		1,168,450,00	54,18
	Kas di BLUD	71,363,739,445,98	96,376,474,671,98	87,496,345,014,98	49,367,509,581,98	32,797,905,100,98	(17,66)
	Kas di Bendahara FKTP	-	-	-	-	-	
	Kas di Bendahara BOS	-	4,995,026,294,00	1,037,127,884,00	893,163,639,00	136,175,766,00	(59,37)
	Kas dana BOK Puskesmas	-	-	-	-	-	
	Kas Lainnya	5,614,042,929,00	-	-	1,208,402,886,00	12,970,689,783,00	23,29
	Setara Kas	-	-	-	-	-	
	Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	-	
	Piutang Pendapatan	-	-	-	-	-	
	Piutang Pajak	6,846,684,862,00	7,474,389,558,00	7,980,512,527,00	9,358,194,241,00	9,358,194,241,00	8,13
	Penyisihan Piutang Pajak	-	-	-	-	-	
	Piutang Retribusi	2,645,872,630,00	3,453,384,530,00	4,079,655,400,00	4,359,106,740,00	4,359,106,740,00	13,29
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-	-	-	-	
	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-	
	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-	
	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	44,088,606,927,00	91,899,678,013,00	20,390,647,936,94	21,073,792,846,36	21,178,631,980,36	(16,75)
	Penyisihan Piutang Lain- lain PAD yang Sah	-	-	-	-	-	
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-	
	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-	
	Piutang Transfer Antar Daerah	14,715,007,496,00	4,770,941,665,00	3,437,968,245,00	6,047,212,575,00		(100,00)
	Penyisihan Piutang	(8,189,140,922,75)	-	(9,170,645,322,50)	(10,866,464,784,45)	-10,866,464,784,45	7,33
	Beban Dibayar Dimuka	65,598,889,00	71,466,181,86	63,096,715,00	33,705,587,11	33,705,587,11	(15,34)
	Piutang Lainnya	-	(10,027,551,584,00)	-	-	4,242,212,575,00	(175,07)
	Persediaan	39,833,217,851,73	46,743,460,481,05	59,569,450,839,32	51,568,005,606,60	51,568,205,606,60	6,67
	Penyisihan Piutang	-	-	-	-	-	



	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
	Jumlah Aset Lancar	319,990,472,249	413,565,396,044	345,177,363,521	246,271,477,312	268,385,066,213	(4,30)
	INVESTASI JANGKA PANJANG						
	Investasi Non Permanen						
	Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	-	-	-	
	Dana Bergulir	35,000,000,00	-	862,539,000,00	-		(100,00)
	Penyisihan Dana Bergulir			(862,539,000,00)			(100,00)
	Penyisihan Investasi Jangka Panjang	-	-		-		
		-	-	-	-	-	
	Jumlah Investasi Non Permanen	35,000,000	-	-	-	-	(100,00)
	Investasi Permanen						
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	150,397,666,979,57	156,628,976,512,61	168,191,138,468,15	204,963,341,996,07	209,268,000,000,00	8,61
	Jumlah Investasi Permanen	150,397,666,980	156,628,976,513	168,191,138,468	204,963,341,996	209,268,000,000	8,61
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	150,432,666,980	156,628,976,513	168,191,138,468	204,963,341,996	209,268,000,000	8,60
	ASET TETAP						
	Tanah	777,646,197,820,55	797,931,995,264,55	794,019,449,045,55	811,434,718,585,55	816,982,481,433,55	1,24
	Peralatan dan Mesin	870,303,689,719,00	990,208,063,048,00	1,094,696,731,234,00	1,136,839,523,231,00	1,254,796,589,040,00	9,58
	Gedung dan Bangunan	1,519,382,588,544,00	1,633,214,003,010,00	1,664,430,735,238,00	1,741,811,783,185,00	1,782,111,259,102,00	4,07
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2,559,995,132,444,25	2,662,665,223,709,25	2,787,621,602,000,25	2,917,657,832,729,25	3,020,514,867,981,25	4,22
	Aset Tetap Lainnya	132,900,631,859,00	138,004,707,625,00	143,266,418,481,00	111,986,224,096,00	124,031,196,423	(1,71)
	Konstruksi dalam Pengerjaan	12,276,936,657,00	4,355,619,173,00	8,911,032,658,00	9,455,386,708,00	9,455,386,708,00	(6,32)
	Akumulasi Penyusutan	(1,940,935,286,174,30)	(2,240,830,838,853,54)	(2,533,703,596,021,04)	(2,793,035,937,938,29)	-2,793,035,937,938,29	9,53
	Jumlah Aset Tetap	3,931,569,890,870	3,985,548,772,976	3,959,242,372,636	3,936,149,530,597	4,214,855,842,750	1,75
	DANA CADANGAN						
	Dana Cadangan	-	-	15,000,000,000,00	12,774,460,000,00		(100,00)
	Jumlah Dana Cadangan	-	-	15,000,000,000	12,774,460,000	-	(100,00)
	ASET LAINNYA						
	Tagihan Jangka Panjang	-	-	-	-	-	
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	-	-	-	-	
	Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi	-	-	-	-	-	
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	16,134,562,688,00	16,134,562,688,00	16,134,562,688,00	16,134,562,688,00	-	(100,00)
	Aset Tak Berwujud	3,914,993,030,00	5,253,586,030,00	5,873,323,030,00	5,922,595,030,00	5,961,982,270,00	11,09
	Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	(2,191,976,584,82)	(2,614,022,456,00)	(3,301,923,144,00)	(3,301,923,144,00)	10,79
	Aset Lain-Lain	105,406,781,516,00	103,407,577,455,00	121,819,628,982,00	132,099,376,769,44	148,233,939,457,44	8,90



	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(1,671,194,650,00)	-	-	(34,132,133,152,00)	(34,132,133,152,00)	112,59
	Jumlah Aset Lainnya	123,785,142,584	122,603,749,588	141,213,492,244	116,722,478,191	116,761,865,431	(1,45)
	JUMLAH ASET	4,525,778,172,682	4,678,346,895,121	4,628,824,366,869	4,516,881,288,096	4,809,270,774,394	1,53
	KEWAJIBAN						
	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	34,314,950,00	-	9,326,302,00	6,438,730,00	6,438,730,00	(34,18)
	Pendapatan Diterima Dimuka	1,248,346,951,00	917,294,717,83	1,109,331,028,94	2,002,249,183,97	-	(100,00)
	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemda Lainnya			35,466,051,092,00	-		(100,00)
	Utang Belanja	40,507,386,063,00	63,080,169,175,00	-	-	56,780,960,062,00	8,81
	Utang Beban	-	-	-	-	-	
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	-	-	2,002,249,183,97	#DIV/0!
	Pendapatan Lain - Lain PAD yang Sah Diterima Dimuka	-	-	-	-	-	
	Utang Bunga	-	-	-	56,780,960,062,00	-	(100,00)
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	41,790,047,964	63,997,463,893	36,584,708,423	58,789,647,976	58,789,647,976	8,91
	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat						
	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya						
	Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank						
	Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank						
	Utang Dalam Negeri - Obligasi						
	Utang Jangka Panjang Lainnya						
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-	
	JUMLAH KEWAJIBAN	41,790,047,964	63,997,463,893	36,584,708,423	58,789,647,976	58,789,647,976	8,91
	EKUITAS						
	EKUITAS						
	Ekuitas	4,483,948,124,718,03	4,614,349,431,228,11	4,592,239,658,445,71	4,458,091,640,119,65	4,750,376,629,279,65	1,45
	Sisa Kas BLUD						
	Sisa Kas JKN						
	JUMLAH EKUITAS	4,483,948,124,718	4,614,349,431,228	4,592,239,658,446	4,458,091,640,120	4,750,376,629,280	1,45

	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	4,525,738,172,682	4,678,346,895,121	4,628,824,366,869	4,516,881,288,096	4,809,166,277,256	1,53

4) **Rasio Keuangan**

Untuk menganalisis kondisi keuangan Kabupaten Kebumen periode tahun 2020-2024 digunakanlah beberapa analisis rasio keuangan. Rasio keuangan Pemerintah Daerah diukur dengan menggunakan analisis terhadap rasio likuiditas, solvabilitas dan aktivitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. **Rasio Likuiditas**

Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Rasio inilah yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu Pemerintah Daerah. Jika pemerintah daerah mampu memenuhi kewajibannya berarti pemerintah daerah tersebut likuid, sedangkan jika pemerintah daerah tidak mampu memenuhi kewajibannya berarti pemerintah daerah tersebut likuid. Ada beberapa rasio likuiditas yang dapat digunakan untuk menganalisis namun disini pendekatan yang dipakai adalah rasio lancar (current ratio). Rasio ini juga dikenal sebagai rasio aset cepat atau rasio acid-test. Rasio ini mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa harus menjual persediaan. Pada umumnya, rasio lancar di atas 2 telah dianggap baik.

Rasio lancar Pemerintah Kabupaten Kebumen tahun 2020-2024 sedikit berfluktuatif namun trennya semakin menurun dari nilai 7,66 % (2020) menjadi 4,57% (2024). Hal ini menunjukkan bahwa aset lancar di tahun 2020 nilainya 7-8 kali lipat dibandingkan total kewajiban lancar yang dibebankan. Sementara di tahun 2024 nilai aset lancarnya 4-5 kali lipat dibandingkan total kewajiban lancar yang ada di tahun 2024. Dari nilai rasio lancar 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan bahwa Kabupaten Kebumen memiliki tingkat likuiditas yang kurang baik terutama pada tahun 2023 dan 2024 karena nilainya dibawah 5. Untuk itu yang perlu dijaga adalah membatasi jumlah kewajiban lancarnya agar mengecil atau bahkan tidak melebihi nilai aset lancar yang ada

Tabel III.7

Rasio Lancar Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
ASET LANCAR	319,990,472,249	413,565,396,044	345,177,363,521	246,271,477,312	268,385,066,213
KEWAJIBAN LANCAR	41,790,047,964	63,997,463,893	36,584,708,423	58,789,647,976	58,789,647,976
RASIO LANCAR	7.66	6.46	9.44	4.19	4.57

Sumber: Dokumen LRA Audited, diolah

b. **Rasio Solvabilitas**

Rasio hutang terhadap ekuitas Kabupaten Kebumen pada tahun 2024 tercatat sebesar 0,012. Sedangkan rasio utang (kewajiban) terhadap aset pada tahun yang sama juga sebesar 0,012. Hasil analisis Debt to Assets Ratio (DAR) dan Debt to Equity Ratio (DER) menunjukkan nilai di sekitar 1%, bahkan di bawah 1 per 100. Hal ini menggambarkan bahwa aset sangat mampu untuk memenuhi dan menutup kewajiban di masa mendatang, serta komposisi sumber pendanaan entitas hampir seluruhnya berasal dari ekuitas. Secara keseluruhan, kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen dilihat dari kinerja neraca daerah menunjukkan kondisi yang sangat sehat.

a) **Total Debt to Equity Ratio (Rasio Hutang terhadap Ekuitas)**

Kesehatan pengelolaan keuangan pemda bisa diukur dari perspektif keuangan internal. Salah satunya dengan pengukuran rasio utang terhadap modal atau dengan istilah yang lebih dikenal sebagai debt to equity ratio. Debt to Equity Ratio (rasio utang terhadap modal) atau yang bisa disingkat DER adalah rasio hutang terhadap ekuitas. Bisa juga disebut dengan rasio hutang modal. Pengertian dari Debt to Equity Ratio (DER) adalah sebuah rasio keuangan yang membandingkan jumlah hutang dengan ekuitas yang menunjukkan kemampuan modal sendiri dari entitas tersebut untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Semakin rendah rasio ini, semakin sedikit ketergantungan perusahaan pada utang dan semakin stabil keuangannya.

Jika dilihat dari data yang ada, rasio hutang terhadap ekuitas Kabupaten Kebumen dari tahun 2020-2024 berfluktuatif tapi cenderung naik secara agregat. Nilai rasio terendah terjadi di tahun 2022 yaitu sebesar 0,008 dan yang tertinggi terjadi di tahun 2021 sebesar 0,014. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rasio terbaik (terendah) terjadi di tahun 2022 di mana nilai kewajiban yang ada jumlahnya hanya sekitar 0,80% dari total ekuitas yang ada. Sementara nilai rasio tertinggi (terburuk) terjadi di tahun 2021 di mana jumlah total kewajiban yang ada jumlahnya hanya sekitar 1,39% dari total ekuitas yang ada. Adapun capaian rasio terakhir tahun 2023 senilai 0,012 atau nilai kewajiban yang ada hanya 1,24% dari total ekuitas yang ada.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa jumlah kewajiban kurun waktu 2020-2024 nilainya jauh lebih kecil dibandingkan ekuitas yang dimiliki sehingga dapat dikatakan kemampuan Kabupaten Kebumen cukup untuk menjamin pembayaran hutang yang ada masih sangat baik.

Tabel III.8

Analisis Rasio Hutang Terhadap Ekuitas Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
KEWAJIBAN	41,790,047,964	63,997,463,893	36,584,708,423	58,789,647,976	58,789,647,976
EKUITAS	4,483,948,124,718	4,614,349,431,228	4,592,239,658,446	4,458,091,640,120	4,750,376,629,280
TOTAL DEBT TO EQUITY RATIO	0.009	0.014	0.008	0.013	0.012

Sumber: Dokumen LRA Audited, diolah

b) **Total Debt to Total Asset Ratio (Rasio Hutang terhadap Total Aktiva)**

Total Debt to Total Asset Ratio (Rasio Hutang terhadap Total Aktiva) merupakan perbandingan antara hutang (baik hutang lancar maupun hutang jangka panjang) dengan jumlah seluruh aktiva (aset). Secara akuntansi, rasio ini menunjukkan berapa bagian dari keseluruhan aktiva yang dibelanjai oleh hutang atau menunjukkan proporsi total aset yang dibiayai oleh hutang. Semakin rendah rasio ini, semakin sedikit risiko perusahaan terhadap perubahan suku bunga dan pembayaran bunga.

Pada dasarnya, rasio ini tidak berbeda dengan rasio sebelumnya (Rasio Hutang

terhadap Ekuitas). Bedanya, dalam rasio ini, total hutang dibandingkan dengan nilai total aset tanpa dikurangi kewajiban yang ada. Oleh karena itu, rasionya akan sedikit lebih kecil. Jika dilihat dari data yang ada, rasio hutang terhadap total aktiva (total aset) Kabupaten Kebumen dari tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi, di mana angka rasio tertinggi (terburuk) terjadi di tahun 2021 dengan nilai rasio 0,0137, dan yang terendah (terbaik) terjadi di tahun 2022 dengan nilai rasio 0,0079. Oleh karena itu, secara keseluruhan Kabupaten Kebumen tidak memiliki risiko gagal bayar kewajiban yang ada. Artinya, secara keseluruhan, nilai total aset daerah nilainya jauh lebih besar daripada jumlah hutang yang ada di Kabupaten Kebumen.

Tabel III.9
Analisis Rasio Hutang terhadap Total Aktiva Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
KEWAJIBAN	41,790,047,964	63,997,463,893	36,584,708,423	58,789,647,976	58,789,647,976
AKTIVA	4,525,778,172,682	4,678,346,895,121	4,628,824,366,869	4,516,881,288,096	4,809,270,774,394
TOTAL DEBT TO ASSET RATIO	0,0092	0,0137	0,0079	0,0130	0,0122

c. Rasio Aktivitas

Secara akuntansi rasio ini digunakan untuk mengukur efektifitas manajemen dalam menggunakan sumber daya ekonomis untuk menghasilkan penjualan yang menguntungkan.

a) Perputaran aktiva tetap (*fixed assets turn over*)

Adalah rasio antara penjualan dengan aktiva tetap yang mengukur efisiensi penggunaan aktiva tetap atau perputaran aktiva tetap. Rasio ini menunjukkan bagaimana perusahaan dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kebumen menggunakan aktiva tetapnya seperti tanah, gedung, jalan, kendaraan, mesin-mesin, perlengkapan kantor dll. untuk menghasilkan keuntungan atau dalam lingkup pemerintah daerah keuntungan tersebut berbentuk Penerimaan Asli Daerah (PAD). Semakin besar rasionya maka semakin baik pula manajemen sumber daya ekonomis tersebut dalam memperoleh keuntungan/ penerimaan daerah.

Perkembangan rasio perputaran aktiva tetap Kabupaten Kebumen dalam kurun waktu 2020-2024 memiliki tren sedikit berfluktuasi namun terus meningkat. Rasio tahun 2020 mencapai 0,103 dan meningkat hingga 0,115 di tahun 2024. Itu artinya kinerja Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam memanfaatkan aset tetapnya semakin membaik, di mana pada tahun 2020, dari Rp3,931 triliun nilai aset yang ada, mampu mendorong dan menghasilkan keuntungan (PAD) sebesar Rp403,02 miliar atau 10,25% dari nilai aset tetap, dan pada tahun 2024 berkinerja lebih baik lagi, di mana dengan memanfaatkan aset senilai Rp4,214 triliun, mampu mendorong dan menghasilkan keuntungan (PAD) sebesar Rp484,17 miliar atau 11,49% dari nilai aset. Jika dilihat kinerjanya, maka secara umum perbandingan pemanfaatan aset tetap terhadap perolehan PAD masih sangat kecil bahkan cenderung menurun. Oleh karena itu, efektivitas pendayagunaan aset masih perlu dioptimalkan.

Tabel III.10

Analisis Perputaran Aktiva Tetap Kabupaten Kebumen

Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
PAD	403,025,963,784	472,017,087,115	512,346,375,475	463,650,961,705	484,175,268,010
AKTIVA TETAP (Aset Tetap)	3,931,569,890,870	3,985,548,772,976	3,959,242,372,636	3,936,149,530,597	4,214,855,842,750
TRASIO PERPUTARAN AKTIVA TETAP	0,103	0,118	0,129	0,118	0,115

b) Perputaran total aktiva (*total assets turn over*)

Hampir mirip dengan perputaran aktiva tetap, perputaran total aktiva juga digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan total aset daerah untuk menghasilkan keuntungan atau dalam lingkup pemerintah daerah keuntungan tersebut berbentuk Penerimaan Asli Daerah (PAD). Dengan kata lain semakin tinggi rasionya semakin efisien pemerintah daerah dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan PAD. Sebaliknya Rasio Perputaran Aset yang rendah menandakan kurang efisiennya manajemen dalam menggunakan asetnya dan kemungkinan besar adanya masalah manajemen ataupun produksinya.

Rasio perputaran total aktiva Kabupaten Kebumen dalam kurun waktu 2020-2024 mengalami perkembangan positif, di mana rasio dari nilai 0,089 di tahun 2020 menjadi 0,101 di tahun 2024. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemanfaatan total aset di tahun 2020 mampu memberikan keuntungan PAD sebesar 8,9% dari nilai total aset itu sendiri. Kinerja pemanfaatan total aset di tahun 2024 semakin membaik hingga mampu menghasilkan 10,1% keuntungan dari nilai total aset yang ada.

Secara keseluruhan dari tahun 2020-2024 rata-rata nilai total aset daerah terbilang memiliki kinerja semakin membaik namun ke depan masih perlu ditingkatkan melalui beberapa strategi antara lain:

- a) Pengembangan Aset Komersial: Menggunakan aset tetap seperti tanah kosong, bangunan tidak terpakai, atau properti komersial untuk dikembangkan menjadi pusat perbelanjaan, pusat hiburan, atau kompleks perkantoran yang bisa disewakan kepada pihak swasta. Dengan cara ini, pemerintah daerah dapat menghasilkan pendapatan sewa yang signifikan.
- b) Penyediaan Infrastruktur: Membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, tol, atau pusat logistik yang dapat menarik investasi dan meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah tersebut. Pemerintah daerah dapat memberikan izin operasi atau kontrak kepada pihak swasta yang akan membayar sejumlah uang kepada pemerintah daerah sebagai imbalan.
- c) Pemanfaatan Sumber Daya Alam: Jika daerah memiliki sumber daya alam seperti hutan, tambang, atau lahan pertanian yang luas, pemerintah daerah dapat menjual hak pengelolaannya kepada pihak swasta dengan cara lelang atau kontrak konsesi. Pendapatan dari penjualan hak

pengelolaan ini dapat menjadi sumber PAD yang signifikan.

- d) Pembangunan Properti Publik: Membangun properti publik seperti gedung perkantoran, pusat pemerintahan, atau fasilitas publik lainnya yang dapat disewakan kepada pihak swasta atau digunakan untuk kegiatan komersial. Pendapatan sewa dari properti ini dapat menjadi sumber pendapatan tetap bagi pemerintah daerah.
- e) Kemitraan Publik-Privat (KPP): Melakukan kemitraan dengan pihak swasta untuk mengembangkan atau mengelola aset tetap. Dalam kemitraan ini, pemerintah daerah dapat memberikan izin pengelolaan atau kontrak kepada pihak swasta dengan imbalan bagi hasil atau pembayaran sewa.
- f) Peningkatan Efisiensi Operasional: Memastikan aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah daerah dikelola dengan efisien dan optimal. Hal ini mencakup pemeliharaan rutin, penggunaan energi yang efisien, dan manajemen biaya operasional secara keseluruhan.
- g) Pengembangan Wisata: Pemerintah daerah dapat mengembangkan aset tetap seperti pantai, bukit/gunung, benda sejarah dan lainnya menjadi destinasi wisata yang menarik. Pendapatan dari sektor pariwisata dapat menjadi sumber PAD yang signifikan.
- h) Pengelolaan Aset Digital: Memanfaatkan teknologi informasi untuk mengoptimalkan pengelolaan aset tetap, termasuk pemantauan dan pemeliharaan, serta menghasilkan data yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.

Tabel III.11

Analisis Perputaran Total Aktiva Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
PAD	403,025,963,784	472,017,087,115	512,346,375,475	463,650,961,705	484,175,268,010
TOTAL AKTIVA (Jumlah Aset)	4,525,778,172,682	4,678,346,895,121	4,628,824,366,869	4,516,881,288,096	4,809,270,774,394
RASIO PERPUTARAN TOTAL AKTIVA	0,089	0,101	0,111	0,103	0,101

3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Analisis kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan penggunaan anggaran dan baik untuk belanja maupun pengeluaran pembiayaan pada periode tahun anggaran sebelumnya. Analisis ini digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan dimasa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kebumen 2020-2024 tergambar pada dua aspek penting yaitu proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan. Fokus analisis dilakukan pada orientasi alokasi belanja daerah dan pembiayaan daerah pada kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah yang dijalankan. Oleh karena itu berbagai belanja aparatur perlu ditekan seefisien mungkin agar dapat meningkatkan belanja

publik.

3.2.1 PROPORSI PENGGUNAAN ANGGARAN

Proporsi penggunaan anggaran menguraikan sekurang-kurangnya mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan realisasi belanja. Oleh karena itu Analisis proporsi penggunaan anggaran dilakukan melalui analisis sebagai berikut:

- a. Analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur;
- b. Analisis belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Belanja pemenuhan aparatur terdiri dari belanja pegawai meliputi gaji dan tunjangan dan belanja pegawai lainnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama terdiri dari seluruh biaya yang harus dikeluarkan baik itu berupa belanja maupun pengeluaran pembiayaan yang wajib untuk dibayarkan.

Proporsi belanja pemenuhan untuk pemenuhan aparatur terhadap total pengeluaran dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren penurunan dengan rata-rata persentasenya sebesar 39,85%. Proporsi belanja aparatur terbesar terjadi di tahun 2020 yang mencapai 42,57% sedangkan capaian terakhir tahun 2024 sebesar 37,96%. Jika dilihat dari keseluruhan perkembangan proporsinya yang tidak pernah lebih dari 43% bisa dikatakan proporsi belanjanya masih cukup sehat namun perlu ditekan ke depan. Oleh karena itu Pemerintah Daerah tetap harus memperhatikan proporsi belanja aparatur agar tidak melebihi batas yang dapat memengaruhi keseimbangan anggaran dan keberlanjutan keuangan jangka panjang. Dalam beberapa kasus, peningkatan belanja pegawai yang signifikan tanpa pertumbuhan yang sesuai dalam pendapatan bisa menjadi beban fiskal yang besar bagi pemerintah, sehingga memerlukan pengelolaan dan perencanaan yang cermat agar belanja publiknya bisa dijaga kualitas maupun kuantitasnya.

Rincian proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.12
Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024 (dalam Jutaan)

No.	Tahun	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase (%)
1	2020	1.169.696,60	2.747.411,92	42,57%
2	2021	1.141.295,42	2.784.940,70	40,98%
3	2022	1.142.207,14	2.859.658,29	39,94%
4	2023	1.153.775,44	3.019.472,91	38,21%
5	2024	1.188.427,01	3.131.020,03	37,96%
Rata-Rata		1.159.080,32	2.908.500,77	39,85%

Untuk menghitung kemampuan belanja daerah, maka diperlukan analisis terhadap pengeluaran Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama. Pada dasarnya analisis terhadap realisasi pengeluaran Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama bertujuan untuk menghitung kebutuhan pendanaan

belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari dan ditunda sehingga harus dibayar dalam suatu tahun anggaran pemerintah daerah seperti: gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya serta pengeluaran pembiayaan yang wajib dibayarkan. Total Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan.

Realisasi Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat serta Prioritas Utama selama tahun 2020-2024 cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,93% pertahun dari Rp. 1,900 triliun (2020) menjadi Rp. 2,051 triliun (2024). Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi oleh naiknya belanja hibah (15,68%), Belanja transfer bagi hasil (4,76%), Belanja transfer bantuan (4,76%). Jika dikaitkan dengan rata-rata belanja daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir yang sebesar Rp. 1,940 triliun maka rata-rata proporsi Total Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas mencapai 67,15%. Itu artinya masih ada ruang fiskal untuk belanja publik sekitar 32,85%. Hal ini perlu mendapatkan perhatian pemerintah Daerah agar ruang fiskal untuk belanja publik ke depan bisa ditingkatkan kembali. Oleh karena itu diperlukan strategi khususnya untuk menekan biaya aparatur antara lain:

- 1) Formulasi dan Pemanfaatan Pinjaman Daerah yang Efektif: melakukan formulasi pinjaman daerah untuk pembangunan yang sifatnya produktif dan berdampak luas.
- 2) Evaluasi Kebutuhan Pegawai: Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan pegawai di setiap unit organisasi Ini termasuk peninjauan terhadap struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab, serta kinerja pegawai yang sudah ada. Dengan memahami kebutuhan yang sebenarnya, pemerintah dapat menghindari pengadaan pegawai yang tidak perlu.
- 3) Optimalisasi Produktivitas: Mendorong produktivitas pegawai dengan memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan, menggunakan teknologi informasi dan sistem manajemen kinerja yang efisien, serta menerapkan praktik kerja yang efektif. Dengan meningkatkan produktivitas, pemerintah daerah dapat mencapai hasil yang lebih baik dengan jumlah pegawai yang lebih sedikit.
- 4) Pengendalian Pengadaan Pegawai Baru: Mengendalikan pengadaan pegawai baru dengan membatasi jumlah penerimaan pegawai baru atau memperlambat proses rekrutmen. Pemerintah dapat memprioritaskan pengisian posisi yang kritis atau strategis, sambil mempertimbangkan opsi untuk menutup atau menggabungkan posisi yang tidak terlalu penting.
- 5) Peningkatan Efisiensi Administrasi: Mengurangi birokrasi dan proses administrasi yang berlebihan yang dapat menghambat efisiensi pelayanan publik. Memperkenalkan inovasi dalam sistem administrasi seperti penggunaan teknologi informasi untuk mengotomatisasi tugas-tugas rutin atau integrasi layanan online dapat membantu mengurangi belanja pegawai.
- 6) Pengendalian Tunjangan dan Insentif: Mengkaji ulang dan menyesuaikan tunjangan dan insentif yang diberikan kepada pegawai, seperti tunjangan

kinerja atau bonus. Memastikan bahwa insentif tersebut sesuai dengan kinerja dan kontribusi yang sebenarnya, serta terkait dengan pencapaian tujuan organisasi.

- 7) Penghapusan atau Penyederhanaan Jabatan: Melakukan peninjauan terhadap struktur jabatan dan mempertimbangkan untuk menghapus atau menyederhanakan jabatan yang tidak lagi relevan atau diperlukan. Ini dapat membantu mengurangi jumlah pegawai secara keseluruhan.

Secara keseluruhan perkembangan pengeluaran Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama dapat dilihat pada tabel berikut



Tabel III.13

Realisasi Pengeluaran Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2023 (dalam Jutaan)

No	Uraian	Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Belanja Operasi Wajib dan Mengikat	1,281,642,48	1,235,673,02	1,213,362,46	1,294,189,33	1,344,993,54	1,21
1.1	Belanja Pegawai	1,169,696,60	1,141,295,42	1,142,207,14	1,153,775,44	1,188,427,01	0,40
1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	#DIV/0!
1.3	Belanja Subsidi	-	484,53	313,86	675,66	1,448,00	
1.4	Belanja Hibah	81,112,63	72,414,17	59,752,65	128,698,06	145,243,41	15,68
1.5	Belanja Bantuan Sosial	30,833,25	21,478,90	11,088,81	11,040,17	9,875,12	(24,77)
1.6	Belanja keuangan	-	-	-	-	-	
2	Belanja Transfer	599,282,82	610,545,52	632,491,27	676,974,54	701,849,11	4,76
2.1	Belanja Transfer Bagi Hasil	13,527,76	13,862,93	12,402,62	13,743,17	15,934,32	4,75
2.2	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	585,755,07	596,682,59	620,088,65	663,231,38	685,914,79	4,76
3	Belanja Tak Terduga	10,188,83	545,32	1,295,20	409,94	323,00	(16,02)
4	Pengeluaran Pembiayaan	9,550,00	5,100,00	35,300,00	42,331,00	4,305,00	(65,08)
4.1.	pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	-	-	-	-	-	#DIV/0!
4.2	penyertaan modal daerah;	8,050,00	3,000,00	18,200,00	20,231,00	2,500,00	(40,71)
4.3.	pembentukan Dana Cadangan;	-	-	15,000,00	20,000,00	-	
4.4	Pemberian Pinjaman Daerah;	-	2,100,00	2,100,00	2,100,00	1,805,00	
4.5.	pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan	1,500,00	-	-	-	-	(100,00)
	Total Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas	1,900,664,13	1,851,863,86	1,882,448,93	2,013,904,82	2,051,470,64	1,93

3.2.2 ANALISIS PEMBIAYAAN

Analisis pembiayaan menguraikan sekurang-kurangnya mengenai besaran nilai penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit riil anggaran daerah. Defisit riil anggaran terjadi jika pendapatan yang ada tidak sebanding dengan nilai belanja dan pengeluaran pembiayaan yang ada pada tahun yang sama. Oleh karena itu besaran defisit riil anggaran daerah juga harus memperhatikan besaran nilai pembiayaan netto yang dapat digunakan untuk menutupnya yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, serta penerimaan piutang daerah.

Dalam lima tahun terakhir (2020-2024) defisit riil anggaran terjadi pada tahun 2022 dan 2023 dimana defisit riil pada tahun tersebut secara berturut-turut sebesar Rp -12.462,28 juta Rp. -118.451 juta. Sementara pada tahun 2020, 2021, 2024 terjadi surplus anggaran.

Tabel III.14
Surplus/Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kebumen 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Realisasi Pendapatan Daerah	2,763,229.31	2,832,035.02	2,847,196.02	2,901,021.51	3,137,714.77
	dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	2,737,861.92	2,779,840.70	2,824,358.29	2,977,141.91	3,126,715.03
3	Pengeluaran Pembiayaan	9,550.00	5,100.00	35,300.00	42,331.00	4,305.00
	(Defisit Riil)	15,817.39	47,094.32	-12,462.28	- 118,451.41	6,694.75

Sumber : Dokumen LRA Audited, diolah

Komposisi penutup defisit riil anggaran Kabupaten Kebumen pada tahun 2020 - 2024 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya.

Tabel III.15
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kebumen 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	202,667.92	219,950.31	269,179.63	258,817.35	164,691.49
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;	-	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah;	-	-	-	-	-
penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perutndang-undangan	-	-	-	-	-
Total Komposisi Penutup Defisit	202,667.92	219,950.31	269,179.63	258,817.35	164,691.49

Sumber : Dokumen LRA Audited, diolah

Dengan analisis realisasi sisa lebih perhitungan anggaran, dapat diketahui kinerja APBD tahun sebelumnya yang lebih rasional dan terukur dengan melihat gambaran mengenai komposisi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) pada periode sebelumnya. Jika dilihat dari sumber SiLPA di Kabupaten Kebumen dari tahun 2020-2024 terlihat bahwa nilai SiLPA tersebut berasal dari Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa sisa penghematan belanja atau akibat lainnya merupakan komponen utama penutup defisit rill anggaran yang ada di Kabupaten Kebumen. Secara rinci perhitungan analisa sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) Kabupaten Kebumen 2020-2024 sebagai berikut.



Tabel III.16

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Kebumen 2020-2024

Uraian	2020		2021		2022		2023		2024	
	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
Jumlah SiLPA	202,667.92	100%	219,950.31	100%	269,179.63	100%	258,817.35	100%	164,691.49	100%
Pelampauan Penerimaan PAD	-		-		-		-		-	
Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan										
Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah										
Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	202,667.92	100%	219,950.31	100%	269,179.63	100%	258,817.35	100%	164,691.49	100%
Kewajiban Kepada Pihak Ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-		-		-		-		-	
Kegiatan Lanjutan	-		-		-		-		-	

Sumber : Dokumen LRA Audited

3.3. KERANGKA PENDANAAN

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kemampuan keuangan dan kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah yang terdiri dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah serta ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan yaitu pengeluaran pembiayaan daerah dan belanja daerah. Pada analisis kerangka pendanaan juga telah diasumsikan berlakunya ketentuan pada UU HKPD maupun ketentuan teknis yang telah tercantum pada Permendagri 15/2023.

3.3.1 PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH

Proyeksi pendapatan daerah adalah perkiraan atau estimasi pendapatan yang akan diperoleh pemerintah daerah dalam periode tahun 2025-2029. Proyeksi ini penting untuk perencanaan keuangan serta untuk memastikan keberlanjutan keuangan pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah. Ada beberapa acuan yang dipakai dalam rangka memproyeksikan pendapatan daerah antara lain:

- 1) Analisis Historis: Melakukan analisis terhadap data historis pendapatan daerah untuk menentukan tren dan pola pengeluaran. Ini dapat melibatkan peninjauan data pendapatan tahun sebelumnya serta faktor-faktor yang memengaruhi perubahan pendapatan dari waktu ke waktu.
- 2) Analisis Ekonomi: Mengkaji kondisi ekonomi baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, inflasi, dan kebijakan fiskal dapat berpengaruh pada pendapatan daerah.
- 3) Perkiraan Pertumbuhan Pendapatan: Berdasarkan data historis dan analisis ekonomi, membuat proyeksi tentang pertumbuhan pendapatan masa depan khususnya mencakup pendapatan pajak,, pendapatan dari investasi, dan sumber-sumber pendapatan lainnya.
- 4) Analisis Demografi: Memahami demografi penduduk daerah dan bagaimana hal itu dapat memengaruhi permintaan layanan publik dan ketersediaan sumber daya. Misalnya, pertumbuhan populasi dapat menghasilkan peningkatan pendapatan dari pajak properti dan pajak penjualan.
- 5) Perencanaan Sensitivitas: Mengidentifikasi risiko-risiko potensial dan mengembangkan skenario alternatif berdasarkan variabel-variabel yang mungkin berubah, seperti perubahan kebijakan pajak atau fluktuasi ekonomi dan apakah proyeksi tersebut realistis dan konservatif.
- 6) Evaluasi Kinerja: Melakukan evaluasi berkala terhadap proyeksi pendapatan dengan pendapatan yang sebenarnya untuk mengetahui keberhasilan proyeksi dan mengidentifikasi area-area di mana penyesuaian mungkin diperlukan.
- 7) Peningkatan Pengelolaan Keuangan: Mengimplementasikan praktik-praktik pengelolaan keuangan yang baik, seperti pengendalian biaya dan diversifikasi sumber pendapatan, untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi.

- 8) Tahun dasar proyeksi yang digunakan adalah angka realisasi APBD tahun 2024 dan/atau target APBD tahun 2025.

Berdasarkan data beberapa tahun sebelumnya, anggaran pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Kebumen masih bertumpu pada dana transfer pemerintah pusat khususnya dari sumber dana perimbangan meskipun trennya menurun dalam beberapa tahun terakhir. Kenyataan ini membuat Pemerintah Kabupaten Kebumen masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat dalam membiayai pembangunannya, sehingga dalam merumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos pendapatan dalam APBD benar-benar memperhatikan penetapan arah kebijakan berkaitan dengan target pendapatan daerah dan upaya-upaya yang ditempuh dalam mencapai target tersebut serta dasar hukum penerimaannya. *Dalam memproyeksi pendapatan, proyeksi lebih difokuskan pada penerimaan yang bersumber dari daerah sendiri (PAD) dengan melihat berbagai variabel yang berkaitan dengannya.*

Pertumbuhan Pendapatan Daerah kabupaten Kebumen tahun 2026-2030 diproyeksikan hanya tumbuh $\pm 1,90\%$ pertahun dari Rp. 3,037 triliun (2026) menjadi Rp. 3,298 triliun (2029). Hal ini didasarkan pada kebijakan efisiensi dari pusat yang diperkirakan akan ada penurunan transfer pemerintah pusat. Untuk menjaga kualitas perencanaan anggaran yang lebih realistis maka fokus pertumbuhan Pendapatan Daerah ini akan didongkrak oleh target tumbuhnya PAD. Sementara untuk sumber pendapatan seperti pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah akan diproyeksikan dengan tingkat pertumbuhan flat sama nilai dengan angka realisasi tahun terakhir yaitu realisasi tahun 2023 ataupun target tahun 2024.

Untuk proyeksi PAD sendiri diproyeksikan pada tahun 2025-2029 tumbuh $\pm 4,14\%$ pertahun dari Rp. 3583,67 miliar (2026) menjadi Rp. 670,38 miliar (2030). Dari seluruh komponen sumber PAD Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditargetkan tumbuh 2-7% pertahun kecuali Lain-lain PAD yang sah yang diproyeksikan turun -0,58% pertahun. Target proyeksi ini didasarkan kondisi 5 (lima) tahun terakhir yang rata-rata pertumbuhannya relatif kecil.

3.3.1.1 PROYEKSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Proyeksi PAD dilakukan secara detil per komponen pembentuk PAD yaitu:

a. Proyeksi Pajak Daerah

Proyeksi pajak daerah untuk tahun 2026-2030 dilakukan terhadap ke-13 komponen pajak daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Perda PDRD). Proyeksi pertumbuhan Pajak Daerah yang sebesar $\pm 5,35\%$ pertahun dari Rp. 255,71 miliar (2025) menjadi Rp. 300,075 miliar (2030) juga mempertimbangkan pada rata-rata realisasi pertumbuhan pajak daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir yang juga tumbuh $\pm 8,43\%$ pertahun. Fokus pertumbuhan pajak ini dengan memanfaatkan potensi opsen PKB dan opsen BBNKB yang akan mampu mendorong pajak daerah secara signifikan. Selain itu juga dengan

memaksimalkan potensi pajak lainnya khususnya dari pos pajak hotel, restoran dan hiburan.

Adapun secara umum target minimal proyeksi pertumbuhan pajak daerah tersebut dilakukan melalui serangkaian kebijakan utama yaitu:

- 1) **Penilaian Properti yang Akurat:** Memastikan penilaian properti yang akurat dapat membantu pemerintah daerah mengenakan pajak properti khususnya NJOP yang sesuai dengan nilai aktualnya. Ini dapat dilakukan dengan melakukan pembaruan teratur terhadap data properti dan menggunakan teknologi seperti sistem informasi geografis (SIG) untuk membantu dalam proses penilaian.
- 2) **Peningkatan Kepatuhan:** Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban mereka dapat menjadi langkah penting. Pemberian informasi yang jelas dan mudah dimengerti tentang kewajiban pajak, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran, dapat membantu meningkatkan tingkat kepatuhan.
- 3) **Diversifikasi Sumber Pajak:** Selain pajak properti, pemerintah daerah dapat mengembangkan sumber-sumber pendapatan lainnya seperti pajak penjualan, pajak hotel, atau bahkan pajak atas industri tertentu yang signifikan di Kabupaten Kebumen. Diversifikasi ini dapat membantu mengurangi ketergantungan pada satu jenis pajak saja.
- 4) **Inisiatif Peningkatan Layanan:** Meningkatkan kualitas layanan publik seperti infrastruktur, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan transportasi dapat membuat masyarakat lebih rela membayar pajak jika mereka melihat manfaat yang diterima dari pajak yang mereka bayar.
- 5) **Kemitraan Publik-Swasta:** Bermitra dengan sektor swasta untuk mengembangkan proyek-proyek infrastruktur atau pengembangan properti yang dapat meningkatkan nilai properti dan pendapatan pajak daerah.
- 6) **Peninjauan Kembali Insentif Pajak:** Meninjau kembali insentif pajak kepada industri atau pemilik properti tertentu untuk mendorong investasi atau pengembangan. Namun, jika insentif ini tidak memberikan manfaat yang diharapkan, maka perlu dievaluasi kembali untuk memastikan bahwa pajak yang diterima oleh pemerintah daerah sebanding dengan manfaat yang diberikan.
- 7) **Evaluasi Kebijakan Pajak:** Melakukan evaluasi terhadap kebijakan pajak yang ada secara berkala untuk memastikan kebijakan pajak masih relevan dan efektif dalam menghasilkan pendapatan yang dibutuhkan.
- 8) **Peningkatan Pengawasan dan Transparansi:** Membangun sistem pengawasan yang kuat dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pajak daerah yang dapat membantu mencegah kebocoran dan penyalahgunaan potensi pajak daerah, sehingga memastikan bahwa semua potensi pendapatan pajak yang ada dapat dipungut dengan efisien dan efektif.

b. Proyeksi Retribusi Daerah

Seperti halnya pajak daerah, proyeksi retribusi daerah untuk tahun 2026-2030 dilakukan terhadap ke-11 komponen retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Perda PDRD). Proyeksi pertumbuhan Retribusi Daerah tahun 2026-2030 ditargetkan tumbuh $\pm 2,90\%$ pertahun dari Rp. 255,71 miliar (2026)

menjadi Rp. 326,49 miliar (2030) sementara realisasi rata-rata pertumbuhan retribusi daerah 5 (lima) tahun terakhir mengalami pertumbuhan sebesar 10,77% pertahun dengan capaian tertinggi ada di tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 33,29 miliar. Diperlukan strategi untuk terus bisa memaksimalkan pendapatan retribusi daerah agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan melalui:

- 1) Analisis Potensi Sektor dan Layanan: Identifikasi sektor dan layanan yang memiliki potensi besar untuk menghasilkan retribusi. Ini bisa termasuk sektor pariwisata, terminal, perizinan usaha, parkir, pasar, pelayanan kesehatan, persampahan dan sebagainya.
- 2) Perbaikan Sistem Pungutan Retribusi: Memastikan bahwa sistem pungutan berjalan efisien dan transparan. Meminimalkan birokrasi, mempercepat proses, dan memperbarui peraturan serta tarif yang sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini.
- 3) Pengawasan dan Penegakan Hukum: Memastikan pengawasan dan penegakan hukum yang ketat terhadap pelanggaran retribusi. Ini mencakup pemeriksaan secara rutin, sanksi yang tegas terhadap pelanggar, dan penggunaan teknologi untuk mendeteksi kecurangan.
- 4) Pengembangan Infrastruktur: Meningkatkan infrastruktur yang mendukung pengumpulan retribusi, seperti sistem pembayaran online, terminal parkir yang canggih, atau perangkat lunak manajemen pajak yang efisien.
- 5) Promosi dan Pemasaran: Melakukan promosi aktif terhadap layanan dan fasilitas yang dikenakan retribusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan menarik lebih banyak pengguna atau pelanggan.
- 6) Kemitraan Swasta: Membangun kemitraan dengan sektor swasta untuk mengelola beberapa layanan atau fasilitas, dengan mempertimbangkan kontrak yang menguntungkan pihak daerah dalam hal pendapatan retribusi.
- 7) Diversifikasi Pendapatan Retribusi: Tidak hanya mengandalkan satu sumber pendapatan, tapi mencari cara untuk mendiversifikasi pendapatan daerah, termasuk eksplorasi potensi baru dan inovasi dalam pengumpulan retribusi.
- 8) Evaluasi dan Penyesuaian: Melakukan evaluasi secara berkala terhadap sistem pengumpulan retribusi, mengevaluasi keberhasilan strategi yang diterapkan, dan melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan.
- 9) Peningkatan Kualitas Layanan: Menawarkan layanan yang berkualitas kepada pelanggan, sehingga mereka merasa nilai yang mereka bayarkan sebanding dengan layanan yang mereka terima.
- 10) Edukasi Masyarakat: Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya membayar retribusi dan dampak positifnya bagi pembangunan dan penyediaan layanan publik

c. Proyeksi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diperoleh dari bagian laba atas penyertaan modal pada 5 BUMD yaitu Apotik Lukulo, PDAM, PD BPR Kebumen, PD BPR BKK Kebumen dan Bank Jateng. Proyeksi pada Tahun 2026-2029 mendasari draft akhir Naskah Akademik Raperda Penyertaan Modal Tahun 2026-2030. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tahun 2026-2030 diproyeksikan tumbuh $\pm 7,43\%$ pertahun dari Rp.

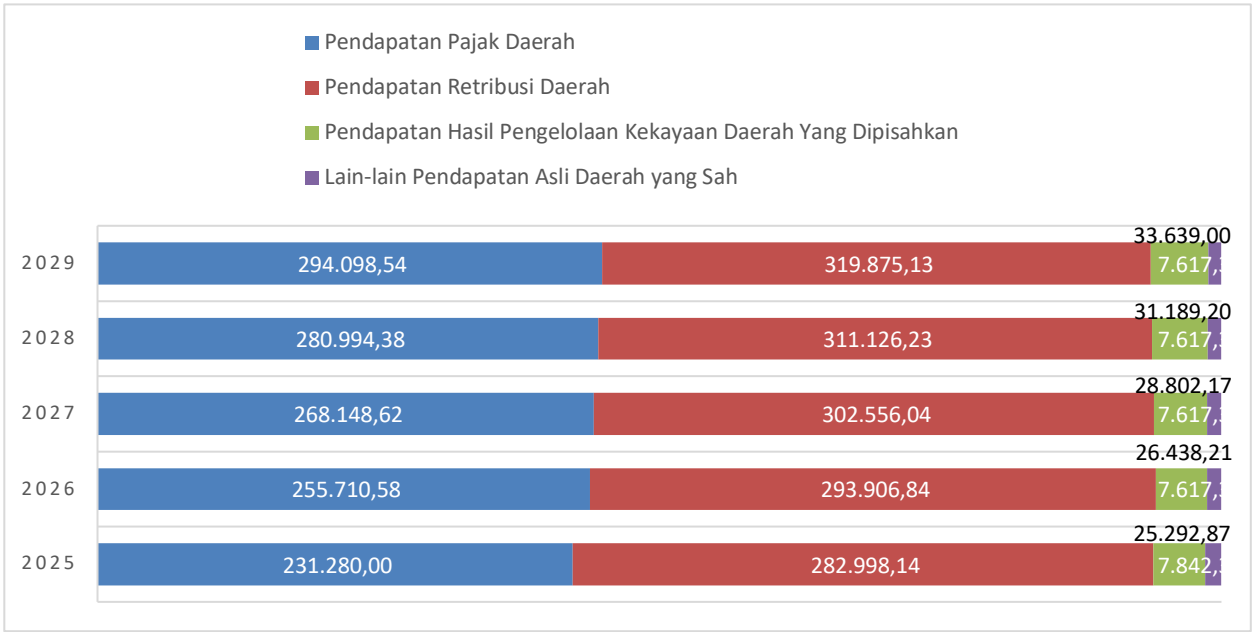
26,43 miliar (2026) menjadi Rp. 36,19 miliar (2030). Target ini juga mempertimbangan pertumbuhan masa lalu yang secara rata-rata pertumbuhannya mencapai 8,57% pertahun. Untuk mencapai target Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan maka perlu didorong BUMD yang terdapat penyertaan modal di dalamnya agar dapat lebih produktif agar dalam meningkatkan labanya sehingga porsi dividen yang didapat juga semakin besar melalui:

- 1) Mendorong Penyusunan Rencana Bisnis yang Komprehensif: BUMD dan swasta yang terkait harus menyusun rencana bisnis yang jelas dan komprehensif yang mencakup target keuangan jangka pendek dan jangka panjang, strategi pemasaran, pengelolaan risiko, dan lain-lain.
- 2) Mendorong Pengelolaan Efisiensi Operasional: Memastikan operasional khususnya BUMD berjalan dengan efisien, termasuk pengelolaan biaya yang efektif, optimalisasi proses produksi, dan manajemen rantai pasok yang baik.
- 3) Mendorong Inovasi Produk dan Layanan: Mengembangkan produk dan layanan baru yang memenuhi kebutuhan pasar dan memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Inovasi dapat mencakup peningkatan kualitas, fitur baru, atau pendekatan yang berbeda dalam pemasaran.
- 4) Mendorong Peningkatan Kualitas Produk dan Layanan: Fokus pada peningkatan kualitas produk dan layanan yang ditawarkan khususnya oleh BUMD untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada dan menarik pelanggan baru.
- 5) Mendorong Ekspansi Pasar: Mencari peluang untuk memperluas pasar khususnya BUMD, baik secara regional maupun nasional. Ini bisa melalui ekspansi geografis, diversifikasi produk, atau penetrasi pasar yang lebih dalam.
- 6) Mendorong Kemitraan Strategis: Membangun kemitraan strategis dengan perusahaan swasta atau entitas lain yang dapat mendukung pertumbuhan dan pengembangan BUMD, seperti dalam hal teknologi, distribusi, atau pemasaran.
- 7) Mendorong Manajemen Risiko yang Efektif: Mengelola risiko dengan baik untuk menghindari kerugian yang tidak perlu dan memastikan keberlanjutan operasional. Ini termasuk manajemen risiko finansial, operasional, dan reputasi.
- 8) Mendorong Pengembangan Sumber Daya Manusia: Melakukan investasi dalam pengembangan karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap kesuksesan BUMD.
- 9) Pemantauan dan Evaluasi Berkala: Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja keuangan dan operasional BUMD, serta melakukan penyesuaian strategis jika diperlukan.
- 10) Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas: Menjaga transparansi dalam pengelolaan keuangan dan operasional BUMD, serta memastikan akuntabilitas kepada pemegang saham dan pihak yang berkepentingan lainnya.

d. Proyeksi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah

Proyeksi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah kurun waktu 2026-2030 ditargetkan melambat di -0,58% pertahun dan stagnan dari 2026 hingga 2030 di Rp. 7,61 miliar. Strategi umum untuk mencapai target pertumbuhan ini adalah dengan memaksimalkan dan mengefektifkan kinerja BLUD bersamaan dengan optimlaisasi hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang dapat meningkatkan penerimaan jasa giro dan pendapatan bunga.

Gambar III.10.
Target Komposisi PAD Kab Kebumen Tahun 2026-2030

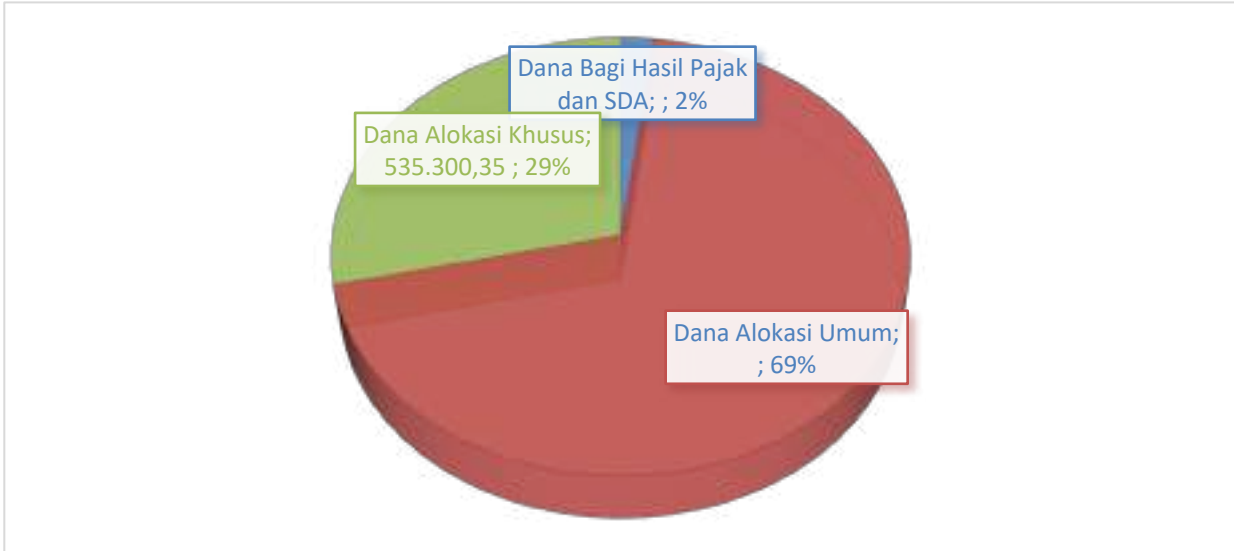


3.3.1.2 PROYEKSI PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen masih didominasi oleh sumber Pendapatan Transfer yang besar kecilnya terutama sangat dipengaruhi oleh kemampuan keuangan negara. Untuk menjaga kualitas perencanaan keuangan daerah agar tidak terlalu dinamis sebagai dasar menyusun penganggaran pembangunan, maka pendekatan proyeksi Pendapatan Transfer khususnya transfer pemerintah pusat menggunakan pendekatan konstan sesuai pendapatan transfer yang diperoleh (realisasi) pada tahun 2024. Dengan kata lain pertumbuhan Pendapatan Transfer ditargetkan melambat di 1,49% tetap dari Rp. 2,43 triliun di 2026 menjadi Rp 2,62 triliun di 2030. setiap tahun dari tahun 2026 sampai tahun 2030 Proyeksi pendapatan transfer dilakukan terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat serta pendapatan transfer antardaerah yang diperoleh dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Proyeksi pendapatan transfer pemerintah pusat dilakukan terhadap dana perimbangan dan dana desa, sedangkan insentif fiskal tidak diproyeksikan dan dianggap sebagai bagian dari dana bagi hasil. Untuk sumber transfer pemerintah pusat ditargetkan 1,57% per tahun dengan target Rp2,32 triliun di 2026 menjadi 2,47 triliun di 2030. Distribusi dana perimbangan terbesar adalah Dana Alokasi Umum sebesar 69% dari total dana perimbangan. Transfer Pemerintah pusat lainnya, tidak ditargetkan

Gambar III.11.
Target Komposisi Dana Perimbangan Kabupaten Kebumen Tahun 2026-2030



3.3.1.3 PROYEKSI LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Selama ini, lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari pendapatan hibah khususnya dari pemerintah pusat. Hingga penyusunan Rancangan RPJMD ini belum terdapat informasi dari pemerintah pusat mengenai adanya skema hibah sehingga tidak diasumsikan selama Tahun 2026-2030.



Tabel III.17

Asumsi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2030 (Juta Rupiah)

No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan 2020-2024 (%)	Proyeksi Pertumbuhan (%)	Realisasi	Target	Proyeksi				
				2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	PENDAPATAN	3.23	1.90	2,901,021.51	3,002,591.10	3,037,429.48	3,102,763.97	3,169,520.18	3,237,878.29	3,298,220.76
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.69	4.14	463,650.96	547,413.35	583,672.99	607,124.18	630,927.16	655,230.02	670,382.16
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	8.43	5.35	137,222.71	231,280.00	255,710.58	268,148.62	280,994.38	294,098.54	300,075.31
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	10.77	2.90	28,881.05	282,998.14	293,906.84	302,556.04	311,126.23	319,875.13	326,492.16
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8.57	7.43	19,123.34	25,292.87	26,438.21	28,802.17	31,189.20	33,639.00	36,197.35
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2.31	-0.58	278,423.87	7,842.35	7,617.35	7,617.35	7,617.35	7,617.35	7,617.35
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	4.34	1.49	2,435,850.44	2,439,923.92	2,453,756.49	2,495,639.79	2,538,593.01	2,582,648.26	2,627,838.60
1.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	3.35	1.57	2,250,967.22	2,329,929.91	2,325,576.57	2,361,240.78	2,397,974.91	2,435,811.07	2,474,782.31
1.2.1.1	Dana Perimbangan	3.79	1.75	1,783,201.60	1,871,443.16	1,891,353.01	1,927,017.22	1,963,751.35	2,001,587.51	2,040,558.75
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak dan SDA	-0.83	11.40	36,123.72	38,116.46	62,946.66	63,530.67	64,132.20	64,751.78	65,389.95
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum	2.20	2.28	1,239,930.91	1,298,026.34	1,306,107.06	1,341,187.26	1,377,319.86	1,414,536.43	1,452,869.51
1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus	8.57	-0.49	507,146.96	535,300.35	522,299.29	522,299.29	522,299.29	522,299.29	522,299.29
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	-23.43	-100.00	11,805.73	24,263.19	-	-	-	-	-
1.2.1.3	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	-100.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.3.1	Dana Otonomi Khusus	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.3.2	Dana Penyesuaian	-100.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.4	Dana Desa	4.41	0.00	455,959.89	434,223.56	434,223.56	434,223.56	434,223.56	434,223.56	434,223.56



No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan 2020-2024 (%)	Proyeksi Pertumbuhan (%)	Realisasi	Target	Proyeksi				
				2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.2.2	TRANSFER ANTAR DAERAH	15.85	6.83	184,883.22	109,994.01	128,179.92	134,399.01	140,618.10	146,837.19	153,056.28
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	8.55	6.83	174,243.93	109,994.01	128,179.92	134,399.01	140,618.10	146,837.19	153,056.28
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	48.09	0.00	10,639.28	-	-	-	-	-	-
1.2.2.2.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	48.09	#DIV/0!	10,639.28	-	-	-	-	-	-
1.2.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kab/Kota	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-39.30	-100.00	1,520.11	15,253.82	-	-	-	-	-
1.3.1	Pendapatan Hibah	-39.30	-100.00	1,520.11	15,253.82	-	-	-	-	-
1.3.2	Pendatan Dana Darurat	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Pendapatan Lainnya	-100.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Tim Penyusun, 2025

3.3.2 PROYEKSI BELANJA DAERAH

Belanja daerah mengacu pada pendekatan yang direncanakan dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah untuk mengelola anggaran belanja dengan mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas serta asas kepatutan dan kewajaran. Untuk itu pemerintah daerah harus memiliki rencana anggaran yang matang yang mencakup identifikasi kebutuhan, prioritas, dan alokasi dana yang tepat untuk setiap program pembangunan. Diharapkan dapat menjamin seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dan prioritas pembangunan yang dialokasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD dapat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kebijakan pengalokasian belanja daerah yang pertama adalah menetapkan pada belanja yang wajib diluar Pagu OPD antara lain belanja transfer, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia (penerimaan) dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Adapun kebijakan perencanaan pagu indikatif OPD diarahkan pada:

- a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kebumen yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- b. Belanja penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- c. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- d. Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur dan terarah yaitu :
 - Mengalokasikan kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan tugas pokok fungsi OPD.
 - Mengalokasikan kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan OPD dan program/kegiatan prioritas yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Kebumen
- e. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Kebumen akan memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di Kabupaten Kebumen, termasuk investasi bidang pendidikan, keuangan persewaan & jasa perusahaan, perdagangan, hotel & restoran.

Belanja Daerah Kabupaten Kebumen dalam 5 (lima) tahun ke depan

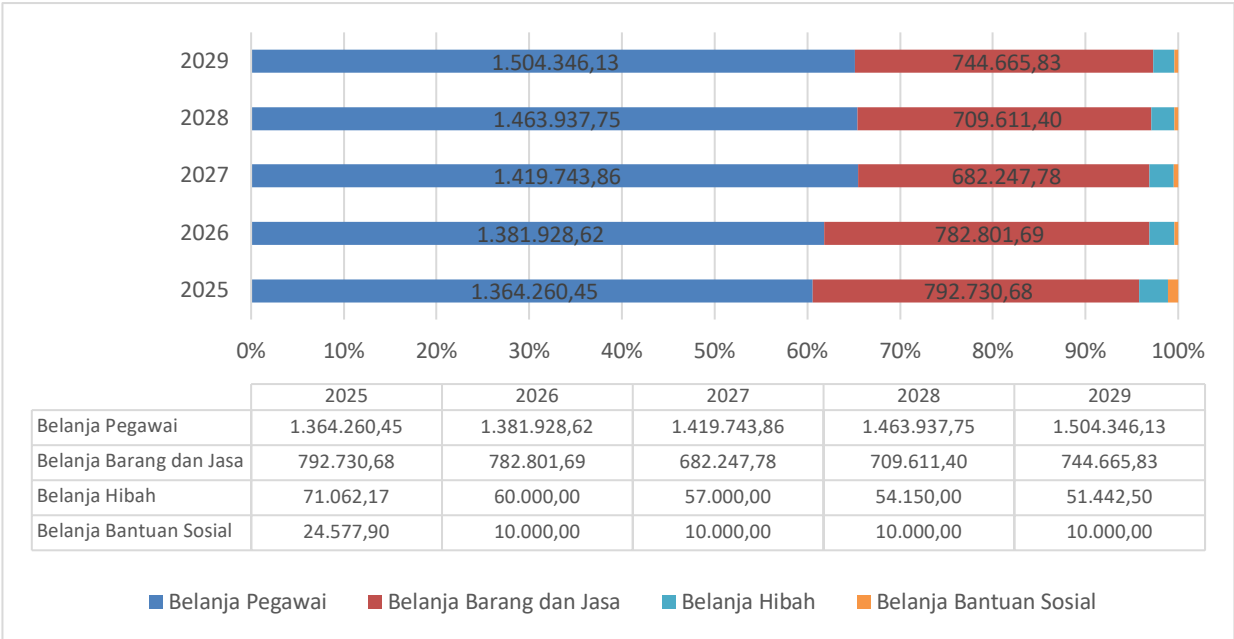
diproyeksinya meningkat dengan rata-rata pertumbuhan $\pm 2,13\%$ pertahun dari Rp. 3,150 triliun (2026) menjadi Rp. 3,432 triliun (2030). Target pertumbuhan Belanja Daerah ini relative lebih rendah dibandingkan rata-rata realisasi Belanja Daerah dalam 5 (lima) tahun sebelumnya yaitu 2020-2024 yang mengalami kontraksi $\pm 2,13\%$ pertahun.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk meningkatkan kualitas belanja publik serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah khususnya dari sisi PAD, maka proporsi belanja modal khususnya yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan investasi akan ditingkatkan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan jenis belanja lainnya terus ditekan atau diminimalkan;

3.3.2.1 PROYEKSI BELANJA OPERASI

Proyeksi belanja operasi dilakukan pada setiap komponen belanja operasi yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Untuk Belanja Operasi secara agregat juga ditekan/diturunkan lebih kecil dibandingkan realisasi tahun 2023 (Rp. 2,02 triliun) maupun target APBD tahun 2024 (Rp.2,14 triliun). Adapun belanja operasi mulai tahun 2026 akan ditargetkan meningkat $\pm 0,77\%$ pertahun dari Rp. 2,23 triliun (2025) menjadi Rp. 2,34 triliun (2029).

Gambar III.12.
Target Belanja Operasi Kabupaten Kebumen Tahun 2026-2030
(dalam juta)



e. Proyeksi Belanja Pegawai

Belanja pegawai pada Tahun 2026-2030 diproyeksikan mengalami kenaikan 2,61% per tahun pada komponen gaji dan tunjangan ASN serta belanja tambahan penghasilan ASN dengan *baseline* dari APBD Tahun 2025. Asumsi kenaikan ini seiring dengan adanya rencana pemerintah pusat menaikkan gaji dan tunjangan ASN sebesar inflasi setiap tahunnya. Selain itu belanja pegawai juga diharapkan dapat terus menurun proporsinya terhadap total belanja

daerah. Hal ini sebagai upaya pemenuhan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui Transfer Ke Daerah (TKD) paling tinggi 30% dari total belanja yang akan diberlakukan mulai tahun 2027 menurut UU HKPD dan Permendagri 15/2023.

f. **Proyeksi Belanja Barang dan Jasa**

Belanja barang dan jasa pada Tahun 2026-2030 diproyeksikan mengalami penurunan sebesar -1,65% per tahun dari APBD Tahun 2025 seiring dengan asumsi adanya perubahan tingkat harga setiap tahunnya

g. **Proyeksi Belanja Hibah**

Belanja hibah pada Tahun 2026-2030 diproyeksikan mengalami penurunan sebesar -5% per tahun dari APBD Tahun 2025 seiring dengan asumsi adanya perubahan tingkat harga setiap tahunnya. Belanja hibah pada Tahun 2028 dan 2029 diasumsikan juga mencakup hibah kepada KPU dan Bawaslu untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2029. Mendasari pelaksanaan hibah Pilkada pada Tahun 2024, pada Tahun n-1 Pilkada akan dihibahkan sebesar 40% dan sisanya sebesar 60% akan dihibahkan pada Tahun n Pilkada. Sesuai perhitungan pada Permendagri 15/2023, belanja hibah bersama dengan belanja bantuan sosial dan belanja modal merupakan komponen pemenuhan belanja infrastruktur pelayanan publik yaitu paling rendah 40% dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa dan akan diberlakukan mulai tahun 2027 menurut UU HKPD dan Permendagri 15/2023.

h. **Proyeksi Belanja Bantuan Sosial**

Seperti halnya belanja hibah, belanja bantuan sosial pada Tahun 2026-2030 diproyeksikan mengalami stagnan 0% per tahun. Sesuai perhitungan pada Permendagri 15/2023, belanja bantuan sosial bersama dengan belanja hibah dan belanja modal merupakan komponen pemenuhan belanja infrastruktur pelayanan publik yaitu paling rendah 40% dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa dan akan diberlakukan mulai tahun 2027 menurut UU HKPD dan Permendagri 15/2023.

3.3.2.2 PROYEKSI BELANJA MODAL

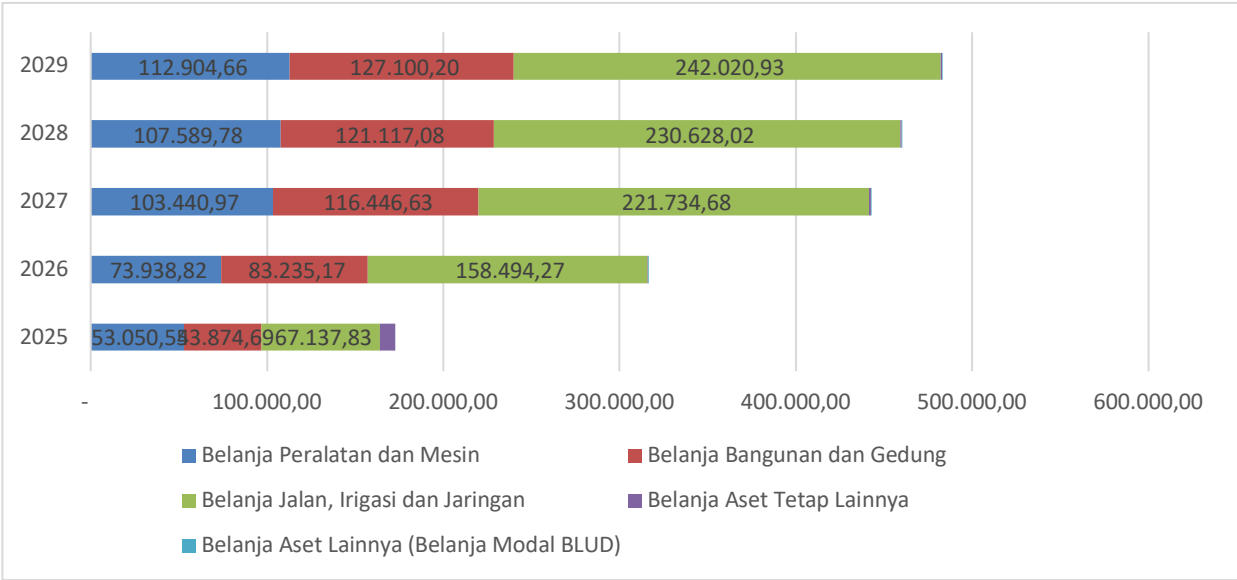
Belanja modal pada Tahun 2026-2030 diproyeksikan akan terus meningkat dimana bersama dengan belanja hibah dan belanja bantuan sosial merupakan komponen pemenuhan belanja infrastruktur pelayanan publik yaitu paling rendah 40% dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa dan akan diberlakukan mulai tahun 2027 menurut UU HKPD dan Permendagri 15/2023. Selain itu, belanja modal diharapkan diprioritaskan karena dapat memberikan efek multiplier bagi perekonomian daerah.

Dalam meningkatkan layanan infrastruktur publik serta menarik investasi daerah, porsi belanja modal akan ditingkatkan cukup signifikan dengan rata-rata pertumbuhan $\pm 22,28\%$ pertahun dari Rp. 325,11 miliar (2026) menjadi Rp. 486,35 miliar (2030).

Gambar III.13.
Rata-rata Proporsi Komponen Belanja Meodal Kabupaten Kebumen Tahun 2026-2030



Gambar III.14.
Target Alokasi Komponen Belanja Modal Kabupaten Kebumen Tahun 2026-2030 (dalam juta)



Porsi Belanja Modal terbesar diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan jalanan irigasi dan jaringan (49%), kemudian belanja bangunan dan Gedung (26%) kemudian belanja peralatan dan mesin (24%), dan sisanya belanja aset tetap lainnya (1%). Arah pembangunan jalan, irigasi dan jaringan difokuskan / diprioritaskan pada wilayah yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi wilayah. Untuk itu sasaran pembangunanya juga harus jelas dan spesifik. Sedangkan belanja peralatan dan mesin diarahkan untuk mendorong inovasi yang dapat mempercepat/mengakselerasi proses produksi yang ada di masyarakat. Harapannya dapat meningkatkan produktivitas masyarakat dan produktivitas wilayah secara bersamaan. Untuk belanja bangunan dan Gedung diarahkan pada bangunan dan Gedung pelayanan publik seperti perkantoran, fasiltias umum, dan sejenisnya.

3.3.2.3 PROYEKSI BELANJA TIDAK TERDUGA

Untuk Belanja Tak Terduga tahun 2025-2029 ditargetkan konstan yaitu sebesar Rp. 2,0 miliar pertahun. Penggunaan Belanja Tak Terduga ini dialokasikan untuk kejadian mendesak dan darurat seperti penanganan bencana banjir yang butuh waktu respon cepat dan sejenisnya.

3.3.2.4 PROYEKSI BELANJA TRANSFER

Belanja transfer pada Tahun 2026-2030 diproyeksikan mengalami penurunan pada komponen transfer dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah di luar PKB dan BBNKB. Belanja transfer khususnya yang bersumber dari Dana Desa diharapkan dapat diarahkan untuk pengembangan Desa Mandiri serta penyelesaian beberapa isu dan permasalahan prioritas daerah (seperti penanganan kemiskinan ekstrim dan *stunting*). Untuk Belanja Transfer ditargetkan sedikit mengalami penurunan yaitu $\pm -1,67\%$ pertahun dari Rp.588,26 miliar (2026) menjadi Rp. 603,18 miliar (2030).

Dengan melihat semakin tertekannya ruang fiskal daerah maka kualitas belanja daerah perlu menjadi prinsip utama. Untuk itu diperlukan kebijakan strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja daerah melalui:

- 1) Pengelolaan Anggaran yang Teliti: Pemerintah daerah harus membuat anggaran yang realistis dan teliti, dengan memprioritaskan pengeluaran yang penting dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat khususnya yang berupa belanja modal yang mampu memberikan dampak signifikan terhadap minat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini melibatkan peninjauan secara menyeluruh terhadap setiap pos anggaran, mengidentifikasi area-area di mana penghematan dapat dicapai, dan memastikan bahwa dana dialokasikan sesuai dengan kebutuhan yang mendesak.
- 2) Transparansi dan Akuntabilitas: Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dapat membantu mencegah penyalahgunaan dan memungkinkan partisipasi publik dalam pengawasan pengeluaran. Pemerintah daerah harus memberikan laporan keuangan yang jelas dan mudah dipahami kepada masyarakat serta memperkuat sistem akuntabilitas untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara bertanggung jawab.
- 3) Pengadaan Barang dan Jasa yang Efisien: Proses pengadaan barang dan jasa merupakan area penting untuk mencapai efisiensi belanja daerah. Pemerintah daerah harus menggunakan mekanisme pengadaan yang transparan dan kompetitif, serta melakukan negosiasi harga yang baik dengan pemasok untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien.
- 4) Penggunaan Teknologi Informasi: Pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam berbagai aspek pengelolaan keuangan daerah, termasuk dalam pengelolaan anggaran, pemantauan pengeluaran, dan pelaporan keuangan. Sistem informasi keuangan yang canggih dapat membantu mengurangi birokrasi, meningkatkan akurasi, dan mempercepat proses pengambilan keputusan.
- 5) Kebijakan Penghematan Biaya: Pemerintah daerah dapat mengadopsi kebijakan penghematan biaya, seperti pengurangan pengeluaran yang

tidak penting, efisiensi dalam penggunaan energi dan sumber daya lainnya, serta restrukturisasi program-program yang kurang efisien atau tidak memberikan manfaat yang signifikan kepada masyarakat.

- 6) Kolaborasi dan Konsolidasi: Kolaborasi antar pemerintah daerah atau konsolidasi layanan publik dapat membantu mengurangi biaya administratif dan meningkatkan efisiensi dalam penyediaan layanan. Misalnya, berbagi sumber daya dengan pemerintah daerah lain atau menggabungkan layanan yang serupa untuk mencapai skala ekonomis.
- 7) Pengembangan Sumber Daya Manusia: Investasi dalam pengembangan SDM yang berkualitas dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Pelatihan dan pengembangan pegawai pemerintah yang kompeten dalam manajemen keuangan dan pengadaan dapat membantu mengoptimalkan penggunaan dana publik.
- 8) Evaluasi dan Pemantauan Berkelanjutan: Pemerintah daerah harus secara teratur mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dari kebijakan dan praktik pengelolaan keuangan yang diterapkan, serta melakukan pemantauan secara berkelanjutan terhadap pengeluaran dan kinerja keuangan daerah untuk mengidentifikasi area-area di mana perbaikan lebih lanjut dapat dilakukan.

Secara lengkap asumsi dan proyeksi belanja daerah Kabupaten Kebumen pada Tahun 2025 hingga 2030 adalah sebagai berikut:



Tabel III.18

Asumsi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2030 (Juta Rupiah)

No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan 2020-2024 (%)	Proyeksi Pertumbuhan (%)	Realisasi	Target	Proyeksi				
				2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	BELANJA	3.38	2.13	2,977,141.91	3,089,359.99	3,150,809.46	3,218,358.70	3,308,982.03	3,408,890.58	3,432,746.90
2.1	BELANJA OPERASI	3.92	0.77	2,020,914.52	2,253,331.20	2,235,430.31	2,169,691.64	2,238,399.15	2,311,154.46	2,341,206.05
2.1.1	Belanja Pegawai	0.40	2.61	1,153,775.44	1,364,260.45	1,381,928.62	1,419,743.86	1,463,937.75	1,504,346.13	1,552,108.43
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	9.45	-1.65	726,725.18	792,730.68	782,801.69	682,247.78	709,611.40	744,665.83	729,527.24
2.1.5	Belanja Hibah	15.68	-5.00	128,698.06	71,062.17	60,000.00	57,000.00	54,150.00	51,442.50	48,870.38
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	-24.77	0.00	11,040.17	24,577.90	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
2.2	BELANJA MODAL	-0.88	22.28	278,842.91	177,908.72	325,110.37	454,831.85	473,074.27	496,443.89	486,351.50
2.2.1	Belanja Modal (Tanah)	-9.36	19.68	1,400.55	5,297.79	8,693.47	12,162.22	12,650.03	13,274.93	13,005.06
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	7.27	15.83	65,799.40	53,050.55	73,938.82	103,440.97	107,589.78	112,904.66	110,609.38
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	-1.78	23.20	75,265.21	43,874.69	83,235.17	116,446.63	121,117.08	127,100.20	124,516.33
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-6.78	28.70	124,921.56	67,137.83	158,494.27	221,734.68	230,628.02	242,020.93	237,100.79
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	0.07	-37.42	11,456.20	8,547.87	548.64	767.55	798.33	837.77	820.74
2.2.6	Belanja Aset Lainnya (Belanja Modal BLUD)	-46.70	0.00	-	-	200.00	279.80	291.02	305.40	299.19
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	-57.80	0.00	409.94	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
2.3.1	Belanja Tak Terduga	-57.80	0.00	409.94	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
2.4	BELANJA TRANSFER	4.03	-1.67	676,974.54	656,120.07	588,268.78	591,835.20	595,508.61	599,292.23	603,189.35
2.4.1	Belanja Transfer Bagi Hasil	4.18	-	13,743.17	17,139.84	17,139.84	17,139.84	17,139.84	17,139.84	17,139.84
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	13.34	0.00	13,743.17	17,139.84	17,139.84	17,139.84	17,139.84	17,139.84	17,139.84
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-100.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-



No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan 2020-2024 (%)	Proyeksi Pertumbuhan (%)	Realisasi	Target	Proyeksi				
				2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.4.2	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	4.03	0.48	663,231.38	638,980.23	571,128.93	574,695.36	578,368.77	582,152.38	586,049.51
2.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan Ke Provinsi	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemda Lainnya	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	4.12	-1.71	663,231.38	638,980.23	571,128.93	574,695.36	578,368.77	582,152.38	586,049.51
2.4.2.4	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-100.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-
	SURPLUS / (DEFISIT)	-18.85	4.37	(76,120.41)	(86,768.90)	(113,379.98)	(115,594.73)	(139,461.85)	(171,012.29)	(134,526.14)

Sumber : Tim Penyusun, 2025

3.3.3 PROYEKSI PEMBIAYAAN DAERAH

Proyeksi pembiayaan daerah dilakukan untuk memproyeksikan pembiayaan pada lima tahun mendatang, yaitu tahun 2025-2030. Pembiayaan yang dimaksud terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Sebagai catatan pembiayaan daerah tahun 2025 mendasari pembiayaan daerah pada RKPD Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 37 Tahun 2025, sehingga proyeksi dilakukan untuk asumsi pembiayaan daerah pada Tahun 2026-2030.

Secara keseluruhan terdapat beberapa arah kebijakan pembiayaan terkait kondisi surplus atau defisit anggaran. Kebijakan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut :

1. Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam keadaan surplus maka akan dilakukan pemberdayaan kas sebagai investasi jangka pendek dalam bentuk deposito sehingga akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari pendapatan bunga deposito
2. Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam keadaan defisit maka akan dilakukan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran sebelumnya untuk menutup defisit. Untuk menutup defisit maka akan dilakukan rasionalisasi belanja program dan kegiatan yang diusulkan oleh OPD.

3.3.3.1 PROYEKSI PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Proyeksi penerimaan pembiayaan dilakukan terhadap masing-masing komponennya yaitu:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya

SiLPA diasumsikan sama dengan RKPD Tahun 2025 dimana dalam penganggaran nantinya SiLPA ini digunakan atau dialokasikan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaannya diharapkan SiLPA dapat diminimalisir;

- b. Penerimaan kembali pinjaman daerah diasumsikan sama dengan RKPD Tahun 2025 yang diperoleh dari dana talangan pangan sebesar Rp.1.500.000.000,00 dan dana talangan perikanan sebesar Rp.600.000.000,00;
- c. Pencairan dana cadangan diasumsikan secara total sebesar Rp.80.000.000.000,00 yang diperoleh dari 4 tahun pembentukan dana cadangan mulai Tahun 2025 hingga Tahun 2028 sebesar Rp.20.000.000.000,00 setiap tahun. Mendasari pelaksanaan hibah Pilkada pada Tahun 2024, pada Tahun n-1 Pilkada (Tahun 2028) akan dihibahkan sebesar 40% atau Rp.24.000.000.000,00 dan sisanya sebesar 60% atau Rp.36.000.000.000,00 akan dihibahkan pada Tahun n Pilkada (Tahun 2029).

3.3.3.2 PROYEKSI PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Proyeksi pengeluaran pembiayaan dilakukan terhadap masing-masing komponennya yaitu:

- d. Pembentukan dana cadangan diasumsikan sama setiap tahun yaitu sebesar Rp.20.000.000.000,00. Dana cadangan selama tahun 2025 hingga 2028

akan digunakan untuk penyelenggaraan Pilkada Tahun 2029, sedangkan dana cadangan Tahun 2029 akan digunakan untuk Pilkada Tahun 2034. Dengan adanya dana cadangan diharapkan pendanaan penyelenggaraan Pilkada tidak membebani tahun anggaran tertentu, namun demikian pembentukan dana cadangan ini harus segera ditindaklanjuti dengan penyusunan Peraturan Daerah (Perda);

- e. Penyertaan modal (investasi) daerah diasumsikan berdasarkan *draft* Narasi Akademik Perda Penyertaan Modal pada Tahun 2026-2030 yang diharapkan dapat ditetapkan tahun depan;
- f. Pemberian pinjaman daerah diasumsikan sama dengan RKPD Tahun 2025 yang berupa dana talangan pangan sebesar Rp.1.500.000.000,00 dan dana talangan perikanan sebesar Rp.600.000.000,00.

Berdasarkan perhitungan asumsi dan proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah, setiap tahun dari Tahun 2025 hingga Tahun 2030 diperoleh *netto* pembiayaan bernilai positif yang dapat digunakan untuk menambah kemampuan keuangan daerah dalam mendanai belanja daerah. Secara lengkap asumsi dan proyeksi belanja daerah Kabupaten Kebumen pada Tahun 2025 hingga 2030 adalah sebagai berikut:



Tabel III.19
Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2030 (Juta Rupiah)

No	Uraian	Rata-rata Pertumbuha n (%)	Proyeksi Pertumbuh an (%)	Tahun Dasar	Realisasi	Target	Proyeksi				
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	PENDAPATA N	3,23	1,90	2,901,021,509,721	3,137,714,774,634	3,002,591,097,000	3,037,429,475,235	3,102,763,970,74 9	3,169,520,176,33 9	3,237,878,286,67 6	3,298,220,757,453
1.1	PENDAPATA N ASLI DAERAH	4,69	4,14	463,650,961,705	484,175,268,010	547,413,351,000	583,672,986,622	607,124,183,112	630,927,163,444	655,230,024,502	670,382,161,257
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	8,43	5,35	137,222,705,502	139,434,789,479	231,279,999,000	255,710,583,890	268,148,623,227	280,994,384,461	294,098,543,502	300,075,306,985
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	10,77	2,90	28,881,046,419	33,229,154,159	282,998,137,000	293,906,842,299	302,556,044,224	311,126,226,768	319,875,133,736	326,492,160,292
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8,57	7,43	19,123,340,688	21,856,399,056	25,292,867,000	26,438,212,433	28,802,167,661	31,189,204,216	33,638,999,263	36,197,345,980
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2,31	-0,58	278,423,869,096	289,654,925,316	7,842,348,000	7,617,348,000	7,617,348,000	7,617,348,000	7,617,348,000	7,617,348,000
1.2	PENDAPATA N TRANSFER	4,34	1,49	2,435,850,438,454	2,634,976,497,624	2,439,923,924,000	2,453,756,488,613	2,495,639,787,63 6	2,538,593,012,89 4	2,582,648,262,17 4	2,627,838,596,196
1.2.1	TRANSFER PEMERINTA H PUSAT	3,35	1,57	2,250,967,223,263	2,366,631,446,811	2,329,929,911,000	2,325,576,571,490	2,361,240,779,31 5	2,397,974,913,37 4	2,435,811,071,45 5	2,474,782,314,279
1.2.1.1	Dana Perimbangan	3,79	1,75	1,783,201,602,063	1,884,523,490,811	1,871,443,157,000	1,891,353,008,490	1,927,017,216,31 5	1,963,751,350,37 4	2,001,587,508,45 5	2,040,558,751,279
1.2.1.1 .1	Dana Bagi Hasil Pajak dan SDA	-0,83	11,40	36,123,723,591	33,987,975,000	38,116,461,000	62,946,655,690	63,530,669,491	64,132,203,705	64,751,783,947	65,389,951,595
1.2.1.1 .3	Dana Alokasi Umum	2,20	2,28	1,239,930,914,430	1,306,369,023,000	1,298,026,342,000	1,306,107,061,800	1,341,187,255,824	1,377,319,855,669	1,414,536,433,509	1,452,869,508,684
1.2.1.1 .4	Dana Alokasi Khusus	8,57	-0,49	507,146,964,042	544,166,492,811	535,300,354,000	522,299,291,000	522,299,291,000	522,299,291,000	522,299,291,000	522,299,291,000
					-						
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	-23,43	-100,00	11,805,728,000	20,849,462,000	24,263,191,000	-	-	-	-	-
1.2.1.3	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	-100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.3 .1	Dana Otonomi Khusus				-						



No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan (%)	Proyeksi Pertumbuhan (%)	Tahun Dasar	Realisasi	Target	Proyeksi				
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.2.1.3.2	Dana Penyesuaian	-100,00	0,00		-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.4	Dana Desa	4,41	0,00	455,959,893,200	461,258,494,000	434,223,563,000	434,223,563,000	434,223,563,000	434,223,563,000	434,223,563,000	434,223,563,000
1.2.2	TRANSFER ANTAR DAERAH	15,85	6,83	184,883,215,191	268,345,050,813	109,994,013,000	128,179,917,123	134,399,008,322	140,618,099,520	146,837,190,718	153,056,281,917
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	8,55	6,83	174,243,934,191	181,816,080,313	109,994,013,000	128,179,917,123	134,399,008,322	140,618,099,520	146,837,190,718	153,056,281,917
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	48,09	0,00	10,639,281,000	86,528,970,500	-					
1.2.2.2.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	48,09	#DIV/0!	10,639,281,000	86,528,970,500		-	-	-	-	-
1.2.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kab/Kota	#DIV/0!		-	-						
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-39,30	-100,00	1,520,109,562	18,563,009,000	15,253,822,000	-	-	-	-	-
1.3.1	Pendapatan Hibah	-39,30	-100,00	1,520,109,562	18,563,009,000	15,253,822,000	-	-	-	-	-
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat			-	-						
1.3.3	Pendapatan Lainnya	-100,00	0,00	-	-						
2	BELANJA	3,38	2,13	2,977,141,914,829	3,126,715,028,457	3,089,359,994,980	3,150,809,459,207	3,218,358,697,721	3,308,982,030,311	3,408,890,578,648	3,432,746,902,425
2.1	BELANJA OPERASI	3,92	0,77	2,020,914,516,871	2,145,807,087,502	2,253,331,199,181	2,235,430,310,664	2,169,691,644,761	2,238,399,151,271	2,311,154,460,743	2,341,206,053,206
2.1.1	Belanja Pegawai	0,40	2,61	1,153,775,444,865	1,188,427,007,238	1,364,260,450,000	1,381,928,619,650	1,419,743,864,619	1,463,937,752,117	1,504,346,127,005	1,552,108,433,919
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	9,45	-1,65	726,725,182,478	800,813,552,333	792,730,683,265	782,801,691,013	682,247,780,142	709,611,399,154	744,665,833,738	729,527,244,287
2.1.2	Belanja Bunga		0,00	-	-			-	-	-	-
2.1.4	Belanja Subsidi	44,04	0,00	675,656,402	1,447,997,750	700,000,000	700,000,000	700,000,000	700,000,000	700,000,000	700,000,000
2.1.5	Belanja Hibah	15,68	-5,00	128,698,064,603	145,243,409,681	71,062,169,416	60,000,000,000	57,000,000,000	54,150,000,000	51,442,500,000	48,870,375,000
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	-24,77	0,00	11,040,168,523	9,875,120,500	24,577,896,500	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000



No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan (%)	Proyeksi Pertumbuhan (%)	Tahun Dasar	Realisasi	Target	Proyeksi				
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.1.7	Belanja keuangan			-	-						
2.2	BELANJA MODAL	-0,88	22,28	278,842,913,538	278,735,832,493	177,908,722,399	325,110,369,794	454,831,853,428	473,074,266,102	496,443,889,159	486,351,496,191
2.2.1	Belanja Modal (Tanah)	-9,36	19,68	1,400,551,240	5,547,762,848	5,297,788,000	8,693,465,791	12,162,224,050	12,650,026,979	13,274,931,742	13,005,060,704
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	7,27	15,83	65,799,396,633	117,947,198,909	53,050,547,599	73,938,821,487	103,440,967,566	107,589,781,690	112,904,661,030	110,609,380,069
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	-1,78	23,20	75,265,208,901	40,299,475,917	43,874,687,000	83,235,172,252	116,446,632,231	121,117,078,031	127,100,198,784	124,516,331,442
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-6,78	28,70	124,921,560,732	102,857,035,252	67,137,827,000	158,494,272,977	221,734,680,384	230,628,023,085	242,020,927,650	237,100,793,952
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,07	-37,42	11,456,196,032	12,044,972,327	8,547,872,800	548,637,287	767,547,692	798,332,523	837,769,735	820,738,402
2.2.6	Belanja Aset Lainnya (Belanja Modal BLUD)	-46,70	0,00	-	39,387,240		200,000,000	279,801,505	291,023,794	305,400,218	299,191,623
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	-57,80	0,00	409,940,801	323,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000
2.3.1	Belanja Tak Terduga	-57,80	0,00	409,940,801	323,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000
2.4	BELANJA TRANSFER	4,03	-1,67	676,974,543,619	701,849,108,462	656,120,073,400	588,268,778,749	591,835,199,531	595,508,612,937	599,292,228,746	603,189,353,028
2.4.1	Belanja Transfer Bagi Hasil	4,18	0,00	13,743,166,881	15,934,319,925	17,139,844,000	17,139,844,000	17,139,844,000	17,139,844,000	17,139,844,000	17,139,844,000
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	13,34	0,00	13,743,166,881	15,934,319,925	17,139,844,000	17,139,844,000	17,139,844,000	17,139,844,000	17,139,844,000	17,139,844,000
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi				-						
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-100,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	4,03	0,48	663,231,376,738	685,914,788,537	638,980,229,400	571,128,934,749	574,695,355,531	578,368,768,937	582,152,384,746	586,049,509,028
2.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan Ke Provinsi				-						
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemda Lainnya			-	-						



No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan (%)	Proyeksi Pertumbuhan (%)	Tahun Dasar	Realisasi	Target	Proyeksi				
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.4.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	4,12	-1,71	663,231,376,738	685,914,788,537	638,980,229,400	571,128,934,749	574,695,355,531	578,368,768,937	582,152,384,746	586,049,509,028
2.4.2.4	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya (PARPOL)	-100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SURPLUS / (DEFISIT)	(18,85)	4,37	(76,120,405,108)	10,999,746,177	(86,768,897,980)	(113,379,983,972)	(115,594,726,972)	(139,461,853,972)	(171,012,291,972)	(134,526,144,972)
3	PEMBIAYAAN	-2,62	9,17	240,811,890,878	174,965,945,878	86,768,897,980	113,379,983,972	115,594,726,972	139,461,853,972	171,012,291,972	134,526,144,972
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-3,19	9,17	283,142,890,878	179,270,945,878	98,868,897,980	152,689,983,972	152,969,726,972	177,270,853,972	189,322,291,972	153,336,144,972
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	-5,06	9,34	258,817,350,878	164,691,485,878	96,768,897,980	150,589,983,972	150,869,726,972	151,170,853,972	151,222,291,972	151,236,144,972
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-42,52	0,00	22,225,540,000	12,774,460,000	-	-	-	24,000,000,000	36,000,000,000	-
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah;	-7,29	0,00	2,100,000,000	1,805,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000
3.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-18,06	9,22	42,331,000,000	4,305,000,000	12,100,000,000	39,310,000,000	37,375,000,000	37,809,000,000	18,310,000,000	18,810,000,000
3.2.1	Pembayaran cicilan pokok Utang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Uraian	Rata-rata Pertumbuha n (%)	Proyeksi Pertumbuh an (%)	Tahun Dasar	Realisasi	Target	Proyeksi				
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	yang jatuh tempo										
3.2.2	Penyertaan modal daerah;	-25,35	10,81	20,231,000,000	2,500,000,000	10,000,000,000	17,210,000,000	15,275,000,000	15,709,000,000	16,210,000,000	16,710,000,000
3.2.3	Pembentukan Dana Cadangan;	-100,00		20,000,000,000	-		20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000	-	
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah;	-4,92	0,00	2,100,000,000	1,805,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-100,00		-	-						
	PEMBIAYAA N NETTO	-2,62	9,17	240,811,890,878	174,965,945,878	86,768,897,980	113,379,983,972	115,594,726,972	139,461,853,972	171,012,291,972	134,526,144,972
	SISA LEBIH PEMBIAYAA N ANGGARAN (SILPA) TAHUN BERKENAAN	-4,11		164,691,485,770	185,965,692,055	-	-	-	0	-	-

Sumber : Tim Penyusun, 2025

3.3.4 PENGHITUNGAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk mendanai pembangunan daerah pada RPJMD Tahun 2025-2030, dilakukan analisis kapasitas riil kemampuan keuangan daerah. Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah diperoleh dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah, setelah dikurangi belanja gaji dan tambahan penghasilan ASN, termasuk DAU Earmark untuk gaji P3K, gaji dan tunjangan KDH dan DPRD, insentif dan honor pengelola kegiatan, DAK Non Fisik sertifikasi guru, serta pengeluaran pembiayaan daerah. Selanjutnya, kapasitas riil kemampuan keuangan daerah digunakan untuk mendanai belanja prioritas daerah. Seperti tercantum pada tabel di atas, kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah diharapkan akan terus meningkat dari Rp. 970.639,41 juta pada RKPD Tahun 2025 menjadi Rp. 1.215.878,74 juta pada Tahun 2030.

Tabel III.20
Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026-2030 (dalam Jutaan)

N o.	Uraian	Proyeksi					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Pendapatan	3.002.591,10	3.037.429,48	3.102.763,97	3.169.520,18	3.237.878,29	3.298.220,76
2.	Penerimaan Pembiayaan	98.868,90	152.689,98	152.969,73	177.270,85	189.322,29	153.336,14
	TOTAL PENERIMAAN						
	(Dikurangi):						
3.	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	2.130.820,59	2.082.207,40	2.118.654,06	2.164.105,37	2.186.090,86	2.235.678,16
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	970.639,41	1.107.912,06	1.137.079,63	1.182.685,67	1.241.109,72	1.215.878,74

Analisis Kapasitas riil keuangan Daerah diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan yang dihitung dengan mengurangi total penerimaan Daerah dengan pengeluaran pembiayaan dan belanja tidak langsung. Namun perlu dipahami bahwa dengan adanya PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur yang kemudian dimutakhirkan melalui Kepmendagri 050-3708 tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka kapasitas riil perlu dimaknai berbeda. Sebelum beberapa aturan tersebut, kapasitas riil dapat dimaknai secara sederhana sebagai alokasi anggaran riil untuk belanja langsung program/kegiatan pembangunan. Namun dengan adanya PP 12 tahun 2019, Permendagri 90 tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023, sebagian besar belanja periodik yang wajib dan mengikat serta prioritas seperti belanja pegawai (gaji, tunjangan, dll), bansos dan belanja hibah masuk dalam komponen belanja program/kegiatan/subkegiatan. Berdasarkan hal tersebut maka kapasitas riil perlu didefinisikan dengan dua metode berbeda Untuk itu agar tidak bias maka dalam dokumen ini akan dirumuskan kapasitas



riil keuangan daerah dan kapasitas riil pagu belanja program/keg/subkeg OPD.

Dengan kemampuan belanja pembangunan/publik yang terbatas maka efisiensi dan efektifitas belanja pembangunan/publik harus dilandasi prinsip efektifitas, efisiensi, prioritas dan kinerja dampak yang dihasilkan.

Sedangkan hasil analisis kapasitas riil pagu belanja OPD menunjukkan tren yang meningkat juga tiap tahun dimana perkembangan kemampuan pagu belanja OPD untuk tahun 2026 hingga 2030 secara berturut-turut.

Tabel III.21
Proyeksi Kapasitas Riil Pagu OPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2030
(Juta Rupiah)

No .	Uraian	Proyeksi					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Pendapatan	3,002,591.10	3,037,429.48	3,102,763.97	3,169,520.18	3,237,878.29	3,298,220.76
2.	Penerimaan Pembiayaan	98,868.90	152,689.98	152,969.73	177,270.85	189,322.29	153,336.14
	TOTAL PENERIMAAN	3,101,459.99	3,190,119.46	3,255,733.70	3,346,791.03	3,427,200.58	3,451,556.90
	(Dikurangi):						
3	Belanja Transfer	656,120.07	588,268.78	591,835.20	595,508.61	599,292.23	603,189.35
4	Belanja Tak Terduga	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
5	Pengeluaran Pembiayaan	12,100.00	39,310.00	37,375.00	37,809.00	18,310.00	18,810.00
	Kapasitas Riil Pagu OPD	2,431,239.92	2,560,540.68	2,624,523.50	2,711,473.42	2,807,598.35	2,827,557.55

Sumber : Tim Penyusun, 2025

Kapasitas riil pagu OPD yang diperoleh selanjutnya akan digunakan untuk membiayai belanja prioritas seperti tercantum pada Tabel di bawah, dimana belanja prioritas terbagi menjadi Prioritas I dan II. Prioritas I terdiri dari:

- a. Belanja yang bersifat mandatori dan diasumsikan sama dengan RKPD Tahun 2025 karena diperoleh pendapatan/penerimaan mandatori yang diasumsikan sama dengan RKPD Tahun 2025 yaitu belanja DAK Fisik, DAK Non Fisik (diluar sertifikasi guru), DAK Non Fisik BOS, DAU *Earmark* Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Kelurahan, Belanja Tidak Terduga, Transfer Dana Desa dan ADD, Iuran BPJS Perangkat Desa, serta Belanja BLUD; serta
- b. Belanja mandatori yang diasumsikan mengalami peningkatan sesuai dengan peningkatkan pendapatan/penerimaannya yaitu Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, DBHCHT, Hibah *Reimburse*, Iuran BPJS dari BHP Rokok (sebesar 37,5% dari pendapatan pajak rokok yang merupakan komponen pendapatan bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta Belanja Hibah Pilkada.

Untuk prioritas II rencananya akan dialokasikan untuk:

- a. belanja operasional dan prioritas OPD (yaitu belanja rutin kantor, belanja program pencapaian target dan sasaran Renstra OPD) yang diasumsikan naik 5% per tahun mengikuti asumsi adanya kenaikan perubahan tingkat harga; serta
- b. belanja kebijakan daerah dalam rangka akselerasi pencapaian target dan sasaran pembangunan yang diharapkan akan terus meningkat.

Tabel III.22
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kabupaten Kebumen Tahun 2026-2030

No	Uraian	Proyeksi Kapasitas Pagu OPD					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Kapasitas riil kemampuan keuangan OPD	2.431.239,92	2.560.540,68	2.624.523,50	2.711.473,42	2.807.598,35	2.827.557,55
2	Prioritas I	1.352.255,64	1.424.172,73	1.459.759,97	1.508.121,51	1.561.586,20	1.572.687,51
3	Prioritas II	729.371,98	768.162,20	787.357,05	813.442,03	842.279,50	848.267,26
4	Prioritas III	349.612,30	368.205,75	377.406,48	389.909,88	403.732,64	406.602,78
	JUMLAH	2.431.239,92	2.560.540,68	2.624.523,50	2.711.473,42	2.807.598,35	2.827.557,55

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Permasalahan dan isu strategis memegang peranan krusial dalam menentukan arah pembangunan suatu daerah. Identifikasi yang tepat terhadap tantangan yang dihadapi, baik yang bersifat internal maupun eksternal, menjadi landasan utama dalam merumuskan kebijakan dan program yang efektif. Memahami hal tersebut dalam pembangunan Kabupaten Kebumen, perlu adanya pemahaman mendalam terhadap permasalahan pembangunan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Hal ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, permasalahan dan isu strategis tersebut harus diterjemahkan ke dalam tujuan, sasaran, dan strategi pembangunan yang jelas dan terukur. RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan, harus mampu menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada, sehingga dapat mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Kebumen. Proses penyusunan RPJMD yang partisipatif dan inklusif, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, menjadi kunci untuk memastikan bahwa dokumen tersebut benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Selain itu, permasalahan dan isu strategis juga harus menjadi dasar dalam penyusunan prioritas pembangunan dan alokasi anggaran, dengan mengutamakan program dan kegiatan yang memiliki dampak signifikan terhadap penyelesaian permasalahan dan pencapaian tujuan pembangunan, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas. Evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan RPJMD juga penting untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tetap berada pada jalur yang benar dan memberikan hasil yang diharapkan. Memahami dinamika permasalahan dan gejolak pembangunan dengan memperhatikan isu yang berpotensi akan dihadapi oleh Kabupaten Kebumen, maka perlu mengidentifikasi isu strategis pembangunan. Dalam mengidentifikasi isu strategis perlu menelaah isu Internasional/Global, Nasional, Regional dan isu dalam lingkup Kabupaten Kebumen, serta masukan dari masyarakat sebagai satu kesatuan utuh dalam penyelenggaraan pembangunan. Dengan memperhatikan dari seluruh aspek, maka diharapkan pembangunan bisa lebih responsif dan adaptif. Dengan ini diharapkan permasalahan dan isu strategis mampu menjadi pijakan yang tepat dalam merumuskan kebijakan dan menentukan tujuan dan sasaran pembangunan.

4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dengan berbagai analisis yang telah dijabarkan pada bab gambaran umum daerah (Bab II) maka dalam perumusan permasalahan pembangunan daerah, dapat diidentifikasi faktor-faktor yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan pembangunan daerah. Setelah menelaah kajian data dan informasi pada gambaran umum kondisi daerah serta menelaah hasil



analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, maka diidentifikasi permasalahan pokok yang dijabarkan sebagai berikut.

Gambar IV.1

Permasalahan Daerah Kabupaten Kebumen

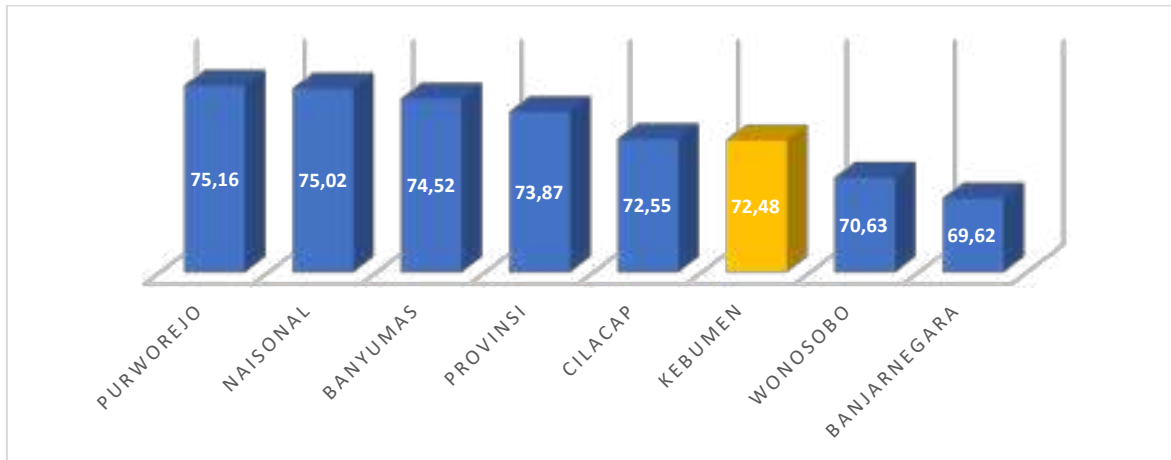


1. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat guna mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang adil dan inklusif

Kabupaten Kebumen masih menghadapi tantangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, yang menjadi fondasi utama dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang adil dan inklusif. Kebutuhan dasar seperti akses terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, pangan, serta infrastruktur dasar yang layak belum sepenuhnya terpenuhi bagi seluruh lapisan masyarakat. Kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan ini berpotensi menghambat peningkatan kualitas SDM, yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan dan daya saing daerah. Salah satu capaian pembangunan SDM dapat dilihat dari indikator IPM Kabupaten Kebumen yang mencapai 72,48 yang termasuk dalam kategori tinggi. Namun dengan capaian ini jika dibandingkan dengan Kabupaten sekitar, provinsi dan nasional, IPM Kabupaten Kebumen masih di bawah provinsi, nasional dan beberapa kabupaten sekitar. Hal ini mengindikasikan belum optimalnya peningkatan daya saing SDM di Kabupaten Kebumen.

Gambar IV.2

IPM Kabupaten Kebumen dan Kabupaten sekitar Tahun 2024



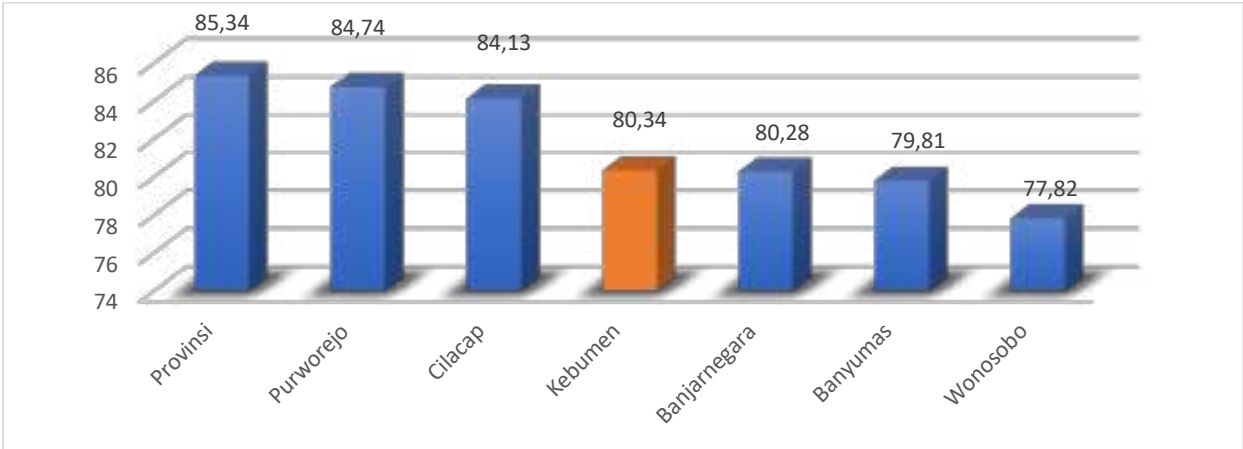
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, diolah

Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti akses terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, pangan yang bergizi dan terjangkau dan sanitasi yang layak, menjadi hambatan utama dalam mewujudkan pembangunan SDM yang adil dan inklusif. Selain itu, kurangnya akses terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan berkualitas memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi, menciptakan lingkaran kemiskinan yang sulit diputus. Ketidacukupan gizi, khususnya pada anak-anak, dapat menyebabkan stunting dan gangguan perkembangan kognitif, yang pada akhirnya membatasi potensi untuk berkontribusi secara produktif dalam masyarakat. Dalam konteks ketahanan pangan, rendahnya daya beli masyarakat dan distribusi pangan yang tidak merata memperparah kerentanan terhadap krisis pangan, yang pada gilirannya berdampak negatif pada kualitas SDM. Hal ini dapat dilihat pada kondisi ketahanan pangan Kabupaten Kebumen yang terlihat dari indeks ketahanan pangan yang masih mencapai nilai 80,34 yang artinya masih perlu adanya peningkatan ketahanan pangan. Kemudian jika dibandingkan dengan capaian daerah sekitar indeks ketahanan pangan Kabupaten Kebumen masih lebih rendah dibandingkan Kabupaten Purworejo, Cilacap dan Provinsi Jawa Tengah.

Oleh karena itu, diperlukan upaya terpadu dan berkelanjutan dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar seluruh lapisan masyarakat, guna membangun SDM yang berdaya saing, dan berkontribusi pada pembangunan yang adil dan inklusif.



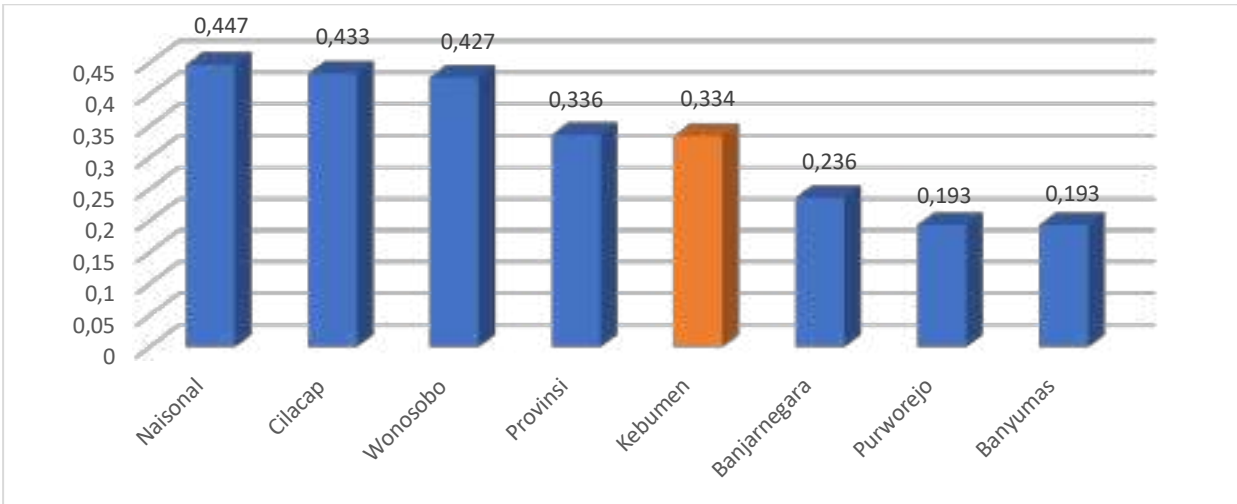
Gambar IV.3
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Sekitar Tahun 2024



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, diolah

Pemenuhan kebutuhan dasar yang inklusif perlu memperhatikan isu ketimpangan gender di mana perempuan sering kali memiliki akses terbatas terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Isu gender dapat berdampak pada pembangunan manusia di Kabupaten Kebumen. Permasalahan ini dapat dilihat pada indeks ketimpangan gender Kabupaten Kebumen yang mencapai 0,334 yang mana angka ini lebih tinggi dari pada Kabupaten sekitar yaitu Banjarnegara, Purworejo dan Banyumas yang terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar IV.4
Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Kebumen Dan Kabupaten Sekitar Tahun 2023



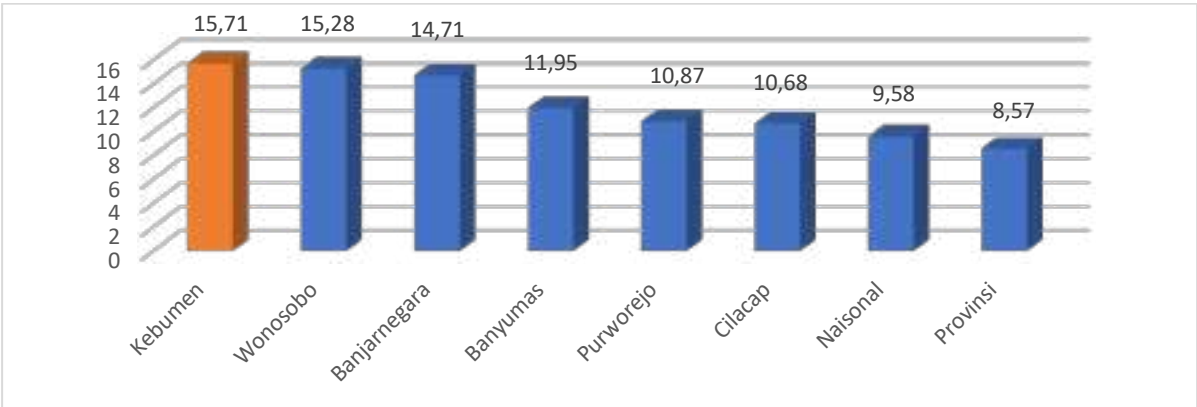
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, diolah

Kondisi kemiskinan Kabupaten Kebumen terlihat pada tingginya angka kemiskinan yang mencapai 15,71 persen, yang jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, angka kemiskinan Kabupaten Kebumen masih lebih tinggi. Kemudian jika dibandingkan dengan kabupaten sekitar terlihat tingkat kemiskinan Kabupaten Kebumen masih paling tinggi. Sehingga upaya percepatan pengentasan kemiskinan, peningkatan akses terhadap layanan



dasar, dan pemberdayaan masyarakat menjadi kunci untuk mengatasi permasalahan ini.

Gambar IV.5
Angka Kemiskinan Kabupaten Kebumen dan Kabupaten sekitar Tahun 2024



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, diolah

Pemerintah Kabupaten Kebumen menyadari bahwa pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan SDM yang adil dan inklusif. Oleh karena itu, berbagai upaya terus dilakukan untuk mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan tersebut. Fokus utama meliputi peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, penguatan ketahanan pangan melalui diversifikasi dan peningkatan produktivitas pertanian, serta penanggulangan kemiskinan melalui program-program pemberdayaan masyarakat dan bantuan sosial yang tepat sasaran. Selain itu, perhatian khusus juga diberikan pada isu ketimpangan gender dengan mendorong partisipasi aktif perempuan dalam berbagai sektor pembangunan. Untuk memastikan efektivitas program-program tersebut, Pemerintah Kabupaten Kebumen terus melakukan evaluasi dan *monitoring* secara berkala. Kerja sama dengan berbagai pihak baik akademisi, masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta, juga ditingkatkan untuk menciptakan sinergi dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Kabupaten Kebumen dapat terus meningkatkan kualitas SDM dan mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis yang lebih terarah dan berkelanjutan dalam memastikan seluruh masyarakat di Kabupaten Kebumen dapat merasakan manfaat pembangunan secara merata.

2. Belum optimalnya peningkatan perekonomian daerah yang inklusif dan berdaya saing berbasis pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal

Kabupaten Kebumen memiliki beragam potensi lokal yang dapat menjadi motor penggerak perekonomian daerah, mulai dari sektor pertanian, perikanan, pariwisata, hingga industri kreatif. Namun, hingga saat ini, upaya peningkatan perekonomian daerah yang inklusif dan berdaya saing masih belum optimal. Pemanfaatan serta pengembangan potensi lokal belum sepenuhnya terintegrasi dengan baik dalam strategi pembangunan ekonomi daerah. Salah satu tantangan utama adalah masih terbatasnya inovasi dan nilai tambah pada produk unggulan daerah. Banyak pelaku usaha, terutama UMKM, menghadapi

kendala dalam akses permodalan, teknologi, serta pasar yang lebih luas. Selain itu, infrastruktur pendukung dan konektivitas antar wilayah masih perlu ditingkatkan guna memperlancar distribusi hasil produksi dan menarik investasi.

Peningkatan perekonomian daerah yang inklusif dan berdaya saing berbasis pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal di Kabupaten Kebumen masih menghadapi tantangan, yang berimplikasi pada laju pertumbuhan ekonomi yang masih belum optimal pencapaiannya di tahun 2024 mencapai 5,30 yang mengalami penurunan jika dibandingkan capaian di tahun 2023 yang mencapai 5,66. Sektor produktif yang merupakan kunci pertumbuhan ekonomi perlu dioptimalkan produktivitasnya. Struktur Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Kabupaten Kebumen pada tahun 2024 didominasi oleh sektor industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 22,69 persen. Selanjutnya, kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mencapai 19,86 persen (angka ini menurun dari tahun 2020 yang sebesar 21,79 persen). Sektor ketiga terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Kebumen adalah perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor. Sektor ini pada tahun 2024 memberikan kontribusi sebesar 14,34 persen dan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 14,67. Secara garis besar beberapa sektor lapangan usaha (PDRB) mengalami penurunan, adapun yang mengalami peningkatan namun tidak begitu signifikan.

Analisis *Location Quotient* (LQ) menunjukkan sektor-sektor tersebut merupakan sektor basis meskipun produktivitas sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 1,61 persen (2023) masih belum maksimal. Potensi sektor ini masih sangat besar untuk dikembangkan, namun dianggap tidak mampu menjamin kesejahteraan petani dan minat generasi muda pada sektor ini semakin menurun. Berdasarkan analisis tipologi klassen dan analisis sektor ekonomi unggulan, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor yang potensial namun tumbuh lambat dan tidak berdaya saing sehingga perlu sentuhan IPTEKIN untuk meningkatkan produktivitasnya serta menjamin keberlanjutan dan kesejahteraan pada sektor ini.

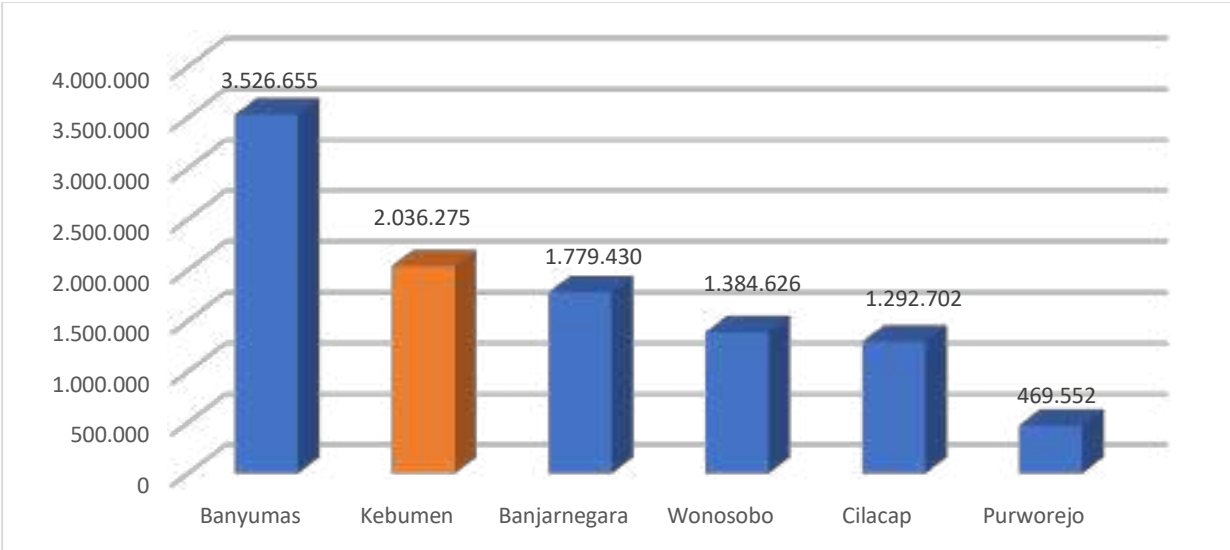
Produktivitas sektor pertanian tidak optimal disebabkan oleh perubahan iklim, lambatnya regenerasi petani dan nelayan, kurangnya tingkat keterampilan petani dan nelayan, terbatasnya adopsi teknologi dan akses keuangan, belum adanya standar proses, masih lemahnya kelembagaan ekonomi petani dan nelayan yang berbadan hukum, semakin berkurangnya daya dukung lahan pertanian dan terjadinya hambatan pada perikanan budidaya karena banyaknya kasus konflik pemanfaatan air dan lahan. Pencemaran *macro, micro, nano plastic*, hujan asam, limbah industri, limbah rumah tangga, limbah pertanian, dan limbah perikanan juga mempengaruhi produktivitas sektor ini. Kondisi tersebut juga tercermin dalam permasalahan pembangunan berkelanjutan sebagaimana tertuang di dalam dokumen KLHS RPJMD, di mana perlu pengembangan sektor pertanian berkelanjutan, kondisi pengairan untuk pertanian belum optimal, serta alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan terbangun. Berbagai faktor tersebut menyebabkan kontribusi sektor pertanian, perikanan dan kehutanan terus melambat.



Sektor Koperasi dan UMKM belum optimal dalam meningkatkan produktivitas ekonomi. Peran koperasi dan UMKM dalam pemberdayaan sekaligus peningkatan produktivitas ekonomi rakyat perlu terus dikembangkan. Hal ini tercermin dari persentase koperasi aktif berfluktuasi dari 84 unit persen pada Tahun 2019 menjadi 90,17 persen di Tahun 2024 dengan total omset meningkat signifikan dari Rp 461.458.055,00 pada Tahun 2019 menjadi Rp496.976.951,00 pada Tahun 2024. Namun demikian angka ini masih sangat kecil jika diproporsikan terhadap total PDRB yaitu hanya sekitar 0,5 persen. Sementara itu, jumlah UMKM juga terus meningkat dari 45.715 unit pada tahun 2019 menjadi 50.321 unit pada Tahun 2024 dengan UMKM yang naik kelas dari 31 unit pada Tahun 2019 menjadi 195 unit di Tahun 2024.

Potensi pariwisata daerah sangat besar dengan keindahan alam dan kekayaan budaya, jumlah kunjungan wisatawan belum optimal. Hal ini terlihat pada jumlah wisatawan yang berkunjung sejumlah 2.063.275 di tahun 2024 yang mana capaian ini lebih rendah jika dibandingkan dengan Kabupaten Banyumas yang mencapai 3.526.655 yang disajikan pada gambar sebagai berikut.

Gambar IV.6
Jumlah wisatawan yang berkunjung Kabupaten Kebumen dan sekitar Kebumen Tahun 2023



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, diolah

Sektor pariwisata belum dioptimalkan melalui Global Geopark Kebumen. Kabupaten Kebumen memiliki potensi alam, budaya, kemudahan akses hingga letak yang cukup strategis dalam pengembangan pariwisata tidak hanya bagi wisatawan domestik, tapi juga wisatawan mancanegara. Jumlah kunjungan wisatawan terus meningkat dari 1.079.169 orang pada Tahun 2018 menjadi 2.151.109 pada Tahun 2023, namun demikian baru terdapat 11 wisatawan mancanegara yang mengunjungi Kabupaten Kebumen. Kunjungan wisatawan mancanegara pada Tahun 2023 meningkat jika dibandingkan Tahun 2021 sebanyak 5 orang dan tahun 2022 sebanyak 9 orang. Untuk itu, pengembangan Global Geopark Kebumen perlu terus dioptimalkan. Sementara itu sebagai pendukung industri pariwisata juga perlu didorong pengembangan sektor penyediaan akomodasi makan dan minum yang terdiri dari restoran atau tempat makan hingga jasa katering termasuk penyediaan makan dan minum di

hotel. Sektor pariwisata juga dapat dilihat dari PDRB sektor Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum yang dalam perkembangannya pada tahun 2022 mencapai 28,31 dan menurun hingga 10,35 di tahun 2024.

Dengan beberapa penjabaran di atas, maka pembangunan pariwisata di Kabupaten Kebumen perlu dioptimalkan. Belum optimalnya jumlah wisatawan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya infrastruktur pendukung, promosi yang belum maksimal, dan kurangnya pengembangan produk wisata yang inovatif dan berkelanjutan. Akibatnya, potensi ekonomi dari sektor pariwisata belum dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, sektor-sektor ekonomi lainnya seperti pertanian, perikanan, dan industri kreatif juga belum dikembangkan secara optimal, padahal memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan daerah dan menciptakan lapangan kerja.

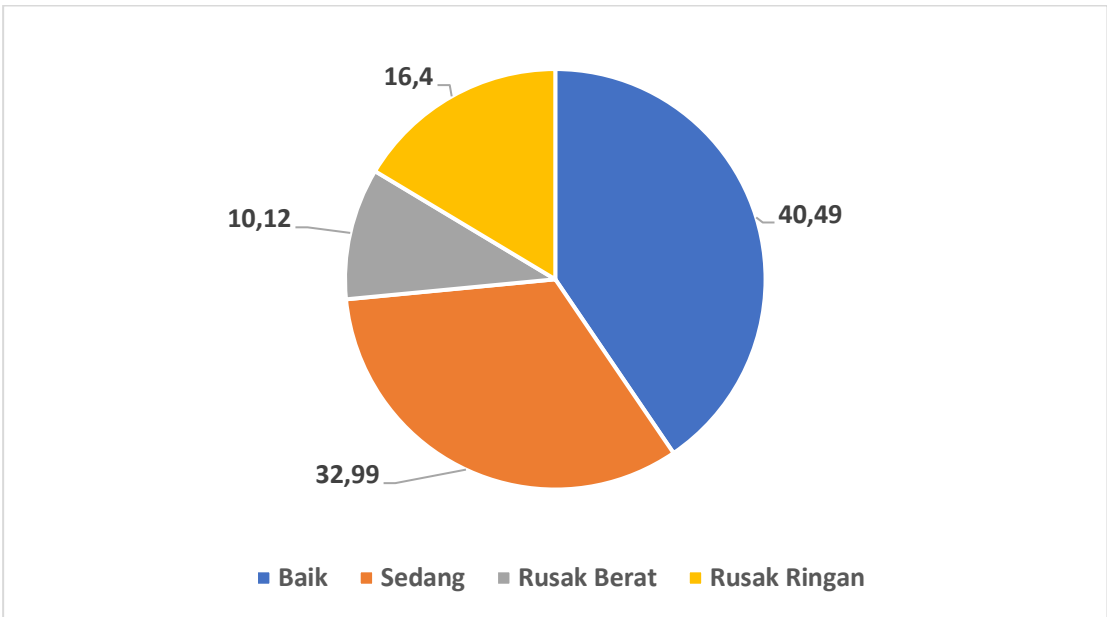
3. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur pelayanan publik yang merata dan berkualitas

Kabupaten Kebumen masih menghadapi tantangan dalam penyediaan infrastruktur pelayanan publik yang merata dan berkualitas. Infrastruktur yang memadai merupakan faktor kunci dalam mendukung kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, hingga saat ini, masih terdapat ketimpangan dalam akses terhadap berbagai fasilitas publik. Keterbatasan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang memadai, infrastruktur seperti jalan, jaringan transportasi, serta akses terhadap air bersih dan sanitasi yang aman menjadi kendala dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Banyak fasilitas umum yang belum memenuhi standar pelayanan optimal, baik dari segi kapasitas, kualitas, maupun pemerataan akses. Hal ini berimbas pada mobilitas, produktivitas masyarakat, serta kesempatan ekonomi masyarakat. Selain itu, tantangan dalam pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur juga masih menjadi persoalan. Keterbatasan sumber daya serta belum maksimalnya sinergitas antar *stakeholder* berkontribusi pada kualitas layanan publik yang diberikan.

Permasalahan ini dapat dilihat pada capaian indikator indeks kualitas pekerjaan umum Pada tahun 2024, mencapai 59,00 ~~57,95~~ persen. Angka ini masih lebih rendah dibandingkan dengan target di tahun ~~2023~~ 2024, yaitu sebesar 61,48 ~~59,16~~ persen. Perbedaan antara capaian dan target ini menunjukkan bahwa upaya dalam meningkatkan kualitas pekerjaan umum masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain keterbatasan anggaran, kendala teknis dalam pelaksanaan proyek, serta faktor cuaca dan kondisi geografis. Selain itu, proses perencanaan, pengawasan, dan koordinasi antarinstansi juga perlu lebih dioptimalkan guna memastikan efektivitas pelaksanaan proyek pekerjaan umum. Kesenjangan ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja dalam pembangunan infrastruktur, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, maupun pemeliharaannya.



Gambar IV.7
Persentase Jalan Menurut Kondisi Permukaan Kabupaten Kebumen Tahun 2024



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, diolah

Salah satu pencapaian infrastruktur terlihat pada kondisi jalan. Pada tahun 2024 kondisi jalan baik sebesar 40,49 persen, kondisi jalan sedang mencapai sebesar 32,99 persen, jalan dengan rusak ringan mencapai 16,4 persen dan jalan dengan kondisi rusak berat mencapai 10,12 persen. Dengan capaian ini terlihat bahwa kondisi jalan di Kabupaten Kebumen masih perlu ditingkatkan. Akses terhadap sanitasi aman belum optimal. Penyediaan akses dasar masyarakat terhadap sanitasi aman menunjukkan peningkatan, tetapi perlu terus didorong agar mampu menjangkau seluruh penduduk dan wilayah. Pencapaian persentase akses sanitasi aman Kabupaten Kebumen masih sebesar 3,67 persen (2024) akibat terbatasnya kesadaran dan kapasitas masyarakat menggunakan jamban sehat, pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD), dan pemanfaatan IPLT. Kondisi tersebut juga tercermin dalam permasalahan pembangunan berkelanjutan sebagaimana tertuang di dalam dokumen KLHS RPJMD, di mana perlu peningkatan pemerataan akses sanitasi yang aman di masyarakat.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan langkah strategis dalam pembangunan dan pemerataan infrastruktur yang berkelanjutan, dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah. Sinergi dengan berbagai pihak sangat penting dalam memastikan bahwa setiap warga Kebumen dapat mengakses layanan publik yang layak, guna mendukung pembangunan daerah yang lebih maju, inklusif, dan berdaya saing.

Berbagai tantangan seperti keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur yang belum merata, serta keterbatasan peluang ekonomi menjadi faktor utama yang menghambat percepatan kemandirian desa. Status desa mandiri mencerminkan tingkat perkembangan desa dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial, serta infrastruktur dasar. Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), pada tahun 2024 ~~2023~~, jumlah desa yang telah mencapai kategori sebagai desa mandiri di Kabupaten Kebumen sebanyak 152 desa atau sekitar 33,85 persen. Meskipun mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, masih

diperlukan upaya meningkatkan kemandirian desa, pengembangan potensi lokal, peningkatan akses terhadap layanan dasar, serta pemberdayaan masyarakat desa agar lebih produktif dan mandiri. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih intensif dan terarah, baik dalam bentuk pendampingan, peningkatan kapasitas masyarakat, maupun optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal agar desa-desa di Kabupaten Kebumen dapat berkembang menjadi desa mandiri yang lebih banyak dan berkelanjutan.

4. Belum optimalnya peningkatan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim

Kabupaten Kebumen masih menghadapi tantangan dalam upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang semakin nyata dampaknya. Perubahan iklim membawa berbagai risiko, seperti meningkatnya frekuensi bencana alam, perubahan pola curah hujan yang berdampak pada sektor pertanian, serta kenaikan suhu yang mempengaruhi ekosistem dan kehidupan masyarakat. Namun, upaya untuk mengurangi dampak negatif serta beradaptasi terhadap perubahan iklim ini masih belum optimal.

Salah satu faktor utama yang menjadi kendala adalah masih terbatasnya kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim. Program mitigasi seperti pengurangan emisi karbon, penghijauan, serta pengelolaan sampah dan energi terbarukan belum sepenuhnya diterapkan secara luas. Di sisi lain, upaya adaptasi seperti penguatan infrastruktur tahan bencana, perlindungan daerah pesisir dari abrasi, serta pengelolaan sumber daya air yang lebih berkelanjutan masih perlu ditingkatkan. Selain itu, koordinasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam menghadapi tantangan iklim masih perlu diperkuat. Diperlukan kebijakan yang lebih terintegrasi, pendanaan yang memadai, serta program yang lebih inklusif untuk memastikan bahwa mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Permasalahan lingkungan dapat dilihat pada Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Kebumen pada tahun-2023 2024 tercatat sebesar ~~67,16~~ 69,86. Angka ini masih berada di bawah rata-rata provinsi Jawa Tengah yang mencapai ~~68,59~~ 60,8 Tahun 2024, serta lebih rendah dibandingkan dengan angka nasional yang berada di level 73,07* (Data Sementara 20204, BPS). Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Kebumen masih perlu ditingkatkan guna mencapai standar yang lebih baik.

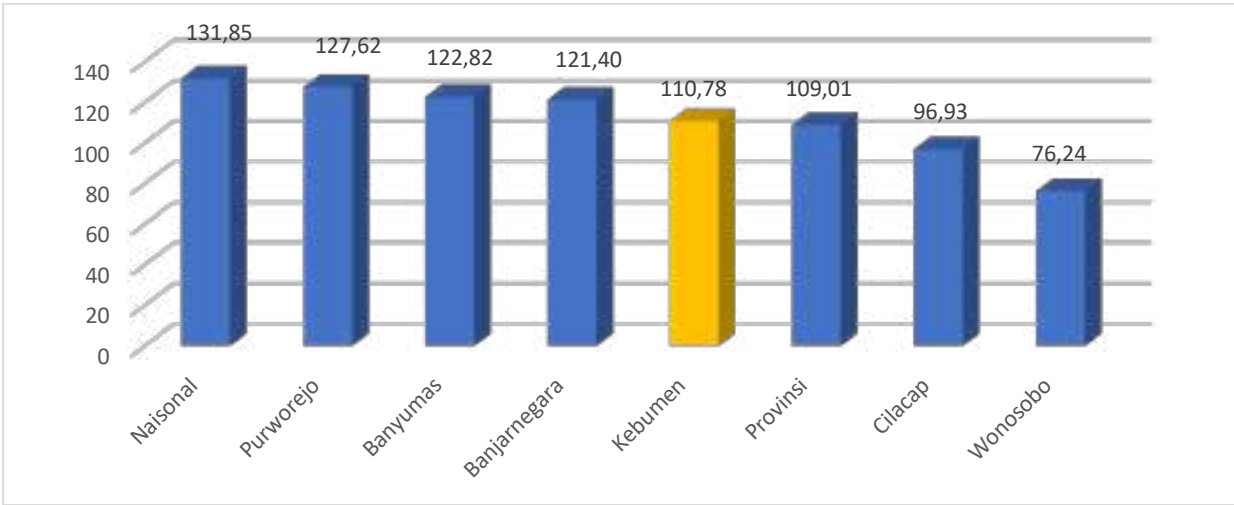
Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya indeks ini antara lain masih adanya pencemaran air dan udara, pengelolaan sampah yang belum optimal, serta degradasi lahan akibat aktivitas pertanian, industri, dan eksploitasi sumber daya alam yang kurang terkendali. Selain itu, masih terbatasnya ruang terbuka hijau serta minimnya kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan juga menjadi tantangan tersendiri dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Kebumen.

Kondisi lingkungan hidup memberikan dampak pada kondisi kebencanaan yang berpotensi terjadi. Memahami hal tersebut, potensi risiko bencana di Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada indeks risiko bencana sebesar 110,78 dengan kategori tinggi. Kemudian jika dibandingkan dengan daerah sekitar dan Provinsi Jawa Tengah, indeks risiko bencana Kabupaten Kebumen masih lebih



tinggi dari pada kabupaten Cilacap, Wonosobo dan Provinsi Jawa Tengah seperti yang digambarkan sebagai berikut.

Gambar IV.8
Indeks Risiko Bencana Kabupaten sekitar Kebumen Tahun 2023



Sumber: Buku IRBI Tahun 2024, diolah

Peningkatan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim memerlukan langkah-langkah strategis yang lebih terarah, seperti peningkatan pengelolaan limbah dan sampah, rehabilitasi kawasan yang terdampak pencemaran, serta penguatan regulasi dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta juga menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Dengan upaya yang lebih optimal, diharapkan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Kebumen dapat terus meningkat dan sejajar dengan capaian di tingkat provinsi maupun nasional.

5. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan, dan akuntabel

Kabupaten Kebumen masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan, dan akuntabel. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan birokrasi, namun masih belum optimal di beberapa aspek. Kendala yang dihadapi antara lain masih adanya prosedur birokrasi yang kurang efisien, penggunaan anggaran yang belum sepenuhnya transparan, serta masih perlunya peningkatan pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah diakses. Selain itu, pengawasan terhadap kinerja pemerintahan dan implementasi kebijakan juga masih perlu diperkuat guna mencegah potensi penyimpangan dan memastikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah juga menjadi tantangan tersendiri. Keterbukaan informasi diperlukan agar setiap kebijakan dapat berjalan dengan efektif serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang lebih baik memerlukan komitmen kuat dari seluruh aparatur pemerintahan, peningkatan kapasitas SDM, serta penerapan sistem yang lebih transparan dan berbasis teknologi informasi. Beberapa indikator yang dapat menggambarkan permasalahan terkait tata kelola pemerintahan adalah sebagai berikut:

- 1) Pada tahun 2024 nilai SAKIP Kabupaten Kebumen masih mencapai 67,54 dengan kategori “B”. Beberapa hal yang masih belum optimal antara lain kualitas perencanaan yaitu adanya indikator RPJMD yang kurang terukur, kualitas penjenjangan kinerja yang disusun Perangkat Daerah belum mempertimbangkan *logical framework* dan *Critical Success Factor* (CSF), dan pada *move* kinerja masih ditemukan data yang tidak akurat.
- 2) Pada tahun 2024, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Kebumen mencapai angka 79,91. Meskipun menunjukkan perkembangan dalam upaya reformasi birokrasi, namun capaian ini masih berada di bawah Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 83,13 dengan kategori A. Perbedaan ini menunjukkan bahwa masih perlu peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Kebumen.

Beberapa faktor yang mempengaruhi capaian ini antara lain efektivitas pelayanan publik, efisiensi dalam penggunaan anggaran, serta penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas kinerja pemerintahan. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital perlu dioptimalkan guna mempercepat proses pelayanan dan meningkatkan transparansi. Untuk mengejar ketertinggalan dari capaian provinsi, pemerintah daerah perlu mengambil langkah strategis, seperti mempercepat digitalisasi layanan publik, meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara (ASN), serta memperkuat budaya kerja yang profesional dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Dengan komitmen yang kuat dan langkah-langkah yang terarah, diharapkan reformasi birokrasi di Kabupaten Kebumen dapat terus berkembang menuju tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan berdaya saing.

6. Meningkatnya potensi pergeseran nilai budaya

Dalam kehidupan Masyarakat di Kabupaten Kebumen, pergeseran budaya seringkali terjadi seiring dengan perkembangan zaman, perubahan pola pikir, serta interaksi antar individu yang dapat mempengaruhi identitas dan karakter masyarakat. Masuknya berbagai budaya luar dan perkembangan teknologi yang sangat cepat sering kali tidak disertai dengan penyaringan yang baik, sehingga nilai-nilai lokal seperti gotong royong, kesopanan, dan kearifan tradisional mulai mengalami pergeseran. Selain itu, pola asuh dalam keluarga dan sistem pendidikan juga turut berkontribusi dalam perubahan budaya. Gaya hidup modern yang lebih individualistis, dinamis, dan efisien membuat adaptasi terhadap budaya lokal menjadi tantangan tersendiri.

Di Kabupaten Kebumen, pergeseran nilai budaya ini tercermin dalam Indeks Pembangunan Kebudayaan yang mengalami fluktuasi. Berdasarkan data Provinsi Jawa Tengah, indeks tersebut menunjukkan kecenderungan menurun dari 60,05 pada tahun 2018 menjadi 59,43 pada tahun 2022, dan meskipun meningkat menjadi 60,89 pada tahun 2023, angka ini masih mencerminkan adanya tantangan dalam pelestarian budaya lokal. Upaya pelestarian budaya juga masih terbatas, tercatat pada tahun 2023 hanya 4,01 persen Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang telah dilestarikan di Kabupaten Kebumen. Hal ini menunjukkan masih perlunya perhatian lebih dalam menjaga nilai-nilai budaya, seni tradisional, serta warisan sejarah yang ada.



Selain itu, partisipasi kelompok kesenian dalam kegiatan pertunjukan seni di Kabupaten Kebumen pada tahun 2023 hanya mencapai 18,33 persen. Persentase ini masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan potensi seni dan budaya yang dimiliki daerah tersebut. Beberapa faktor yang menjadi tantangan dalam meningkatkan keterlibatan kelompok kesenian meliputi keterbatasan akses terhadap sarana dan prasarana, minimnya dukungan pendanaan, serta menurunnya minat generasi muda terhadap kesenian tradisional. Jika tidak ada langkah strategis yang lebih konkret, dikhawatirkan pergeseran nilai budaya di Kabupaten Kebumen akan semakin sulit dikendalikan.

Diperlukan strategi yang lebih intensif dalam pelestarian budaya, termasuk peningkatan edukasi mengenai kebudayaan di kalangan generasi muda, penguatan peran komunitas budaya, serta penyediaan ruang ekspresi bagi para seniman. Selain itu, sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menjaga keberlanjutan warisan budaya daerah. Dengan langkah-langkah yang lebih konkret, diharapkan pembangunan kebudayaan di Kabupaten Kebumen dapat kembali meningkat dan menjadi identitas yang kuat bagi masyarakat.

Dengan rumusan permasalahan pokok diatas, maka dijabarkan permasalahan perurusan sebagai berikut.

Tabel IV. 1.
Keterkaitan Permasalahan Pokok dan Permasalahan Per Urusan

PERMASALAHAN POKOK	PERMASALAHAN PER URUSAN
Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat guna mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang adil dan inklusif	Belum optimalnya pembangunan sistem pendidikan di jenjang pendidikan dasar
	Masih rendahnya kesiapan dalam implementasi integrasi pelayanan kesehatan primer
	Belum optimalnya Penyediaan pangan masyarakat
	Belum optimalnya peningkatan kualitas keluarga yang sejahtera
	Belum optimalnya pengarusutamaan gender
	Masih rendahnya kreativitas dan kewirausahaan pemuda dapat dilihat dari jumlah wirausaha muda yang masih renda
	Belum optimalnya penyelenggaraan kegiatan olahraga daerah
	Belum optimalnya tingkat kunjungan ke perpustakaan
	Terbatasnya Kuota Transmigrasi dari Pemerintah Pusat untuk Calon transmigrasi Kabupaten
	Masih tingginya angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem
Belum optimalnya peningkatan perekonomian daerah yang inklusif dan	Penurunan omzet koperasi di Kabupaten Kebumen
	Belum optimalnya kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha mikro
	Ketidakpastian ekonomi global mengakibatkan berkurangnya jumlah penanaman modal dalam skala investasi kategori besar;
	Belum optimalnya pemanfaatan sektor perikanan



PERMASALAHAN POKOK	PERMASALAHAN PER URUSAN
berdaya saing berbasis pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal	Belum optimalnya nilai tambah produk pertanian
	Belum optimalnya pembangunan sektor industri menengah
	Belum optimalnya pendapatan daerah daerah dari sektor pariwisata
	masih adanya potensi sengketa tanah antara pemda dengan masyarakat.
Belum optimalnya penyediaan infrastruktur pelayanan publik yang merata dan berkualitas	Masih tingginya angka Backlog/kebutuhan rumah di Kabupaten Kebumen khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah
	belum adanya rencana rinci serta upaya pengendalian pemanfaatan ruang agar tidak terjadi alih fungsi lahan
	Belum optimalnya akses antar wilayah, terutama untuk menghubungkan daerah daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan
	Belum optimalnya pembangunan infrastruktur kebinamargaan
	Kawasan perdesaan belum berperan dalam pengembangan ekonomi kewilayahan
	Konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah belum memadai sehingga belum mampu mengakselerasi aktivitas perekonomian
	Pertumbuhan komoditas perdagangan perlu untuk terus didorong selain pada produktivitas dalam negeri juga untuk konsumsi ekspor
Belum optimalnya peningkatan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim	Belum optimalnya peningkatan kualitas lingkungan
	Belum optimalnya antisipasi dan penanganan bencana berbasis masyarakat tanggap bencana
Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan, dan akuntabel	Belum optimalnya layanan kependudukan dan pencatatn sipil
	Belum optimalnya layanan komunikasi dan informatika
	belum optimalnya jumlah desa/kelurahan, sekolah, lembaga masyarakat dan OPD yang telah menerapkan Arsip Secara Baku
	Masih diperlukan peningkatan upaya implementasi Reformasi Birokrasi
	Pengesahan Raperda yang tepat waktu cenderung menurun karena membutuhkan waktu penyusunan yang lebih lama termasuk proses pembahasan dan harmonisasi
	Belum terintegrasinya proses perencanaan penganggaran dengan penatausahaan dan evaluasi
	Masih rendahnya kemandirian keuangan daerah dikarenakan proporsi pendapatan asli daerah yang masih kecil
	Masih rendahnya pengelolaan keuangan daerah
	Belum optimalnya manajemen sumber daya aparatur



PERMASALAHAN POKOK	PERMASALAHAN PER URUSAN
	Masih rendahnya kualitas dan kuantitas kajian yang mendukung kebutuhan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah
	Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tepat waktu
	Peningkatan potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) terhadap stabilitas politik dan keamanan daerah
	Belum optimalnya kualitas layanan publik di kecamatan
Meningkatnya potensi pergeseran nilai budaya	Masih belum banyaknya minat generasi muda terhadap kesenian tradisional sehingga jumlah grup kesenian dari kebumen pada tahun 2023 tidak bertambah

4.2 Isu Strategis

Isu-isu strategis mencakup berbagai urgensi yang menjadi urgensi terhadap kondisi dan perihal yang sangat penting dalam pembangunan daerah, baik pada masa kini maupun masa mendatang. Isu strategis melibatkan identifikasi isu global, isu nasional, isu regional dan isu daerah yang saling terkait dan terintegrasi. Memahami pentingnya isu-isu strategis, kita dapat meminimalkan risiko kegagalan dan mengambil peluang untuk mendorong kemajuan yang berkelanjutan dalam pembangunan daerah.

4.2.1 Isu Global

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, terdapat berbagai isu strategis internasional (isu global) yang berpengaruh terhadap pembangunan nasional dan daerah. Beberapa isu utama yang menjadi perhatian mencakup dinamika geopolitik dan geoekonomi global, dampak perubahan iklim, perkembangan teknologi industri 5.0, serta pergeseran budaya akibat digitalisasi. Isu-isu ini tidak hanya berdampak pada kebijakan nasional tetapi juga memberikan tantangan dan peluang bagi daerah, termasuk Kabupaten Kebumen. Berikut penjabaran isu global:

Gambar IV.9
Isu Global



Sumber: RPJMN 2025-2029

1. Geopolitik dan Geoekonomi

Dinamika geopolitik dan geoekonomi global terus berkembang, mempengaruhi stabilitas ekonomi serta ketahanan pangan di berbagai negara. Ketergantungan pada impor bahan baku, fluktuasi harga komoditas, serta kebijakan dagang internasional menjadi tantangan yang harus diantisipasi untuk menjaga keseimbangan ekonomi. Dengan memperkuat rantai pasok lokal, mendorong ekspor produk bernilai tambah, serta meningkatkan daya saing industri domestik, suatu negara dapat lebih adaptif terhadap perubahan global dan berkontribusi pada stabilitas ekonomi dunia.

2. Dampak Perubahan Iklim Global

Perubahan iklim global membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, mulai dari peningkatan suhu bumi, perubahan pola cuaca ekstrem, hingga naiknya permukaan air laut. Fenomena ini mengancam ketahanan pangan, mengganggu ekosistem, serta meningkatkan risiko bencana alam seperti banjir dan kekeringan. Selain itu, dampak sosial dan ekonomi juga terasa, terutama bagi negara berkembang yang lebih rentan terhadap perubahan lingkungan. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya kolektif melalui kebijakan ramah lingkungan, transisi menuju energi bersih, serta kesadaran global dalam mengurangi emisi gas rumah kaca guna menjaga keseimbangan ekosistem dunia.

3. Perkembangan Teknologi Industri 5.0

Perkembangan teknologi dalam era Industri 5.0 membawa transformasi besar dalam berbagai sektor dengan menekankan kolaborasi antara manusia dan teknologi cerdas. Dengan kemajuan dalam kecerdasan buatan, Internet of Things (IoT), dan robotika, Industri 5.0 berfokus pada personalisasi, keberlanjutan, serta kesejahteraan manusia dalam proses produksi. Integrasi teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tetapi juga

menghadirkan tantangan baru, seperti kebutuhan akan keterampilan baru, etika dalam penggunaan AI, serta dampak terhadap tenaga kerja. Oleh karena itu, adaptasi yang bijak dan kebijakan yang tepat diperlukan untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi ini memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat global.

4. Pergeseran Budaya Dampak dari Teknologi Informasi

Kemajuan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam budaya global, mempengaruhi cara manusia berkomunikasi, bekerja, dan berinteraksi. Digitalisasi dan akses mudah terhadap informasi memungkinkan pertukaran budaya yang lebih cepat, namun juga dapat menyebabkan pergeseran nilai-nilai tradisional. Gaya hidup yang semakin individualistik, perubahan pola konsumsi media, serta hilangnya beberapa aspek budaya lokal menjadi tantangan dalam menjaga identitas budaya suatu bangsa. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara pemanfaatan teknologi dengan pelestarian nilai-nilai budaya agar perubahan yang terjadi tetap sejalan dengan jati diri masyarakat.

4.2.2 Isu Strategis Nasional

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, terdapat sejumlah isu strategis nasional yang menjadi acuan utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan di tingkat daerah. Isu-isu tersebut mencakup resiliensi dan prospek perekonomian yang positif, potensi sumber daya manusia dan modal manusia, pergeseran struktur kelas masyarakat, rendahnya produktivitas, serta tata kelola dan akuntabilitas pemerintah.

Gambar IV.10
Isu Strategis Nasional



Sumber: RPJMN 2025-2029

1. **Resiliensi dan Prospek Perekonomian yang Positif**
RPJMN 2025-2029 menekankan pentingnya meningkatkan ketahanan (resiliensi) ekonomi nasional melalui penguatan sektor unggulan, diversifikasi ekonomi, dan peningkatan konektivitas antarwilayah. Dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global, penguatan daya tahan ekonomi di tingkat daerah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah pusat mendorong peningkatan investasi, penguatan rantai pasok domestik, dan peningkatan nilai tambah produk lokal sebagai strategi utama dalam memperkuat ketahanan ekonomi.
2. **Potensi Sumber Daya Manusia dan Modal Manusia**
Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu fokus utama dalam RPJMN 2025-2029 untuk mendorong daya saing nasional. Peningkatan kualitas pendidikan, akses kesehatan, dan keterampilan tenaga kerja menjadi prioritas dalam memperkuat kapasitas manusia di era ekonomi digital dan industri 5.0. Pemerintah pusat juga mendorong pengembangan pendidikan vokasi, pelatihan kerja, serta peningkatan literasi teknologi untuk memastikan kesiapan tenaga kerja menghadapi transformasi ekonomi dan industri.
3. **Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat**
RPJMN 2025-2029 mengidentifikasi terjadinya pergeseran struktur kelas masyarakat sebagai dampak dari pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dan ketidaksetaraan akses terhadap peluang ekonomi. Peningkatan jumlah kelas menengah di Indonesia menciptakan peluang dalam pengembangan pasar domestik, tetapi di sisi lain meningkatkan risiko ketimpangan sosial dan ekonomi antarwilayah. Penguatan akses terhadap layanan dasar, kesempatan kerja, dan inklusi keuangan menjadi strategi utama dalam mengatasi ketidaksetaraan ini.
4. **Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah**
RPJMN 2025-2029 menekankan pentingnya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel sebagai fondasi utama dalam mempercepat pembangunan. Penguatan sistem pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi prioritas dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan juga menjadi fokus utama untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kebijakan daerah.
5. **Rendahnya Produktivitas**
Salah satu tantangan utama yang diidentifikasi dalam RPJMN 2025-2029 adalah rendahnya produktivitas tenaga kerja dan sektor ekonomi di Indonesia. Keterbatasan teknologi, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, serta kurangnya inovasi menjadi faktor utama yang menyebabkan stagnasi produktivitas. Pemerintah pusat mendorong peningkatan produktivitas melalui penguatan riset dan pengembangan (R&D), penerapan teknologi industri 5.0, serta pengembangan ekosistem inovasi di tingkat daerah.

Visi RPJMN 2025-2029, yaitu "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045" mencerminkan komitmen nasional untuk mewujudkan kemajuan Indonesia dalam rangka mencapai puncak kejayaan pada tahun 2045. Untuk mencapai visi tersebut, misi Presiden yang dikenal dengan astasita dituangkan dalam bentuk Prioritas Nasional yang menjadi landasan utama dalam RPJMN 2025-2029. Prioritas Nasional ini berfungsi sebagai tujuan strategis dan sasaran pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029, yang mencakup berbagai sektor penting seperti pembangunan sumber daya manusia, pemerataan ekonomi, ketahanan pangan, energi berkelanjutan, dan transformasi digital. Dengan mengacu pada prioritas nasional tersebut, Kabupaten Kebumen dapat menyusun program pembangunan yang terarah, berbasis pada kebutuhan lokal namun tetap sejalan dengan tujuan besar pembangunan nasional. Dengan 8 astasita sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM)
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat bergama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

➤ RPJMN menyebutkan terdapat 17 program prioritas sebagai berikut:

1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara
3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi
5. Pemberantasan kemiskinan
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat
8. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi

9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif
 10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas
 11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup
 12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani
 13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan
 14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif-karakteristik-mandiri lainnya
 15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA) termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi
 16. Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah
 17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga
- Adapun terdapat 8 *quick wins* sebagai berikut:
1. Memberi makanan bergizi sehat di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil
 2. menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di Kabupaten
 3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional
 4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap Kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi
 5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut
 6. Meningkatkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh) TNI/Polri dan pejabat negara
 7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
 8. Mendirikan badan penerimaan negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ke 23%

Kabupaten Kebumen memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian visi, misi, 17 program prioritas, dan *quick wins* RPJMN 2025-2029 melalui kontribusi pada sektor unggulannya. Dalam mendukung visi pembangunan berkelanjutan, Kebumen berfokus pada penguatan ketahanan pangan nasional melalui optimalisasi sektor pertanian dan peternakan. Terkait misi peningkatan SDM, Kebumen memperkuat pendidikan berbasis komoditas unggulan untuk menjembatani kebutuhan industri. Pada program prioritas hilirisasi industri, kawasan Solo-Kebumen-Karanganyar-Sukoharjo menjadi koridor strategis pengembangan industri pengolahan. Selain itu, *quick wins* seperti penurunan angka stunting dan pengentasan kemiskinan dijalankan



melalui program kesehatan dan ketahanan pangan lokal. Dengan peran tersebut, Kebumen tidak hanya menjadi pilar pembangunan regional, tetapi juga kontributor nyata terhadap target pembangunan nasional.

4.2.3 Isu Strategis Regional

RPJMD Kabupaten Kebumen, penting untuk melakukan telaahan isu regional secara menyeluruh. Telaah ini meliputi telaahan arahan RPJMN terhadap wilayah Jawa, dan telaah RPJMD Provinsi Jawa Tengah, RPJPD Kabupaten Kebumen, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar mampu menjadi satu kesatuan yang terintegrasi. Integrasi semua aspek ini akan memastikan bahwa RPJMD Kabupaten Kebumen dirumuskan secara komprehensif dan berkelanjutan, mendukung pengembangan daerah yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah.

4.2.3.1. Telaah Arahan RPJMN terhadap Pembangunan Wilayah Provinsi Jawa Tengah

Dalam RPJMN Tahun 2025-2029 memberikan arahan kebijakan kewilayahan pada tiap Provinsi di Indonesia, khususnya pada Provinsi Jawa Tengah beberapa hal yang menjadi intervensi dalam pembangunan Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:

A. Kawasan Pertumbuhan 1 Kawasan Perkotaan Purwokerto 2 Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Borobudur-Dataran Tinggi Dieng 3 Kawasan Perkotaan Cilacap dan Kawasan Pengembangan Industri Cilacap 4 Kawasan Perkotaan Pekalongan-Batang dan Kawasan Pengembangan Industri Batang 5 WII Samarang dan Kawasan Pengembangan Industri Kendal-Samarang-Demak-Kudus 6 Kawasan Perkotaan Surakarta, Kawasan Pengembangan Industri Surakarta-Boyolali-Karanganyar-Sukoharjo 7 Kawasan Pariwisata & Ekonomi Kreatif Unggulan Solo-Sragen-Karanganyar 8 Kawasan Perkotaan Rembang	C. Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Swasembada Pangan dan Air 1 Pemali-Comal (Kab. Brebes, Kab. Tegal, Kab. Pemalang, Kab. Pekalongan, Kab. Batang) Swasembada Pangan, Air, dan Energi 2 Dieng-Serayu-Bogowonto (Kab. Cilacap, Kab. Banyumas, Kab. Purbalingga, Kab. Banjarnegara, Kab. Wonosobo, Kab. Kebumen, Kab. Purworejo) 3 Jragung-Tuntang-Serang-Lusi-Juwana (Kab. Semarang, Kab. Demak, Kab. Jepara, Kab. Pati, Kab. Kudus, Kab. Rembang, Kab. Grobogan) 4 Bangawan Solo (Kab. Blora, Kab. Sragen, Kab. Boyolali, Kab. Klaten, Kab. Sukoharjo, Kab. Karanganyar, Kab. Wonogiri)
B. Kawasan Komoditas Unggulan Tebu 1 Pegunungan Kendeng (Kab. Rembang, Kab. Pati, Kab. Blora, Kab. Sragen) Ekonomi Biru 2 Pati-Rembang 3 Cilacap	D. Kawasan Afirmasi 1 Brebes (Percepatan Pengentasan Kemiskinan)
	E. Kawasan Konservasi/Rawan Bencana 1 TN Merbabu-Merapi 2 TN Kanisiusjawa 3 Geopark Kebumen

- A. Dalam intervensi atau highlight arah pengembangan wilayah Kabupaten Kebumen dalam RPJMN dijabarkan sebagai berikut:
- 1) Kabupaten Kebumen sebagai lokasi Swasembada Pangan, air, dan energi Dieng-Serayu-Bogowonto, dengan highlight intervensi sebagai berikut:
 - 2) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D. I. Banjarcahyana, D. I. Singomerto, D. I. Serayu, D. I. Wadaslintang, D. I. Sempor, dan D. I. Tajum
 - 3) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah Daerah
 - 4) Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi)
 - 5) Pengembangan dan Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan)
 - 6) Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura

- 7) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura
 - 8) Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada catchment area WS Serayu-Bogowonto
 - 9) Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan Danau
 - 10) Pembangunan infrastruktur PLTP Candradimuka
 - 11) Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik
 - 12) Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk & pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen
 - 13) Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar & pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi & korporasi petani; pembiayaan dana bergulir & kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama
 - 14) Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian
- B. Kabupaten Kebumen sebagai kawasan konservasi geopark kebumen, dengan *highlight intervensi* sebagai berikut:
- 1) Pengelolaan geologi untuk mendukung keanekaragaman ekosistem
 - 2) Perlindungan, pemulihan, pengelolaan ekosistem dan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi
 - 3) Pengurangan status keterancaman spesies tumbuhan, satwa, dan biota Perairan
 - 4) Pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan mendukung bioekonomi
 - 5) Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik

4.2.3.2. Telaah RPJMD Provinsi Jawa Tengah

Pada konsep rancangan awal RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 memiliki hal penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen yang dijabarkan sebagai berikut.

Visi

Dalam pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Tengah memiliki visi yaitu:

“Terwujudnya Provinsi Jawa Tengah sebagai Provinsi yang maju, berkelanjutan untuk menuju Indonesia Emas 2045”

Misi

Dalam pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan Layanan Dasar yang inklusif untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Kompetitif dan Berwawasan Global
2. Meningkatkan Pertumbuhan perekonomian perkotaan dan pedesaan berbasis sektor unggulan yang inovatif, mandiri dan berkelanjutan
3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang responsif dan kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai integritas
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsive
5. Menjaga stabilitas dan kondusifitas daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan
6. Menjaga iklim investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah, serta mengembangkan pembiayaan pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.

Dengan arah kebijakan perencanaan pembangunan sebagai berikut.



4.2.3.3. Telaah RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045

RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dokumen RPJPD pada tahap I, sehingga perlu diperhatikan tema dan arah kebijakan pada tahap I RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045. Dengan ini beberapa poin penting dalam dokumen RPJPD yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPJMD adalah sebagai berikut.

1) Visi RPJPD

Visi Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 adalah:

“Kabupaten Sumunar 2045: Kebumen Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”

Visi Kabupaten Kebumen 2025-2045 sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya sumber daya manusia berkualitas, tata kelola pemerintahan yang handal, berdaya saing tinggi, terkoneksi antar wilayah, perekonomian yang tumbuh inklusif dan merata, infrastruktur dasar yang berkualitas, lingkungan hidup yang lestari, dan memiliki kebudayaan yang beradab untuk mensejahterakan masyarakat dengan memperhatikan isu strategis, serta memperhatikan Visi Indonesia Emas 2045: Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan serta memperhatikan Visi Jawa Tengah 2045: Jawa Tengah Sebagai Penumpu Pangan dan Industri Nasional yang Maju, Sejahtera, Berbudaya, dan Berkelanjutan.

Dengan memiliki sasaran visi yaitu

1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia, dengan indikator IPM dan target pada tahap I sebesar 74,00-75,00
2. Kepemimpinan dan pengaruh di lingkungan Nasional meningkat, dengan indikator indeks reformasi birokrasi dengan target 2025-2029 sebesar 79,94 dan Kapabilitas Inovasi dengan target 2,32-2,36
3. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dalam rangka peningkatan pendapatan per Kapita dengan indikator pertumbuhan ekonomi dan target 2025-2029 sebesar 5,00-5,50
4. Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan dengan indikator tingkat kemiskinan yang ditargetkan di tahun 2025-2029 mencapai 10,43-11,20
5. Penurunan emisi GRK menuju net zero emission dengan indikator penurunan emisi GRK (Ton CO₂eq) dengan target 2025-2029 mencapai 4.592.235,71

2) Misi RPJPD

Dalam RPJPD Kabupaten Kebumen memiliki 6 misi yaitu

- a. Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing
- b. Mewujudkan pelayanan prima berdasarkan prinsip good and clean
- c. governance
- d. Mewujudkan daerah yang kompetitif dan inovatif
- e. Mewujudkan perekonomian daerah yang memiliki produktivitas tinggi
- f. dan berbasis potensi lokal
- g. Mewujudkan kesejahteraan sosial.
- h. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas.

3) Arah Kebijakan Periode 2025-2029

Tahapan pertama arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Kebumen Periode 2025-2029 adalah Penguatan Landasan Pembangunan Kabupaten Kebumen. Pada tahap ini dilakukan dengan penguatan landasan dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing, pelayanan prima berdasarkan prinsip good and clean governance, daerah yang kompetitif dan inovatif, perekonomian daerah yang memiliki produktivitas tinggi dan berbasis potensi lokal, peningkatan kesejahteraan sosial, serta lingkungan hidup yang berkualitas.

Misi 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing, diarahkan pada penguatan landasan dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya

saing merupakan tahapan kebijakan peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan untuk semua dan pendidikan yang berkualitas termasuk pendidikan karakter dan literasi, pemajuan budaya, peningkatan pengarusutamaan gender serta kualitas keluarga untuk peningkatan produktivitas sumber daya manusia. Penguatan landasan dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing difokuskan pada peningkatan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan, serta peningkatan kualitas hidup keluarga untuk membentuk SDM yang produktif, berkarakter, adaptif dan tangguh.

Misi 2: Mewujudkan pelayanan prima berdasarkan prinsip good and clean governance, diarahkan pada penguatan landasan dalam mewujudkan pelayanan prima berdasarkan prinsip good and clean governance merupakan tahapan kebijakan penguatan reformasi birokrasi menuju birokrasi yang dinamis, pelayanan publik yang berintegritas, adaptif, kolaboratif dan berbasis teknologi informasi serta perwujudan kondusifitas wilayah. Penguatan landasan dalam mewujudkan pelayanan prima berdasarkan prinsip good and clean governance difokuskan pada peningkatan perbaikan kelembagaan pemerintah daerah, peningkatan kualitas pengelolaan manajemen ASN berbasis merit, penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan, penguatan kapasitas masyarakat sipil, dan penguatan kebijakan pembangunan berbasis big data dan artificial intelligent, serta perbaikan tata kelola fiskal dan optimalisasi pembiayaan pembangunan non pemerintah.

Misi 3: Mewujudkan daerah yang kompetitif dan inovatif, diarahkan pada penguatan landasan dalam mewujudkan daerah yang kompetitif dan inovatif, merupakan tahapan kebijakan pengembangan jaringan riset dan inovasi daerah dan penguatan ekosistem riset dan inovasi daerah untuk meningkatkan kapabilitas inovasi. Penguatan landasan dalam mewujudkan daerah yang kompetitif dan inovatif difokuskan pada peningkatan jejaring riset dan inovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah.

Misi 4: Mewujudkan perekonomian daerah yang memiliki produktivitas tinggi dan berbasis potensi lokal, diarahkan pada penguatan landasan dalam mewujudkan perekonomian daerah yang memiliki produktivitas tinggi dan berbasis potensi lokal merupakan tahapan kebijakan penguatan produksi dan hilirisasi melalui peningkatan nilai tambah berbasis potensi unggulan yang saling terintegrasi dan berdaya saing di pasar domestik maupun global, peningkatan kewirausahaan dan kompetensi tenaga kerja, mendorong pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, peningkatan infrastruktur dan transformasi digital, serta stabilitas ekonomi makro daerah. Penguatan landasan dalam mewujudkan perekonomian daerah yang memiliki produktivitas tinggi dan berbasis potensi lokal difokuskan pada peningkatan produktivitas sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja tinggi untuk pemerataan pendapatan, serta peningkatan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru didukung peningkatan sistem transportasi antar wilayah dan penerapan ekonomi hijau.

Misi 5: Mewujudkan kesejahteraan sosial, diarahkan pada penguatan landasan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial merupakan tahapan kebijakan peningkatan integrasi dan kolaborasi dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan perlindungan sosial, peningkatan daya beli, pengurangan beban pengeluaran, perbaikan pola konsumsi, peningkatan ketahanan pangan serta pemerataan pendapatan. Penguatan landasan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial difokuskan pada peningkatan pendapatan dan ketahanan pangan, serta peningkatan upaya perlindungan sosial.

Misi 6: Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas, diarahkan pada penguatan landasan dalam mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan merupakan tahapan kebijakan perbaikan kualitas lingkungan hidup, manajemen pengelolaan lingkungan, serta peningkatan mitigasi dan adaptasi bencana. Penguatan landasan dalam mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan difokuskan pada peningkatan kapasitas sumber daya air dan energi, serta pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman memperhatikan tata ruang dan kelestarian lingkungan

4.2.3.4. Telaah KLHS-RPJMD Kabupaten Kebumen

Kesimpulan dan beberapa poin dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 meliputi:

- 1) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Kebumen dengan total indikator yang relevan sejumlah 189 indikator, maka terdapat 99 indikator (52%) sudah tercapai, 64 indikator (34%) belum tercapai, 10 indikator (5%) belum dilaksanakan, dan 16 indikator (8%) belum ada data.
 - Pilar sosial yang relevan dengan Kabupaten Kebumen sejumlah 85 indikator terdapat 47 indikator (55%) sudah mencapai target nasional, 29 indikator (34%) belum tercapai, dan 9 indikator (11%) tidak ada data
 - Pilar ekonomi yang relevan dengan Kabupaten Kebumen sejumlah 48 indikator terdapat 26 indikator (54%) sudah mencapai target nasional, 17 indikator (35%) belum tercapai, 3 indikator (6%) belum dilaksanakan, dan 2 indikator (4%) tidak ada data.
 - Pilar Lingkungan yang relevan dengan Kabupaten Kebumen sejumlah 35 indikator terdapat 12 indikator (34%) sudah mencapai target nasional, 11 indikator (31%) belum tercapai, 7 indikator (20%) belum dilaksanakan, dan 5 indikator (14%) tidak ada data.
 - Pilar hukum dan tata kelola yang relevan dengan Kabupaten Kebumen 21 indikator terdapat 14 indikator (67%) sudah mencapai target nasional, 7 indikator (33%) belum tercapai. Pada pilar hukum dan tata Kelola terdapat 7 indikator belum tercapai.
- 2) Indikator TPB yang belum mencapai target, belum dilaksanakan dan belum memiliki data menjadi permasalahan atau isu TPB. Adapun hasil pengelompokan terhadap indikator TPB yang menjadi permasalahan dikelompokkan menurut pilar berikut:

- Pilar Sosial : (1) Belum terpenuhinya akses layanan pendidikan dasar yang berkualitas; (2) Peningkatan derajat kesehatan yang terjangkau dan merata; (3) Jaminan akses terhadap pangan yang aman dan bergizi serta cukup untuk semua; (4) Pengentasan penyakit menular, terabaikan, dan penyakit tidak menular; (5) Pengendalian penduduk melalui program keluarga berencana; (6) Pemberdayaan dan perlindungan bagi perempuan, anak, dan disabilitas; dan (7) Pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan.
 - Pilar Ekonomi : (1) Pengembangan infrastruktur energi terbarukan; (2) Peningkatan pekerjaan yang layak; (3) Kontribusi sektor pariwisata potensial yang berkelanjutan; dan (4) Penguatan lembaga keuangan untuk industri kecil menengah.
 - Pilar Lingkungan : (1) Penguatan kelembagaan sumber daya air dan peningkatan akses air minum; (2) Belum meratanya akses sanitasi yang aman di masyarakat; (3) Pelestarian dan perlindungan sumber daya hutan dan lahan; (4) Pengelolaan sampah yang belum terintegrasi dari hulu sampai hilir; (5) Peningkatan kepatuhan instrumen penataan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan (6) Penguatan wilayah tangguh bencana dan perubahan iklim terutama pada wilayah rentan.
 - Pilar Hukum dan Tata Kelola : (1) Peningkatan kinerja pemerintah daerah dan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan; dan (2) Peningkatan akses pelayanan publik berbasis teknologi informasi.
- 3) Isu strategis KLHS RPJMD Kabupaten Kebumen meliputi:
- a) Kualitas hidup sumber daya manusia yang masih rendah dan distribusi kesejahteraan sosial
 - b) Masih rendahnya daya saing sektor ekonomi unggulan
 - c) Ancaman degradasi hutan dan lahan
 - d) Belum meratanya akses sanitasi, pelayanan sampah dan air bersih yang aman dan berkelanjutan
 - e) Peningkatan ancaman intensitas multi bencana dan perubahan iklim
 - f) Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi

4.2.3.5. Telaah RTRW Kabupaten Kebumen

Dalam mendukung fokus pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Kebumen akan mengembangkan pusat pertumbuhan wilayah yang dituangkan dalam kebijakan penataan ruang wilayah yang termuat dalam RTRW Kabupaten Kebumen 2023-2043 (Perda Kabupaten Kebumen No 1 Tahun 2024). Penataan ruang wilayah Kabupaten Kebumen bertujuan mewujudkan Kabupaten yang sejahtera, mandiri, berbasis agribisnis, dan pariwisata yang berkelanjutan. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas:

- (i) Kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten meliputi: (a) pengembangan sistem pusat permukiman sesuai dengan hierarki dan jangkauan pelayanannya; dan (b) pengembangan sistem jaringan prasarana Wilayah yang mendukung Agrobisnis dan pariwisata.
- (ii) Kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas: (a) Kebijakan pengembangan Kawasan Lindung meliputi: pengendalian dan pelestarian Kawasan Lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan

hidup dan pengurangan risiko bencana; dan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan degradasi dan kerusakan lingkungan hidup; serta (b) Kebijakan pengembangan Kawasan Budidaya meliputi: (a) pengembangan ekonomi Wilayah berbasis pemanfaatan potensi dan penciptaan nilai tambah yang berkelanjutan; dan (b) peningkatan fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

- (iii) Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten meliputi: (a) pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan Strategis Kabupaten untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang unggul dan berdaya saing; dan (b) pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan Strategis Kabupaten untuk mendukung kepentingan sosial dan budaya.

Strategi penataan ruang wilayah dalam pengembangan pusat pertumbuhan wilayah di Kabupaten Kebumen antara lain:

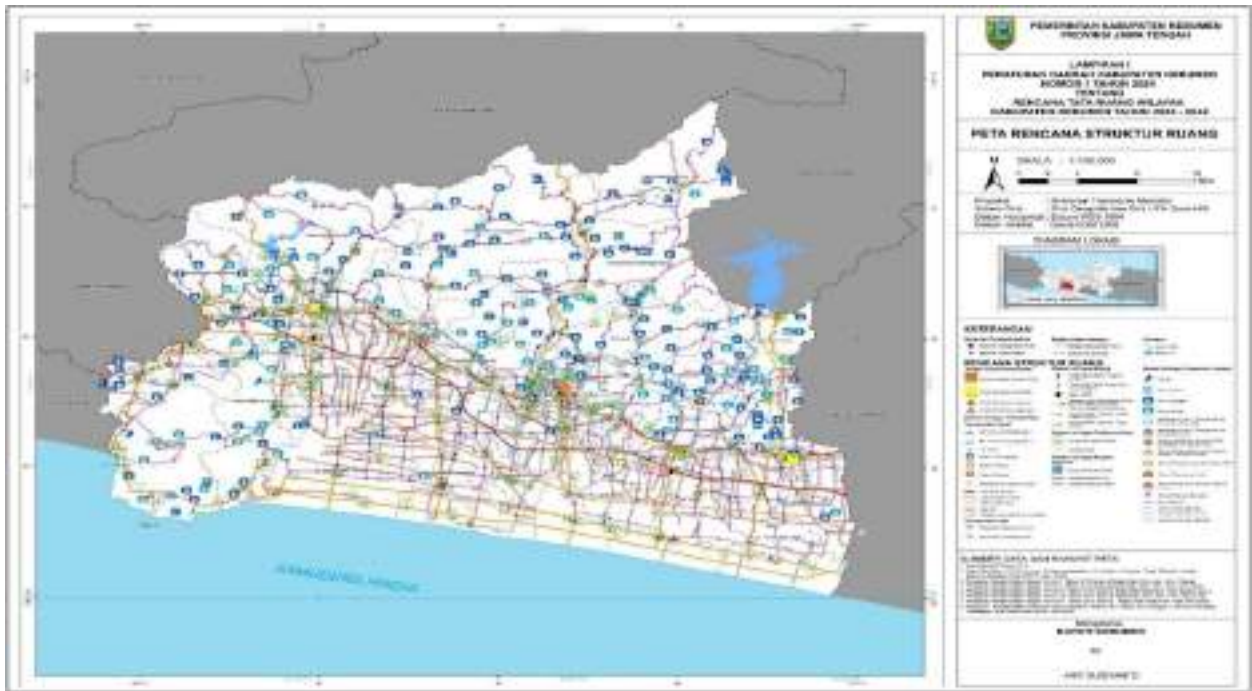
- (i) Strategi pengembangan sistem pusat permukiman sesuai dengan hierarki dan jangkauan pelayanannya meliputi: (a) mengembangkan kawasan perkotaan agar lebih kompetitif dan efektif dalam pengembangan Wilayah di sekitarnya; (b) mengembangkan kawasan perdesaan sebagai penyangga Kawasan Perkotaan; dan (c) meningkatkan keterkaitan antar kawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah di sekitarnya.
- (ii) Strategi pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah yang mendukung agrobisnis dan pariwisata meliputi: (a) mengembangkan sistem jaringan transportasi secara menyeluruh; (b) mengembangkan sistem jaringan energi; (c) mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi; (d) mengembangkan sistem jaringan sumber daya air; dan (e) mengembangkan jaringan prasarana untuk meningkatkan keterpaduan pengelolaan lingkungan.
- (iii) Strategi pengembangan ekonomi wilayah berbasis pemanfaatan potensi dan penciptaan nilai tambah yang berkelanjutan meliputi: (a) mengoptimalkan pemanfaatan ruang budidaya dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; (b) meningkatkan peran kawasan hutan produksi; (c) mengoptimalkan pemanfaatan kawasan perkebunan rakyat untuk mewujudkan nilai tambah daerah; (d) mengembangkan kawasan pertanian sebagai pusat agrobisnis; (e) menetapkan dan melestarikan kawasan pertanian pangan berkelanjutan untuk mewujudkan ketahanan dan keamanan pangan; (f) mengembangkan kawasan perikanan; (g) mengendalikan kegiatan di kawasan pembangkitan tenaga listrik; (h) mengembangkan kegiatan pada kawasan peruntukan industri yang ramah lingkungan dan berdaya saing tinggi; (i) mengembangkan kawasan pariwisata; (j) mengembangkan dan mengendalikan kawasan permukiman; (k) menyediakan pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau pada kawasan perkotaan paling sedikit seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan, meliputi 20% (dua puluh persen) ruang terbuka hijau publik dan 10% (sepuluh persen) ruang terbuka hijau privat; dan (l) mempertahankan keberadaan ruang terbuka hijau apabila proporsi total luas lebih besar dari 30% (tiga puluh persen).
- (iv) Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan strategis kabupaten untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang unggul dan

- berdaya saing meliputi: (a) menetapkan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; (b) mengembangkan dan meningkatkan pusat perdagangan dan jasa, pariwisata, serta industri; dan (c) mengoptimalkan pusat pertumbuhan ekonomi sebagai penggerak utama pengembangan wilayah kabupaten.
- (v) Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan strategis kabupaten untuk mendukung kepentingan sosial dan budaya meliputi: (a) menetapkan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan (b) mengembangkan dan meningkatkan nilai Kawasan Kota Pusaka Gombang dengan menambah kegiatan pendukung yang sesuai.

Arahan penataan ruang Kabupaten Kebumen berdasarkan kebijakan penataan ruang dalam RTRW Kabupaten Kebumen 2023-2044, terbagi menjadi arahan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten; pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten.

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Kebumen terdiri atas sistem pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana. Dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, struktur ruang didefinisikan sebagai susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Pontoh & Kustiwan (2009) menambahkan bahwa struktur ruang kota terdiri atas pusat kegiatan, kawasan fungsional, dan didukung oleh jaringan jalan yang saling berkaitan membentuk sistem spasial. Struktur ruang juga dapat berpengaruh terhadap keberlanjutan kota. Struktur ruang dapat memberi arah bagi perkembangan pola ruang yang terkait dengan pola penggunaan lahan. Kondisi struktur ruang kota juga mempengaruhi pola perilaku penduduk, terutama pola pergerakan penduduk karena menyangkut jaringan pergerakan (Hakim, 2010). Perkembangan aktivitas ekonomi mempengaruhi perubahan struktur ruang dilihat dari pola penggunaan lahan dan jaringan jalan (Nilayanti and Brotosunaryo, 2012). Kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah Kabupaten Kebumen berdasarkan RTRW Kabupaten Kebumen, terdiri atas sistem pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana.

Gambar IV.11
Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen



Sumber: Perda No 1 Tahun 2024, RTRW 2024-2044, 2024

Dalam struktur ruang wilayah, pusat-pusat kegiatan berfungsi sebagai simpul atau pusat pelayanan/ pertumbuhan wilayah. Pengembangan sistem pusat permukiman di Kabupaten Kebumen terdiri dari Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/ kota, Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL) sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/ kota atau beberapa kecamatan, Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan, dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. Setiap simpul memiliki hubungan fungsional dengan simpul lainnya. Konfigurasi simpul menjadi dasar penyusunan jaringan prasarana. Simpul-simpul tersebut memiliki wilayah pelayanan atau jangkauan (Adisasmita, 2014). Lebih lanjut, keberadaan jaringan jalan yang menghubungkan antar kawasan menimbulkan simpul pergerakan atau transportasi baru untuk memicu perkembangan aktivitas di sekitarnya (Ariyanto, 2017). Lahagina et al. (2015) menjelaskan bahwa beberapa hal yang mendorong munculnya pusat pelayanan seperti faktor lokasi, ketersediaan sumber daya, aglomerasi, dan investasi pemerintah. Pusat pelayanan terletak pada lokasi yang memiliki nilai strategis karena akan berfungsi sebagai simpul kegiatan.

Gambar IV.12
Peta Rencana Sistem Pusat Permukiman Kabupaten Kebumen



Sumber: Perda No 1 Tahun 2024, RTRW 2024-2044, 2024

Di Kabupaten Kebumen beberapa pusat kegiatan telah ditentukan hierarki fungsinya dan tercantum dalam RTRW Kabupaten Kebumen karena memiliki fungsi strategis. RTRW Kabupaten Kebumen menunjukkan (i) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) ditetapkan berupa Kawasan Perkotaan Kebumen meliputi: Kecamatan Alian, Buluspesantren, Kebumen, Klirong, dan Pejagoan. (ii) Pusat Kegiatan Lokal (PKL), ditetapkan meliputi: (a) Kawasan Perkotaan Gombong-Karanganyar meliputi Kecamatan Buayan, Kuwarasan, Rowokele, Gombong, Sempor, Adimulyo, Karanganyar, dan Sruweng; dan (b) Kawasan Perkotaan Prembun meliputi Kecamatan Ambal, Kutowinangun, Mirit, dan Prembun. (iii) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) ditetapkan meliputi: (a) Kawasan Perkotaan Ambal meliputi Kecamatan Ambal, Buluspesantren, Mirit, Kebumen, dan Klirong; (b) Kawasan Perkotaan Ayah meliputi Kecamatan Ayah; (c) Kawasan Perkotaan Karangsambung meliputi Kecamatan Karangsambung; dan (d) Kawasan Perkotaan Petanahan meliputi Kecamatan Petanahan, Puring, dan Klirong. (iv) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) ditetapkan meliputi PPL Jladri di Kecamatan Buayan, PPL Karangduwur di Kecamatan Ayah, PPL Giyanti di Kecamatan Rowokele, PPL Karanggayam di Kecamatan Karanggayam, PPL Padureso di Kecamatan Padureso, PPL Poncowarno di Kecamatan Poncowarno, PPL Sadang Kulon di Kecamatan Sadang, PPL Semali di Kecamatan Sempor, PPL Sinungrejo di Kecamatan Ambal, dan PPL Tambakmulyo di Kecamatan Puring.

Tabel IV. 2.
Pembagian PKW, PKL, PPK, PPL pada tiap Kecamatan di Kabupaten Kebumen

No.	Kecamatan	Hierarki Fungsi dan Orde Kota			
		I	II	III	IV
		PKW	PKL	PPK	PPL
1.	Ayah			√	√
2.	Buayan		√		√
3.	Puring			√	√
4.	Petanahan			√	
5.	Klirong	√		√	
6.	Buluspesantren	√		√	
7.	Ambal		√	√	√
8.	Mirit		√	√	
9.	Prembun		√		
10.	Kutowinangun		√		
11.	Alian	√			
12.	Kebumen	√		√	
13.	Pejagoan	√			
14.	Sruweng		√		
15.	Adimulyo		√		
16.	Kuwarasan		√		
17.	Rowokele		√		√
18.	Sempor		√		√
19.	Gombong		√		
20.	Karanganyar		√		
21.	Karanggayam				√
22.	Sadang				√
23.	Bonorowo	X	X	X	X
24.	Padureso				√
25.	Poncowarno				√
26.	Karangsambung			√	

Sumber: Perda No 1 Tahun 2024, RTRW 2024-2044, 2024, diolah

Rencana struktur ruang sistem jaringan transportasi terdiri dari sistem jaringan jalan, sistem jaringan kereta api, dan sistem jaringan transportasi laut. Rencana struktur ruang sistem jaringan jalan selain jalan umum (jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal) berupa jalan tol Cilacap-Yogyakarta, terminal penumpang tipe A di Kecamatan Kebumen, dan terminal penumpang tipe C di Kecamatan Karanggayam, Kebumen, dan Gombong. Rencana struktur ruang sistem jaringan kereta api meliputi sistem jaringan jalur kereta api antar kota Double track Jawa Selatan dan Kereta api Jakarta-Surabaya, sistem jaringan stasiun kereta api penumpang meliputi stasiun Gombong, stasiun Karanganyar, stasiun Kebumen dan stasiun Kutowinangun, sistem jaringan stasiun kereta api barang meliputi stasiun Gombong dan stasiun Kebumen, dan sistem jaringan stasiun kereta api operasi meliputi stasiun Gombong, stasiun Ijo,

stasiun Karanganyar, stasiun Kebumen, stasiun Kutowinangun, stasiun Prembun, stasiun Soka, dan stasiun Wonosari.

Rencana struktur ruang sistem jaringan transportasi laut berupa pelabuhan sungai dan danau (Dermaga Waduk Sempor, Dermaga Logending, Dermaga Kademangan, Dermaga Desa Kademangan Demangsari, dan Dermaga Prasasti Waduk Wadaslintang). Selain itu, sistem jaringan transportasi laut berupa pelabuhan perikanan pantai Logending dan pangkalan pendaratan ikan (Argopeni, Karangduwur, Lembupurwo, Pasir, Rowo, Surejan, Tangulangun, dan Tegalretno). Rencana struktur ruang sistem jaringan energi meliputi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi dan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan. Kabupaten Kebumen memiliki sistem jaringan energi yang terintegrasi yaitu jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke tempat penyimpanan (jalur pipa BBM Cilacap-Jogja-Teras Kebumen) dan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan berupa Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Pejengkolan, PLTA Sempor, PLTA Wadaslintang, Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Merden, Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) jalur transmisi Pedan-Kesugihan, Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Gombong-Kesugihan, SUTT Gombong-Rawalo,

SUTT Kebumen-Gombong, SUTT Kebumen-Purworejo, SUTT Kesugihan-Purworejo, SUTT Purworejo-Gombong, SUTT Purworejo-Wadaslintang, SUTT Wonosobo- Wadaslintang, Gardu Induk Gombong, Gardu Induk Kebumen, dan Gardu Induk Wadaslintang.

Rencana struktur ruang sistem jaringan telekomunikasi meliputi jaringan tetap dan jaringan bergerak. Jaringan tetap berada di Kecamatan Adimulyo, Alian, Ambal, Buayan, Buluspesantren, Gombong, Karanganyar, Karanggayam, Karangsambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Kuwarasan, Mirit, Pejagoan, Petanahan, Prembun, Puring, Rowokele, Sempor, dan Sruweng. Jaringan bergerak berupa Jaringan bergerak seluler berada di seluruh kecamatan di Kabupaten Kebumen.

Rencana struktur ruang sistem jaringan sumber daya air berupa prasarana sumber daya air sistem jaringan irigasi dan bangunan sumber daya air. Sistem jaringan irigasi terdiri dari jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder. Bangunan sumber daya air berupa bendungan, embung, dan long storage meliputi Bendungan Sempor, Bendungan Wadaslintang, Bendungan Pejengkolan, Embung Banjararjo, Embung Bulurejo, Embung DAS Kalong, Embung Giritirto, Embung Kalirejo, Embung Kalisana, Embung Kedungweru, Embung Krakal, Embung Pandansari, Embung Peniron, Embung Penusupan, Embung Rahayu, Embung Sadangwetan, Embung Seboro, Embung Seling, Embung Sрати, Embung Tlepok, Embung Triwarno, Embung Tugu, Embung Wonosari, dan Long Storage Sidomukti.

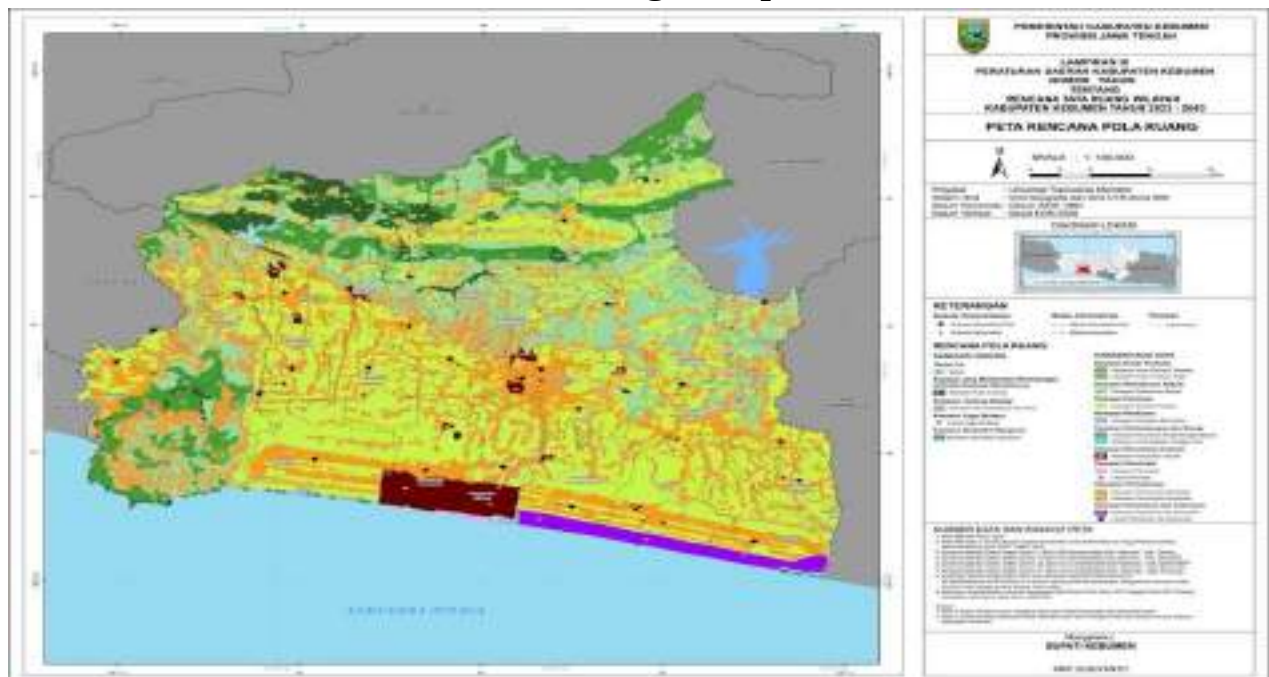
Rencana struktur ruang sistem jaringan prasarana lainnya terdiri atas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), sistem jaringan persampahan, sistem jaringan evakuasi bencana, dan sistem drainase. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berupa jaringan perpipaan (unit air baku, unit produksi, dan unit distribusi) dan bukan jaringan perpipaan (sumur dangkal

dan sumur pompa). Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) terdiri dari SPAL Non Domestik dan SPAL Domestik. Sistem Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) meliputi pengembangan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) . Sistem jaringan persampahan terdiri dari Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R), Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Sistem jaringan evakuasi bencana diperuntukan bagi jenis bencana banjir, banjir bandang, gempa bumi, tsunami, dan longsor terdiri dari jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana. Sistem drainase terdiri dari jaringan drainase primer dan sekunder.

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Kebumen terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya. Berdasarkan RTRW Kabupaten Kebumen, kebijakan pengembangan pola ruang wilayah Kabupaten Kebumen, terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Gambar IV.13

Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Kebumen



Sumber: Perda No 1 Tahun 2024, RTRW 2024-2044, 2024

Rencana pola ruang kawasan lindung di Kabupaten Kebumen terdiri dari (a) Badan Air luas kurang lebih 1.415 ha; (b) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya berupa kawasan hutan lindung luas kurang lebih 3.820 ha; (c) Kawasan Konservasi berupa Kawasan Konservasi di wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil (taman pulau kecil) luas kurang lebih 0,5 ha; (d) Kawasan lindung geologi berupa Kawasan cagar alam geologi (Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil) luas kurang lebih 5 ha; (e) Kawasan Cagar Budaya berada di Benteng Van Der Wijck dan DKT Gombong di Kecamatan Gombong, serta SMP N 1 Prembun di Kecamatan Prembun; dan (f) Kawasan Ekosistem Mangrove luas kurang lebih 63 ha.

Rencana pola ruang kawasan budidaya terdiri atas (1) kawasan hutan produksi berupa kawasan hutan produksi terbatas seluas 13.077 ha dan kawasan hutan produksi tetap seluas 655 ha; (2) kawasan perkebunan rakyat seluas 23.788 ha; (3) kawasan pertanian berupa kawasan tanaman pangan seluas 44.113 ha yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan seluas 43.154 ha (97,83 persen); (4) kawasan perikanan berupa kawasan perikanan budidaya seluas 241 ha; (5) kawasan pertambangan dan energi terdiri dari kawasan pertambangan mineral berupa kawasan peruntukan pertambangan batuan seluas 94 ha dan kawasan pembangkitan tenaga listrik berupa gardu induk seluas 5 ha; (6) kawasan peruntukan industri seluas 3.310 ha; (7) kawasan pariwisata seluas 172 ha (Kali Ratu, Pantai Karangbolong, Pantai Logending, Pantai Suwuk, Pantai Watubale, Waduk Wadaslintang, dan Pantai Pandan Kuning) dan lokasi pariwisata (Bukit Pentulu, Curug Sindaro, Jembatan, Gading Paradise, Goa Petruk, Goa Barat, Goa Jatijajar, Hutan Mangrove, Pantai di sepanjang pesisir Kabupaten, Pantai Lampon, Pantai Menganti, Pemandian Air Panas Krakal, Selo Asri Seboro, Songging Waterpark, Taman Banyulangit, Tubing Sungai Padureso, Tubing Sungai Luk Ulo, Taman Reptile Adimulyo, dan Waduk Sempor); (8) kawasan permukiman perkotaan seluas 12.784 ha dan kawasan permukiman perdesaan seluas 27.620 ha; dan (9) kawasan pertahanan dan keamanan (daerah latihan TNI seluas 2.238 ha, Markas Komando Distrik Militer 0709 Kebumen dan Markas Komando Rayon Militer).



Tabel IV. 3.
Indikasi Program Rencana Pola Ruang Kabupaten Kebumen

No	Kecamatan	Pusat Kegiatan				Indikasi Program Rencana Pola Ruang																	
		PKW	PKL	PPK	PPL	Bada n Air	Kawa san Huta n Lind ung	Kawa san Kons ervas i (tam an pula u kecil)	Kaw asan Keu nika n Batu an dan Fosil	Kawa san Caga r Buda ya	Kawa san Ekos iste m Mang rove	kawa san huta n prod uksi tetap	kawa san perk ebun an raky at	kawa san perta nian pang an berke lanju tan	kawa san perik anan budid aya	kawa san peru ntuk an perta mban gan batua n	kawa san pem bang kitan tena ga listrik (gard u indu k)	Kawa san peru ntuk an indus tri	kawa san pariw isata	lokas i pariw isata	kawa san perm ukim an perk otaan	kawa san perm ukim an perde saan	kawa san perta hana n dan keam anan
1.	Ayah					✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
2.	Buayan				✓	✓	✓					✓	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
3.	Puring				✓	✓							✓	✓	✓			✓	✓		✓	✓	✓
4.	Petanahan													✓				✓	✓		✓	✓	✓
5.	Klirong					✓								✓				✓	✓		✓	✓	✓
6.	Buluspesantren					✓							✓	✓				✓	✓		✓	✓	✓
7.	Ambal				✓	✓								✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓
8.	Mirit				✓	✓					✓		✓	✓						✓	✓	✓	✓
9.	Prembun				✓	✓				✓			✓	✓						✓	✓	✓	✓
10.	Kutowinangun					✓			✓				✓	✓		✓				✓	✓	✓	✓
11.	Alian				✓	✓	✓					✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓
12.	Kebumen				✓	✓							✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓
13.	Pejagoan				✓	✓	✓				✓		✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓
14.	Sruweng				✓	✓	✓						✓	✓		✓				✓	✓	✓	✓
15.	Adimulyo				✓	✓							✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓
16.	Kuwarasan				✓	✓							✓	✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓



17.	Rowokele					√	√			√		√	√		√		√	√	√
18.	Sempor					√	√			√	√	√	√			√	√	√	√
19.	Gombang					√			√			√	√			√	√	√	√
20.	Karanganyar					√	√			√		√	√			√	√	√	√
21.	Karanggayam					√	√	√		√	√	√	√			√		√	√
22.	Sadang					√		√		√	√	√	√			√		√	√
23.	Bonorowo	X	X	X	X	√							√			√	√	√	√
24.	Padureso					√	√			√	√	√	√		□	√	√		√
25.	Poncowarno					√						√	√			√		√	√
26.	Karangsambung					√	√	√		√	√	√	√			√	√	√	√

Sumber: Perda No 1 Tahun 2024, RTRW 2024-2044, 2024, diolah

Keterangan:



: Indikasi Program
: Non Indikasi Program

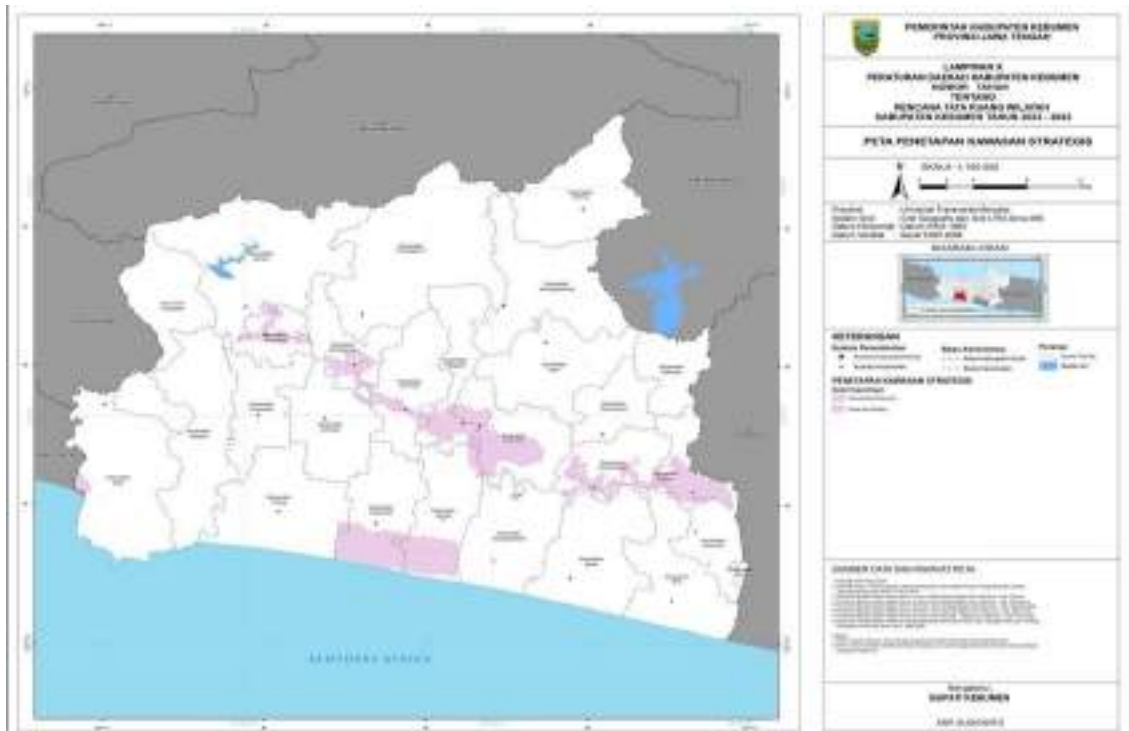
Kawasan strategis Kabupaten Kebumen terdiri atas kawasan strategis provinsi di Kabupaten dan kawasan strategis Kabupaten. Berdasarkan RTRW Kabupaten Kebumen, kebijakan pengembangan kawasan strategis Kabupaten Kebumen, terdiri atas (1) Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten meliputi: (a) Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, (b) Kawasan Strategis Provinsi dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, dan (c) Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan (2) Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi: (a) Kawasan industri Kebumen, (b) Kawasan ekonomi cepat tumbuh Gombang, (c) Kawasan ekonomi cepat tumbuh Karanganyar-Sruweng, (d) Kawasan ekonomi cepat tumbuh Kebumen, (e) Kawasan ekonomi cepat tumbuh Prembun- Kutowinangun, dan (f) Kawasan pariwisata terpadu pesisir Ayah.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. Kawasan industri Kebumen merupakan bagian dari kawasan strategis provinsi kawasan industri terpadu sedangkan kawasan pariwisata terpadu pesisir Ayah merupakan bagian dari kawasan strategis provinsi kawasan strategis pariwisata terpadu. Pengembangan kawasan industri Kebumen bertujuan mewujudkan Kawasan industri yang berdaya saing dan berkelanjutan dengan arah pengembangan industri, perdagangan dan jasa, dan permukiman. Pengembangan kawasan ekonomi cepat tumbuh Gombang bertujuan mewujudkan Kawasan ekonomi cepat tumbuh Gombang sebagai Kawasan perdagangan dan jasa dan pusat pariwisata budaya dengan arah pengembangan perdagangan dan jasa, pariwisata, dan permukiman. Pengembangan kawasan ekonomi cepat tumbuh Karanganyar-Sruweng bertujuan mewujudkan Kawasan ekonomi cepat tumbuh Karanganyar-Sruweng sebagai Kawasan pusat perdagangan dan jasa dengan arah pengembangan perdagangan dan jasa dan permukiman. Pengembangan kawasan ekonomi cepat tumbuh Kebumen bertujuan mewujudkan Kawasan ekonomi cepat tumbuh Kebumen sebagai Kawasan pusat pemerintahan yang didukung perdagangan dan jasa dan industri dengan arah pengembangan pusat pemerintahan, industri, permukiman, dan perdagangan dan jasa. Pengembangan kawasan ekonomi cepat tumbuh Prembun-Kutowinangun bertujuan mewujudkan Kawasan ekonomi cepat tumbuh Prembun-Kutowinangun sebagai Kawasan pusat perdagangan dan jasa berbasis Agribisnis dengan arah pengembangan pertanian, permukiman, dan perdagangan dan jasa. Pengembangan kawasan pariwisata terpadu pesisir Ayah bertujuan mewujudkan Kawasan pariwisata terpadu pesisir Ayah sebagai Kawasan Pariwisata alam yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan dengan arah pengembangan pariwisata, perdagangan dan jasa, dan permukiman.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya berupa Kawasan Kota Pusaka Gombang. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya bertujuan mewujudkan sebagai kawasan pariwisata budaya

yang berkelanjutan. Arah pengembangan Kawasan Kota Pusaka Gombang di Kecamatan Gombang adalah pengembangan pariwisata, perdagangan dan jasa, dan permukiman.

Gambar IV.14
Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Kebumen



Sumber: Perda No 1 Tahun 2024, RTRW 2024-2044, 2024

Penentuan pusat kegiatan tidak hanya melihat dari aspek kebijakan tetapi juga melihat kebutuhan pengembangan wilayah. Pusat kegiatan telah ditentukan hierarki fungsinya untuk meningkatkan kinerja pusat permukiman dalam memberikan pelayanan sarana prasarana intra dan antar wilayah di Kabupaten Kebumen. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) ditetapkan berupa Kawasan Perkotaan Kebumen meliputi: Kecamatan Alian, Buluspesantren, Kebumen, Klirong, dan Pejagoan. Kawasan perkotaan Kebumen akan dikembangkan sebagai Kawasan yang memiliki nilai strategis sebagai pusat pertumbuhan wilayah seperti: pembangunan desa terpadu, pengembangan geopark, kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap, kawasan perkebunan rakyat, kawasan tanaman pangan, produksi garam, kawasan peruntukan industri yang ramah lingkungan, Kawasan Industri Petanahan, pengembangan sentra-sentra industri, pengembangan ekspor produk unggulan, kawasan pariwisata, pengembangan lokasi pariwisata, pengembangan pariwisata budaya, peningkatan daya tarik destinasi pariwisata, Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK) dan ekonomi kreatif, kawasan permukiman perkotaan, pengembangan ekonomi berbasis koperasi dan UMKM, pengembangan ekonomi berbasis pesantren, Kawasan Industri Kebumen, Kawasan Pariwisata Terpadu Pesisir Ayah, kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, pengembangan perdagangan dan jasa, dan Kawasan Kota Pusaka Gombang.



Tabel IV. 4.
Indikasi Program Pusat Pertumbuhan Wilayah Kabupaten Kebumen

No	PKW Kawasan Perkotaan Kebumen	Indikasi Program Pusat Pertumbuhan Wilayah Kabupaten Kebumen																								
		Pe mba ngu nan Des a Ter pad u	Pen gem ban gan Geo par k	Kaw asa n Hut an Pro duk si Ter bata s	Kaw asa n Hut an Pro duk si Tet ap	Kaw asa n Per keb una n Rak yat	Kaw asa n Tan ama n Pan gan	Pro duk si Gar am	Kaw asa n Per unt uka n Ind ustr i yan g Ra ma h Lin gku nga n	Kaw asa n Ind ustr i Pet ana han	Pen gem ban gan Sen tra Sen tra Ind ustr i	Pen gem ban gan Eks por Pro duk Ung gula n	Kaw asa n Pari wis ata	Pen gem ban gan Lok asi Pari wis ata	Pen gem ban gan Pari wis ata	Pen ing kat an Day a Tari k Des tina si Pari wis ata	Des tin asi Par iwi sat a Kab upa ten (DP K) dan Eko no mi Kre atif	Kaw asa n Per mu kim an Per kot aan	Pen gem ban gan Eko no mi Ber basi s Kop eras i dan UM KM	Pen gem ban gan Eko no mi Ber basi s Pes antr en	Kaw asa n Ind ustr i Keb um en	Kaw asa n Pari wis ata Ter pad u Pesi sir Aya h	Kaw asa n Stra tegi s Pert um buh an Eko no mi	Pen gem ban gan Per dag ang an dan Jas a	Kaw asa n Kot a Pus aka Go mbo ng	
1.	Klirong	√	√				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2.	Bulus pesantren					√	√		√		√		√	√	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√
3.	Alian			√	√	√	√						√	√	√	√	√	√	√				√	√	√	√
4.	Kebumen	√	√			√	√		√		√			√				√		√	√		√	√	√	√
5.	Pejagoan	√		√		√			√		√		√	√	√	√	√	√	√	√	√			√	√	√

Sumber: Perda No 1 Tahun 2024, RTRW 2024-2044, 2024, diolah

Keterangan:

- Indikasi Program
- Non Indikasi Program

Keberadaan sistem jaringan transportasi yang menghubungkan antar kawasan menimbulkan simpul pergerakan atau transportasi baru untuk memicu perkembangan aktivitas di sekitarnya. Rencana struktur ruang sistem jaringan transportasi terdiri dari sistem jaringan jalan, sistem jaringan kereta api, dan sistem jaringan transportasi laut. Rencana struktur ruang sistem jaringan jalan selain jalan umum (jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal) berupa jalan tol Cilacap-Yogyakarta, serta terminal penumpang tipe A di Kecamatan Kebumen, terminal penumpang tipe C di Kecamatan Karanggayam, Kebumen, dan Gombong. Rencana struktur ruang sistem jaringan kereta api meliputi sistem jaringan jalur kereta api antar kota Double track Jawa Selatan dan Kereta api Jakarta-Surabaya, serta sistem jaringan stasiun kereta api penumpang meliputi Stasiun Gombong, Stasiun Karanganyar, Stasiun Kebumen, dan Stasiun Kutowinangun; sistem jaringan stasiun kereta api barang meliputi Stasiun Gombong dan Stasiun Kebumen; dan sistem jaringan stasiun kereta api operasi meliputi Stasiun Gombong, Stasiun Ijo, Stasiun Karanganyar, Stasiun Kebumen, Stasiun Kutowinangun, Stasiun Prembun, Stasiun Soka dan Stasiun Wonosari.

Rencana struktur ruang sistem jaringan transportasi laut berupa pelabuhan sungai dan danau Dermaga Waduk Sempor, Dermaga Logending, Dermaga Kademangan, Kali Ijo Kademangan Demangsari Kecamatan Ayah, dan Dermaga Prasasti Waduk Wadaslintang. Selain itu, sistem jaringan transportasi laut berupa pelabuhan perikanan pantai Logending dan pangkalan pendaratan ikan (Argopeni Kecamatan Ayah, Karangduwur Kecamatan Ayah, Lembupurwo Kecamatan Mirit, Pasir Kecamatan Ayah, Rowo Kecamatan Mirit, Surerejan Kecamatan Puring, Tanggulangin Kecamatan Klirong, dan Tegalretno Kecamatan Petanahan).

Gambar IV.15

Peta Rencana Sistem Jaringan Transportasi Kabupaten Kebumen



Sumber: Perda No 1 Tahun 2024, RTRW 2024-2044, 2024

Sistem jaringan transportasi yang menghubungkan Pusat Kegiatan Kabupaten Kebumen (PKW, PKL, PPK, dan PPL) sebagai hubungan fungsional perkembangan wilayah dalam mendukung pencapaian fokus pembangunan daerah. Indikasi program sistem jaringan transportasi dalam melayani kebutuhan aktivitas pusat kegiatan Kabupaten Kebumen yaitu pengembangan jalan arteri primer, pengembangan jalan kolektor primer, pengembangan jalan lokal primer, pembangunan jalan tol, pembangunan jalan layang (*flyover*) di perlintasan rel kereta api, pembangunan jalan lingkar (Gombong, Karanganyar, Prembun), pengembangan terminal penumpang tipe A, pengembangan terminal penumpang tipe C, pembangunan terminal penumpang tipe C, pembangunan terminal penumpang tipe B, pembangunan terminal barang, pengembangan dan pemeliharaan jembatan, pengembangan jaringan jalur kereta api antarkota (double track Jawa Selatan), pengembangan jaringan jalur kereta api antarkota, pengembangan stasiun penumpang, pengembangan stasiun barang, pengembangan stasiun operasi, pengembangan dermaga, pengembangan pelabuhan perikanan pantai logending, pengembangan pangkalan pendaratan ikan, dan pembangunan tempat pelelangan ikan.



Tabel IV. 5.
Pusat Kegiatan dan Indikasi Program Sistem Jaringan Transportasi

No	Kecamatan	Pusat Kegiatan				Indikasi Program sistem jaringan transpotasi																		
		PKW	PKL	PPK	PPL	Pengembangan Jalan Arteri Primer	Pengembangan Jalan Kolektor Primer	Pengembangan Jalan Lokal Primer	Pembangunan Jalan Tol	Pengembangan Terminal Penumpangan Tipe A	Pengembangan Terminal Penumpangan Tipe C	Pembangunan Terminal Penumpangan Tipe C	Pembangunan Terminal Penumpangan Tipe B	Pembangunan Terminal Baranng	Pengembangan dan Pemeliharaan Jembatan	Pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antar kota (Double Track Jawa Selatan)	Pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api	Pengembangan Stasiun Penumpangan	Pengembangan Stasiun Baranng	Pengembangan Stasiun Operasi	Pengembangan Dermaga	Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Logending	Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan	Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan
1.	Ayah																							
2.	Buayan																							
3.	Puring																							
4.	Petanahan																							
5.	Klirong																							
6.	Buluspesantren																							
7.	Ambal																							
8.	Mirit																							
9.	Prembun																							
10.	Kutowinangun																							
11.	Alian																							
12.	Kebumen																							
13.	Pejagoan																							
14.	Sruweng																							
15.	Adimulyo																							

Sumber: Perda No 1 Tahun 2024, RTRW 2024-2044, 2024 diolah



: Non Indikasi Program

4.2.4 Isu Strategis Kabupaten Kebumen

Isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan urgensi dalam pembangunan di Kabupaten Kebumen. Isu strategis menjadi hal krusial karena pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap tantangan dan peluang pembangunan masa mendatang. Berdasarkan identifikasi dari berbagai isu baik internasional, nasional maupun daerah, dapat ditentukan isu strategis untuk Kabupaten Kebumen yang akan ditangani dalam 5 tahun ke depan yang dijabarkan sebagai berikut:

1) Penguatan tata kelola pendidikan dan kesehatan menuju SDM yang sehat, cerdas dan berdaya saing

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) merupakan kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. Kabupaten Kebumen terus berupaya memperkuat tata kelola di sektor pendidikan dan kesehatan sebagai langkah strategis untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Di sektor pendidikan, pemerintah daerah berfokus pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan pada jenjang dasar. Meskipun angka partisipasi sekolah mengalami peningkatan namun pemerataan kualitas pendidikan masih menjadi tantangan. Ketersediaan tenaga pendidik yang berkualitas, sarana dan prasarana yang memadai, serta integrasi teknologi dalam pembelajaran menjadi aspek penting yang terus ditingkatkan. Program pendidikan vokasi juga diperkuat guna menyiapkan lulusan yang siap kerja dan sesuai dengan kebutuhan industri.

Sementara itu, di sektor kesehatan, upaya peningkatan layanan kesehatan dilakukan dengan memperluas cakupan fasilitas kesehatan serta meningkatkan kualitas tenaga medis. Penyediaan layanan kesehatan yang merata, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil, menjadi prioritas dalam upaya menekan angka kematian ibu dan bayi, meningkatkan angka harapan hidup, serta mengurangi angka stunting. Selain itu, edukasi tentang pola hidup sehat dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan penyakit juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam pembangunan kesehatan di Kebumen. Untuk mencapai SDM yang sehat, cerdas dan berdaya saing, kolaborasi antara pemerintah dengan berbagai pemangku kepentingan sangat diperlukan. Dengan tata kelola yang baik serta sinergi berbagai pihak, Kabupaten Kebumen dapat menciptakan generasi yang tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga memiliki daya saing tinggi dalam menghadapi tantangan masa depan.

2) Akselerasi pengentasan kemiskinan melalui pemanfaatan basis data perlindungan sosial

Kabupaten Kebumen terus berupaya mempercepat pengentasan kemiskinan melalui strategi berbasis data yang lebih akurat dan terintegrasi. Dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi, optimalisasi basis data perlindungan sosial menjadi langkah penting dalam memastikan bantuan dan program pemberdayaan tepat sasaran serta efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan Data Terpadu dan sistem informasi berbasis digital memungkinkan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan, sekaligus memastikan distribusi

bantuan sosial berjalan lebih transparan dan efisien. Dengan data yang valid dan terkini, program-program seperti bantuan sosial tunai, subsidi pangan, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta Program Keluarga Harapan (PKH) dapat diberikan secara lebih optimal kepada masyarakat miskin dan rentan. Berdasarkan hasil kajian rencana penanggulangan kemiskinan daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 maka beberapa daerah prioritas dalam percepatan penanggulangan kemiskinan yaitu kecamatan Padureso, Alian, Rowokele, Sempor, Karanggayam dan Karangsembung.

Selain bantuan sosial, Kebumen juga terus mendorong program pemberdayaan ekonomi berbasis inklusi. Melalui pemanfaatan data perlindungan sosial, masyarakat miskin dapat diarahkan untuk mendapatkan akses pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, serta program padat karya yang dapat meningkatkan kemandirian ekonomi. Kolaborasi dan Sinergi antar instansi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan sangat penting dalam mempercepat pengentasan kemiskinan. Dengan pemanfaatan basis data yang lebih akurat, kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based policy), serta penguatan program pemberdayaan ekonomi, Kabupaten Kebumen dapat mempercepat penurunan angka kemiskinan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

3) Hilirisasi ekonomi berbasis komoditas unggulan

Kabupaten Kebumen memiliki beragam potensi komoditas unggulan yang dapat menjadi penggerak utama ekonomi, mulai dari sektor pertanian, perikanan, hingga industri kreatif. Untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk lokal, diperlukan strategi hilirisasi ekonomi yang berbasis pada pengolahan dan diversifikasi produk dari komoditas unggulan daerah. Salah satu langkah strategis dalam hilirisasi adalah pengembangan industri pengolahan berbasis lokal. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat dapat diperkuat dengan mendorong pengolahan hasil pertanian seperti beras organik, olahan hasil hortikultura, dan pengembangan produk turunan dari tanaman perkebunan seperti kopi dan kelapa. Begitu pula dengan sektor perikanan, di mana hasil tangkapan laut dapat diolah menjadi produk bernilai jual tinggi seperti ikan asap, abon ikan, hingga produk berbasis ekspor.

Berdasarkan hasil analisis dalam kajian produk unggulan daerah maka pengembangan perekonomian daerah melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan menggunakan alat analisis Location Quotients (LQ), Shift Share maupun tipologi klassen dan dengan pemetaan melalui analisis overlay ketiganya, dan mengelaborasi melalui analisa Boston Consulting Group (BCG) Matrix dan Product Life Cycle (PLC) didapatkan 8 calon produk unggulan daerah Kabupaten Kebumen yaitu gula semut, industri kerajinan anyaman bambu, industry emping, pembibitan sapi PO, udang vaname, garam, pembibitan kelapa genjah entog kebumen.

Selanjutnya Berdasarkan Peraturan daerah nomor 15 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2039 dan berdasarkan hasil analisis maka industri unggulan di Kabupaten Kebumen yang digunakan sebagai dasar pengembangan industri selama kurun waktu 20 tahun ke depan (2019- 2039) adalah fokus pada industri makanan; industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furniture) dan barang

anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya; industri tekstil; dan industri bahan galian bukan logam lainnya (genteng dan batu mulia). Kemudian beberapa poin penting dalam RPIK di Kabupaten Kebumen pengembangan per wilayah industri yang dijabarkan sebagai berikut:

Pengembangan perwilayahan industri di Kabupaten Kebumen dilakukan melalui pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM).

1) Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI)

Kawasan Peruntukan Industri (KPI) adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lokasi KPI di Kabupaten Kebumen ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 yang terdiri dari kawasan peruntukan untuk industri besar pada 5 Kecamatan, industri menengah pada 7 kecamatan dan industri kecil dan mikro yang tersebar di seluruh kecamatan. Dalam rangka penurunan tingkat pengangguran di Kabupaten Kebumen direncanakan dibangun Kawasan Industri di Kecamatan Petanahan. Dengan adanya kawasan industri diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong pertumbuhan sektor industri lebih terarah, terpadu dan memberikan hasil guna yang lebih optimal. Potensi Kabupaten Kebumen dalam pembangunan kawasan industri antara lain dengan semakin dekatnya jarak antara Kebumen dengan New Yogyakarta International Airport, dilalui oleh Jalur Jalan Lintas Selatan dan Jalan Tol (dalam rencana) dan dilalui oleh Double Track Kereta Api.

2) Pengembangan Sentra IKM

Sebagaimana sentra pada umumnya, maka pengembangan sentra IKM ini termasuk di dalamnya adalah tersedianya sarana dan prasarana sentra. Pemerintah Kabupaten Kebumen juga harus memberikan insentif khusus, agar IKM dapat tumbuh dan sentra ini pun juga dapat tumbuh berkembang.

Selain itu, penguatan akses pasar dan pemasaran digital menjadi faktor penting dalam mendukung hilirisasi ekonomi. Dengan memanfaatkan teknologi dan platform e-commerce, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kebumen dapat lebih mudah menjangkau pasar yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dukungan dalam bentuk pelatihan digitalisasi usaha, branding, serta sertifikasi produk juga diperlukan agar produk lokal mampu bersaing di pasar modern. Pemerintah daerah berperan aktif dalam mendukung hilirisasi dengan memberikan fasilitas pendampingan, akses pembiayaan, serta penguatan kelembagaan ekonomi seperti koperasi dan kelompok usaha bersama (KUB). Dengan adanya ekosistem yang mendukung, masyarakat dapat lebih berdaya dalam mengembangkan usaha berbasis komoditas unggulan, menciptakan lapangan kerja baru, serta meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. Melalui hilirisasi ekonomi yang terencana dan berorientasi pada nilai tambah, Kabupaten Kebumen dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal serta memperkuat daya saing produk daerah di pasar yang lebih luas.

4) Penerapan pembangunan ekonomi berkelanjutan

Kabupaten Kebumen terus berupaya menerapkan pembangunan ekonomi berkelanjutan sebagai strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan keseimbangan lingkungan dan sumber daya alam. Prinsip pembangunan ini menekankan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, efisien, serta ramah lingkungan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi saat ini dan mendatang. Salah satu langkah konkret dalam penerapan ekonomi berkelanjutan adalah penguatan sektor pertanian berbasis ekologi. Dengan mayoritas masyarakat mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencaharian, penerapan praktik pertanian organik, sistem irigasi hemat air, serta diversifikasi tanaman menjadi solusi untuk meningkatkan hasil pertanian tanpa merusak lingkungan. Selain itu, kebijakan untuk mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk kimia juga terus didorong guna menjaga keseimbangan ekosistem. Di sektor industri dan UMKM, pembangunan ekonomi berkelanjutan diwujudkan melalui pemanfaatan energi terbarukan dan pengurangan limbah produksi. Para pelaku usaha didorong untuk menggunakan bahan baku ramah lingkungan, mengelola limbah dengan sistem daur ulang, serta memanfaatkan teknologi yang lebih hemat energi. Pemerintah daerah juga memfasilitasi pelaku UMKM agar dapat mengakses pelatihan dan insentif dalam rangka mengadopsi praktik usaha yang lebih berkelanjutan. Selain itu, Kebumen juga mengembangkan pariwisata berbasis ekowisata yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga konservasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Destinasi wisata seperti pantai, pegunungan, dan situs budaya dikembangkan dengan pendekatan ramah lingkungan, di mana masyarakat setempat turut berperan dalam pengelolaannya guna menciptakan manfaat ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Dukungan regulasi dan kebijakan yang berpihak pada prinsip ekonomi hijau juga menjadi kunci keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Dengan menerapkan kebijakan tata ruang yang memperhatikan daya dukung lingkungan, pengelolaan sampah yang lebih baik, serta insentif bagi pelaku usaha ramah lingkungan, Kabupaten Kebumen dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang seimbang antara pertumbuhan dan keberlanjutan. Melalui penerapan pembangunan ekonomi berkelanjutan, diharapkan Kabupaten Kebumen dapat mencapai kemajuan ekonomi yang lebih inklusif, ramah lingkungan, dan berdaya saing dalam jangka panjang.

5) Penataan infrastruktur kewilayahan dan digital guna peningkatan aksesibilitas dan konektivitas

Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas merupakan faktor kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kebumen. Untuk itu, penataan infrastruktur yang berbasis digital dan kewilayahan menjadi langkah strategis dalam menciptakan sistem transportasi dan komunikasi yang lebih efisien, modern, serta inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Salah satu aspek utama dalam penataan infrastruktur adalah pengembangan jaringan transportasi yang terintegrasi. Pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas dan pemerataan pembangunan jalan, jembatan, serta fasilitas transportasi umum guna menghubungkan wilayah pedesaan dengan pusat ekonomi dan layanan publik. Dengan adanya konektivitas yang lebih baik, distribusi barang dan jasa menjadi

lebih lancar, serta akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan pasar kerja semakin mudah.

Selain infrastruktur kewilayahan, Kabupaten Kebumen juga mendorong penguatan infrastruktur digital sebagai bagian dari transformasi menuju era digital. Pembangunan jaringan internet yang lebih luas dan merata menjadi prioritas untuk memastikan seluruh masyarakat, termasuk di daerah terpencil, dapat mengakses layanan digital seperti *e-government*, *e-commerce*, dan pendidikan berbasis teknologi. Pengembangan *smart village* juga menjadi salah satu inisiatif untuk mempercepat digitalisasi di tingkat desa, sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi, layanan publik, serta peluang ekonomi berbasis digital. Lebih lanjut, integrasi sistem teknologi informasi dalam tata kelola kewilayahan juga terus diperkuat. Penerapan *Geographic Information System* (GIS) dalam perencanaan tata ruang, monitoring infrastruktur, serta manajemen bencana menjadi bagian dari upaya menciptakan pembangunan yang lebih efektif dan berbasis data. Dengan pemanfaatan teknologi ini, pemerintah dapat mengoptimalkan penggunaan lahan, mempercepat respons terhadap bencana, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan infrastruktur publik. Dengan penataan infrastruktur yang terencana, Kabupaten Kebumen diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas bagi masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mendorong pemerataan pembangunan yang berkelanjutan di seluruh wilayah.

6) Degradasi lingkungan hidup, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

Kabupaten Kebumen menghadapi tantangan serius terkait degradasi lingkungan hidup yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti alih fungsi lahan, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, serta pencemaran air dan udara. Kondisi ini semakin diperparah dengan dampak perubahan iklim global, yang menyebabkan cuaca ekstrem, peningkatan suhu, serta bencana alam seperti banjir, longsor, dan kekeringan yang semakin sering terjadi. Salah satu bentuk degradasi lingkungan yang signifikan adalah kerusakan hutan dan lahan kritis, yang berkontribusi terhadap menurunnya daya dukung ekosistem. Berkurangnya vegetasi alami mempercepat erosi tanah dan mengganggu keseimbangan hidrologi, sehingga meningkatkan risiko bencana alam. Selain itu, pencemaran sungai akibat limbah domestik dan industri juga menjadi ancaman bagi ketersediaan air bersih di wilayah Kebumen.

Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah daerah terus memperkuat strategi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Beberapa langkah yang telah dan terus dilakukan meliputi:

1. Mitigasi Perubahan Iklim

- o Rehabilitasi lahan kritis dan penghijauan kembali melalui program penanaman pohon dan pelestarian hutan sebagai upaya menekan emisi karbon serta mengurangi risiko bencana banjir dan longsor.
- o Peningkatan energi terbarukan dan efisiensi energi, termasuk pemanfaatan energi surya dan pengurangan penggunaan bahan bakar fosil untuk mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca.
- o Pengelolaan sampah berbasis *circular economy*, seperti pengurangan sampah plastik, daur ulang, dan optimalisasi tempat pembuangan akhir (TPA) yang lebih ramah lingkungan.

2. Adaptasi terhadap Perubahan Iklim

- o Penguatan sistem peringatan dini bencana dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana alam, terutama di wilayah rawan banjir dan longsor.
- o Pengembangan pertanian yang adaptif terhadap iklim, seperti penggunaan varietas tanaman yang tahan terhadap kekeringan dan sistem irigasi hemat air untuk mengurangi dampak perubahan pola cuaca terhadap sektor pertanian.
- o Pembangunan infrastruktur hijau, seperti tanggul pesisir untuk mengurangi abrasi dan banjir rob, serta ruang terbuka hijau untuk menjaga keseimbangan ekosistem perkotaan.

Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci dalam upaya mengatasi degradasi lingkungan serta membangun ketahanan daerah terhadap perubahan iklim. Dengan penerapan kebijakan yang berbasis pada prinsip pembangunan berkelanjutan, Kabupaten Kebumen dapat menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan demi masa depan yang lebih baik.

7) Percepatan Reformasi Birokrasi berbasis pelayanan publik

Pemerintah Kabupaten Kebumen terus berupaya mempercepat reformasi birokrasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Reformasi birokrasi tidak hanya bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan profesional, tetapi juga memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat semakin cepat, mudah, dan berorientasi pada kepuasan warga. Salah satu langkah utama dalam percepatan reformasi birokrasi adalah penguatan digitalisasi layanan publik. Melalui penerapan e-government, berbagai layanan administrasi seperti perizinan, kependudukan, kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial kini semakin mudah diakses oleh masyarakat secara daring. Digitalisasi ini tidak hanya mempercepat proses birokrasi, tetapi juga mengurangi potensi praktik korupsi dan maladministrasi.

Selain itu, Kebumen juga terus mendorong peningkatan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) agar lebih adaptif terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat. Pelatihan serta pengembangan kapasitas pegawai dilakukan secara berkelanjutan agar ASN dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, profesional, dan berbasis solusi. Sistem meritokrasi juga diterapkan guna memastikan bahwa promosi dan penempatan jabatan dilakukan secara transparan berdasarkan kompetensi dan kinerja. Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, pemerintah daerah menerapkan mekanisme pengawasan berbasis partisipasi masyarakat. Layanan pengaduan publik berbasis digital memungkinkan warga untuk menyampaikan keluhan serta masukan terkait layanan pemerintahan, sehingga respons dan perbaikan dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran.

Sebagai bagian dari reformasi birokrasi, Kebumen juga berfokus pada penyederhanaan regulasi dan perizinan untuk mendukung iklim investasi dan dunia usaha. Proses perizinan yang sebelumnya kompleks dan memakan waktu lama kini diarahkan menjadi lebih simpel melalui sistem layanan terpadu satu pintu (PTSP), yang memastikan perizinan usaha dan layanan publik dapat diakses secara lebih cepat dan transparan. Melalui percepatan implementasi

reformasi birokrasi berbasis pelayanan publik, Kabupaten Kebumen menargetkan tata kelola pemerintahan yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Dengan birokrasi yang semakin efisien, diharapkan pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

8) Memperkuat riset dan inovasi daerah untuk meningkatkan daya saing daerah

Dalam menghadapi persaingan ekonomi yang semakin ketat, Kabupaten Kebumen perlu memperkuat riset dan inovasi daerah sebagai landasan utama dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing daerah. Riset yang berbasis pada potensi lokal serta inovasi yang berorientasi pada pemecahan masalah daerah menjadi kunci dalam menciptakan kebijakan yang lebih efektif dan program pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah penguatan kerja sama antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat dalam riset dan inovasi. Melalui kemitraan ini, berbagai sektor dapat berkolaborasi untuk menggali dan mengembangkan potensi unggulan daerah, seperti pertanian berbasis teknologi, industri kreatif, serta pariwisata berbasis kearifan lokal. Misalnya, riset dalam bidang pertanian dapat membantu petani mengadopsi teknologi pertanian cerdas (*smart farming*) guna meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan daerah.

Selain itu, Kabupaten Kebumen juga terus mendorong penguatan ekosistem inovasi dan pengembangan teknologi melalui program inkubasi bisnis bagi pelaku UMKM dan startup lokal. Dengan memberikan pelatihan, akses pendanaan, serta fasilitas riset dan pengembangan (R&D), inovator lokal dapat menciptakan produk dan layanan yang memiliki nilai tambah serta mampu bersaing di pasar nasional maupun global. Pemerintah daerah juga berperan aktif dalam mendukung penggunaan data dan teknologi dalam pengambilan keputusan. Pemanfaatan *big data*, *artificial intelligence* (AI), dan *Internet of Things* (IoT) dalam berbagai sektor, seperti transportasi, tata ruang, dan pelayanan publik, dapat meningkatkan efisiensi serta memberikan solusi berbasis teknologi bagi masyarakat. Lebih lanjut, untuk memperkuat daya saing daerah, Kebumen berkomitmen dalam mendorong pendidikan dan penelitian berbasis inovasi. Melalui kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga riset, penelitian yang dilakukan dapat lebih aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Selain itu, penguatan literasi teknologi dan keterampilan digital bagi generasi muda juga menjadi prioritas agar SDM Kebumen semakin kompetitif di era ekonomi berbasis pengetahuan. Dengan memperkuat riset dan inovasi daerah, Kabupaten Kebumen dapat menciptakan solusi yang lebih efektif dalam mengatasi berbagai tantangan pembangunan, meningkatkan daya saing produk lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

9) Menurunnya karakter dan norma di masyarakat

Kabupaten Kebumen tengah menghadapi tantangan dalam menjaga karakter dan norma sosial masyarakat di tengah perubahan zaman. Modernisasi, urbanisasi, serta kemajuan teknologi telah membawa pergeseran dalam nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. Norma-norma seperti gotong

royong, tata krama, serta kepedulian sosial yang menjadi ciri khas masyarakat Kebumen mulai mengalami penurunan. Hal ini terlihat dari berkurangnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosial, menurunnya tingkat toleransi dalam kehidupan sehari-hari, serta meningkatnya sikap individualisme di berbagai aspek kehidupan.

Fenomena ini juga tercermin dalam Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Kebumen yang cenderung mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai budaya lokal serta minimnya pendidikan karakter di lingkungan keluarga dan sekolah menjadi faktor utama dalam melemahnya norma sosial. Selain itu, semakin berkurangnya interaksi sosial langsung akibat dominasi penggunaan teknologi digital juga berkontribusi terhadap perubahan pola perilaku masyarakat, terutama di kalangan generasi muda yang cenderung lebih banyak berinteraksi melalui dunia maya dibandingkan dengan lingkungan sekitarnya.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya strategis yang melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga pendidikan, maupun tokoh masyarakat. Penguatan pendidikan karakter di sekolah, revitalisasi budaya gotong royong melalui program-program berbasis komunitas, serta peningkatan kesadaran akan pentingnya menjaga norma sosial harus menjadi prioritas. Selain itu, perlu ada dukungan dalam menciptakan ruang sosial yang mendorong interaksi dan kebersamaan, seperti kegiatan keagamaan, seni budaya, serta program kepemudaan berbasis nilai-nilai tradisional. Dengan sinergi yang kuat antara berbagai elemen masyarakat, diharapkan karakter dan norma sosial masyarakat Kebumen dapat kembali diperkuat sebagai identitas yang kokoh di tengah perubahan zaman.



BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029 merupakan kerangka strategis untuk mengelola dan memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya yang melimpah. Kabupaten Kebumen dikenal memiliki sumber daya alamnya yang melimpah, termasuk potensi pertanian, perikanan dan pariwisata yang memberikan landasan kuat dalam mendukung pembangunan daerah. Dengan konteks ini, visi dan misi RPJMD diharapkan mampu menjawab kebutuhan dan tantangan pembangunan Kabupaten Kebumen dalam menyejahterakan masyarakat. Selanjutnya dalam mengupayakan pencapaian visi dan misi maka dirumuskan Tujuan dan sasaran untuk memperkuat dan mempertajam apa yang ingin dicapai dalam waktu jangka menengah. Melalui pendekatan ini, RPJMD berperan sebagai peta jalan yang dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

5.1. VISI

Visi merupakan kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan, dimana visi mengenai pembangunan daerah dalam RPJMD merupakan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Dengan mempertimbangkan hasil capaian pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kebumen, visi yang hendak dicapai dalam periode 2025–2029 adalah:

**“KEBUMEN BERDAYA:
KEBUMEN BERIMAN- MAJU – SEJAHTERA - BERBUDAYA”**

Dalam rumusan visi ini terkandung empat rumusan pokok visi yang ingin dicapai oleh pemerintah Kabupaten Kebumen di tahun 2029. Keempat rumusan pokok visi ini merupakan satu kesatuan pernyataan tentang kondisi ideal yang hendak diwujudkan dalam 5 (lima) tahun kedepan, maka penjabaran makna pokok visi RPJMD Kabupaten Kebumen dijelaskan sebagai berikut.

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran | V-1

1. **Beriman**, perwujudan Kebumen beriman dilakukan melalui pemberdayaan pesantren dan pendidikan keagamaan. Selain itu, Kebumen beriman juga dapat ditandai dengan masyarakat Kabupaten Kebumen yang hidup dalam kerukunan antar umat beragama
2. **Maju**, Terbangunnya sistem dan tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi dengan dukungan ASN yang berkualitas menuju reformasi birokrasi yang kuat melalui: penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), Keterbukaan Informasi Publik yang aksesibel, adanya ruang ekspresi kaum muda melalui *teknokreatif*, optimalisasi digitalisasi transaksi pendapatan asli daerah, mendudukkan Desa sebagai subyek yang mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, serta adanya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah dan infrastruktur dasar berdasar kondisi geografis wilayah dan terwujudnya daerah yang tangguh terhadap bencana.
3. **Sejahtera**, Masyarakat terlindungi dan terjamin kebutuhan dasarnya baik lahir maupun batin yang meliputi: pangan, sandang, papan, pendidikan, Kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya yang didukung peningkatan daya saing ekonomi sektor pertanian dalam arti luas, pariwisata, dan UMKM sesuai potensi lokal dan berbasis digital guna mempercepat peningkatan ekonomi masyarakat Kebumen sekaligus keluar dari kemiskinan dan ketertinggalan.
4. **Berbudaya**, pembangunan Kebumen Berbudaya dilakukan untuk memperkuat budaya lokal yang dimiliki guna menjaga jatidiri Kebumen Beriman. Masyarakat Kebumen sejatinya memiliki modal sosial besar dalam hal keswadayaan, gotong royong, partisipasi serta kekuatan nilai-nilai keagamaan (*religiusitas*) yang ditandai keberadaan pesantren dan pendidikan keagamaan dalam mewujudkan kehidupan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Dan Kebumen sebagai bumi tua tentu banyak peninggalan bersejarah yang harus dilestarikan dan dikembangkan sebagai kekuatan jatidiri masyarakat Kebumen.

5.2. MISI

Misi adalah langkah strategis yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan. Rumusan misi yang baik membantu menggambarkan secara jelas visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan

ditempuh untuk mencapai visi. Dengan memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, misi pembangunan sebagai berikut:

- 1) **MISI 1: Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemenuhan Hak dasar Yang Inklusif dan Berkeadilan Serta Pemberdayaan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan**, Pelaksanaan misi ini disertai dengan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, jaminan kemudahan dan kualitas Pendidikan, Kesehatan, air bersih, perumahan, pengurangan pengangguran, pembangunan berkeadilan Gender, Disabilitas, dan inklusi sosial.
- 2) **MISI 2: Memperkuat Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Sektor Pertanian dalam Arti Luas dan Pengembangan Pariwisata, UMKM Yang Inovatif dan Keberlanjutan**, Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah dengan fokus pada sektor pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM serta optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan yang berwawasan keberlanjutan lingkungan dengan didukung penuh pengembangan sistem digitalisasi.
- 3) **MISI 3: Pemerataan kualitas pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan**, Membangun infrastruktur untuk akses sanitasi aman, akses air minum aman, akses hunian layak, akses menuju pusat layanan dasar, dll), terutama pada wilayah kantong- kantong kemiskinan dan pusat pengembangan ekonomi sesuai kondisi geografis, percepatan pembangunan infrastruktur Desa dan Kawasan perdesaan, dan pembangunan daerah Tangguh Bencana melalui pelestarian lingkungan.
- 4) **MISI 4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi**, mewujudkan reformasi birokrasi yang salah satunya dengan menerapkan *merit system*, memperkuat partisipasi dan Keterbukaan Informasi Publik berbasis digital/SPBE yang aksesibel, adanya ruang ekspresi kaum muda melalui tecno-kreatif, optimalisasi digitalisasi transaksi PAD dan mendudukkan Desa sebagai subyek yang mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
- 5) **MISI 5: Mewujudkan masyarakat yang damai, guyub, dan rukun atas dasar nilai keagamaan dan budaya lokal**, seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kebumen harus mencerminkan jati diri Kebumen Beriman, dimana nilai-nilai agama (*religiusitas*) dan budaya lokal sebagai kunci utama mewujudkan Kebumen yang guyub, rukun, damai, tertib, dan aman. Maka agenda kerja yang dilakukan adalah memperkuat dan mengembangkan adat-istiadat, tradisi budaya lokal Kebumen, mengembangkan karya dan kesenian tradisional khas Kebumen, pelestarian

cagar budaya dan optimalisasi fasilitasi pengembangan pesantren dan pendidikan keagamaan.

5.3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategi yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Sasaran RPJMD dapat diterjemahkan sebagai sasaran tahunan melalui arah kebijakan yang menjadi pedoman dalam penyusunan prioritas dan sasaran tahunan (prioritas dan sasaran pembangunan RKPD). Secara skematik keterkaitan antara visi, misi dengan perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang secara totalitas menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah, dapat kami sajikan sebagai berikut:

Gambar V.1
Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah



Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan juga merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan – pilihan strategi pembangunan dan sasaran untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan sebagai berikut: (1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah

ditetapkan dengan memperhatikan visi; (2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; (4) dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan (5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; (2) untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan memenuhi kriteria *SMART-C*. Merujuk dari berbagai penjelasan diatas dan untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 maka dirumuskan tujuan dan indikator serta target sebagai berikut:

Tabel V.1
Rumusan Tujuan dan Indikator Tujuan RPJMD Tahun 2025-2030

VISI: "KEBUMEN BERDAYA: KEBUMEN BERIMAN- MAJU – SEJAHTERA - BERBUDAYA"				
MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET PEMBANGUNAN	
			2025	2030
MISI 1: Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemenuhan Hak dasar Yang Inklusif dan Berkeadilan Serta Pemberdayaan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan	Tujuan 1: Mewujudkan masyarakat yang unggul dan sejahtera	Tingkat Kemiskinan	14,305	9,94
		Indeks Pembangunan Manusia	72,88	74,90
MISI 2: Memperkuat Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Sektor Pertanian dalam Arti Luas dan Pengembangan Pariwisata, UMKM Yang Inovatif dan Keberlanjutan.	Tujuan 2: Mewujudkan kemandirian ekonomi yang tumbuh dan berdaya saing	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,40-6,30	5,00-5,50
		Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/Kota	27,775	57,66
MISI 3: Pemerataan kualitas pembangunan	Tujuan 3: Menyediakan infrastruktur pembangunan yang	Indeks Infrastruktur	67,24	76,08
		Penurunan Emisi GRK	206.765,97	5.688.603



VISI: “KEBUMEN BERDAYA: KEBUMEN BERIMAN- MAJU – SEJAHTERA - BERBUDAYA”				
MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET PEMBANGUNAN	
			2025	2030
infrastruktur yang berwawasan lingkungan	merata, berkualitas dan ramah lingkungan			
MISI 4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi	Tujuan 4: Mengimplementasikan reformasi birokrasi di seluruh bidang pembangunan	Indeks Reformasi Birokrasi	79,92	79,95
MISI 5: Mewujudkan masyarakat yang damai, guyub, dan rukun atas dasar nilai keagamaan dan budaya lokal	Tujuan 5: Meningkatkan pembangunan berbasis budaya dan kearifan lokal yang memegang teguh nilai-nilai keagamaan	Indeks Kebudayaan (Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) dan Benda yang dilestarikan)*	12,12	15,21
		Indeks Kesalehan Sosial	82,41	84,29

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai Kabupaten Kebumen dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Merujuk dari berbagai penjelasan diatas dan berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah maka sasaran serta indikator pada setiap tujuan dijabarkan sebagai berikut:

1. T1. Mewujudkan masyarakat yang unggul dan sejahtera

Dalam rangka memaksimalkan pembangunan daerah Kabupaten Kebumen, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat
- Meningkatnya kualitas pendidikan
- Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

2. T2. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang tumbuh dan berdaya saing

Dalam rangka memaksimalkan pembangunan daerah Kabupaten Kebumen, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- Meningkatnya produktivitas sektor pertanian daerah
- Meningkatnya pemberdayaan perekonomian kerakyatan berbasis hilirisasi
- Meningkatnya pengembangan potensi dan daya tarik wisata
- Meningkatnya kesempatan kerja

3. T3. Menyediakan infrastruktur pembangunan yang merata, berkualitas dan ramah lingkungan

Dalam rangka memaksimalkan pembangunan daerah Kabupaten Kebumen, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- Meningkatnya kualitas perumahan dan pemukiman masyarakat
- Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas masyarakat
- Meningkatnya kualitas pekerjaan umum
- Pemerataan pembangunan infrastruktur perdesaan
- Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup
- Meningkatnya kualitas antisipasi dan penanganan bencana daerah

4. T4. Mengimplementasikan reformasi birokrasi di seluruh bidang pembangunan

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Kebumen, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah
- Meningkatnya efektivitas dan kapabilitas pengendalian intern
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT

5. T5. Meningkatkan pembangunan berbasis budaya dan kearifan lokal yang memegang teguh nilai-nilai keagamaan

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Kebumen, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- Meningkatnya pelestarian cagar budaya dan warisan budaya
- Terwujudnya kondusifitas wilayah

Dengan rumusan tujuan, sasaran dan indikator di atas maka keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran serta targetnya yang disajikan pada tabel berikut.



Tabel V.2
Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029

VISI: “KEBUMEN BERDAYA: KEBUMEN BERIMAN- MAJU – SEJAHTERA - BERBUDAYA”										
MISI	TUJU AN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN						
				Baseli ne 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
MISI 1: Pemenuha n Kebutuhan Dasar Masyaraka t yang Adil dan Inklusif Pengentas an Kemiskina n Melalui Pemenuha n Hak dasar Yang Inklusif dan Berkeadila	Tujuan 1. Mewujudkan masyarakat yang unggul dan sejahtera		Indeks Pembangunan Manusia	72,48	72,88	73,29	73,69	74,10	74,50	74,90
			Tingkat Kemiskinan	15.71	14.305	13.43	12.56	11.69	10.82	9.94
		Sasaran 1.1 Meningkat nya pemerataa n kesejahter aan masyaraka t	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	NA	20,38- 21,48	20,38- 21,48	20,38- 21,48	20,38- 21,48	20,98- 21,48	20,98- 21,48
		Sasaran 1.2 Meningkat nya	Indeks Pendidikan	63,43	64,80	65,45	66,11	66,76	67.41	68.06



VISI: “KEBUMEN BERDAYA: KEBUMEN BERIMAN- MAJU – SEJAHTERA - BERBUDAYA”										
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN						
				Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
n Serta Pemberdayaan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan		kualitas pendidikan								
		Sasaran 1.3 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	84,95	85,41	85,7	86,33	86,79	87.25	87.70
MISI 2: Memperkuat Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Sektor Pertanian dalam Arti Luas dan Pengembangan Pariwisata,	Tujuan 2. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang tumbuh dan berdaya saing		Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,30	5,40-6,30	5,00-5,50	5,00-5,50	5,00-5,50	5,00-5,50	5,00-5,50
			Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/Kota (Juta Rupiah)	27,29	27775	33,75	39,73	45,70	51.68	57.66
		Sasaran 2.1 Meningkatnya produktivitas sektor pertanian daerah	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,59	2,72	2,86	3,00	3,15	3,31	3.47



VISI: “KEBUMEN BERDAYA: KEBUMEN BERIMAN- MAJU – SEJAHTERA - BERBUDAYA”										
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN						
				Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Umkm Yang Inovatif dan Keberlanjutan.		Sasaran 2.2 Meningkatnya pemberdayaan perekonomian kerakyatan berbasis hilirisasi	LPE Kategori Industri Pengolahan	6,00	6,30	6,62	6,95	7,29	7.66	8.04
		Sasaran 2.3. Meningkatnya pengembangan potensi dan daya tarik wisata	LPE Kategori Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum*	10,35	10,87	11,41	11,98	12,58	13.21	13.87
		Sasaran 2.4	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,07	4,765	4,63	4,50	4,36	4.23	4.10



VISI: “KEBUMEN BERDAYA: KEBUMEN BERIMAN- MAJU – SEJAHTERA - BERBUDAYA”										
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN						
				Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Meningkatnya kesempatan kerja								
MISI 3: Pemerataan kualitas pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan	Tujuan 3. Menyediakan infrastruktur pembangunan yang merata, berkualitas dan ramah lingkungan		Indeks Infrastruktur	64,00	67,24	68,92	70,64	72,41	74,22	76,08
			Penurunan Emisi GRK	151.888,21 TonCO2Eq	206.765,97	1.303.133,41	2.399.500,84	3.495.868,28	4.592.235,71	5.688.603,15
		Sasaran 3.1 Meningkatnya kualitas perumahan dan pemukiman masyarakat	Indeks infrastruktur perumahan dan permukiman	71,16	71,87	72,59	73,32	74,05	74,79	75,54
		Sasaran 3.2	Indeks infrastruktur perhubungan	75,78	76,54	77,30	78,08	78,86	79,65	80,44



VISI: “KEBUMEN BERDAYA: KEBUMEN BERIMAN- MAJU – SEJAHTERA - BERBUDAYA”										
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN						
				Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas masyarakat								
		Sasaran 3.3. Meningkatkan Kualitas Pekerjaan Umum	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	59,00	59,59	60,19	60,79	61,40	62,01	62,63
		Sasaran 3.4 Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Persentase Desa Mandiri	33,85	2,45	2,95	3,45	3,95	4,45	4,95



VISI: “KEBUMEN BERDAYA: KEBUMEN BERIMAN- MAJU – SEJAHTERA - BERBUDAYA”										
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN						
				Baseli ne 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
MISI 4: Mewujudkan tata kelola		Sasaran 3.5 Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,86	74,71	74,76	74,80	74,85	74,89	74,94
		Sasaran 3.6 Meningkatnya kualitas antisipasi dan penanganan bencana daerah	Indeks Resiko Bencana	121,38	96,5	94,19	91,88	89,56	87,25	84,94
	Tujuan 4. Mengimplementasikan reformasi birokrasi di		Indeks Reformasi Birokrasi	79,91	79,92	79,93	79,93	79,94	79,94	79,95



VISI: “KEBUMEN BERDAYA: KEBUMEN BERIMAN- MAJU – SEJAHTERA - BERBUDAYA”										
MISI	TUJU AN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN						
				Baseli ne 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
pemerinta han yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi	seluruh bidang pembangunan									
		Sasaran 4.1 Meningkat nya akuntabilit as kinerja Pemerinta h Daerah	Nilai SAKIP	68,78	70,03	71,27	72,51	73,76	75,00	68,78
		Sasaran 4.2 Meningkat nya efektivitas dan kapabilitas pengendali an intern	Nilai Maturitas SPIP	3,30	3,42	3,53	3,65	3,77	3,88	4,00
		Sasaran 4.3 Meningkat nya	Indeks Pelayanan Publik	4,59	4,61	4,63	4,66	4,68	4,70	4,72



VISI: “KEBUMEN BERDAYA: KEBUMEN BERIMAN- MAJU – SEJAHTERA - BERBUDAYA”										
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN						
				Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
MISI 5: Mewujudkan masyarakat yang damai, guyub, dan rukun atas dasar nilai keagamaan dan budaya lokal		kualitas pelayanan publik berbasis IT								
	Tujuan 5. Meningkatkan pembangunan berbasis budaya dan kearifan lokal yang memegang teguh nilai-nilai keagamaan	Sasaran 5.1 Meningkatnya pelestarian cagar budaya dan warisan budaya	Indeks Kebudayaan (Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) dan Benda yang dilestarikan)*	11.50	11,22	12,06	12,91	13,75	14,59	15,21
			Indeks Kesalehan Sosial	82.38	82,41	82,79	83,16	83,54	83,91	84,29
			Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	14,29	15,06	15,83	16,59	17,36	18,13	14,29
			Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Benda (WBTB) yang dilestarikan	11,50	12,12	12,74	13,35	13,97	14,59	11,50



VISI: “KEBUMEN BERDAYA: KEBUMEN BERIMAN- MAJU – SEJAHTERA - BERBUDAYA”										
MISI	TUJU AN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN						
				Baseli ne 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Sasaran 5.2 Terwujudn ya kondusifita s wilayah	Penurunan Konflik SARA	NA	5	5	4	4	3	3

Memahami bahwa Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki indikator tujuan dan sasaran jangka menengah yang harus didukung oleh pencapaian kinerja perangkat daerah. Maka hal ini menjadi elemen krusial dalam mencapai target pembangunan yang terintegrasi dan efektif. RPJMD sebagai dokumen perencanaan lima tahunan memuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta indikator kinerja yang menjadi pedoman utama bagi seluruh sektor pembangunan di tingkat daerah. Indikator tujuan dan sasaran dalam RPJMD diturunkan secara spesifik ke dalam rencana pembangunan perangkat daerah agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dalam mendukung pencapaian target pembangunan. Hal ini menciptakan kesinambungan antara kebijakan strategis daerah dan implementasinya di tingkat teknis melalui program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terukur. Keterpaduan ini memastikan bahwa setiap sasaran perangkat daerah mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan. Indikator kinerja di tingkat perangkat daerah harus selaras dengan indikator RPJMD agar perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan berjalan terarah dan terukur.



Tabel V.3
Hubungan Tujuan dan Sasaran Daerah dengan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen

Tujuan/Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/Sasaran RPJMD	Tujuan/Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/Sasaran Renstra	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang
Mewujudkan masyarakat yang unggul dan sejahtera	Tingkat Kemiskinan			
	Indeks Pembangunan Manusia			
Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	Gini Ratio	Meningkatkan ketahanan pangan di seluruh daerah	Indeks Ketahanan Pangan*	
		Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan*	Pangan
		Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merata	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia*	



Tujuan/Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/Sasaran RPJMD	Tujuan/Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/Sasaran Renstra	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang
		Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang tertangani	Sosial
		Meningkatnya kesetaraan gender dalam aktivitas pembangunan	Indeks Ketimpangan Gender*	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Meningkatkan kualitas keluarga dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)*	



Tujuan/Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/Sasaran RPJMD	Tujuan/Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/Sasaran Renstra	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang
		Meningkatnya kualitas kesejahteraan keluarga	Pertumbuhan keluarga sejahtera	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	Meningkatkan mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan bagi masyarakat	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun*	Pendidikan
			Harapan Lama Sekolah*	
		Meningkatnya literasi membaca dan numerasi peserta didik	Literasi Membaca SD*	
			Literasi Membaca SMP*	
			Numerasi SD*	
			Numerasi SMP*	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan masyarakat	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi*	
		Meningkatnya layanan pendidikan anak usia dini	Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun*	



Tujuan/Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/Sasaran RPJMD	Tujuan/Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/Sasaran Renstra	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang
		Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Proporsi pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi S1/D4	Kepemudaan dan olahraga
		Meningkatnya prestasi olahraga daerah	Presentase Prestasi Olahraga	
		Meningkatnya keaktifan organisasi kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	
		Meningkatkan kualitas literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Perpustakaan
		Meningkatnya pemanfaatan perpustakaan dalam pembangunan	Tingkat pemanfaatan Perpustakaan*	
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata dan berkesinambungan	Usia Harapan Hidup*	Kesehatan
		Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi kelompok rentan,	Jumlah Kasus Kematian Ibu*	
			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita*	



Tujuan/Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/Sasaran RPJMD	Tujuan/Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/Sasaran Renstra	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang
		khususnya ibu dan anak		
		Meningkatnya penanganan penyakit menular	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>)*	
			Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>)*	
		Meningkatnya cakupan jaminan kesehatan nasional	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional*	
Mewujudkan kemandirian ekonomi yang tumbuh dan berdaya saing	Laju Pertumbuhan Ekonomi			
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/Kota			
Meningkatnya produktivitas sektor pertanian daerah	LPE Kategori Pertanian,	Meningkatkan daya saing ekonomi sektor pertanian	Nilai produksi pertanian	Pertanian



Tujuan/Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/Sasaran RPJMD	Tujuan/Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/Sasaran Renstra	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang
	Kehutanan dan Perikanan	Meningkatnya produktivitas komoditas tanaman pangan	Produktivitas tanaman pangan (ton per ha)	Kelautan dan Perikanan
		Meningkatkan daya saing ekonomi sektor perikanan	Nilai produksi perikanan	
		Meningkatnya produksi komoditas perikanan dan kelautan	nilai produksi perikanan tangkap	
			nilai produksi perikanan budidaya	
Meningkatnya pemberdayaan perekonomian	LPE Kategori Industri Pengolahan	Meningkatnya kontribusi kategori industri pengolahan	Rasio PDRB Industri Pengolahan*	



Tujuan/Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/Sasaran RPJMD	Tujuan/Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/Sasaran Renstra	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang
kerakyatan berbasis hilirisasi		dalam struktur ekonomi daerah		
		Meningkatnya kewirausahaan daerah	Rasio Kewirausahaan Daerah*	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Meningkatnya kapasitas industri daerah	Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	Perindustrian
		Meningkatnya koperasi aktif dan sehat	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB*	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan wilayah	LPE Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	



Tujuan/Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/Sasaran RPJMD	Tujuan/Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/Sasaran Renstra	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang
		Meningkatnya kontribusi perdagangan terhadap perekonomian wilayah	Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Perdagangan
Meningkatnya pengembangan potensi dan daya tarik wisata	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum*	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata	Pendapatan Asli Daerah sektor Pariwisata	
		Meningkatnya kualitas obyek wisata	Rata-rata Lama Tinggal	Pariwisata
		Meningkatnya kunjungan pariwisata	Persentase kenaikan kunjungan wisatawan	
Meningkatnya kualitas kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang berkualitas	Tingkat Partisipasi angkatan kerja	



Tujuan/Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/Sasaran RPJMD	Tujuan/Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/Sasaran Renstra	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang
		Meningkatnya kompetensi dan kapasitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang dilatih dan mendapatkan sertifikat kompetensi	Tenaga Kerja
		Meningkatnya pemberdayaan angkatan kerja perempuan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan*	
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program transmigrasi	Persentase pertumbuhan transmigran dari Kebumen	Transmigrasi
Menyediakan infrastruktur pembangunan yang merata, berkualitas dan ramah lingkungan	Indeks Infrastruktur			
	Penurunan emisi GRK			
Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman masyarakat	Indeks infrastruktur perumahan dan permukiman	Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman dengan Prasarana Sarana Utilitas yang memadai	Persentase Luas Kawasan Kumuh	



Tujuan/Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/Sasaran RPJMD	Tujuan/Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/Sasaran Renstra	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang
		Meningkatnya kualitas kesehatan sanitasi daerah	Rumah Tangga dengan Akses Hunian layak*	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas masyarakat	Indeks infrastruktur perhubungan	Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman dengan Prasarana Sarana Utilitas yang memadai	Rasio konektivitas	
		Meningkatnya kualitas kelengkapan jalan terpasang	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	Perhubungan
Pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh Kebumen	Persentase Desa Mandiri	Meningkatkan kemajuan desa yang berkualitas	Persentase kenaikan status desa	
		Meningkatnya status desa maju menjadi desa mandiri	Persentase peningkatan desa maju menjadi desa mandiri	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Tujuan/Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/Sasaran RPJMD	Tujuan/Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/Sasaran Renstra	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang
		Meningkatnya status desa berkembang menjadi desa maju	Persentase peningkatan desa berkembang menjadi desa maju	
Meningkatnya kualitas pekerjaan umum	Indeks infrastruktur pekerjaan umum	Meningkatkan kualitas infrastruktur pembangunan daerah	Persentase infrastruktur wilayah yang terbangun	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya kualitas konektivitas antar wilayah	Persentase jalan dalam kondisi mantap	
			Persentas jembatan dalam kondisi baik	
		Meningkatnya akses air minum yang terstandar	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	
		Meningkatnya kualitas sistem irigasi daerah	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	



Tujuan/Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/Sasaran RPJMD	Tujuan/Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/Sasaran Renstra	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang
		Meningkatnya kesesuaian perencanaan wilayah dengan kesesuaian RTRW	Persentase Kesesuaian pembangunan dengan RTRW	
		Meningkatnya tata kelola pertanahan dalam pelaksanaan pembangunan daerah	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Pertanahan
Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Persentase kenaikan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup*	
		Meningkatnya tata kelola persampahan masyarakat	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah*	Lingkungan Hidup
		Meningkatnya perbaikan kualitas air	Indeks Kualitas Air	



Tujuan/Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/Sasaran RPJMD	Tujuan/Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/Sasaran Renstra	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang
		Meningkatnya perbaikan kualitas udara	Indeks Kualitas Udara	
		Meningkatnya perbaikan kualitas tutupan lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	
		Meningkatkan peranan EBT dalam pembangunan berkelanjutan	Tingkat pemanfaatan EBT dalam pembangunan	Energi dan Sumber Daya Mineral
		Meningkatnya pengelolaan EBT	Persentase pengelolaan EBT	
Meningkatnya kualitas antisipasi dan penanganan bencana daerah	Indeks Risiko Bencana	Meningkatkan cakupan layanan bencana daerah	Indeks Ketahanan Daerah	
		Meningkatnya penanganan bencana	Persentase penanganan bencana	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Mengimplementasikan reformasi birokrasi di seluruh bidang pembangunan	Indeks Reformasi Birokrasi			
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan	Nilai SAKIP Daerah	Sekretariat Daerah



Tujuan/Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/Sasaran RPJMD	Tujuan/Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/Sasaran Renstra	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang
		efisien dalam pencapaian kinerja		
		Meningkatnya kualitas kebijakan pembangunan	Indeks kualitas kebijakan pembangunan	
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Nilai EKPPD	
			Indeks Reformasi Hukum*	
			Indeks Kualitas Fasilitas Lembaga Keagamaan	
		Meningkatkan tata kelola arsip daerah	Persentase PD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	
		Meningkatnya SDM pengelola arsip yang kompeten dan profesional	Persentase Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan yang mendapatkan pelatihan/pendampingan kearsipan	Kearsipan

Tujuan/Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/Sasaran RPJMD	Tujuan/Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/Sasaran Renstra	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang
		Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan	Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan	
		Meningkatnya konsistensi dan kesinambungan pembangunan	Persentase konsistensi program dan kegiatan RPJMD dengan RKPD	Perencanaan
		Meningkatnya kapabilitas inovasi daerah	Kapabilitas Inovasi*	
		Meningkatnya penyelenggaraan riset dan inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	Penelitian dan Pengembangan
		Meningkatkan kemandirian pembangunan daerah	Derajat Otonomi Fiskal Daerah	
		Meningkatnya pendapatan asli daerah	Tingkat Pertumbuhan PAD	Keuangan
			Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB*	
		Meningkatkan pengawasan tata kelola keuangan daerah	Opini BPK	



Tujuan/Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/Sasaran RPJMD	Tujuan/Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/Sasaran Renstra	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang
		Meningkatnya pengelolaan keuangan yang efisien dan akuntabel	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan
		Meningkatkan tata kelola Satu Data Kebumen	Indeks Pembangunan Statistik	
		Meningkatnya keamanan data dan informasi pembangunan	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persandian
		Meningkatnya pemanfaatan data statistik dalam pembangunan	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Statistik
Meningkatnya efektivitas dan kapabilitas pengendalian intern	Nilai Maturitas SPIP	Meningkatkan integritas daerah	Indeks Integritas Nasional*	
		Meningkatnya pengawasan internal pemerintah daerah	Level Kapabilitas APIP	Pengawasan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik*	



Tujuan/Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/Sasaran RPJMD	Tujuan/Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/Sasaran Renstra	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik OPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sekretariat Daerah
		Meningkatkan kualitas layanan terhadap anggota DPRD	Indeks Kepuasan Anggota DPRD	
		Meningkatnya output DPRD yang berkualitas	Persentase agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	Fungsi Penunjang Lainnya
		Meningkatnya nilai tambah baru yang diinvestasikan dalam pembangunan ekonomi wilayah	Pembentukan Modal Tetap Bruto (persen PDRB)*	
		Meningkatkan penanaman modal di Kebumen	Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah	Penanaman Modal



Tujuan/Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/Sasaran RPJMD	Tujuan/Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/Sasaran Renstra	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang
		Meningkatkan layanan kepengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Nilai Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	
		Meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang sesuai peraturan berlaku	Persentase masyarakat yang memiliki dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Meningkatkan penyelenggaran negara yang profesional dan bertanggungjawab	Indeks Profesionalitas ASN	
		Meningkatnya manajemen ASN sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja pegawai secara adil dan objektif	Indeks Sistem Merit	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan



Tujuan/Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/Sasaran RPJMD	Tujuan/Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/Sasaran Renstra	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang
		Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan tingkat kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan	
		Meningkatnya penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu	Persentase penyelesaian pelayanan publik yang tepat waktu	Fungsi Penunjang Lainnya
		Meningkatkan digitalisasi pelaksanaan pembangunan yang merata dan bertanggungjawab	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*	
		Meningkatnya penyediaan akses internet kepada masyarakat	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet*	Komunikasi dan Informatika
		Meningkatnya keterbukaan data dan	Indeks Keterbukaan Informasi Publik*	

Tujuan/Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/Sasaran RPJMD	Tujuan/Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/Sasaran Renstra	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang
		informasi publik kepada masyarakat		
Meningkatkan pembangunan berbasis budaya dan kearifan lokal yang memegang teguh nilai-nilai keagamaan	Indeks Kebudayaan (Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) dan Bendayang dilestarikan)*			
	Indeks Kesalehan Sosial			
Meningkatnya pelestarian cagar budaya dan warisan budaya	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	Meningkatkan kualitas Warisan Budaya daerah	Jumlah pengunjung tempat bersejarah*	
	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Benda (WBTB) yang dilestarikan	Meningkatnya upaya pelestarian seni, budaya dan adat istiadat	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir*	Kebudayaan

Tujuan/Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/Sasaran RPJMD	Tujuan/Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/Sasaran Renstra	Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang
			Cakupan Pelestarian Adat Istiadat dan Ritus*	
Terwujudnya kondusivitas wilayah	Penurunan Konflik SARA	Meningkatkan kondusivitas wilayah	Persentase penurunan pelanggaran Trantibum	
		Meningkatnya ketertiban, keamanan dan keindahan wilayah	Tingkat penyelesaian pelanggaran Perda	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
		Meningkatkan rasa aman dari bahaya kebakaran	Persentase Kesiapsiagaan Damkar	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
		Meningkatnya kualitas penanganan kebakaran	Tingkat waktu tanggap kebakaran (<i>respond time rate</i>)	
		Meningkatkan stabilitas keamanan daerah	Persentase penanganan konflik SARA	
		Meningkatnya pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat	Jumlah Kejadian konflik SARA *	Kesatuan Bangsa dan Politik

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen strategis yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan selama lima tahun ke depan. Penyusunan strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan dalam RPJMD menjadi hal yang penting untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan terarah, terukur, dan berkelanjutan. Strategi yang matang memungkinkan identifikasi prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah, sementara arah kebijakan menjadi panduan normatif yang memastikan seluruh program pembangunan selaras dengan visi dan misi kepala daerah. Dengan demikian, RPJMD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai sinergi antar-sektor, efisiensi alokasi sumber daya, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Perencanaan strategis yang dilakukan bertujuan untuk mengoperasionalkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja selama lima tahun yang akan datang. Pengimplementasian tujuan dan sasaran pemerintah daerah yang sudah ditetapkan dijabarkan menjadi arah kebijakan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana dalam melaksanakan transformasi reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan pelayanan kepada masyarakat.

6.1 Strategi Pembangunan Daerah

Strategi memegang peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sebagai kerangka perencanaan yang sistematis, strategi memberikan panduan bagi pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya secara efektif dan efisien untuk menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang pembangunan. Strategi yang dirancang dengan jelas dapat menjadi upaya dalam mencapai visi dan misi pembangunan daerah yang terfokus dan memberikan dampak yang signifikan. Oleh karena itu, strategi dirancang untuk menjembatani antara misi yang bersifat jangka panjang dengan kebijakan dan program konkret yang dapat diimplementasikan, sehingga setiap langkah pembangunan berjalan terarah dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Pada pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029, Kabupaten Kebumen memiliki tujuan untuk penguatan landasan pembangunan. Upaya ini difokuskan pada penguatan fondasi dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul, peningkatan kualitas layanan publik yang transparan dan akuntabel, serta pengembangan daerah yang kompetitif dan inovatif. Selain itu, optimalisasi perekonomian berbasis potensi lokal dengan produktivitas tinggi menjadi prioritas guna mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Peningkatan kesejahteraan sosial dan pengelolaan lingkungan yang

berkelanjutan juga menjadi bagian dari strategi pembangunan yang holistik. Strategi pembangunan Kabupaten Kebumen dijabarkan sebagai berikut.

Tabel VI.1
Strategi Pembangunan Kabupaten Kebumen
Tahun 2025-2029

MISI	STRATEGI PEMBANGUNAN
Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemenuhan Hak Dasar yang Inklusif dan Berkeadilan Serta Pemberdayaan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan	Peningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan yang merata dan berkeadilan
	Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat
	Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam Pembangunan
	Percepatan pengentasan kemiskinan berbasis data yang valid dan relevan
Memperkuat Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Sektor Pertanian Dalam Arti Luas dan Pengembangan Pariwisata, UMKM yang Inovatif dan Berkelanjutan	Penguatan ekonomi kerakyatan yang kreatif, produktif dan inovatif serta peningkatan sumber pertumbuhan ekonomi baru
Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan	Keterpaduan perencanaan dan sinkronisasi pengembangan infrastruktur berbasis kewilayahan
	Penguatan aksi pembangunan rendah karbon dan ketahanan bencana daerah
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Ngopeni, Ngayomi, dan Ngayemi	Penguatan pelaksanaan tahapan Reformasi Birokrasi di setiap urusan pemerintahan
Mewujudkan Masyarakat yang Damai, Guyub, Rukun Atas Dasar Nilai Keagamaan dan Budaya Lokal Yang Kuat	Penguatan masyarakat yang berkarakter berbasis norma agama dan identitas budaya lokal

a. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan yang merata dan berkeadilan

Strategi pemerataan layanan kesehatan di Kabupaten Kebumen difokuskan pada pemenuhan pelayanan dasar yang berkualitas dan berkelanjutan guna membentuk sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan tangguh. Upaya ini mencakup penyediaan infrastruktur kesehatan yang merata, peningkatan jumlah dan kompetensi tenaga medis, serta optimalisasi layanan kesehatan primer dan rujukan. Pemerintah juga memperkuat sistem kesehatan melalui regulasi yang mendukung akses layanan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan. Selain itu, pendekatan *health in all policies* diterapkan untuk memastikan bahwa kebijakan di berbagai sektor turut mendukung peningkatan kesehatan masyarakat.

b. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat

Strategi pemerataan layanan pendidikan di Kabupaten Kebumen berfokus pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang terjangkau guna menciptakan sumber daya manusia yang produktif, adaptif, dan berdaya saing. Pemerintah daerah mendorong percepatan wajib belajar 13 tahun melalui perluasan bantuan pendidikan, penyediaan sarana prasarana yang

sesuai standar dan aman bencana, serta pemerataan distribusi guru di daerah terpencil dengan pemberian insentif. Selain itu, inovasi dalam pendidikan juga diperkuat dengan pengembangan sekolah virtual dan kelas jauh berbasis digital, serta penguatan sekolah boarding dan semi-boarding. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, kurikulum pendidikan menengah disesuaikan dengan kebutuhan masa depan, menekankan pada pengembangan *soft skills*, literasi digital, STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Maths), serta potensi lokal daerah. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik juga menjadi prioritas guna menjamin mutu pendidikan yang lebih baik.

c. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam Pembangunan

Strategi penguatan masyarakat inklusif di Kabupaten Kebumen diarahkan pada peningkatan akses dan kualitas pengarusutamaan gender serta inklusi sosial dalam pembangunan, dengan memastikan prinsip pemerataan (*no one left behind*). Pemerintah daerah mendorong kesetaraan gender melalui kebijakan yang mendukung peningkatan peran perempuan dalam ekonomi, pendidikan, dan kepemimpinan, serta penguatan kualitas keluarga sebagai fondasi utama dalam membentuk sumber daya manusia yang berdaya saing. Program pembangunan keluarga berkualitas dilakukan dengan memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok rentan, meningkatkan akses layanan kesehatan dan pendidikan yang responsif gender, serta mendorong partisipasi aktif perempuan dan kelompok marginal dalam pengambilan keputusan publik. Selain itu, integrasi pengarusutamaan gender dalam kebijakan daerah dilakukan melalui regulasi yang memastikan kesempatan setara bagi seluruh masyarakat dalam memperoleh akses terhadap sumber daya dan layanan publik.

d. Percepatan pengentasan kemiskinan berbasis data yang valid dan relevan

Strategi percepatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kebumen berfokus pada penggunaan data yang valid dan relevan untuk memastikan kebijakan yang tepat sasaran. Pemerintah daerah mengintegrasikan berbagai program perlindungan sosial guna meningkatkan daya beli masyarakat, mengurangi beban pengeluaran, serta memperbaiki distribusi pendapatan secara adil. Upaya ini didukung dengan kebijakan pemerataan akses terhadap kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan, agar masyarakat dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraannya. Selain itu, peningkatan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi bagi kelompok rentan, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas, dilakukan untuk menciptakan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah juga memperkuat sistem perlindungan sosial yang mencakup bantuan sosial berbasis kebutuhan, pemberdayaan UMKM, serta program padat karya untuk menciptakan lapangan kerja.

e. Penguatan ekonomi kerakyatan yang kreatif, produktif dan inovatif serta peningkatan sumber pertumbuhan ekonomi baru

Strategi penguatan perekonomian berbasis potensi lokal di Kabupaten Kebumen difokuskan pada peningkatan produktivitas sektor unggulan yang mampu menyerap tenaga kerja tinggi serta menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Pemerintah daerah mendorong hilirisasi industri berbasis potensi lokal dengan menambahkan nilai tambah pada produk unggulan agar lebih kompetitif di pasar domestik maupun global. Peningkatan kewirausahaan dan kompetensi tenaga kerja menjadi prioritas melalui pelatihan berbasis teknologi serta dukungan terhadap UMKM dan koperasi agar lebih inovatif dan berdaya saing. Selain itu, pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi diperkuat dengan peningkatan infrastruktur serta transformasi digital untuk memperlancar akses pasar. Pemerintah juga menerapkan kebijakan ekonomi hijau guna menciptakan pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan stabilitas ekonomi makro daerah.

f. Keterpaduan perencanaan dan sinkronisasi pengembangan infrastruktur berbasis kewilayahan

Strategi sinkronisasi pembangunan di Kabupaten Kebumen diarahkan pada keterpaduan perencanaan dan pengembangan infrastruktur berbasis kewilayahan guna menciptakan daerah yang kompetitif dan inovatif. Integrasi antara sektor perkotaan dan perdesaan diperkuat melalui peningkatan kemandirian desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sejalan dengan upaya memperkuat peran perkotaan sebagai penggerak utama perekonomian daerah. Pemerintah daerah mendorong penguatan jaringan riset dan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta efisiensi tata kelola pemerintahan guna mendukung daya saing daerah. Sinkronisasi pembangunan juga difokuskan pada integrasi ekonomi daerah dengan sistem perekonomian regional, nasional, dan global agar lebih kompetitif dan merata. Selain itu, peningkatan infrastruktur yang mendukung konektivitas antarwilayah dan transformasi digital menjadi prioritas untuk mempercepat pemerataan pembangunan serta menciptakan kota dan desa yang maju, inovatif, dan berkelanjutan.

g. Penguatan aksi pembangunan rendah karbon dan ketahanan bencana daerah

Strategi pembangunan berketahanan bencana di Kabupaten Kebumen difokuskan pada penguatan aksi pembangunan rendah karbon serta peningkatan mitigasi dan adaptasi terhadap bencana guna mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan. Pemerintah daerah mengedepankan perbaikan kualitas lingkungan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, peningkatan kapasitas sumber daya air dan energi terbarukan, serta pemenuhan akses air minum dan sanitasi yang aman. Selain itu, kebijakan tata ruang diarahkan untuk memperhitungkan aspek ketahanan bencana dengan mengoptimalkan konservasi lingkungan serta menerapkan prinsip pembangunan rendah emisi. Dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana,

Kebumen mengintegrasikan sistem peringatan dini, edukasi kebencanaan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam manajemen risiko bencana.

h. Penguatan pelaksanaan tahapan Reformasi Birokrasi di setiap urusan pemerintahan

Strategi penguatan pelaksanaan tahapan Reformasi Birokrasi di setiap urusan pemerintahan di Kabupaten Kebumen bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Langkah utama yang diambil meliputi penyederhanaan birokrasi guna mempercepat pelayanan publik, digitalisasi administrasi untuk meningkatkan efisiensi, serta penguatan sistem pengawasan dan evaluasi kinerja aparatur. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi menjadi prioritas agar birokrasi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Reformasi ini juga menitikberatkan pada penerapan prinsip *good and clean governance* dengan memperkuat integritas serta mempercepat penyesuaian regulasi agar lebih adaptif terhadap perkembangan daerah.

i. Penguatan masyarakat yang berkarakter berbasis norma agama dan identitas budaya lokal

Strategi penguatan masyarakat yang berkarakter berbasis norma agama dan identitas budaya lokal di Kabupaten Kebumen bertujuan untuk membangun masyarakat yang berakhlak, berdaya saing, dan memiliki jati diri yang kuat. Upaya ini dilakukan melalui penguatan pendidikan karakter di sekolah dan lingkungan keluarga, integrasi nilai-nilai agama dalam kehidupan sosial, serta pelestarian budaya lokal sebagai identitas daerah. Selain itu, pengembangan kegiatan keagamaan dan seni budaya diperkuat melalui program pemberdayaan komunitas, dukungan terhadap lembaga keagamaan, serta fasilitasi ruang ekspresi budaya. Pemerintah daerah juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga harmoni sosial dan mencegah pengaruh negatif globalisasi yang dapat mengikis nilai-nilai luhur.

6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Arah kebijakan dirumuskan dalam rangka mencapai strategi pembangunan, juga sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang berkelanjutan. Kebijakan ini disusun berdasarkan misi dan mempertimbangkan potensi, tantangan, dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kebumen. Fokus utama arah kebijakan meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah, pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Dalam mewujudkan pembangunan jangka menengah, terdapat tema pembangunan per tahun yang saling berkaitan. Tema pembangunan per tahun Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut.

Gambar VI.1

Tema Pembangunan Per Tahun Kabupaten Kebumen

Tahun 2025-2029



Dalam mewujudkan strategi pembangunan jangka menengah di Kabupaten Kebumen, dirumuskan arah kebijakan sebagai berikut.

Tabel VI.2

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kebumen

Tahun 2025-2029

STRATEGI PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN
Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan yang merata dan berkeadilan	Peningkatan kualitas layanan kesehatan secara inklusif, termasuk layanan kesehatan perempuan dan bayi guna percepatan penanggulangan stunting, gizi kurang, dan gizi buruk berbasis penguatan ketahanan pangan daerah, penurunan angka kematian ibu dan bayi, serta penanggulangan TBC
	Peningkatan kualitas dan kemudahan akses layanan kesehatan dan perluasan keterjangkauan fasilitas kesehatan di seluruh wilayah berbasis sarana prasarana yang memadai dan tenaga kesehatan yang profesional
Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat	Peningkatan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan termasuk fasilitasi pembiayaan pendidikan jenjang perguruan tinggi
	Fasilitasi pengembangan pesantren dan pendidikan keagamaan guna mencetak anak yang soleh/berbudi luhur
	Pembangunan sarana prasarana olahraga yang berstandar nasional dan pembinaan atlet daerah



STRATEGI PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN
Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam Pembangunan	Penguatan perlindungan, pemberdayaan dan peningkatan kemandirian perempuan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan
Percepatan pengentasan kemiskinan berbasis data yang valid dan relevan	Penuntasan kemiskinan dan perlindungan sosial dengan basis data tunggal yang integratif
	Peningkatan kualitas tenaga kerja dan penciptaan iklim ketenagakerjaan yang kondusif
	Peningkatan perlindungan dan pemberdayaan terhadap kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas, lansia, anak, warga miskin, dan korban kekerasan
Penguatan ekonomi kerakyatan yang produktif, kreatif, dan inovatif serta peningkatan sumber pertumbuhan ekonomi baru	Peningkatan fasilitasi sektor pertanian dalam arti luas melalui pemberdayaan sumber daya manusia, pemenuhan sarana prasarana, dan meringankan pembiayaan
	Penguatan sinergisitas pengembangan sektor pariwisata, industri, perdagangan dan UMKM guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat
	Peningkatan iklim investasi pada wilayah pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal
	Peningkatan peran aktif pemuda dalam pengembangan ekonomi kreatif yang inovatif dan berbasis digital
Keterpaduan perencanaan dan sinkronisasi pengembangan infrastruktur berbasis kewilayahan	Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah yang difokuskan pada kantong-kantong kemiskinan dan wilayah strategis pengembangan ekonomi
	Pengurangan kawasan kumuh
	Penguatan kapasitas Desa dalam rangka mempercepat kemandirian desa berbasis ekonomi, pemberdayaan masyarakat , dan tata kelola desa
Penguatan aksi pembangunan rendah karbon dan ketahanan bencana daerah	Pelestarian lingkungan hidup melalui peningkatan peran serta masyarakat
	Peningkatan kapasitas desa tangguh bencana dan pembangunan yang adaptif bencana
Penguatan karakter masyarakat berbasis norma agama dan identitas budaya lokal	Fasilitasi pelestarian dan pengembangan seni dan budaya berbasis nilai-nilai lokal
	Peningkatan ketertiban, keamanan, dan kerukunan masyarakat berbasis kondusifitas wilayah
	Penguatan karakter generasi muda dengan nilai keagamaan dan budaya lokal

6.3 Program Pembangunan Daerah

Program dalam mencapai strategi pembangunan jangka menengah daerah merupakan rangkaian langkah konkret yang dirancang untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah secara efektif dan berkelanjutan. Program-program ini disusun berdasarkan arah kebijakan yang telah ditetapkan, dengan fokus pada berbagai sektor prioritas seperti peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur yang



berkelanjutan, serta optimalisasi tata kelola pemerintahan. Setiap program dirancang dengan pendekatan yang terukur dan berbasis data guna memastikan efektivitas pelaksanaannya serta dampak yang maksimal bagi masyarakat. Melalui sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat, program pembangunan ini diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan sosial, serta memperkuat daya saing daerah Kabupaten Kebumen.

Program pembangunan daerah serta program unggulan kepala daerah Kabupaten Kebumen dijabarkan sebagai berikut.

Tabel VI.3
Program Prioritas Pembangunan dan Program Unggulan Kepala Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029

PERANGKAT DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS
PROGRAM UNGGULAN : "MANGAN WAREG BARENG BIYUNGE"	
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Rehabilitasi Sosial
Dinas Pertanian dan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan
	Program Penanganan Keamanan Pangan
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa
PROGRAM UNGGULAN : "CERDAS DAN SEHAT BARENG BIYUNGE"	
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengelolaan Pendidikan
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan
PROGRAM UNGGULAN : "ANAK SOLEH"	
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengelolaan Pendidikan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa
PROGRAM UNGGULAN : "LINGKUNGAN BERSIH LESTARI"	
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengelolaan Pendidikan
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
	Program Kawasan Permukiman
	Program Pengembangan Perumahan
	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh



PERANGKAT DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS
Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
	Program Pengelolaan Persampahan
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
Dinas Tenaga Kerja	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
BPBD	Program Penanggulangan Bencana
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Penanganan Bencana
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
PROGRAM UNGGULAN : "MUDA KREATIF"	
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Program Riset dan Inovasi Daerah
PROGRAM UNGGULAN : "BIYUNGE MOMONG"	
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
	Program Pemberdayaan Sosial
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)
	Program Perlindungan Khusus Anak
	Program Perlindungan Perempuan
	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Rehabilitasi Sosial
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)
	Program Pengendalian Penduduk



PERANGKAT DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Satpol PP	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
PROGRAM UNGGULAN : "SREGEP NGODE BARENG BIYUNGE"	
Dinas Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
	Program Penempatan Tenaga Kerja
	Program Hubungan Industrial
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
	Program Perencanaan Tenaga Kerja
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Pelayanan Penanaman Modal
	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
	Program Promosi Penanaman Modal
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Penataan Bangunan Gedung
	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
PROGRAM UNGGULAN : "PETANI MAKMUR DAN SWADAYA PANGAN"	
Dinas Pertanian dan Pangan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
	Program Penyuluhan Pertanian
	Program Perizinan Usaha Pertanian
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)



PERANGKAT DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS
PROGRAM UNGGULAN : "NJAMU BERGAS"	
Dinas Pertanian dan Pangan	Program Prasarana
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
	Program Penyelenggaraan Jalan
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
PROGRAM UNGGULAN : "BAKULAN LARIS"	
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Program Pemasaran
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
	Program Pengembangan Ekspor
	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)
	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
	Program Pengembangan Umkm
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
PROGRAM UNGGULAN : "PLESIR BARENG BIYUNGE"	
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Program Pemasaran Pariwisata
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
PROGRAM UNGGULAN : "DESA BERDAYA"	
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
	Program Penataan Desa
	Program Peningkatan Kerjasama Desa
	Program Administrasi Pemerintahan Desa
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil
	Program Pendaftaran Penduduk



PERANGKAT DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Inspektorat	Program Penyelenggaraan Pengawasan
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
PROGRAM UNGGULAN : "AYEM TENTREM GUYUB RUKUN"	
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
Satpol PP	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
Kecamatan	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Kecamatan	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
	Program Pengembangan Kebudayaan
Satpol PP	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
PROGRAM UNGGULAN : "NGOBROL DAN REMBUG BARENG BIYUNGE"	
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa
Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

PERANGKAT DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Program Pengelolaan Arsip
Sekretariat Daerah	Program Perekonomian Dan Pembangunan
PROGRAM UNGGULAN : "ASN NYAMAN, TERAMPIL, DAN INOVATIF"	
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Kepegawaian Daerah
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengelolaan Pendidikan
Sekretariat Daerah	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
Inspektorat	Program Penyelenggaraan Pengawasan
Sekretariat DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan kerangka pendanaan pembangunan daerah serta program perangkat daerah yang mencakup indikasi program dan pagu indikatif program guna mencapai visi dan misi RPJMD Tahun 2025-2029. Selain itu, bab ini menjadi acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, dengan memuat target indikasi program dan pagu indikatif sesuai perodesasi RPJMD.

Kerangka pendanaan mencerminkan kapasitas riil keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk periode 2025-2029, sedangkan belanja daerah merupakan kebutuhan anggaran yang diperlukan guna membiayai pembangunan selama periode tersebut.

Indikasi program merujuk pada program-program yang dirancang untuk mendukung pelaksanaan pembangunan tahun 2025-2029. Sementara itu, pagu indikatif merupakan gambaran kebutuhan pendanaan yang tersedia dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program yang telah disusun beserta kebutuhan pendanaannya selanjutnya dijadikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Rumusan target kinerja program dalam setiap urusan pemerintahan, baik bidang wajib maupun pilihan, disusun dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen, APBD Provinsi, APBN, serta sumber pendanaan lainnya.

Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 - 2030

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100	100,00	308.908.904.921	100,00	325.337.623.237	100,00	333.467.163.224	100,00	344.514.861.182	100,00	356.728.319.582	100,00	359.264.299.024	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK)	Persentase	85,65	85,75	83.974.505.627	85,85	88.440.526.117	85,95	90.650.478.923	86,05	93.653.710.489	86,15	96.973.845.049	86,25	97.663.231.521	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEREMPUAN	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Persentase	4,43	4,50	128.986.048	4,57	135.845.920	4,64	139.240.440	4,71	143.853.447	4,78	148.993.221	4,85	150.012.129	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHAGARAN	Persentase prestasi Olahraga	Persentase	67,67	67,77	1.749.977.206	67,87	1.842.941.016	67,97	1.888.992.446	68,07	1.931.514.374	68,17	2.020.759.988	68,27	2.055.123.559	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPAMPUAN	Cakupan Prestasi Kepemudaan	Persentase	66,67	66,77	124.672.677	66,87	131.303.150	66,97	134.584.155	67,07	138.042.900	67,17	143.972.135	67,27	144.995.632	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase	100	100	154.509.139.346	100,00	162.726.406.920	100,00	166.792.616.105	100,00	172.318.420.885	100,00	178.427.312.263	100,00	179.685.750.934	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPM Kesehatan	Persentase	100	100	34.154.533.339	100,00	35.970.975.657	100,00	36.869.818.779	100,00	38.091.308.229	100,00	39.441.690.098	100,00	39.722.080.792	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Tenaga Kesehatan yang Lulus Uji Kompetensi	Persentase	100	100	889.531.505	100,00	936.839.506	100,00	960.249.261	100,00	992.062.120	100,00	1.027.231.893	100,00	1.034.534.478	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Produk Pangan PIRT yang Tersertifikasi	Persentase	100	100	201.631.335	100,00	212.354.704	100,00	217.681.026	100,00	224.872.091	100,00	232.844.072	100,00	234.499.359	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Capaian PHBS Tingkat Kabupaten	Persentase	61,96	62,06	872.703.654	62,16	919.116.698	62,26	942.083.595	62,36	973.294.629	62,46	1.007.799.073	62,56	1.014.963.510	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun dan Menetapkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Persentase	54,17	54,27	348.182.833	54,37	366.700.259	54,47	375.863.369	54,57	388.315.644	54,67	402.081.892	54,77	404.940.290	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03	PROGRAM PEMBIAYAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Peserta KB Aktif	Persentase	65	66,00	3.886.021.081	67,00	4.092.691.542	68,00	4.194.959.762	69,00	4.333.937.909	70,00	4.487.581.122	71,00	4.519.483.309	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	Persentase	70,42	70,45	2.863.149.869	70,48	2.804.784.307	70,51	2.874.870.287	70,54	2.970.114.144	70,57	3.075.408.195	70,60	3.097.271.253	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase	100	100	52.707.833.362	100,00	55.510.996.798	100,00	56.898.106.176	100,00	58.783.128.633	100,00	60.867.059.914	100,00	61.299.763.471	RSUD dr. Soedarmo
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase	100	100	21.790.208.318	100,00	22.949.078.097	100,00	23.522.529.904	100,00	24.301.826.442	100,00	25.163.354.868	100,00	25.342.241.004	RSUD Preadipati
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100	100	8.323.445.563	100,00	8.766.111.801	100,00	8.985.159.495	100,00	9.282.835.966	100,00	9.611.923.456	100,00	9.860.254.561	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Infrastruktur Sumber Daya Air Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik	Persentase	85	86,00	5.735.548.178	87,00	6.040.582.135	88,00	6.191.524.265	89,00	6.396.648.180	90,00	6.623.416.907	91,00	6.670.562.737	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Pelayanan Air Bersih Perkapita	Persentase	23,75	23,80	324.721.316	23,85	341.990.987	23,90	350.536.661	23,95	362.149.868	24,00	374.988.508	24,05	377.654.299	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Saluran Drainase dalam Kondisi Baik	Persentase	19,98	20,18	606.147.304	20,28	638.384.068	20,38	664.336.015	20,48	676.014.032	20,58	699.979.527	20,68	704.955.677	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik	Persentase	83,84	83,86	8.863.469.754	83,88	9.334.856.126	83,90	9.568.115.610	83,92	9.885.105.296	83,94	10.235.543.944	83,96	10.368.368.363	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan dan Lingkungan yang Tertangani	Persentase	15	16,00	275.560.427	17,00	290.215.572	18,00	297.467.481	19,00	307.322.517	20,00	318.217.463	21,00	320.479.689	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.10	PROGRAM PENVELENGARAAN JALAN	Persentase Jalan Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	Persentase	85,18	85,28	18.690.975.730	85,38	19.685.018.862	85,48	20.176.908.323	85,58	20.845.305.111	85,68	21.584.357.904	85,78	21.737.800.973	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang Telah Dibina dan Nyalaya Baik	Persentase	64,92	65,00	36.721.585	65,08	38.674.551	65,16	39.840.951	65,24	40.954.248	65,32	42.406.124	65,40	42.707.589	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.12	PROGRAM PENVELENGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Lahan dengan Pola Ruang RT/RW	Persentase	91,45	91,50	287.340.577	91,55	302.622.226	91,60	310.184.153	91,65	320.460.490	91,70	331.821.192	91,75	334.180.107	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penanganan Sengketa Lahan	Persentase	100	100	10.895.104	100,00	11.474.539	100,00	11.761.265	100,00	12.150.913	100,00	12.581.677	100,00	12.671.121	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase	100	100	181.144.544	100,00	190.778.364	100,00	195.545.535	100,00	202.023.918	100,00	209.185.905	100,00	210.673.006	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERUMUKAN	Persentase penataan kawasan kumuh di bawah 10 Ha	Persentase	26,29	26,30	244.401.882	26,31	257.399.920	26,32	263.831.832	26,33	272.572.526	26,34	282.235.543	26,35	284.241.954	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMUKAN KUMUH	Persentase Rumah Tidak Layak Huni Tertangani	Persentase	88,16	88,26	83.501.894	88,36	87.942.780	88,46	90.140.295	88,56	93.126.624	88,66	96.428.073	88,76	97.113.579	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.05	PROGRAM PENGINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMM (PSU)	Persentase Peningkatan akses air limbah aman	Persentase	1,17	1,27	520.578.972	1,37	548.264.950	1,47	561.965.001	1,57	580.582.785	1,67	601.165.129	1,77	605.438.809	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2.15.02	PROGRAM PENVELENGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Indeks Infrastruktur Perhubungan	Persentase	79,78	79,80	10.388.306.404	79,82	10.940.788.243	79,84	11.214.176.776	79,86	11.585.700.126	79,88	11.996.426.868	79,90	12.081.709.394	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100	100	2.652.202.527	100,00	2.793.254.751	100,00	2.863.052.631	100,00	2.957.904.971	100,00	3.062.766.193	100,00	3.084.539.379	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETERTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan Perda	Persentase	100	100	1.741.225.903	100,00	1.833.829.611	100,00	1.879.653.365	100,00	1.941.925.891	100,00	2.010.769.455	100,00	2.025.064.003	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Kesiapsiagaan Damkar	Persentase	76,92	76,95	199.192.060	76,98	209.785.702	77,01	215.027.829	77,04	222.151.657	77,07	230.027.195	77,10	231.662.457	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100	100	4.173.595.540	100,00	4.395.506.088	100,00	4.505.396.390	100,00	4.654.659.238	100,00	4.819.672.401	100,00	4.853.935.423	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Desa Tanggap Bencana	Persentase	100	100	7.142.357.221	100,00	7.522.209.576	100,00	7.710.174.629	100,00	7.965.611.115	100,00	8.248.001.429	100,00	8.404.990.391	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Peningkatan Kemampuan SDM Kesegelangan Sosial	Persentase	72	75,00	68.411.085	78,00	72.049.396	81,00	73.849.767	84,00	76.296.394	87,00	79.001.191	89,00	79.562.810	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase	100	100	1.815.851	100,00	1.912.423	100,00	1.960.211	100,00	2.025.152	100,00	2.096.940	100,00	2.111.853	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS di Luar Pantli Kewenangan Kabupaten yang Tertangani	Persentase	100	100	1.694.471.806	100,00	1.784.588.778	100,00	1.829.182.101	100,00	1.889.782.525	100,00	1.956.777.545	100,00	1.970.688.265	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan Perlindungan Jaminan Sosial	Persentase	80,27	81,27	2.013.662.713	82,27	2.120.755.441	83,27	2.173.748.901	84,27	2.245.794.751	85,27	2.325.379.762	86,27	2.341.910.872	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggip Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	Persentase	100	100	238.728.801	100,00	251.425.127	100,00	257.707.741	100,00	266.245.545	100,00	275.684.264	100,00	277.644.102	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMK yang Dikunjungi	Persentase	100	100	9.999.890	100,00	10.531.714	100,00	10.794.881	100,00	11.152.513	100,00	11.547.883	100,00	11.629.977	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100	100	1.788.816.308	100,00	1.883.951.019	100,00	1.931.027.207	10						

2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWAN PANGAN	Penentase Desay yang Tertinggi Kerawan Pangnya	Penentase	57,25	57,50	22.142.847	57,75	23.320.471	58,00	23.903.203	58,25	24.095.111	58,50	25.570.582	58,75	25.752.363	59	145.384.576	Dinas Pertanian dan Pangan
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Penentase Hasil Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	Penentase	92,35	92,50	22.808.537	92,65	24.021.565	92,80	24.621.816	92,95	25.437.532	93,10	26.339.322	93,25	26.526.568	93	149.755.341	Dinas Pertanian dan Pangan
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penentase	100	100	7.572.895.275	100,00	7.975.644.957	100,00	8.174.940.458	100,00	8.445.774.540	100,00	8.745.187.215	100,00	8.807.356.697	100	49.721.399.144	Dinas Pertanian dan Pangan
3.17.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Penentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penentase	12,79	12,89	594.400.294	12,99	626.012.315	13,09	641.655.118	13,19	662.913.019	13,29	686.414.067	13,39	691.293.781	13	3.902.688.593	Dinas Pertanian dan Pangan
3.17.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Penentase Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Layak	Penentase	26	27,00	2.536.850.771	28,00	2.671.768.238	29,00	2.738.530.411	30,00	2.829.257.355	31,00	2.929.557.867	32,00	2.950.384.076	32	16.656.348.719	Dinas Pertanian dan Pangan
3.17.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penentase Penurunan Kejadian dan Kasus Penyakit Hewan Menular	Penentase	2,98	3,03	404.786.531	3,08	426.314.314	3,13	436.967.061	3,18	451.443.689	3,23	467.447.900	3,28	479.770.985	3	2.657.730.480	Dinas Pertanian dan Pangan
3.17.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Penentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Penentase	2,73	2,80	163.341.944	2,87	172.028.967	2,94	176.327.628	3,01	182.169.326	3,08	188.627.444	3,15	189.968.395	3	1.072.463.704	Dinas Pertanian dan Pangan
3.17.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Penentase Rekomendasi Izin Usaha Pertanian	Penentase	100	100	14.526.806	100,00	15.299.385	100,00	15.661.687	100,00	16.201.218	100,00	16.775.570	100,00	16.894.827	100	95.379.492	Dinas Pertanian dan Pangan
3.17.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Penentase Skor Evaluasi Kinerja Penyuluhan Pertanian	Penentase	59	61,00	544.533.311	63,00	573.493.254	65,00	587.823.710	67,00	607.298.187	69,00	628.827.625	71,00	633.297.957	71	3.575.274.044	Dinas Pertanian dan Pangan
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Penentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	Penentase	87,5	87,75	101.637.885	88,00	107.043.297	88,25	109.118.096	88,50	113.353.034	88,75	117.371.533	89,00	118.205.927	89	667.329.772	Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN KESEKARANGAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Penentase	74,36	74,46	339.435.861	74,56	357.488.117	74,66	366.421.033	74,76	378.560.486	74,86	391.980.902	74,96	394.767.492	79	2.228.653.911	Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Penentase Pemanganan Keaneekaragaman Hayati Daerah	Penentase	46,67	46,77	899.139.898	46,87	946.958.902	46,97	970.621.521	47,07	1.002.778.010	47,17	1.038.327.674	47,27	1.045.709.139	47	5.903.535.144	Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (BB3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Penentase Kegiatan Usaha yang Memiliki Ijin Pengelolaan LBB3	Penentase	50	50,25	10.777.800	50,50	11.350.997	50,75	11.634.835	51,00	12.020.088	51,25	12.446.215	51,50	12.534.695	52	70.764.430	Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan
2.11.06	PROGRAM PEMBIANAN DAN PENGAWASAN TERPADU (DIN LINGKUNGAN DAN DIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DIN PPLH))	Penentase Pelaksanaan Kegiatan Usaha dan Pengawasan Ijin Lingkungan	Penentase	16,56	16,66	19.220.053	16,76	20.242.234	16,86	20.748.048	16,96	21.435.426	17,06	22.195.337	17,16	22.353.124	17	126.194.222	Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Penentase Desa dan Kelurahan yang Memiliki Peraturan Lingkungan Hidup	Penentase	21,3	21,50	23.315.896	21,70	24.555.896	21,90	25.169.499	22,10	26.003.359	22,30	26.925.209	22,50	27.116.620	23	153.086.470	Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan
2.11.09	PROGRAM PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Penentase Pemantauan Pengawasan Lingkungan Hidup	Penentase	82,33	82,43	13.548.425	82,53	14.268.972	82,63	14.625.535	82,73	15.120.066	82,83	15.645.735	82,93	15.756.961	84	88.965.684	Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Penentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	Penentase	100	100	3.739.563	100,00	3.938.444	100,00	4.036.858	100,00	4.170.598	100,00	4.318.451	100,00	4.349.151	100	25.553.060	Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Penentase Jumlah Sampah yang Terkurangi melalui 3R	Penentase	30	31,00	4.191.967.954	32,00	4.414.909.603	33,00	4.525.229.411	34,00	4.675.149.323	35,00	4.840.888.884	36,00	4.875.302.733	36	27.523.447.909	Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penentase	100	100	4.674.391.752	100,00	4.922.990.171	100,00	5.046.005.901	100,00	5.213.179.030	100,00	5.397.992.379	100,00	5.436.366.674	100	30.690.925.908	Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Penentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Penentase	6,25	6,50	449.980.513	6,75	473.911.850	7,00	485.751.964	7,25	501.466.892	7,50	519.637.957	7,75	523.332.060	8	2.954.463.235	Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Penentase Peningkatan Nilai Produk Perikanan Budidaya	Penentase	25	26,00	306.461.485	27,00	322.760.042	28,00	330.825.173	29,00	341.785.342	30,00	353.902.036	31,00	356.417.924	31	2.012.152.001	Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan Wilayah Pesaran Umum Daratan yang Mendapatkan Penelitian Sumberdaya Perikanan	Penentase	92,86	92,96	17.115.119	93,06	18.025.353	93,16	18.475.771	93,26	19.087.870	93,36	19.764.557	93,46	19.905.063	93	112.373.733	Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Penentase Penanganan Hasil Perikanan	Penentase	47,5	47,75	118.912.435	48,00	125.236.562	48,25	128.365.974	48,50	132.618.712	48,75	137.320.202	49,00	138.296.410	49	780.750.296	Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan
2.11.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGAWASAN TERPADU (DIN LINGKUNGAN DAN DIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DIN PPLH))	Cakupan Layanan Penyediaan dan Pengawasan Ijin Lingkungan	Penentase	100	100	637.623.730	100,00	671.745.142	100,00	688.530.717	100,00	711.341.597	100,00	736.559.496	100,00	741.795.693	100	4.187.796.375	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.11.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGAWASAN TERPADU (DIN LINGKUNGAN DAN DIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DIN PPLH))	Cakupan Layanan Penyediaan dan Pengawasan Ijin Lingkungan	Penentase	100	100	31.958.556	100,00	32.657.686	100,00	33.473.730	100,00	34.550.714	100,00	35.808.712	100,00	36.363.276	100	203.594.680	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.11.04	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGAWASAN TERPADU (DIN LINGKUNGAN DAN DIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DIN PPLH))	Cakupan Layanan Penyediaan dan Pengawasan Ijin Lingkungan	Penentase	100	100	1.700.376.579	100,00	1.790.801.476	100,00	1.835.550.042	100,00	1.896.361.434	100,00	1.969.589.685	100,00	1.977.548.832	100	11.164.222.047	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.11.05	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGAWASAN TERPADU (DIN LINGKUNGAN DAN DIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DIN PPLH))	Cakupan Layanan Penyediaan dan Pengawasan Ijin Lingkungan	Penentase	100	100	1.700.376.579	100,00	1.790.801.476	100,00	1.835.550.042	100,00	1.896.361.434	100,00	1.969.589.685	100,00	1.977.548.832	100	11.164.222.047	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.11.06	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGAWASAN TERPADU (DIN LINGKUNGAN DAN DIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DIN PPLH))	Cakupan Layanan Penyediaan dan Pengawasan Ijin Lingkungan	Penentase	100	100	1.700.376.579	100,00	1.790.801.476	100,00	1.835.550.042	100,00	1.896.361.434	100,00	1.969.589.685	100,00	1.977.548.832	100	11.164.222.047	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.11.07	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGAWASAN TERPADU (DIN LINGKUNGAN DAN DIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DIN PPLH))	Cakupan Layanan Penyediaan dan Pengawasan Ijin Lingkungan	Penentase	100	100	1.700.376.579	100,00	1.790.801.476	100,00	1.835.550.042	100,00	1.896.361.434	100,00	1.969.589.685	100,00	1.977.548.832	100	11.164.222.047	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.11.08	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGAWASAN TERPADU (DIN LINGKUNGAN DAN DIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DIN PPLH))	Cakupan Layanan Penyediaan dan Pengawasan Ijin Lingkungan	Penentase	100	100	1.700.376.579	100,00	1.790.801.476	100,00	1.835.550.042	100,00	1.896.361.434	100,00	1.969.589.685	100,00	1.977.548.832	100	11.164.222.047	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.11.09	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGAWASAN TERPADU (DIN LINGKUNGAN DAN DIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DIN PPLH))	Cakupan Layanan Penyediaan dan Pengawasan Ijin Lingkungan	Penentase	100	100	1.700.376.579	100,00	1.790.801.476	100,00	1.835.550.042	100,00	1.896.361.434	100,00	1.969.589.685	100,00	1.977.548.832	100	11.164.222.047	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.11.10	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGAWASAN TERPADU (DIN LINGKUNGAN DAN DIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DIN PPLH))	Cakupan Layanan Penyediaan dan Pengawasan Ijin Lingkungan	Penentase	100	100	1.700.376.579	100,00	1.790.801.476	100,00	1.835.550.042	100,00	1.896.361.434	100,00	1.969.589.685	100,00	1.977.548.832	100	11.164.222.047	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.11.11	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGAWASAN TERPADU (DIN LINGKUNGAN DAN DIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DIN PPLH))	Cakupan Layanan Penyediaan dan Pengawasan Ijin Lingkungan	Penentase	100	100	1.700.376.579	100,00	1.790.801.476	100,00	1.835.550.042	100,00	1.896.361.434	100,00	1.969.589.685	100,00	1.977.548.832	100	11.164.222.047	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.11.12	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGAWASAN TERPADU (DIN LINGKUNGAN DAN DIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DIN PPLH))	Cakupan Layanan Penyediaan dan Pengawasan Ijin Lingkungan	Penentase	100	100	1.700.376.579	100,00	1.790.801.476	100,00	1.835.550.042	100,00	1.896.361.434	100,00	1.969.589.685	100,00	1.977.548.832	100	11.164.222.047	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.11.13	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGAWASAN TERPADU (DIN LINGKUNGAN DAN DIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DIN PPLH))	Cakupan Layanan Penyediaan dan Pengawasan Ijin Lingkungan	Penentase	100	100	1.700.376.579	100,00	1.790.801.476	100,00	1.835.550.042	100,00	1.896.361.434	100,00	1.969.589.685	100,00	1.977.548.832	100	11.164.222.047	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.11.14	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGAWASAN TERPADU (DIN LINGKUNGAN DAN DIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DIN PPLH))	Cakupan Layanan Penyediaan dan Pengawasan Ijin Lingkungan	Penentase	100	100	1.700.376.579	100,00	1.790.801.476	100,00	1.835.550.042	100,00	1.896.361.434	100,00	1.969.589.685	100,00	1.977.548.832	100	11.164.222.047	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.11.15	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGAWASAN TERPADU (DIN LINGKUNGAN DAN DIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DIN PPLH))	Cakupan Layanan Penyediaan dan Pengawasan Ijin Lingkungan	Penentase	100	100	1.700.376.579	100,00	1.790.801.476	100,00	1.835.550.042	100,00	1.896.361.434	100,00	1.969.589.685	100,00	1.977.548.832	100	11.164.222.047	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.11.16	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGAWASAN TERPADU (DIN LINGKUNGAN DAN DIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DIN PPLH))	Cakupan Layanan Penyediaan dan Pengawasan Ijin Lingkungan	Penentase	100	100	1.700.376.579	100,00	1.790.801.476	100,00	1.835.550.042	100,00	1.896.361.434	100,00	1.969.589.685	100,00	1.977.548.832	100	11.164.222.047	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.11.17	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGAWASAN TERPADU (DIN LINGKUNGAN DAN DIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DIN PPLH))	Cakupan Layanan Penyediaan dan Pengawasan Ijin Lingkungan	Penentase	100	100	1.700.376.579	100,00	1.790.801.476	100,00	1.835.550.042	100,00	1.896.361.434	100,00	1.969.589.685	100,00	1.977.548.832	100	11.164.222.047	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.11.18	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGAWASAN TERPADU (DIN LINGKUNGAN DAN DIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DIN PPLH))	Cakupan Layanan Penyediaan dan Pengawasan Ijin Lingkungan	Penentase	100	100	1.700.376.579	100,00	1.790.801.476	100,00	1.835.550.042	100,00	1.896.361.434	100,00	1.969.589.685	100,00	1.977.548.832	100	11.164.222.047	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.11.19	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGAWASAN TERPADU (DIN LINGKUNGAN DAN DIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DIN PPLH))	Cakupan Layanan Penyediaan dan Pengawasan Ijin Lingkungan	Penentase	100	100	1.700.376.579	100,00	1.790.801.476	100,00	1.835.550.042	100,00	1.896.361.434	100,00	1.969.589.685	100,00	1.977.548.832	100	11.164.222.047	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.11.20	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGAWASAN TERPADU (DIN LINGKUNGAN DAN DIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DIN PPLH))	Cakupan Layanan Penyediaan dan Pengawasan Ijin Lingkungan	Penentase	100	100	1.700.376.579	100,00	1.790.801.476	100,00	1.835.550.042	100,00	1.896.361.434	100,00	1.969.589.685	100,00	1.977.548.832	100	11.164.222.047	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.11.21	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGAWASAN TERPADU (DIN LINGKUNGAN DAN DIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DIN PPLH))	Cakupan Layanan Penyediaan dan Pengawasan Ijin Lingkungan	Penentase	100	100	1.700.376.579	100,00	1.790.801.476	100,00	1.835.550.042	100,00	1.896.361.434	100,00	1.969.589.685	100,00	1.977.548.832	100	11.164.222.047	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.11.22	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGAWASAN TERPADU (DIN LINGKUNGAN DAN DIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DIN PPLH))	Cakupan Layanan Penyediaan dan Pengawasan Ijin Lingkungan	Penentase	100	100														

2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.544.359.951		1.626.493.726	1.667.136.569	1.722.368.457	1.783.428.452	1.796.106.834	10.139.893.988	Dinas Penanganan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Kesenangan yang Dibembangkan	Persentase	46,88	46,98	630.967.441	46,08	664.524.215	46,18	681.129.353	46,28	703.696.027	46,38	726.641.846	46,48	733.821.757	46	4.142.779.640	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGOLOAN CAGAR BUDAYA	Persentase Benda, Biosk dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestakan	Persentase	30,77	30,80	62.646.849	30,83	65.978.600	30,86	68.727.273	30,89	69.867.721	30,92	72.344.645	30,95	73.858.943	31	411.324.061	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pengembangan Sarana Prasarana Pariwisata	Persentase	89,39	89,48	1.530.290.013	88,59	1.611.675.506	88,69	1.651.948.071	88,79	1.706.676.768	88,89	1.767.340.743	88,99	1.799.743.349	89	10.047.514.180	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Pemasaran Kegiatan Wisatawan	Persentase	33	35,00	727.701.862	37,00	766.403.205	39,00	785.554.096	41,00	811.579.341	43,00	840.380.478	45,00	864.234.834	45	4.777.814.064	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3.26.06	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pemasaran Produk Lokal	Persentase	20	21,00	100.000.000	22,00	100.000.000	23,00	100.000.000	24,00	100.000.000	25,00	100.000.000	26,00	100.000.000	26	17.145.929.071	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100	100	2.829.298.247	100,00	2.768.079.169	100,00	2.837.347.961	100,00	2.931.245.397	100,00	3.035.161.596	100,00	3.056.738.450	100	12.596.770.731	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3.23.02	PROGRAM PEMBIKIHAN KEPERAWATAN	Indeks Pembangunan Indeks Masyarakat	Persentase	13,02	13,04	963.732.616	13,08	985.250.148	13,10	1.008.053.870	13,12	1.028.158.049	13,12	1.050.468.640	13,14	1.073.888.129	13	3.698.518.558	Dinas Kesehatan dan Perputakaan
3.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Pelestarian Koleksi dan Naskah Kuno	Persentase	100	100	31.596.714	100,00	32.245.566	100,00	33.076.305	100,00	33.505.246	100,00	34.076.312	100,00	34.305.302	100	29.939.057	Dinas Kesehatan dan Perputakaan
2.24.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN ASRIP	Persentase Jumlah Peserta Asip yang Menetapkan Asip Baru	Persentase	78,24	78,30	86.796.389	78,36	91.414.593	78,42	93.996.862	78,48	96.803.085	78,54	100.234.899	78,60	100.947.438	79	569.897.235	Dinas Kesehatan dan Perputakaan
2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100	100	1.864.730.877	100,00	1.753.266.346	100,00	1.797.076.984	100,00	1.856.613.772	100,00	1.922.442.921	100,00	1.936.099.485	100	10.930.220.285	Dinas Kesehatan dan Perputakaan
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Cakupan perencanaan ketenagakerjaan	Dokumen	1	2,00	10.865.104	3,00	11.474.538	4,00	11.761.265	5,00	12.158.673	6,00	12.581.677	7,00	12.671.121	7	17.534.618	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN TENGAH DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Diatih Bersama "A"	Persentase	100	100	57.707.987	100,00	60.031.539	100,00	61.539.523	100,00	63.952.219	100,00	65.84.776	100,00	66.871.874	100	7.343.847.519	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.04	PROGRAM PENGEMBANGAN TENAGA KERJA	Persentase Pemenuhan Perkiraan Tenaga Kerja	Persentase	32,39	32,41	161.244.133	32,43	163.244.133	32,45	165.244.133	32,47	167.244.133	32,49	169.244.133	32,51	171.244.133	32	60.966.151	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Kasus yang Diselesaikan dengan Penjamin Bersama	Persentase	100	100	147.209.200	100,00	155.038.234	100,00	158.912.331	100,00	164.177.064	100,00	169.997.333	100,00	171.205.845	100	966.540.009	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100	100	2.420.536.237	100,00	2.549.267.742	100,00	2.612.968.871	100,00	2.699.535.988	100,00	2.795.237.724	100,00	2.815.100.359	100	15.892.655.615	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.28.05	PROGRAM PENGOLOAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Persentase penggolongan energi baru terbarukan	Persentase	100	100	11.424.989	100,00	12.032.584	100,00	12.333.254	100,00	13.183.546	100,00	13.287.359	100,00	13.287.359	100	75.013.586	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSKRISIS	Persentase Transmigrasi yang Ditempatkan	Persentase	20	21,00	4.086.779	22,00	45.377.212	23,00	46.511.098	24,00	48.092.001	25,00	49.755.502	26,00	50.109.213	26	282.890.806	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEHATAN RAKYAT	Nilai Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPD)	Nila	3,29	3,30	6.707.532.016	3,31	7.064.259.039	3,32	7.240.780.189	3,33	7.475.864.838	3,34	7.745.864.838	3,35	7.800.930.143	3	44.404.033.242	Sekretariat Daerah
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indeks Kualitas Kebijakan Pembangunan	Persentase	91	91,25	608.521.700	91,50	640.884.762	91,75	656.896.187	92,00	676.662.121	92,25	702.721.494	92,50	707.717.137	93	3.995.406.401	Sekretariat Daerah
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IHS Desa	Nila	86	87,00	11.379.984.231	88,00	11.894.163.871	89,00	12.283.624.285	90,00	12.690.578.210	91,00	13.140.474.814	92,00	13.233.889.738	92	74.711.724.516	Sekretariat Daerah
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Fasilitas Pemerintahan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase	100	100	6.584.873.118	100,00	6.930.076.766	100,00	7.106.370.538	100,00	7.343.869.380	100,00	7.604.218.216	100,00	7.658.276.557	100	43.264.684.575	Sekretariat Daerah
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100	100	14.874.704.743	100,00	15.685.786.937	100,00	16.057.243.787	100,00	16.588.216.943	100,00	17.177.324.262	100,00	17.298.437.755	100	98.637.714.426	Sekretariat Daerah
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Konsistensi Program RPMD kedalam RPMD	Persentase	90	90,25	453.500.358	90,50	477.618.891	90,75	489.553.637	91,00	505.772.447	91,25	523.702.677	91,50	527.425.975	92	2.977.573.686	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINERONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan urusan Pembangunan Daerah	Persentase	100	100	326.032.733	100,00	343.372.139	100,00	351.952.329	100,00	363.612.433	100,00	376.502.923	100,00	379.176.480	100	2.146.652.023	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100	100	2.492.658.922	100,00	2.625.126.310	100,00	2.690.825.309	100,00	2.779.971.793	100,00	2.878.525.074	100,00	2.898.988.491	100	16.366.195.719	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Penelitian Hasil Penelitian dan Pengembangan	Persentase	83,3	83,60	461.359.723	83,90	485.896.241	84,20	498.037.821	84,50	514.573.711	84,80	532.778.680	85,10	536.566.200	85	3.029.176.376	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan	Persentase	83,3	83,60	0	83,90	0	84,20	0	84,50	0	84,80	0	85,10	0	85	0	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.02.02	PROGRAM PENGOLOAN KEUANGAN DAERAH	Saldo Anggaran Lebih				239.864.351.871		252.410.433.930	258.177.668.125	267.288.930.814	276.764.638.848	278.732.156.979	1.573.576.180.157	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah					
5.02.03	PROGRAM PENGOLOAN BARANG MILIK DAERAH	Saldo Anggaran Lebih				392.845.134		413.737.897	424.076.322	438.125.883	453.657.963	465.883.014	2.579.326.153	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah					
5.02.04	PROGRAM PENGOLOAN PENDAPATAN DAERAH	Saldo Anggaran Lebih				2.022.633.203		2.130.203.041	2.183.452.249	2.255.769.249	2.352.348.928	2.432.120.707	12.320.120.707	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah					
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100	100	7.814.375.119	100,00	8.229.967.437	100,00	8.435.617.950	100,00	8.715.088.233	100,00	9.020.448.366	100,00	9.088.200.291	100	51.307.297.406	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pemenuhan PNS dalam Jabatan	Persentase	93	94,00	545.605.389	95,00	574.622.349	96,00	588.981.918	97,00	608.489.837	98,00	630.965.862	99,00	634.544.795	99	3.582.313.095	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100	100	50.185.885.847	100,00	52.821.222.560	100,00	54.114.119.831	100,00	55.934.803.902	100,00	57.917.758.711	100,00	58.329.498.703	100	329.298.286.556	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang Mengikuti Kapasitas	Persentase	75,09	75,19	1.039.692.189	75,29	1.094.886.193	75,39	1.122.347.719	75,49	1.159.836.686	75,59	1.200.637.064	75,69	1.209.172.929	76	6.826.367.390	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
8.01.02	PROGRAM PENYELANGGARAN PENGAWASAN	Level Kapasitas APSP	Level	3	4,00	2.251.797.981	5,00	2.404.130.961	6,00	2.544.200.923	7,00	2.544.806.256	8,00	2.635.022.644	9,00	2.635.755.004	9	14.981.733.732	Inspektoriat Daerah
8.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Persepsi Kognisi	Nila	3,5	3,60	141.273.184	3,60	147.586.832	3,60	152.504.402	3,60	163.142.417	3,60	164.302.196	3,60	167.565.564	3	927.565.564	Inspektoriat Daerah
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100	100	3.634.368.929	100,00	3.827.653.022	100,00	3.923.788.456	100,00	4.053.378.520	100,00	4.186.969.988	100,00	4.226.800.968	100	22.862.370.473	Inspektoriat Daerah
7.01.02	PROGRAM PENYELANGGARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase	100	100	104.787.9778	100,00	109.822.55613	100,00	112.5680.333	100,00	116.629.811.818	100,00	120.418.952.81	100,00	121.257.501.041	100	68.465.623.863	Kecamatan Ayah
7.01.05	PROGRAM PENYELANGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN UHUM	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase	100	100	184.485.346	100,00	194.296.840	100,00	199.151.931	100,00	205.749.793	100,00	213.043.866	100,00	214.558.394	100	1.211.286.173	Kecamatan Ayah
7.01.06	PROGRAM PEMBIKIHAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase	34,04	34,06	1.208.250.709	34,08	1.272.509.169	34,10	1.304.306.641	34,12	1.347.518.050	34,14	1.395.289.155	34,16	1.405.208.257	34,16	7.933.081.980	Kecamatan Ayah
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100	100	25.198.644.404	100	26.538.785.217	100	27.201.936.664	100	28.103.131.184	100	29.099.420.350	100	29.306.287.951	100	165.448.205.768	Kecamatan Ayah
7.01.02	PROGRAM PENYELANGGARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase	4	100	10.427.679.778	88	10.982.255.613	88,5	11.256.680.333	89	11.629.611.818	89,5	12.041.895.281	90	12.127.501.041	90	68.465.623.863	Kecamatan Ayah
7.01.05	PROGRAM PENYELANGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN UHUM	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase	100	100	184.485.346	100,00	194.296.840	100,00	199.151.931	100,00	205.749.793	100,00	213.043.866	100,00	214.558.394	100	1.211.286.173	Kecamatan Ayah
7.01.06	PROGRAM PEMBIKIHAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Persentase	34,04	34,06	1.208.250.709	34,08	1.272.509.169	34,10	1.304.306.641	34,12	1.347.518.050	34,14	1.395.289.155	34,16	1.405.208.257	34,16	7.933.081.980	Kecamatan Ayah
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100	100	25.198.644.404	100	26.538.785.217	100	27.201.936.664	100	28.103.131.184	100	29.099.420.350	100	29.306.287.951	100	165.448.205.768	Kecamatan Ayah
7.01.02	PROGRAM PENYELANGGARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase	4	100	10.427.679.778	88	10.982.255.613	88,5	11.256.680.333	89	11.629.611.818	89,5	12.041.895.281	90	12.127.501.041	90	68.465.623.863	Kecamatan Ayah
7.01.05	PROGRAM PENYELANGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN UHUM	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase	100	100	184.485.346	100,00	194.296.840	100,00	199.151.931	100,00	205.749.793	100,00	213.043.866	100,00	214.558.394	100	1.211.286.173	Kecamatan Ayah
7.01.06	PROGRAM PEMBIKIHAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Persentase	34,04	34,06	1.208.250.709													

[illegible]

7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					1.208.250.709		1.272.509.169		1.304.306.641		1.347.518.050		1.395.289.155		1.405.208.257		7.933.081.980	Kecamatan Rowokete
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					25.186.644.404		26.538.785.217		27.201.936.664		28.103.131.184		29.099.420.350		29.306.287.951		165.448.205.768	Kecamatan Rowokete
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Presentase	91,24	91,25	10.427.679.778	91,50	10.982.255.613	91,75	11.256.680.333	92,00	11.629.611.818	92,25	12.041.895.281	92,50	12.127.501.041	92,50	68.465.623.863	Kecamatan Sempur
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	Presentase	100	100	184.485.346	100	194.296.840	100	199.151.931	100	205.749.793	100	213.043.866	100	214.558.394	100	1.211.286.171	Kecamatan Sempur
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Presentase	100	100	1.208.250.709	100	1.272.509.169	100	1.304.306.641	100	1.347.518.050	100	1.395.289.155	100	1.405.208.257	100	7.933.081.980	Kecamatan Sempur
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase	100	100	25.186.644.404	100	26.538.785.217	100	27.201.936.664	100	28.103.131.184	100	29.099.420.350	100	29.306.287.951	100	165.448.205.768	Kecamatan Sempur
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Presentase	100	100	10.427.679.778	100	10.982.255.613	100	11.256.680.333	100	11.629.611.818	100	12.041.895.281	100	12.127.501.041	100	68.465.623.863	Kecamatan Gombang
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Presentase	100	100	184.485.346	100	194.296.840	100	199.151.931	100	205.749.793	100	213.043.866	100	214.558.394	100	1.211.286.171	Kecamatan Gombang
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Presentase	100	100	1.208.250.709	100	1.272.509.169	100	1.304.306.641	100	1.347.518.050	100	1.395.289.155	100	1.405.208.257	100	7.933.081.980	Kecamatan Gombang
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Presentase	100	100	25.186.644.404	100	26.538.785.217	100	27.201.936.664	100	28.103.131.184	100	29.099.420.350	100	29.306.287.951	100	165.448.205.768	Kecamatan Gombang
7.01.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Presentase	100	100	3.255.547.189	100	3.428.687.124	100	3.514.363.194	100	3.630.793.318	100	3.759.509.226	100	3.786.235.554	100	21.375.135.605	Kecamatan Gombang
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan	Presentase	100	100	25.186.644.404	100	26.538.785.217	100	27.201.936.664	100	28.103.131.184	100	29.099.420.350	100	29.306.287.951	100	165.448.205.768	Kecamatan Gombang
7.01.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Presentase	100	100	3.255.547.189	100	3.428.687.124	100	3.514.363.194	100	3.630.793.318	100	3.759.509.226	100	3.786.235.554	100	21.375.135.605	Kecamatan Wonorejo
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan	Presentase	100	100	25.186.644.404	100	26.538.785.217	100	27.201.936.664	100	28.103.131.184	100	29.099.420.350	100	29.306.287.951	100	165.448.205.768	Kecamatan Wonorejo
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Presentase	88	88,25	10.427.679.778	88,50	10.982.255.613	88,75	11.256.680.333	89,00	11.629.611.818	89,25	12.041.895.281	89,50	12.127.501.041	89,50	68.465.623.863	Kecamatan Karanganyar
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Presentase	100	100	184.485.346	100	194.296.840	100	199.151.931	100	205.749.793	100	213.043.866	100	214.558.394	100	1.211.286.171	Kecamatan Karanganyar
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi/Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase	100	100	1.208.250.709	100	1.272.509.169	100	1.304.306.641	100	1.347.518.050	100	1.395.289.155	100	1.405.208.257	100	7.933.081.980	Kecamatan Karanganyar
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan	Presentase	100	100	25.186.644.404	100	26.538.785.217	100	27.201.936.664	100	28.103.131.184	100	29.099.420.350	100	29.306.287.951	100	165.448.205.768	Kecamatan Karanganyar
7.01.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kelurahan	Presentase	100	100	3.255.547.189	100	3.428.687.124	100	3.514.363.194	100	3.630.793.318	100	3.759.509.226	100	3.786.235.554	100	21.375.135.605	Kecamatan Jatiuhur
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Presentase	100	100	25.186.644.404	100	26.538.785.217	100	27.201.936.664	100	28.103.131.184	100	29.099.420.350	100	29.306.287.951	100	165.448.205.768	Kecamatan Jatiuhur
7.01.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	Presentase	100	100	3.255.547.189	100	3.428.687.124	100	3.514.363.194	100	3.630.793.318	100	3.759.509.226	100	3.786.235.554	100	21.375.135.605	Kecamatan Piarangan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Presentase	100	100	25.186.644.404	100	26.538.785.217	100	27.201.936.664	100	28.103.131.184	100	29.099.420.350	100	29.306.287.951	100	165.448.205.768	Kecamatan Piarangan
7.01.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang dilaksanakan	Presentase	100	100	3.255.547.189	100	3.428.687.124	100	3.514.363.194	100	3.630.793.318	100	3.759.509.226	100	3.786.235.554	100	21.375.135.605	Kecamatan Piarangan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun.	Presentase	100	100	25.186.644.404	100	26.538.785.217	100	27.201.936.664	100	28.103.131.184	100	29.099.420.350	100	29.306.287.951	100	165.448.205.768	Kecamatan Panjatan
7.01.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Presentase	88	88,25	10.427.679.778	88,50	10.982.255.613	88,75	11.256.680.333	89,00	11.629.611.818	89,25	12.041.895.281	89,50	12.127.501.041	89,50	68.465.623.863	Kecamatan Karanganyar
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Presentase	100	100	25.186.644.404	100	26.538.785.217	100	27.201.936.664	100	28.103.131.184	100	29.099.420.350	100	29.306.287.951	100	165.448.205.768	Kecamatan Karanganyar
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Presentase	88	88,25	10.427.679.778	88,50	10.982.255.613	88,75	11.256.680.333	89,00	11.629.611.818	89,25	12.041.895.281	89,50	12.127.501.041	89,50	68.465.623.863	Kecamatan Karanganyar
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Presentase	100	100	184.485.346	100	194.296.840	100	199.151.931	100	205.749.793	100	213.043.866	100	214.558.394	100	1.211.286.171	Kecamatan Karanganyar
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Presentase	42,09	42,10	1.208.250.709	42,11	1.272.509.169	42,12	1.304.306.641	42,13	1.347.518.050	42,14	1.395.289.155	42,15	1.405.208.257	42,15	7.933.081.980	Kecamatan Karanganyar
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase	100	100	25.186.644.404	100	26.538.785.217	100	27.201.936.664	100	28.103.131.184	100	29.099.420.350	100	29.306.287.951	100	165.448.205.768	Kecamatan Karanganyar
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Sadang	Presentase	88	88,50	10.427.679.778	89,00	10.982.255.613	89,50	11.256.680.333	90,00	11.629.611.818	90,50	12.041.895.281	91,00	12.127.501.041	91,00	68.465.623.863	Kecamatan Sadang
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	Presentase	100	100	184.485.346	100	194.296.840	100	199.151.931	100	205.749.793	100	213.043.866	100	214.558.394	100	1.211.286.171	Kecamatan Sadang
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Presentase	42,09	42,10	1.208.250.709	42,11	1.272.509.169	42,12	1.304.306.641	42,13	1.347.518.050	42,14	1.395.289.155	42,15	1.405.208.257	42,15	7.933.081.980	Kecamatan Sadang
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase	100	100	25.186.644.404	100	26.538.785.217	100	27.201.936.664	100	28.103.131.184	100	29.099.420.350	100	29.306.287.951	100	165.448.205.768	Kecamatan Sadang
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	Presentase	90,38	90,40	10.427.679.778	90,42	10.982.255.613	90,44	11.256.680.333	90,46	11.629.611.818	90,48	12.041.895.281	90,50	12.127.501.041	90,50	68.465.623.863	Kecamatan Karangambung
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Kejadian	2	3	184.485.346	4	194.296.840	5	199.151.931	6	205.749.793	7	213.043.866	8	214.558.394	8	1.211.286.171	Kecamatan Karangambung
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Presentase	29,17	29,20	1.208.250.709	29,23	1.272.509.169	29,26	1.304.306.641	29,29	1.347.518.050	29,32	1.395.289.155	29,35	1.405.208.257	29,35	7.933.081.980	Kecamatan Karangambung
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase	100	100	25.186.644.404	100	26.538.785.217	100	27.201.936.664	100	28.103.131.184	100	29.099.420.350	100	29.306.287.951	100	165.448.205.768	Kecamatan Karangambung
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Rasio Elemen Masyarakat yang Mendapatkan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Penduduk	87,79 jumlah per 100.000 penduduk	87,80 jumlah per 100.000 penduduk	224.904.003	87,81 jumlah per 100.000 penduduk	236.865.085	87,82 jumlah per 100.000 penduduk	242.783.872	87,83 jumlah per 100.000 penduduk	250.827.251	87,84 jumlah per 100.000 penduduk	259.719.373	87,85 jumlah per 100.000 penduduk	261.565.717	87,85 jumlah per 100.000 penduduk	1.476.665.302	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI Proses Pembiayaan Umum	Cakupan Partisipasi Masyarakat/Penduduk dalam Proses Pembiayaan Umum	Presentase	69,38	69,40	826.822.554	69,42	870.795.501	69,44	892.554.948	69,46	922.125.109	69,48	954.815.532	69,50	961.603.310	69,50	5.428.716.955	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Cakupan Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Presentase	100	100	24.843.743	100	26.165.009	100	26.818.820	100	27.707.322	100	28.689.580	100	28.893.534	100	163.118.008	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN LINGKUNGAN	Rasio Elemen Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	Penduduk	99,14 jumlah per 100.000 penduduk	99,16 jumlah per 100.000 penduduk	54.307.736	99,18 jumlah per 100.000 penduduk	57.195.987	99,20 jumlah per 100.000 penduduk	58.625.201	99,22 jumlah per 100.000 penduduk	60.567.442	99,24 jumlah per 100.000 penduduk	62.714.629	99,26 jumlah per 100.000 penduduk	63.160.467	99,26 jumlah per 100.000 penduduk	358.571.463	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN KETAHANAN NASIONAL	Presentase Penanganan Konflik Berbasis Berkeadilan SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi	Presentase	75	75,25	449.996.129	75,50	473.928.297	75,75	485.770.822	80	501.864.308	80,25	515.695.990	80,50	523.350.222	80,50	2.954.565.768	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Presentase	100	100	1.336.221.308	100	1.617.922.245	100	1.658.350.904	100	1.713.291.725	100	1.774.029.939	100	1.786.641.507	100	10.086.457.627	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Total :						2.431.239.921.580		2.560.540.680.458		2.624.523.458.189		2.711.473.417.373		2.807.598.349.902		2.827.557.549.397		15.962.933.416.899	



BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

8.1. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan Indikator Kinerja dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah terbagi menjadi dua yakni Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Indikator Kinerja Utama merupakan indikator yang menentukan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kebumen. Sedangkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan indikator yang menentukan target penyelenggaraan pemerintahan daerah.

8.1.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator penting yang memiliki daya ungkit tinggi bagi perwujudan visi pembangunan jangka menengah daerah. Pencapaian indikator tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program pembangunan daerah. Berikut ini penetapan Indikator Kinerja Utama pada pembangunan Kabupaten Kebumen tahun 2025-2029.



Tabel VIII.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2030

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Indikator Tujuan RPJMD									
1	Tingkat Kemiskinan	%	15,71	14,305	13,43	12,56	11,69	10,82	9,94
2	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	72,48	72,88	73,29	73,69	74,10	74,50	74,90
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,30	5,40-6,30	5,00-5.50	5,00-5.50	5,00-5.50	5,00-5.50	5,00-5.50
4	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/Kota	Juta Rupiah	27,29	27,775	33,75	39,73	45,70	51,68	57,66
5	Indeks Infrastruktur	Poin	65,60	67,24	68,92	70,64	72,41	74,22	76,08
6	Penurunan emisi GRK	TonCO2Eq	151.888,21	206.765,97	1.303.133,41	2.399.500,84	3.495.868,28	4.592.235,71	5.688.603,15
7	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	79,91*	79,92	79,93	79,93	79,94	79,94	79,95
8	Indeks Kebudayaan Daerah (Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan)	%	11,50	12,12	12,74	13,35	13,97	14,59	15,21
9	Indeks Kesalehan Sosial	Poin	82,38	82,41	82,79	83,16	83,54	83,91	84,29



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Indikator Sasaran RPJMD									
1	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	%	NA	20,38-21,48	20,38-21,48	20,38-21,48	20,38-21,48	20,98-21,48	20,98-21,48
2	Indeks Pendidikan	Poin	63,43	64,80	65,45	66,11	66,76	67,41	68,06
3	Indeks Kesehatan	Poin	84,95	85,41	85,87	86,33	86,79	87,25	87,70
4	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	2,59	2,72	2,86	3,00	3,15	3,31	3,47
5	LPE Kategori Industri Pengolahan	%	6,00	6,30	6,62	6,95	7,29	7,66	8,04
6	LPE kategori Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	10,35	10,87	11,41	11,98	12,58	13,21	13,87
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,07	4,765	4,63	4,50	4,36	4,23	4,10
8	Indeks infrastruktur perumahan dan permukiman	Poin	71,16	71,87	72,59	73,32	74,05	74,79	75,54
9	Indeks infrastruktur perhubungan	Poin	75,78	76,54	77,30	78,08	78,86	79,65	80,44
10	Indeks infrastruktur pekerjaan umum	Poin	59,00	59,59	60,19	60,79	61,40	62,01	62,63
11	Persentase Desa Mandiri	%	33,85	2,45	2,95	3,45	3,95	4,45	4,95
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	69,86	74,71	74,76	74,80	74,85	74,89	74,94
13	Indeks Risiko Bencana	Poin	121,38	96,5	94,19	91,88	89,56	87,25	84,94
14	Nilai SAKIP	Poin	67,54	68,78	70,03	71,27	72,51	73,76	75,00
15	Nilai Maturitas SPIP	Poin	3,30	3,42	3,53	3,65	3,77	3,88	4,00



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
16	Indeks Pelayanan Publik	Poin	4,59	4,61	4,63	4,66	4,68	4,70	4,72
17	Persentase Cagar Budaya (CB) yang dilestarikan (Benda)	%	14,29	15,06	15,83	16,59	17,36	18,13	18,90
18	Persentase Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	%	11,5	12,12	12,74	13,35	13,97	14,59	15,21
19	Penurunan Konflik SARA	Kali	NA	5	5	4	4	3	3

**realisasi data 2023*

8.1.2 Indikator Kinerja Daerah

Kinerja pembangunan suatu daerah pada dasarnya digambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal pembuatan rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan Indikator Kinerja Daerah. Penetapan Indikator Kinerja Daerah beserta targetnya dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kebumen diuraikan dalam tabel sebagai berikut:



Tabel VIII.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2030

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)							
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI								
1	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	81,21	81,35	81,49	81,63	81,77	81,91	82,04
2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	%	9,20*	9,31	9,09	8,88	8,66	8,44	8,22
3	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	18,74	20,19	21,64	23,10	24,55	26,00	27,45
4	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	angka	NA	58,00	58,38	58,75	59,13	59,50	59,88
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	IKLH	69,86	74,71	74,76	74,80	74,85	74,89	74,94
6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	% RT	3,67	5,93	8,95	11,96	14,98	18,00	21,01
7	Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Liter/Kg	53,27	55,81	56,83	57,84	58,86	59,87	60,89
8	Penurunan Intensitas Emisi GRK	TonCO2Eq	151.888,21	206.765,97	1.303.133,41	2.399.500,84	3.495.868,28	4.592.235,71	5.688.603,15
9	Indeks Risiko Bencana	poin	110,78*	96,5	94,19	91,88	89,56	87,25	84,94
10	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,27	1,22	1,17	1,14	1,10	1,07	1,03
11	Rasio Penduduk	%	103	103	103	103	103	103	103



No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
12	Kepadatan Penduduk	Orang/m2	1125	1137	1149	1161	1173	1185	1197
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,3	5,40-6,30	5,00-5.50	5,00-5.50	5,00-5.50	5,00-5.50	5,00-5.50
2	Tingkat Kemiskinan	%	15,71	14,305	13,43	12,56	11,69	10,82	9,94
3	PDRB Per Kapita	Rp Juta	27,29	27,775	33,75	39,73	45,70	51,68	57,66
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,07	4,765	4,63	4,50	4,36	4,23	4,10
5	Indeks Gini	angka	0,327	0,323	0,318	0,314	0,309	0,305	0,3
6	Indeks Pembangunan Manusia	angka	72,48	72,88	73,29	73,69	74,10	74,50	74,90
7	Indeks Kesehatan	angka	84,95384615	85,41	85,87	86,33	86,79	87,25	87,70
8	Usia Harapan Hidup	tahun	75,22	75,518	75,82	76,11	76,41	76,71	77,01
9	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	NA	14	14	14	13	13	12
10	Prevalensi Stunting	%	NA	9,1	9,08	9,05	9,03	9,00	8,98
11	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (Persen)	%	NA	95	95,25	95,50	95,75	96,00	96,25
12	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (Persen)	%	NA	90	90,56	91,13	91,69	92,25	92,81
13	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan Nasional	%	NA	98,21	98,30	98,40	98,49	98,58	98,67
14	Indeks Pendidikan	angka	63,42777778	64,8	65,45277778	66,10555556	66,75833333	67,41111111	68,06388889



No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
15	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	7,87	7,89	7,94	7,99	8,04	8,09	8,14
16	Harapan Lama Sekolah	tahun	13,39	13,86	14,04	14,21	14,39	14,56	14,74
17	- Literasi Membaca	%	NA	84,29	84,79	85,29	85,79	86,29	86,79
18	- Numerasi	%	NA	87,3	87,80	88,30	88,80	89,30	89,80
19	- Literasi Membaca	%	NA	73,69	74,19	74,69	75,19	75,69	76,19
20	- Numerasi	%	NA	82,35	82,85	83,35	83,85	84,35	84,85
21	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (Persen)		NA	7,96	8,26	8,56	8,85	9,15	9,45
22	Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun (Persen)		NA	85,85	86,53	87,22	87,90	88,58	89,26
23	Tingkat pemanfaatan Perpustakaan (Persen)		NA	0,28	0,57	0,87	1,16	1,45	1,74
24	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	%	NA	20,38-21,48	20,38-21,48	20,38-21,48	20,38-21,48	20,98-21,48	20,98-21,48
25	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	NA	1,55	1,56	1,58	1,59	1,60	1,61
26	Cakupan Fasilitas Publik yang Inklusif	%	NA	4,34	11,73	19,13	26,52	33,91	41,30
27	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak	%	NA	12,118	12,74	13,35	13,97	14,59	15,21



No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Benda (WBTB) yang dilestarikan (Persen)								
28	Jumlah pengunjung tempat bersejarah	Orang	NA	53800	54800	55800	56800	57800	58800
29	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	%	NA	20,4	21,05	21,70	22,35	23,00	23,65
30	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	%	NA	64,07	64,55	65,04	65,52	66,00	66,48
31	Indeks Kesalehan Sosial	Poin	82,38	82,41	82,79	83,16	83,54	84	84,29
32	Cakupan Pelestarian Adat Istiadat dan Ritus	%	NA	85,43	85,90	86,36	86,83	87,29	87,76
33	Jumlah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Mendapatkan Fasilitasi Anggaran	Angka	NA	176	238	300	362	424	486
34	Jumlah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Mendapatkan Fasilitasi Pendampingan	Angka	NA	98	129	159	190	220	251



No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
35	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan benda	Angka	14,29*	15,06	15,83	16,59	17,36	18,13	18,90
36	Persentase Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan		11,50*	12,12	12,74	13,35	13,97	14,59	15,21
37	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	0-100		64,89	65,22	64,89	65,22	64,89	65,22
38	Indeks Ketimpangan Gender	poin	0,344*	0,320	0,305	1,320	1,305	2,320	2,305
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH								
1	Angka Ketergantungan	%	48,64	46,85	47,41	48,01	48,64	49,28	49,865
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	22,69	22,7	23,00	23,29	23,59	23,88	24,18
3	LPE Kategori Industri Pengolahan	%	6	6,3	6,62	6,95	7,29	7,66	8,04
4	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	2,85	2,82	3,02	3,23	3,43	3,63	3,83
5	LPE kategori Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	10,35	10,8675	11,41	11,98	12,58	13,21	13,87
6	Rasio Kewirausahaan	%		3,84	4,26	4,67	5,09	5,50	5,92
7	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	1,55	1,62	1,70	1,77	1,85	1,92	1,99
8	Return on Aset (ROA) BUMD	%	NA	4,08	4,15	4,21	4,28	4,34	4,41



No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
9	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	NA	25	25,88	26,75	27,63	28,50	29,38
10	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	77,37	77,81	78,25	78,69	79,12	79,56	80,00
11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	NA	62,21	63,11	64,01	64,90	65,80	66,70
12	Kapabilitas Inovasi	angka	NA	2,32	2,33	2,33	2,34	2,34	2,35
13	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	18,5	19,03	19,16	19,28	19,41	19,53	19,66
14	Net Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	-3,71	0,00	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00
15	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	NA	93,48	93,89	94,30	94,70	95,11	95,52
16	Persentase Desa Mandiri	%	33,85	36,08	38,31	40,53	42,76	44,99	47,22
18	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet		NA	75	75,94	76,88	77,81	78,75	79,69
19	Indeks Infrastruktur		65,6	67,24	68,92	70,64	72,41	74,22	76,08
20	Indeks infrastruktur perumahan dan permukiman		71,16	71,8716	72,59	73,32	74,05	74,79	75,54
21	Indeks infrastruktur perhubungan		75,78	76,5378	77,30	78,08	78,86	79,65	80,44
22	Indeks infrastruktur pekerjaan umum		59	59,59	60,19	60,79	61,40	62,01	62,63
23	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	NA	0,40	0,41	0,43	0,44	0,45	0,46



No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
24	Disparitas Harga	%	NA	±10	±10	±10	±10	±10	±10
25	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	2,59	2,69	2,79	2,89	3,00	3,12	3,23
26	LPE Kategori Industri Pengolahan	%	6	6,23	6,46	6,71	6,96	7,22	7,49
27	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	2,59	2,72	2,86	3,00	3,15	3,31	3,47
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM								
1	Indeks Reformasi Birokrasi	poin	79,91*	79,92	79,925	79,93	79,935	79,94	79,945
2	Indeks Reformasi Hukum	poin	98,52	98,57	98,62	98,67	98,72	98,77	98,82
3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	poin	4,07	4,10	4,13	4,17	4,20	4,23	4,26
4	Indeks Pelayanan Publik	poin	4,59	4,61	4,63	4,66	4,68	4,70	4,72
5	Indeks Integritas Nasional	poin	75	79,81	80,36	80,91	81,45	82,00	82,55
6	Nilai SAKIP		67,54	68,78	70,03	71,27	72,51	73,76	75,00
7	Nilai Maturitas SPIP		3,301	3,42	3,53	3,65	3,77	3,88	4,00
8	Indeks Daya Saing Daerah	poin	3,41	3,51	3,61	3,71	3,80	3,90	4,00
9	Jumlah Kejadian Konflik SARA	Kali	NA	5	5	4	4	3	3



No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
10	Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	%	NA	1,6	1,61	1,61	1,62	1,62	1,63
11	Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	%	NA	1,44	1,45	1,45	1,46	1,46	1,47

**realisasi data 2023*

BAB IX

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari milestone pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kebumen periode 2025-2045. RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang akan menjadi acuan, pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Kebumen lima tahun ke depan agar senantiasa selaras, terpadu dan searah dengan pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan pembangunan nasional.

Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 ditentukan oleh dukungan yang solid dari seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen serta kerjasama yang kuat antara Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya. Tidak kalah penting komitmen dan dukungan DPRD Kabupaten Kebumen serta kerjasama dengan stakeholders pembangunan lainnya.

Dokumen ini juga merupakan implementasi dari Visi, Misi, dan Program Prioritas Bupati/Wakil Bupati terpilih periode 2025-2029 yang disusun melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta pendekatan atas-bawah dan bawah-atas. Keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan, upaya-upaya yang dilakukan serta penentuan keterlibatan berbagai pihak dan pemangku kepentingan secara runut dan jelas dijabarkan dalam dokumen RPJMD ini. Untuk itu, menjadi penting dipahami oleh segenap pihak terkait tentang bagaimana mengoperasionalkan RPJMD ini, baik dalam tahapan normal maupun masa transisi, agar dokumen RPJMD ini benar-benar menjadi rujukan dalam pengelolaan kinerja oleh Perangkat Daerah dalam koordinasi Bappeda.

9.1. Pedoman Transisi

Setelah berakhirnya RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, perlu disusun RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2030-2034 sebagai acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan lima tahun berikutnya. Pada masa transisi tersebut, diperlukan sebuah pedoman bagi penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2030. Pedoman transisi demikian dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah pada akhir periode RPJMD hingga terpilihnya kepala daerah baru dan tersedianya dokumen RPJMD sebagai hasil penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih. Pedoman transisi ini juga dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih siap dalam menyusun dokumen rencana pembangunan pada periode berikutnya sehingga tidak terjadi kekosongan pengaturan sebagai upaya untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan ketersediaan dokumen rencana pembangunan.

Dalam rangka keberlanjutan pembangunan Kabupaten Kebumen maka pedoman transisi ditetapkan sebagai berikut:

- 1) RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan Kebijakan Umum serta prioritas program APBD masa transisi yaitu tahun pertama di bawah

kepemimpinan bupati dan wakil bupati terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah pada periode berikutnya.

- 2) RPJMD sebagai pedoman dimaksud pada butir 1) antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode berikutnya.
- 3) RKPD masa transisi di tahun 2030 menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJMD periode saat ini 2025-2029, dikarenakan dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 memuat hingga tahun 2030.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 merupakan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Kebumen serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan lima tahun ke depan. Oleh karena itu, konsistensi, transparansi, inovasi, kerjasama, dan rasa tanggung jawab yang tinggi sangat diperlukan guna mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029. Dalam hal ini, penting untuk menyusun kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 sebagai aturan atau patokan dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2030. Adapun tujuan disusunnya kaidah pelaksanaan ini adalah untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kaidah pelaksanaan RPJMD Kebumen Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Bupati berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 kepada masyarakat;
2. Seluruh OPD/unit kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, Bappeda Kabupaten Kebumen berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi, dan mediasi terhadap penjabaran RPJMD Tahun 2025-2029 ke dalam Rencana OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
4. Setiap OPD berkewajiban untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD dengan berpedoman pada RPJMD ini;
5. RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam menyusun RKPD setiap tahun selama 5 tahun masa kepemimpinan bupati yang dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Kebumen dan selanjutnya RKPD merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);



6. Terhadap perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan nomenklatur urusan pemerintahan yang terbentuk setelah RPJMD ditetapkan, maka RPJMD dapat dirubah terhadap nomenklatur program, urusan dan OPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Bappeda Kabupaten Kebumen melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD;
8. Evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 dilakukan pada tahun ketiga dan pada akhir masa jabatan Bupati terhadap indikator kinerja misi, sedangkan evaluasi tahunan dilakukan terhadap indikator kinerja program dengan menggunakan data yang diperoleh dari lembaga resmi atau melakukan survei yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Kebumen serta melaporkan hasilnya kepada Bupati; dan

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan disebabkan karena perkembangan keadaan dalam tahun berjalan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, penetapan perubahan RPJMD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

BUPATI KEBUMEN

ttd